PERATURAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
PETA PROSES BISNIS
DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 35 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2023 tentang Arsip Nasional Republik Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2023 tentang Arsip Nasional Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 52);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);
5. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 89);
6. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2025–2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 795);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PETA PROSES BISNIS DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN
UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia ini, yang dimaksud dengan:

1. Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.
2. *Supplier* adalah pihak yang menyediakan *input* untuk suatu proses.
3. *Input* adalah sumber daya yang akan digunakan dalam suatu proses.
4. Proses adalah serangkaian tahapan yang mengubah *input* menjadi *output*.
5. *Output* adalah sumber daya yang dihasilkan dari suatu proses.
6. *Customer* adalah pihak yang menerima *output* dari suatu proses.
7. Level 0 adalah peta proses bisnis yang memuat seluruh proses bisnis Arsip Nasional Republik Indonesia yang terdiri dari proses bisnis utama dan proses bisnis pendukung.
8. Level 1 adalah peta proses bisnis yang dilakukan oleh unit organisasi dan keterhubungan antara satu proses dengan proses lainnya.
9. Level 2 (Level n) adalah penjabaran lebih rinci dari masing-masing proses yang ada di Level 1.
10. Peta Relasi adalah peta yang menggambarkan dan menunjukkan siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam setiap proses yang tergambarkan pada peta proses bisnis.
11. Peta Lintas Fungsi adalah peta yang menggambarkan rangkaian kerja lintas unit/fungsi yang saling berhubungan dan membentuk suatu proses kerja.
12. Arsip Nasional Republik Indonesia selanjutnya disebut ANRI adalah lembaga kearsipan berbentuk lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas negara di bidang kearsipan yang berkedudukan di ibukota negara.

Pasal 2

(1) Peta Proses Bisnis di lingkungan ANRI dimaksudkan untuk menggambarkan sekumpulan aktivitas kerja terstruktur dan saling terkait pada level unit kerja/organisasi untuk menghasilkan keluaran yang sesuai dengan kebutuhan pengguna.
(2) Tujuan dari Peta Proses Bisnis di lingkungan ANRI untuk meningkatkan penerapan sistem, proses dan prosedur kerja yang lebih jelas, efektif, dan efisien pada unit kerja/organisasi.

BAB II
PETA PROSES BISNIS ANRI

Bagian Kesatu
Peta Proses Bisnis Level 0

Pasal 3

(1) Peta Proses Bisnis ANRI Level 0 terdiri atas:
    a. Proses utama; dan
    b. Proses pendukung.
(2) Peta Proses Bisnis pada Proses utama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, meliputi:
    a. penguatan tata kelola kearsipan nasional;
    b. percepatan digitalisasi arsip;
    c. peningkatan ketersediaan arsip secara nasional; dan
    d. peningkatan pelayanan kearsipan dan pemanfaatan informasi kearsipan melalui Jaringan Informasi Kearsipan Nasional.
(3) Proses bisnis pada Proses pendukung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, yaitu:
    a. pelayanan perencanaan;
    b. pelayanan organisasi dan tata laksana;
    c. pelayanan keuangan;
    d. pelayanan monitoring dan evaluasi serta pelaporan;
    e. pelayanan hukum;
    f. pelayanan kerja sama;
    g. pelayanan hubungan masyarakat;
    h. pelayanan kepegawaian;
    i. pelayanan umum;
    j. pelayanan data dan informasi internal; dan
    k. pengawasan internal.
(4) Penggambaran Peta Proses Bisnis ANRI Level 0 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kedua
Peta Proses Bisnis Level 1

Pasal 4

(1) Proses bisnis penguatan tata kelola kearsipan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, memiliki Level 1, meliputi:

a. transformasi tata kelola penyelenggaraan kearsipan;
b. peningkatan pengetahuan tertib arsip;
c. peningkatan kompetensi sumber daya manusia kearsipan;
d. peningkatan pelatihan sumber daya manusia;
e. peningkatan pelayanan jasa kearsipan;
f. peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pengawasan kearsipan;
g. peningkatan jaminan mutu akreditasi kearsipan; dan
h. peningkatan kualitas kebijakan kearsipan nasional.

(2) Proses bisnis percepatan digitalisasi arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, memiliki Level 1 meliputi:
a. penyelenggaraan kearsipan digital nasional; dan
b. peningkatan implementasi Sistem Informasi Kearsipan Nasional dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional.

(3) Proses bisnis peningkatan ketersediaan arsip secara nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, memiliki Level 1 meliputi:
a. peningkatan khazanah arsip nasional;
b. peningkatan arsip nasional yang diolah;
c. peningkatan arsip nasional yang dipreservasi; dan
d. penyelamatan dan pelestarian arsip pada masyarakat dan wilayah rawan bencana.

(4) Proses bisnis peningkatan pelayanan kearsipan dan pemanfaatan informasi kearsipan melalui Jaringan Informasi Kearsipan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, memiliki Level 1 meliputi:
a. peningkatan pengguna dan kualitas pelayanan arsip secara nasional;
b. peningkatan layanan data dan informasi kearsipan nasional; dan
c. peningkatan arsip yang dimanfaatkan sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa.

Pasal 5

(1) Proses bisnis pelayanan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, memiliki Level 1 meliputi:
a. perencanaan strategis;
b. perencanaan program; dan
c. perencanaan anggaran.

(2) Proses bisnis pelayanan organisasi dan tata laksana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, memiliki Level 1 meliputi:
a. pelaksanaan evaluasi kelembagaan;
b. penyempurnaan organisasi dan tata kerja;
c. penyusunan standar kompetensi jabatan manajerial/struktural;
d. penyusunan dan evaluasi Peta Proses Bisnis;

e. penyusunan dan evaluasi standar operasional prosedur;
f. pelaksanaan evaluasi jabatan;
g. penyusunan analisis jabatan;
h. penyusunan analisis beban kerja;
i. pengelolaan reformasi birokrasi; dan
j. pengelolaan pembangunan zona integritas.

(3) Proses bisnis pelayanan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c, memiliki Level 1 meliputi:
a. pengelolaan keuangan perbendaharaan;
b. pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan; dan
c. pengelolaan penerimaan negara bukan pajak.

(4) Proses bisnis pelayanan monitoring dan evaluasi serta pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d, memiliki Level 1 meliputi:
a. pengukuran kinerja organisasi;
b. penyusunan pelaporan; dan
c. pelaksanaan evaluasi kinerja.

(5) Proses bisnis pelayanan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e, memiliki Level 1 meliputi:
a. penyusunan Undang-Undang;
b. penyusunan Peraturan Pemerintah;
c. penyusunan Peraturan Presiden;
d. penyusunan Peraturan ANRI;
e. penyusunan Keputusan Kepala dan Instrumen lainnya;
f. pelayanan bantuan perkara hukum; dan
g. pendampingan saksi atau ahli.

(6) Proses bisnis pelayanan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf f, memiliki Level 1 meliputi:
a. kelembagaan;
b. kontraktual;
c. bilateral;
d. multilateral;
e. teknis; dan
f. pelayanan fasilitasi kerja sama.

(7) Proses bisnis pelayanan hubungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf g, memiliki Level 1 meliputi:
a. pengelolaan hubungan kelembagaan;
b. pengelolaan publikasi;
c. pengelolaan dokumentasi;
d. pelaksanaan keprotokolan;
e. pengelolaan, pelayanan, dan pengendalian media sosial, *website*, dan media massa;
f. pengelolaan dan pengendalian informasi publik; dan
g. pengelolaan layanan terpadu di lingkungan ANRI.

(8) Proses bisnis pelayanan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf h, memiliki Level 1 meliputi:
a. perencanaan kebutuhan;

b. pengadaan pegawai aparatur sipil negara;
c. pengelolaan manajemen talenta;
d. pengelolaan kinerja;
e. pengembangan kompetensi;
f. penguatan budaya kerja dan citra institusi;
g. penegakan disiplin pegawai;
h. pemberhentian pegawai;
i. pemberian penghargaan dan pengakuan; dan
j. pengelolaan digitalisasi manajemen aparatur sipil negara.

(9) Proses bisnis pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf i, memiliki Level 1 meliputi:
a. pengelolaan barang dan jasa;
b. pengelolaan kerumahtanggaan;
c. pengelolaan kearsipan;
d. pelayanan tata usaha pimpinan;
e. pengelolaan kegiatan pengamanan;
f. pengelolaan barang milik negara (BMN); dan
g. pengelolaan layanan kesehatan klinik pratama ANRI.

(10) Proses bisnis pelayanan data dan informasi internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf j, memiliki Level 1 meliputi:
a. pengelolaan data dan informasi;
b. pengelolaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;
c. pengelolaan aplikasi; dan
d. pengelolaan keamanan informasi, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, dan aplikasi;

(11) Proses bisnis pengawasan internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf k, memiliki Level 1 meliputi:
a. perencanaan pengawasan;
b. pelaksanaan audit;
c. pelaksanaan reviu;
d. pelaksanaan evaluasi;
e. pelaksanaan pemantauan; dan
f. pelaksanaan pengawasan lainnya.

Pasal 6

Penggambaran Peta Proses Bisnis ANRI Level 1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Ketiga
Proses Bisnis Level 2

Pasal 7

(1) Proses bisnis transformasi tata kelola penyelenggaraan kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, memiliki Level 2 meliputi:
a. transformasi dan penguatan kapasitas organisasi kearsipan;
b. peningkatan sistem manajemen dan mekanisme kerja kearsipan; dan

c. pemenuhan standar sarana prasarana kearsipan.

(2) Proses bisnis peningkatan pengetahuan tertib arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, memiliki Level 2 meliputi:
   a. pelayanan bimbingan teknis dan konsultasi kearsipan;
   b. pelayanan bimbingan/rapat koordinasi kearsipan;
   c. pelaksanaan supervisi sebagai tindak lanjut hasil pengawasan kearsipan; dan
   d. pemberian persetujuan atau pertimbangan jadwal retensi arsip.

(3) Proses bisnis peningkatan kompetensi sumber daya manusia kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, memiliki Level 2 meliputi:
   a. penyusunan proyeksi kebutuhan arsiparis nasional;
   b. pemberian rekomendasi jabatan fungsional arsiparis;
   c. penyusunan kebijakan jabatan fungsional arsiparis;
   d. pemberian bimbingan konsultasi sumber daya manusia kearsipan dan sertifikasi;
   e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi jabatan fungsional arsiparis;
   f. pelaksanaan uji kompetensi/sertifikasi sumber daya manusia kearsipan;
   g. pengelolaan data arsiparis nasional;
   h. pemilihan arsiparis teladan/berprestasi; dan
   i. pelaksanaan pembinaan organisasi profesi arsiparis.

(4) Proses bisnis peningkatan pelatihan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, memiliki Level 2 meliputi:
   a. perencanaan pelatihan sumber daya manusia;
   b. pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pelatihan sumber daya manusia;
   c. pelatihan kearsipan masyarakat;
   d. kerja sama penjaminan mutu pelatihan; dan
   e. pelaksanaan proses manajemen pengetahuan (ANRI *Corporate University*).

(5) Proses bisnis peningkatan pelayanan jasa kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, memiliki Level 2 meliputi:
   a. pelayanan jasa teknis kearsipan; dan
   b. pelayanan kemitraan bidang jasa teknis kearsipan.

(6) Proses bisnis peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pengawasan kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, memiliki level 2 yaitu peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pengawasan kearsipan.

(7) Proses bisnis peningkatan jaminan mutu akreditasi kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g, memiliki Level 2 yaitu peningkatan mutu akreditasi kearsipan.

(8) Proses bisnis peningkatan kualitas kebijakan kearsipan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h, memiliki Level 2 meliputi:
a. penjaminan mutu kebijakan;
b. pengelolaan standardisasi kebijakan; dan
c. pengelolaan manajemen pengetahuan kearsipan.

Pasal 8

(1) Proses bisnis penyelenggaraan kearsipan digital nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, memiliki Level 2 meliputi:
a. pembangunan teknologi informasi kearsipan;
b. pengembangan teknologi informasi kearsipan;
c. pemeliharaan teknologi informasi kearsipan;
d. pengoperasian teknologi informasi kearsipan;
e. pengamanan teknologi informasi kearsipan;
f. pengendalian dan penjaminan mutu teknologi informasi kearsipan; dan
g. pengelolaan infrastruktur teknologi informasi kearsipan.

(2) Proses bisnis peningkatan implementasi Sistem Informasi Kearsipan Nasional dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, memiliki Level 2 meliputi:
a. pengelolaan data dan informasi kearsipan nasional;
b. pengelolaan pusat jaringan nasional; dan
c. pengembangan simpul jaringan.

Pasal 9

(1) Proses bisnis peningkatan khazanah arsip nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, memiliki Level 2 meliputi:
a. penyusunan strategi penyelamatan arsip;
b. pelaksanaan monitoring, identifikasi, penilaian dan verifikasi arsip;
c. pelaksanaan akuisisi arsip;
d. persetujuan/pertimbangan pemusnahan arsip;
e. pengelolaan laporan arsip terjaga;
f. pelaksanaan wawancara sejarah lisan;
g. penyiapan daftar pencarian arsip;
h. penyelamatan arsip penggabungan dan/atau pembubaran lembaga negara dan Badan Usaha Milik Negara; dan
i. pertimbangan pemberian penghargaan atau imbalan atas penyelamatan arsip statis.

(2) Proses bisnis peningkatan arsip nasional yang diolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, memiliki Level 2 meliputi:
a. pembuatan sarana bantu akses arsip statis;
b. penyusunan sarana bantu berupa guide tematis arsip statis;
c. penyusunan sarana bantu berupa guide khazanah arsip statis;
d. pelaksanaan alih aksara arsip/transliterasi;
e. penerjemahan arsip;

f. pelaksanaan transkripsi arsip;
g. pemberian bimbingan teknis penyusunan sarana bantu; dan
h. pemberian layanan konsultasi pengolahan arsip statis.

(3) Proses bisnis peningkatan arsip nasional yang dipreservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c, memiliki Level 2 meliputi:
a. penyimpanan arsip statis;
b. pelaksanaan restorasi;
c. pelaksanaan reproduksi dan alih media;
d. pengujian laboratorium;
e. pembuktian autentisitas arsip; dan
f. pengembangan sarana prasarana pelestarian dan pelindungan arsip.

(4) Proses bisnis penyelamatan dan pelestarian arsip pada masyarakat dan wilayah rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d, memiliki Level 2 yaitu pelayanan arsip statis dan arsip penanggulangan bencana.

Pasal 10

(1) Proses bisnis peningkatan pengguna dan kualitas pelayanan arsip secara nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a, memiliki Level 2 meliputi:
a. pelayanan arsip statis;
b. pelayanan bahan pustaka;
c. penerbitan naskah sumber;
d. pengelolaan registrasi memori kolektif bangsa;
e. penominasian arsip sebagai *memory of the world*;
f. pelaksanaan pameran (*on site* dan virtual) dan diorama arsip;
g. pelayanan arsip statis kepresidenan;
h. pelayanan arsip pemberantasan korupsi;
i. penyelenggaraan pusat layanan khazanah kearsipan melayu nusantara; dan
j. penyelenggaraan depot arsip berkelanjutan Bandung ANRI.

(2) Proses bisnis peningkatan layanan data dan informasi kearsipan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b, memiliki Level 2 yaitu pelayanan informasi kearsipan nasional.

(3) Proses bisnis peningkatan arsip yang dimanfaatkan sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf c, memiliki Level 2 yaitu penyediaan informasi arsip pada Jaringan Informasi Kearsipan Nasional.

Pasal 11

Penggambaran Peta Proses Bisnis ANRI Level 2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Bisnis Level 0 dan Level 1 di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1305), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 September 2026

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

MEGO PINANDITO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian Dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

LAMPIRAN
PERATURAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
PETA PROSES BISNIS DI LINGKUNGAN
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

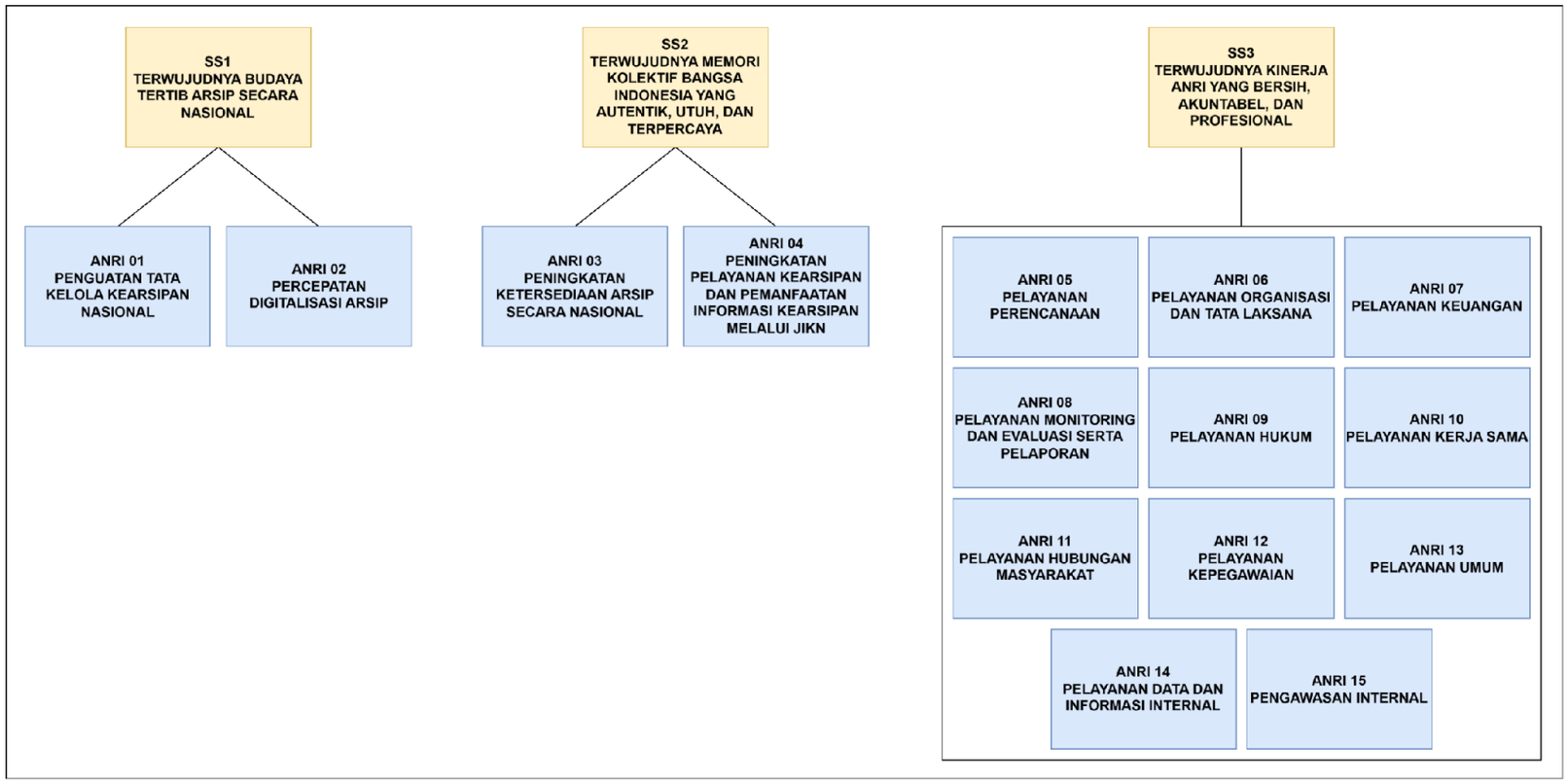

Gambar 1. Pemetaan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) ANRI ke dalam Proses Bisnis Utama

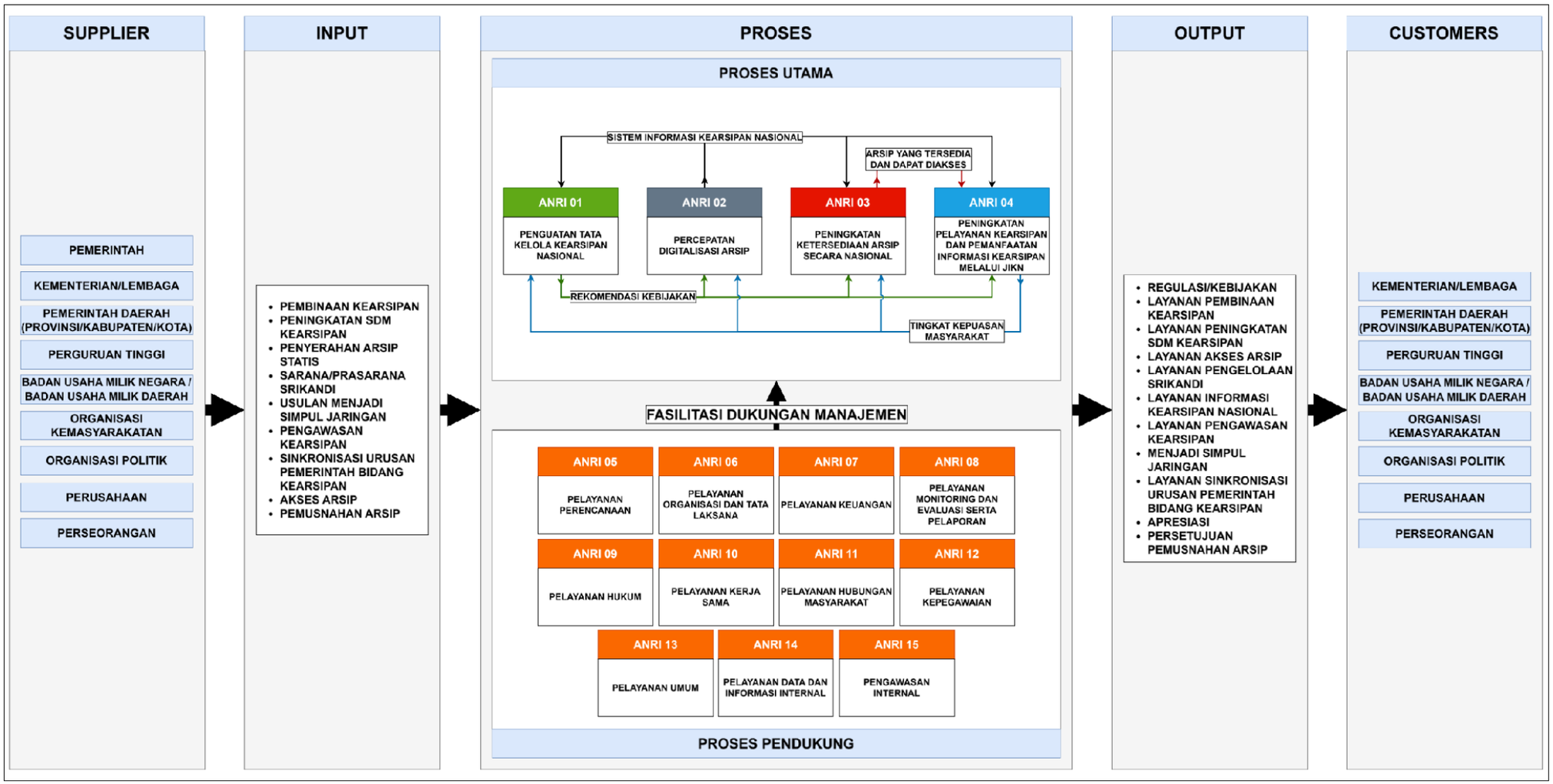

Gambar 2. Peta Proses Bisnis ANRI Level 0

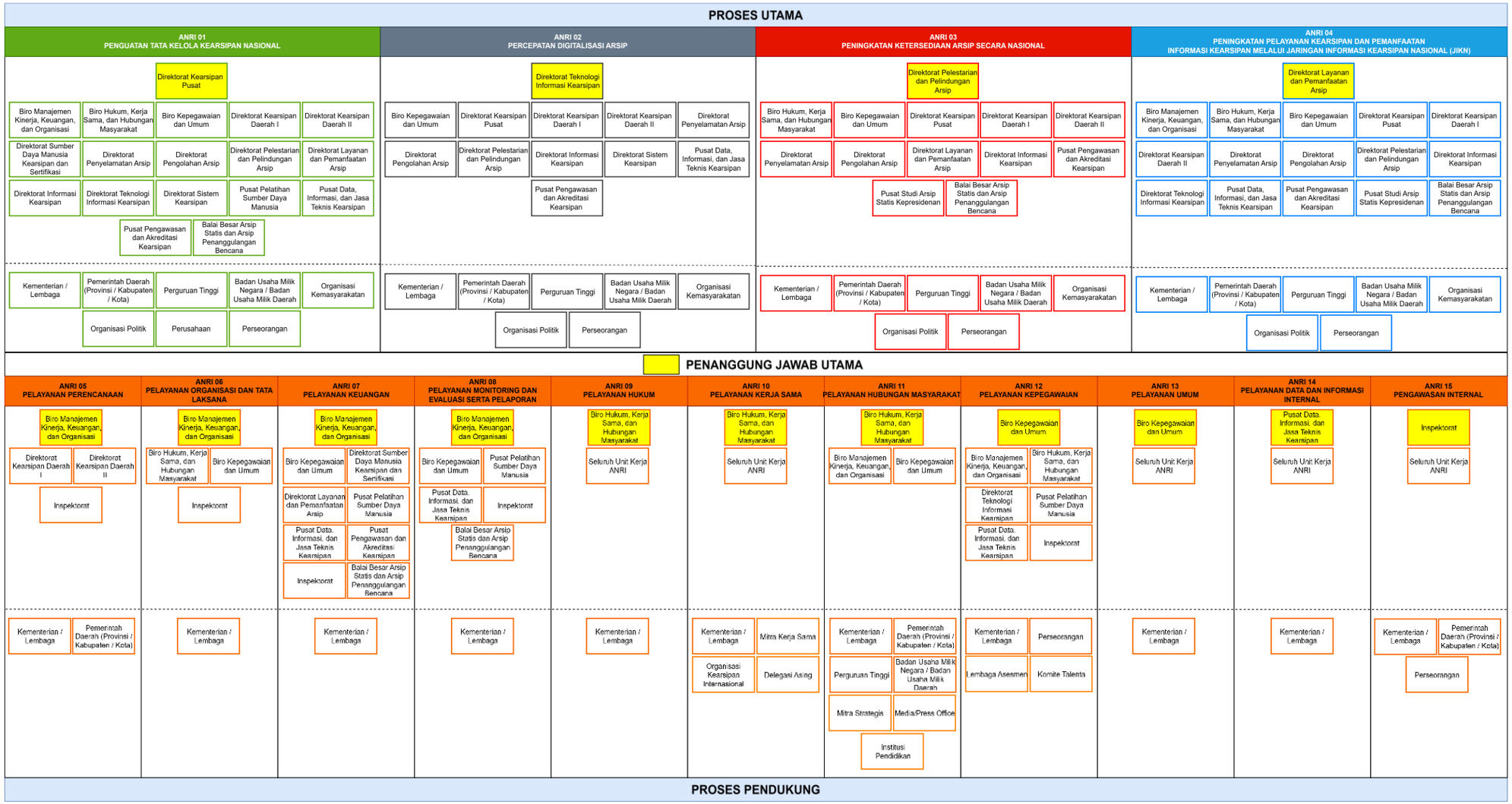

Gambar 3. Peta Relasi Proses Bisnis ANRI Level 0

I. Proses Utama

I. A. Proses Bisnis Level 1 (ANRI 01 Penguatan Tata Kelola Kearsipan Nasional);

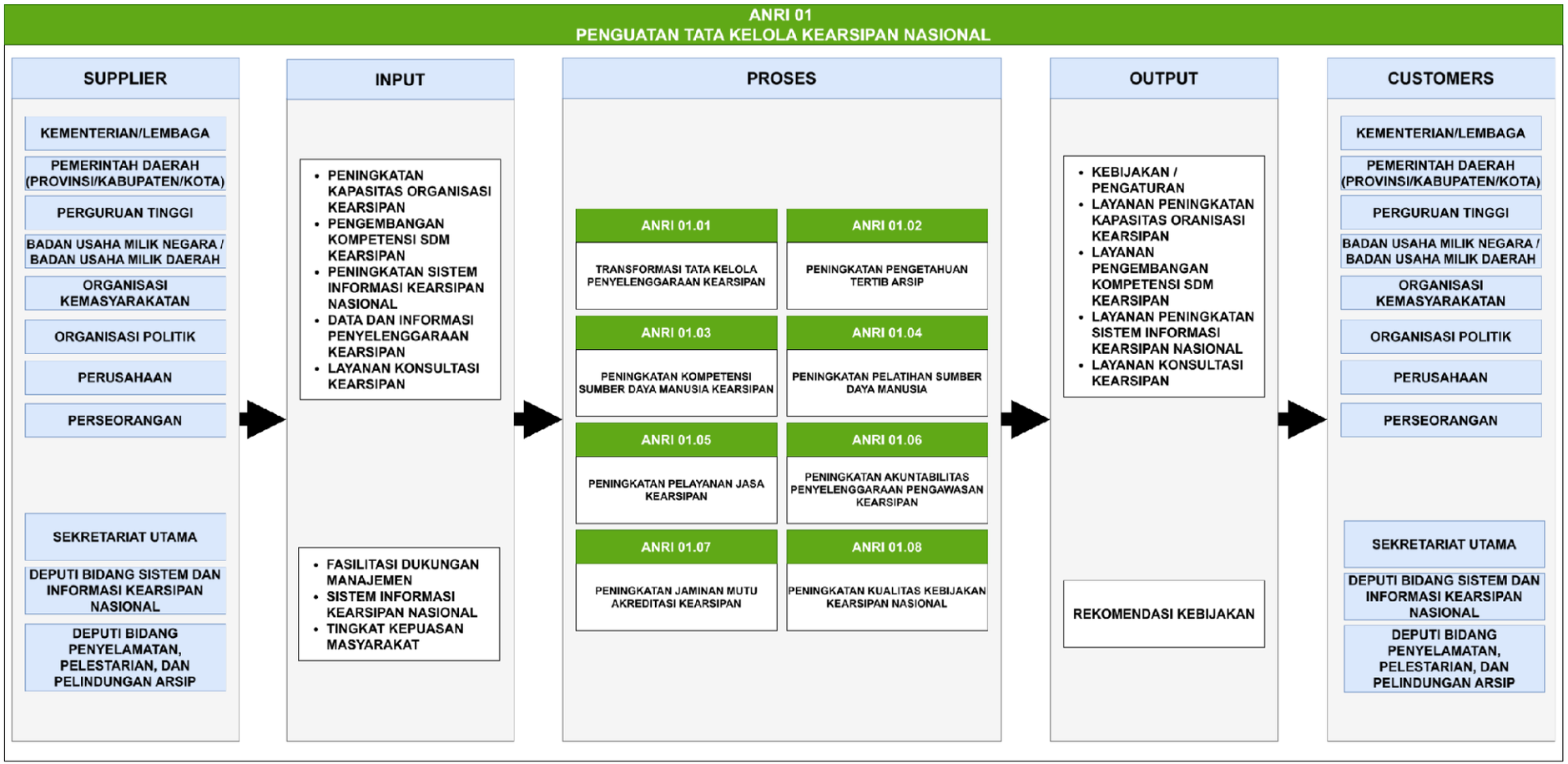

Gambar 4. Proses Bisnis Level 1 (ANRI 01 Penguatan Tata Kelola Kearsipan Nasional)

I.B. Peta Relasi Proses Bisnis Level 1 (ANRI 01 Penguatan Tata Kelola Kearsipan Nasional);

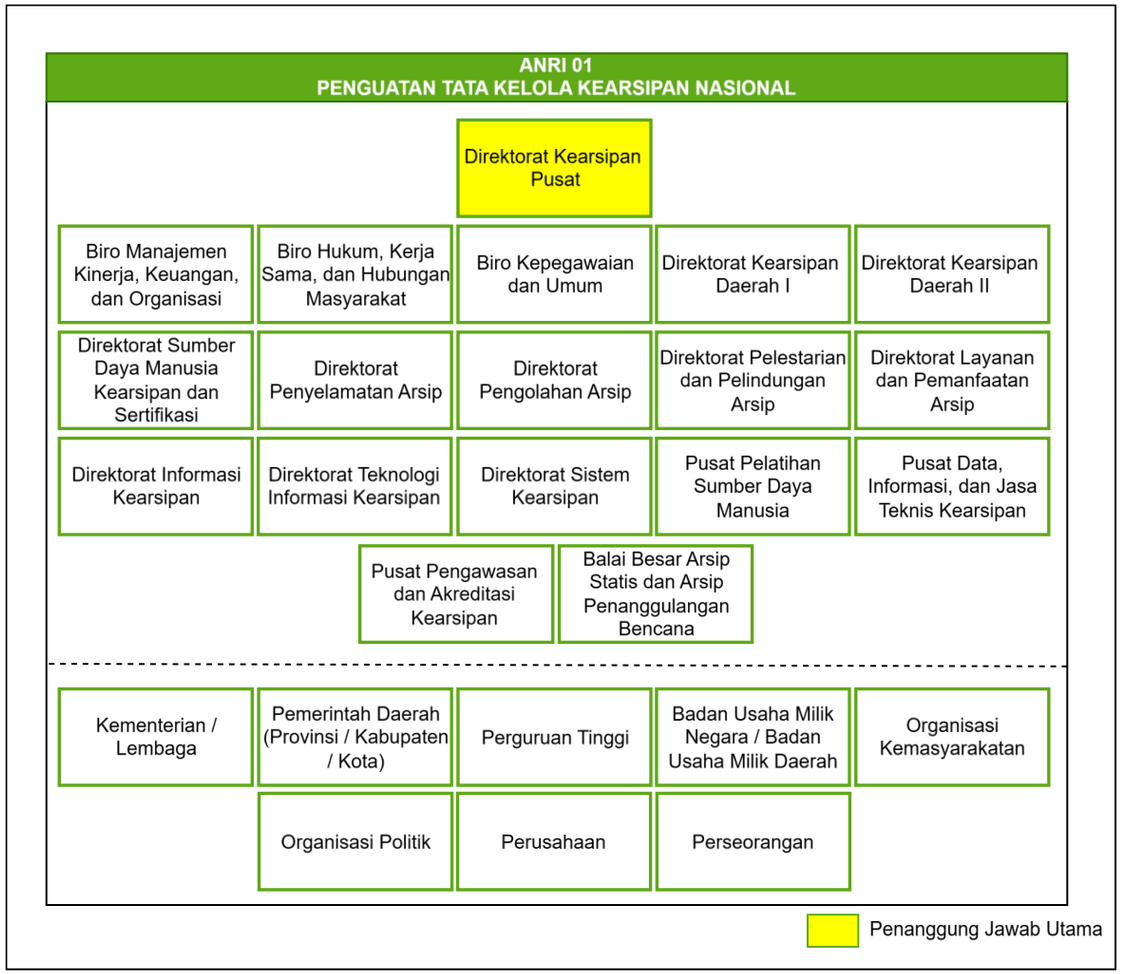

Gambar 5. Peta Relasi Proses Bisnis Level 1 (ANRI 01 Penguatan Tata Kelola Kearsipan Nasional)

I.A.1. Proses Bisnis Level 2 (ANRI 01.01 Transformasi Tata Kelola Penyelenggaraan Kearsipan);

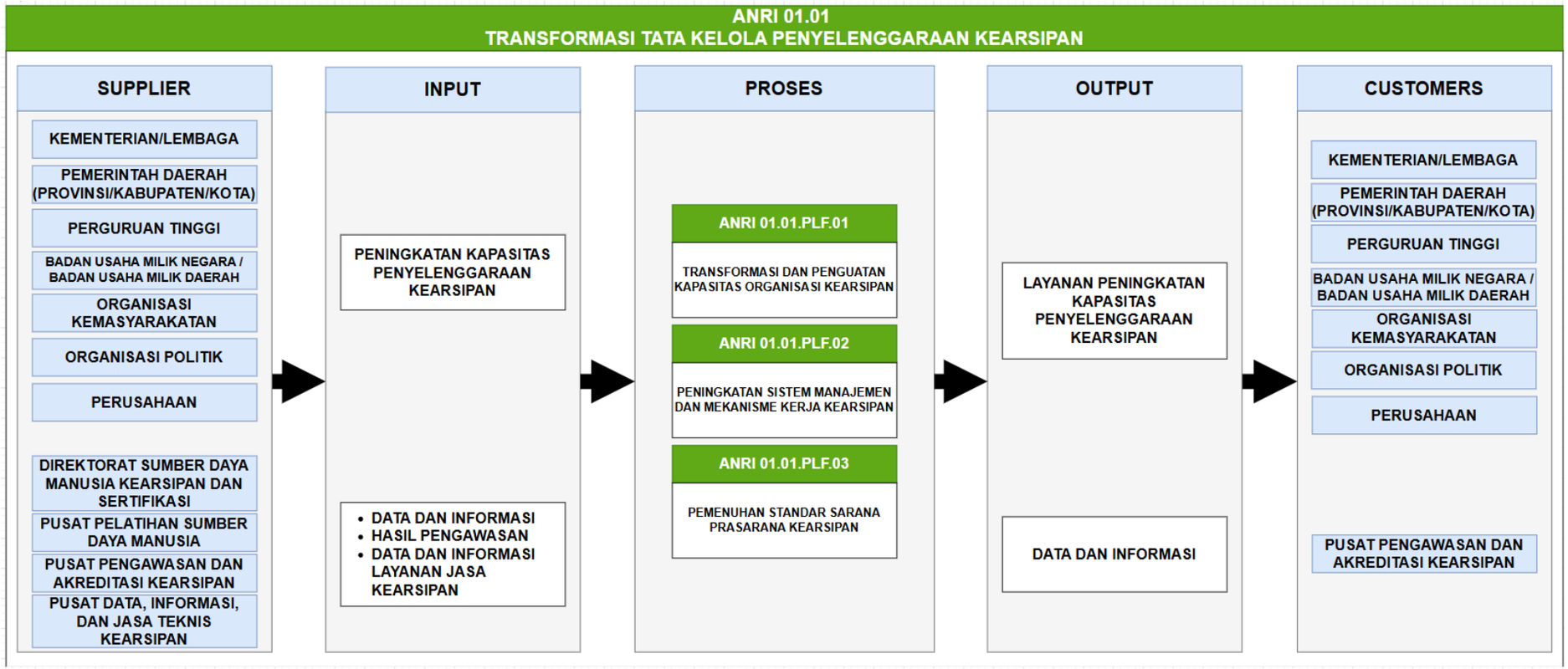

Gambar 6. Proses Bisnis Level 2 (ANRI 01.01 Transformasi Tata Kelola Penyelenggaraan Kearsipan)

I.B.1. Peta Relasi Proses Bisnis Level 2 (ANRI 01.01 Transformasi Tata Kelola Penyelenggaraan Kearsipan);

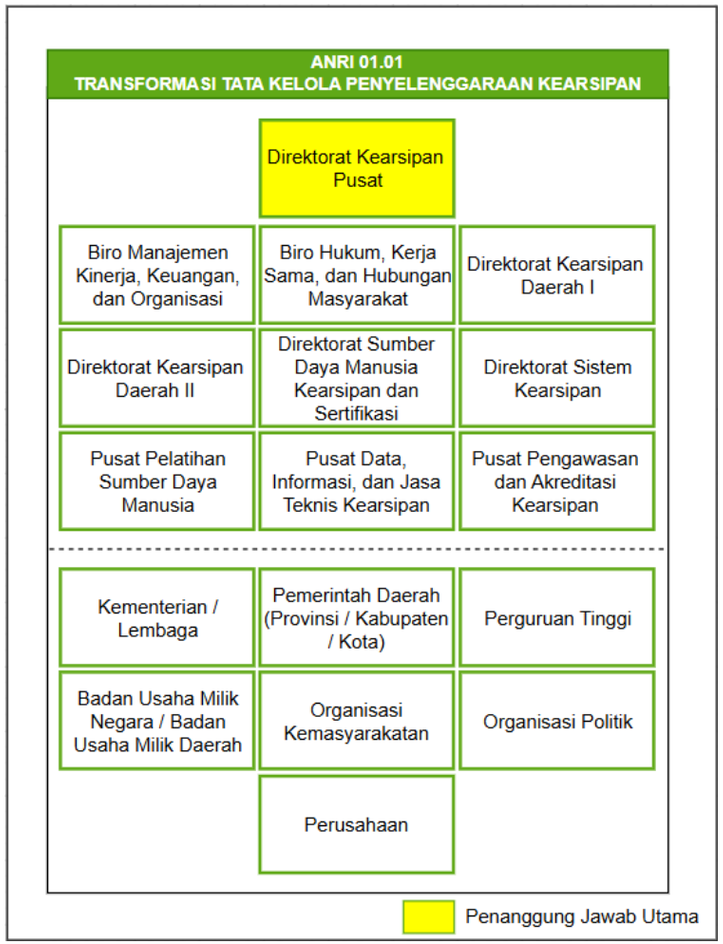

Gambar 7. Peta Relasi Proses Bisnis Level 2 (ANRI 01.01 Transformasi Tata Kelola Penyelenggaraan Kearsipan)

I.C.1.i. Peta Lintas Fungsi (ANRI 01.01.PLF.01 Transformasi dan Penguatan Kapasitas Organisasi Kearsipan);

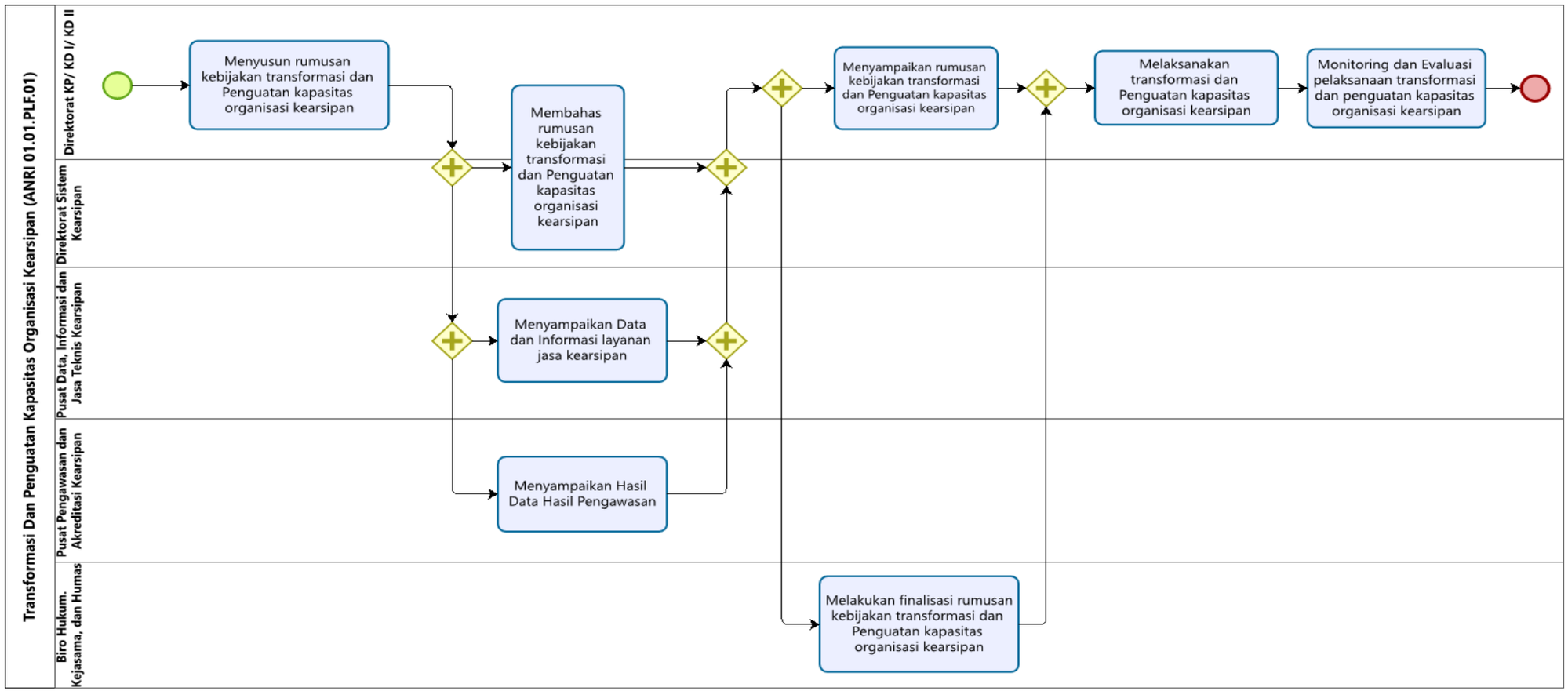

Gambar 8. Peta Lintas Fungsi (ANRI 01.01.PLF.01 Transformasi dan Penguatan Kapasitas Organisasi Kearsipan)

I.C.1.ii. Peta Lintas Fungsi (ANRI 01.01.PLF.02 Peningkatan Sistem Manajemen dan Mekanisme Kerja Kearsipan);

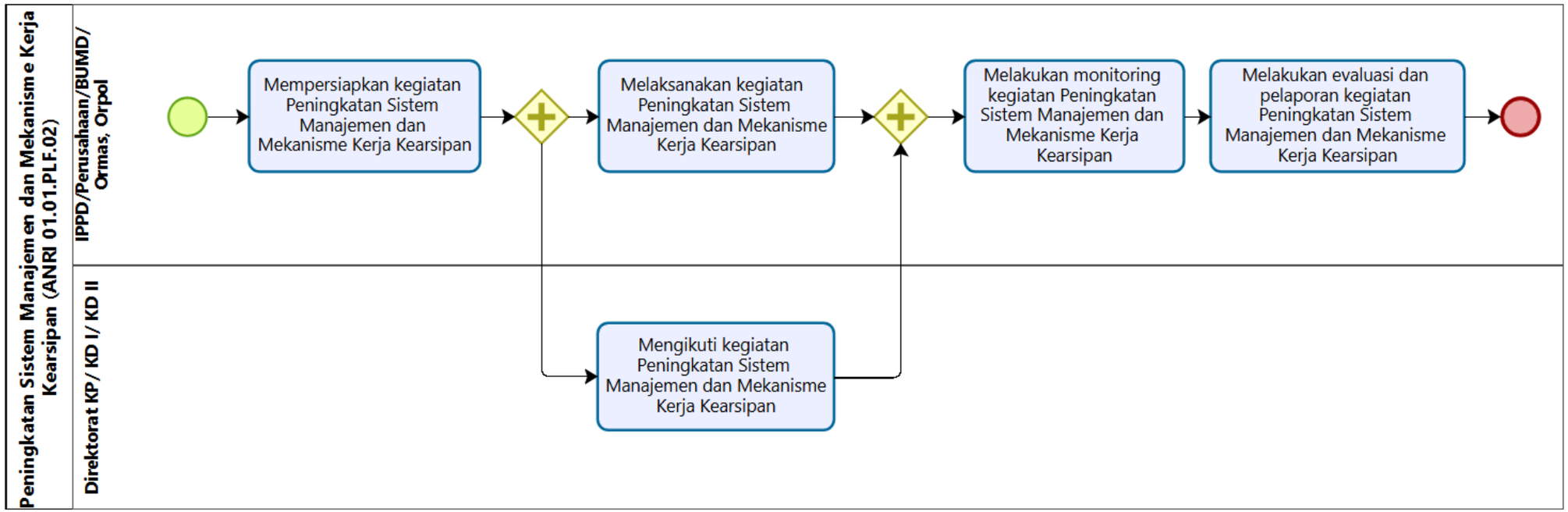

Gambar 9. Peta Lintas Fungsi (ANRI 01.01.PLF.02 Peningkatan Sistem Manajemen dan Mekanisme Kerja Kearsipan)

I.C.1.iii. Peta Lintas Fungsi (ANRI 01.01.PLF.03 Pemenuhan Standar Sarana Prasarana Kearsipan).

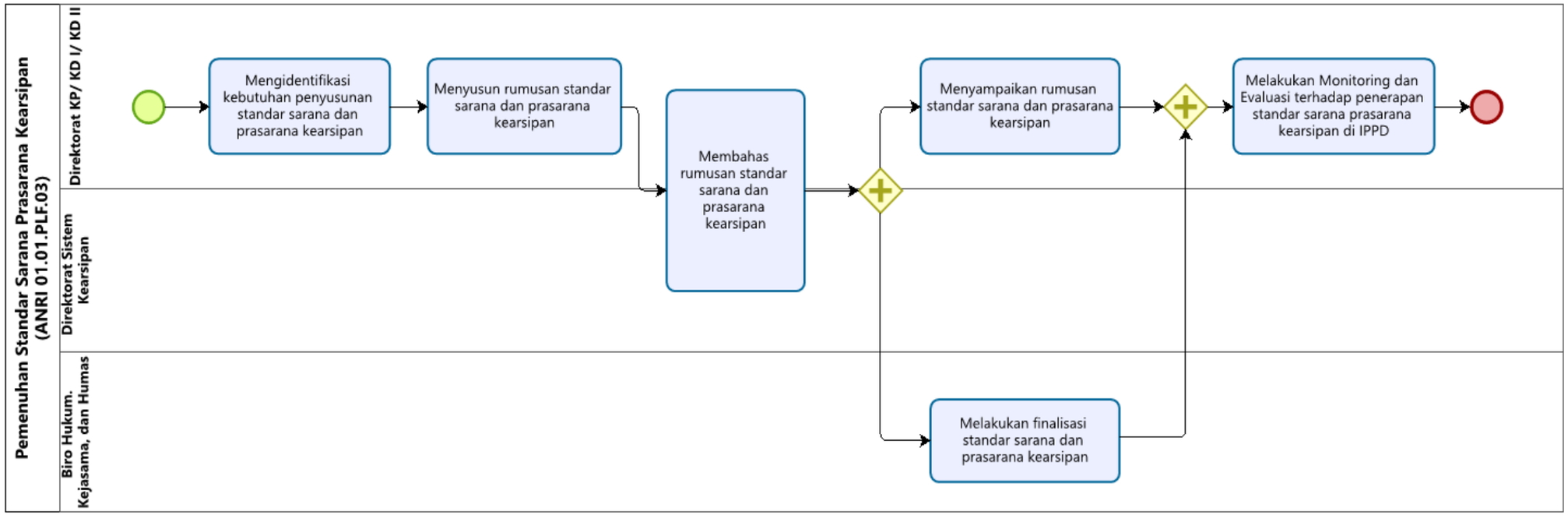

Gambar 10. Peta Lintas Fungsi (ANRI 01.01.PLF.03 Pemenuhan Standar Sarana Prasarana Kearsipan)

I.A.2. Proses Bisnis Level 2 (ANRI 01.02 Peningkatan Pengetahuan Tertib Arsip);

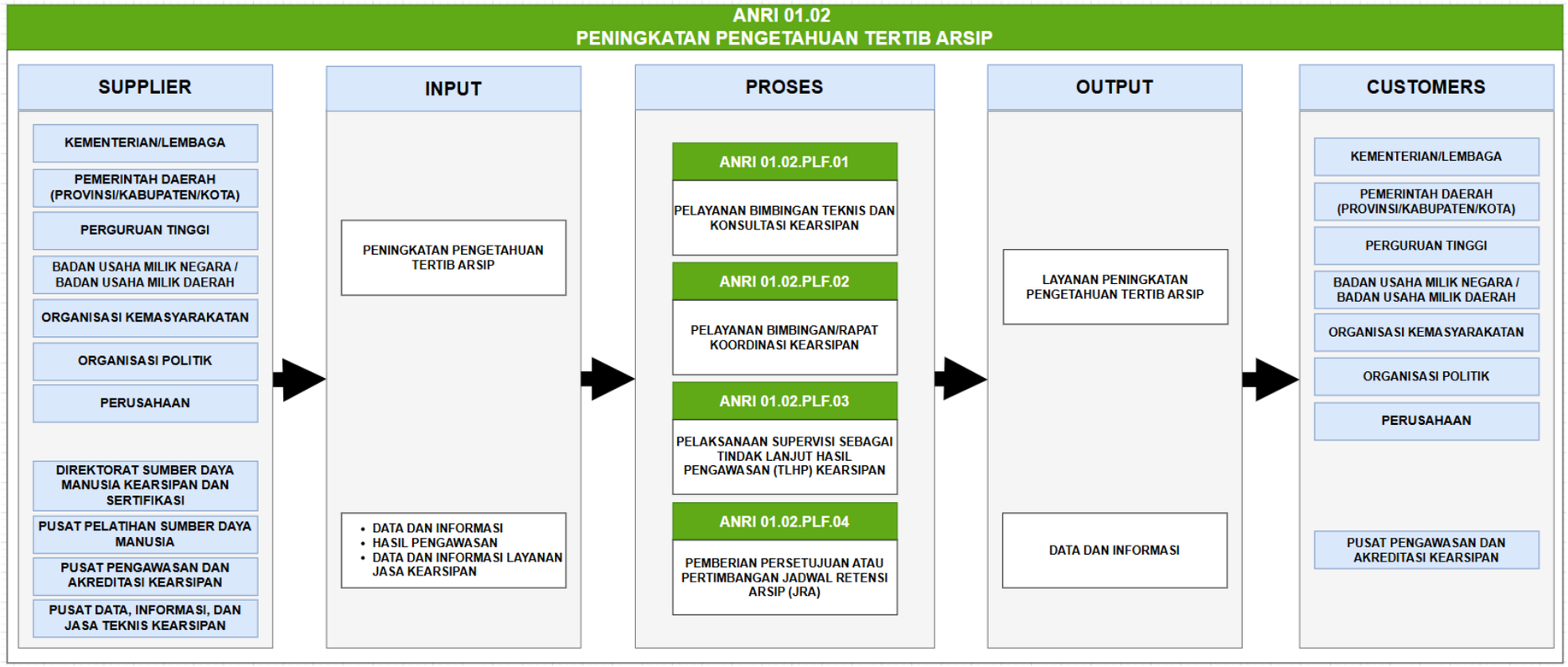

Gambar 11. Proses Bisnis Level 2 (ANRI 01.02 Peningkatan Pengetahuan Tertib Arsip)

I.B.2. Peta Relasi Proses Bisnis Level 2 (ANRI 01.02 Peningkatan Pengetahuan Tertib Arsip);

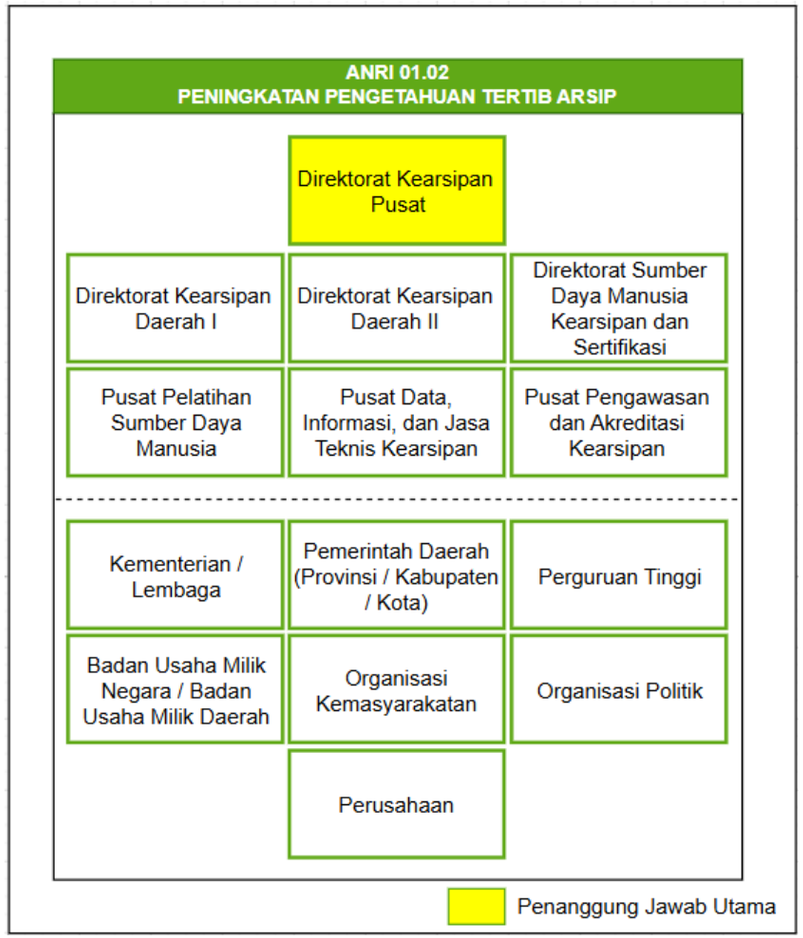

Gambar 12. Peta Relasi Proses Bisnis Level 2 (ANRI 01.02 Peningkatan Pengetahuan Tertib Arsip)

I.C.2.i. Peta Lintas Fungsi (ANRI 01.02.PLF.01 Pelayanan Bimbingan Teknis dan Konsultasi Kearsipan);

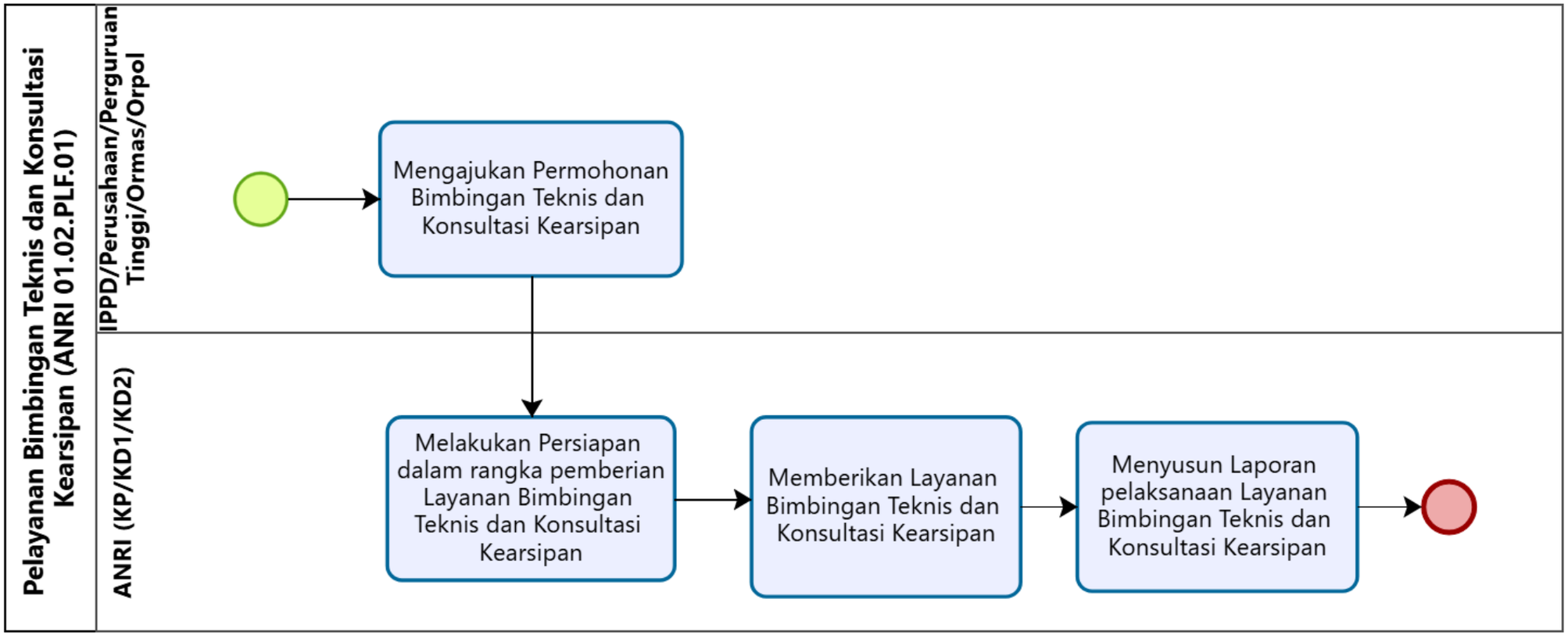

Gambar 13. Peta Lintas Fungsi (ANRI 01.02.PLF.01 Pelayanan Bimbingan Teknis dan Konsultasi Kearsipan)

I.C.2.ii. Peta Lintas Fungsi (ANRI 01.02.PLF.02 Pelayanan Bimbingan/Rapat Koordinasi Kearsipan);

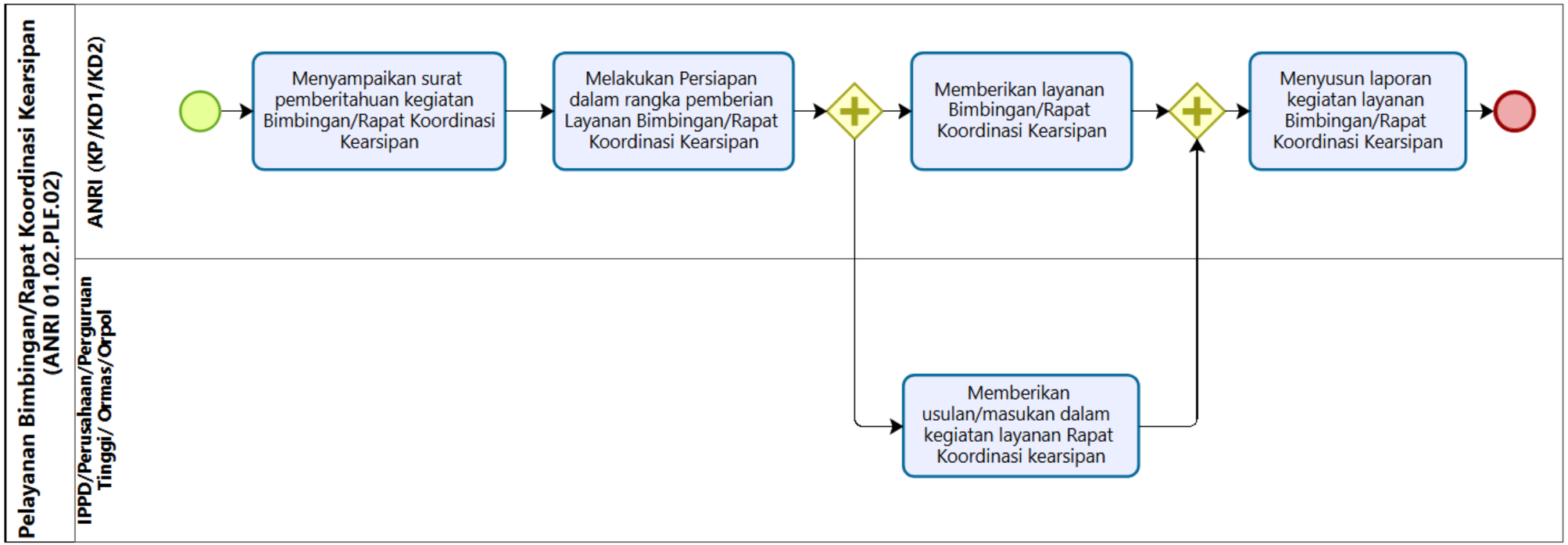

Gambar 14. Peta Lintas Fungsi (ANRI 01.02.PLF.02 Pelayanan Bimbingan/Rapat Koordinasi Kearsipan)

I.C.2.iii. Peta Lintas Fungsi (ANRI 01.02.PLF.03 Pelaksanaan Supervisi sebagai Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) Kearsipan);

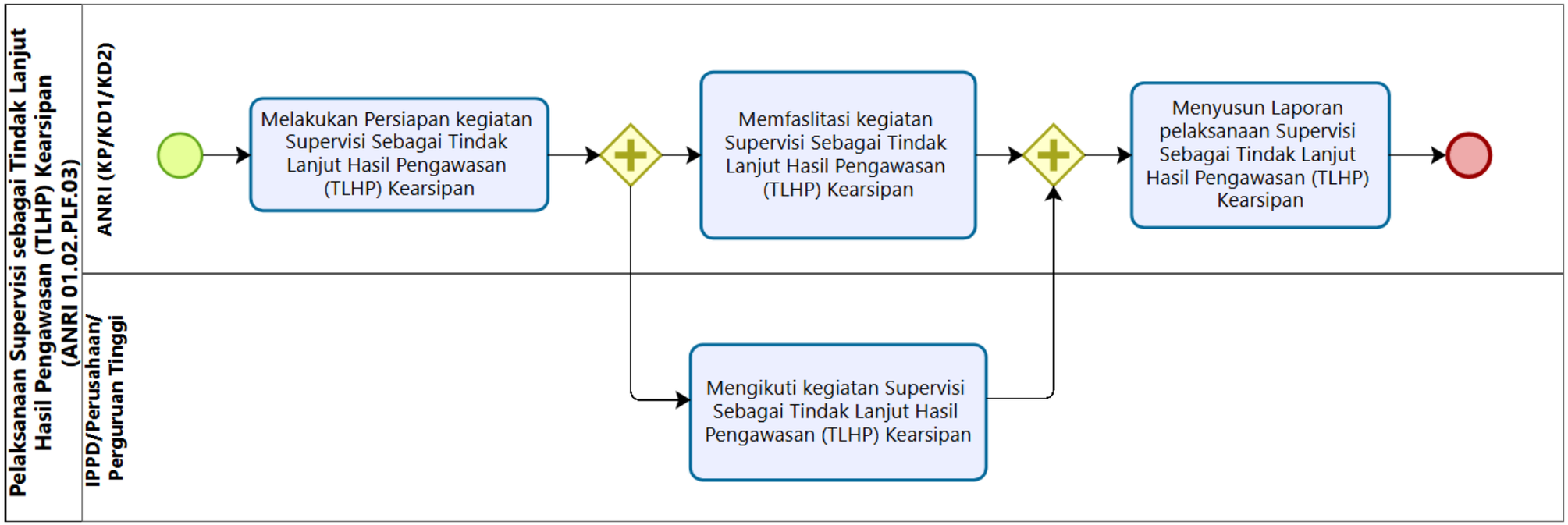

Gambar 15. Peta Lintas Fungsi (ANRI 01.02.PLF.03 Pelaksanaan Supervisi sebagai Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) Kearsipan)

I.C.2.iv. Peta Lintas Fungsi (ANRI 01.02.PLF.04 Pemberian Persetujuan atau Pertimbangan JRA).

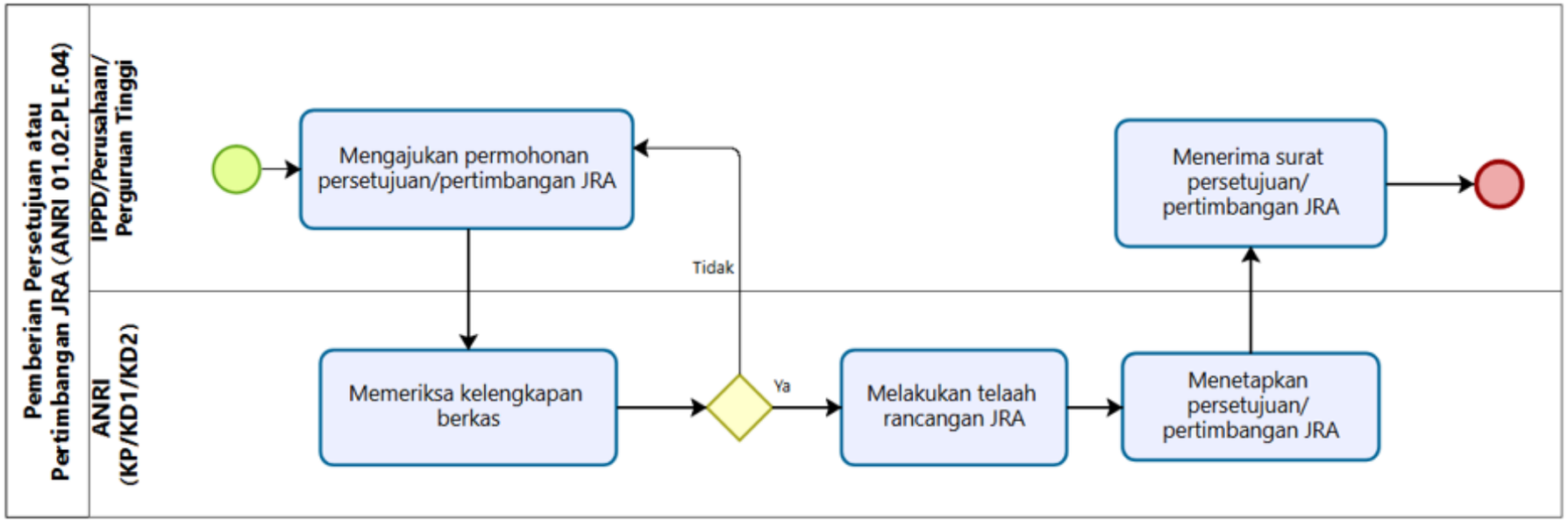

Gambar 16. Peta Lintas Fungsi (ANRI 01.02.PLF.04 Pemberian Persetujuan atau Pertimbangan JRA)

I.A.3. Proses Bisnis Level 2 (ANRI 01.03 Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kearsipan);

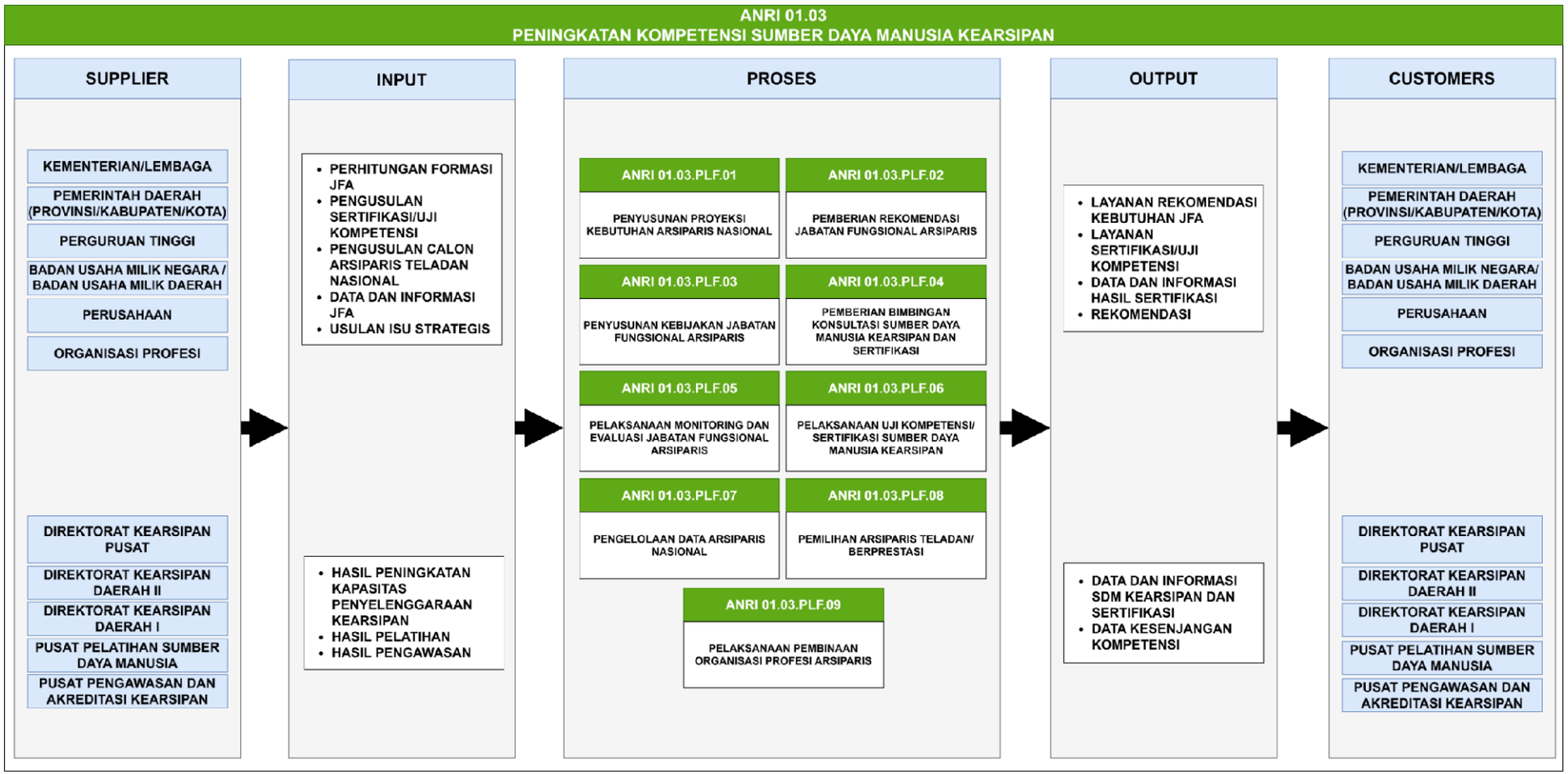

Gambar 17. Proses Bisnis Level 2 (ANRI 01.03 Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kearsipan)

I.B.3. Peta Relasi Proses Bisnis Level 2 (ANRI 01.03 Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kearsipan);

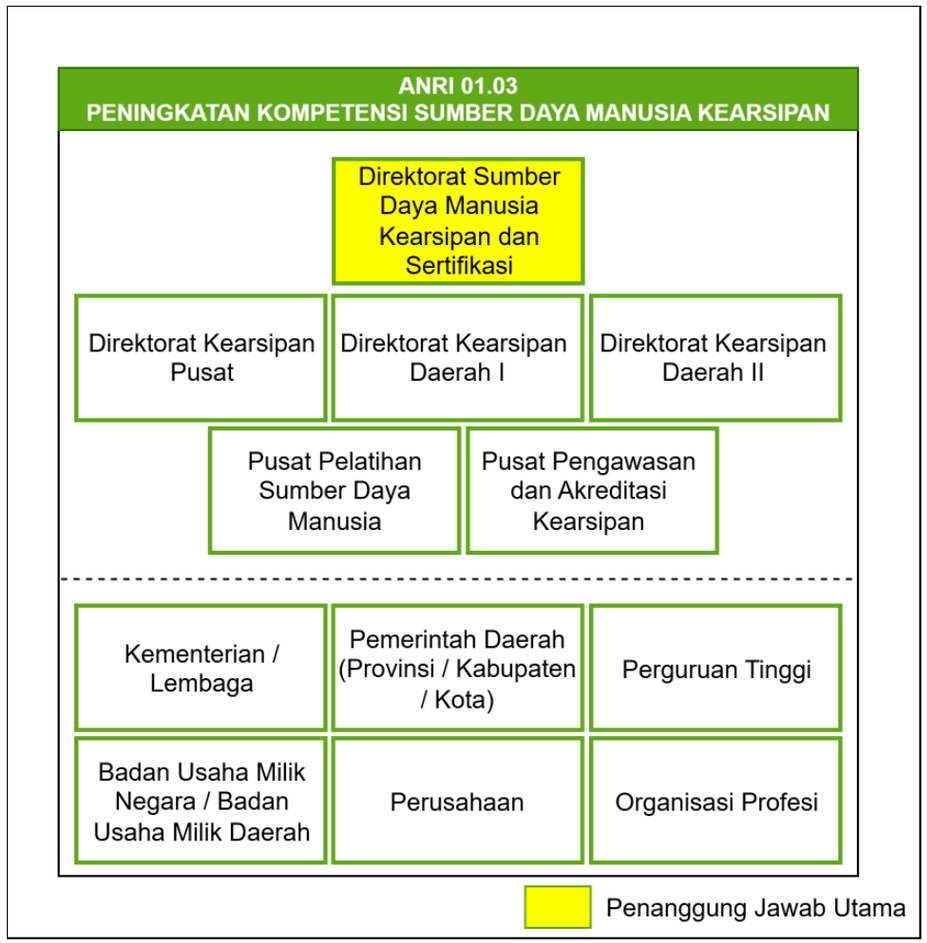

Gambar 18. Peta Relasi Proses Bisnis Level 2 (ANRI 01.03 Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kearsipan)

I.C.3.i. Peta Lintas Fungsi (ANRI 01.03.PLF.01 Penyusunan Proyeksi Kebutuhan Arsiparis Nasional);

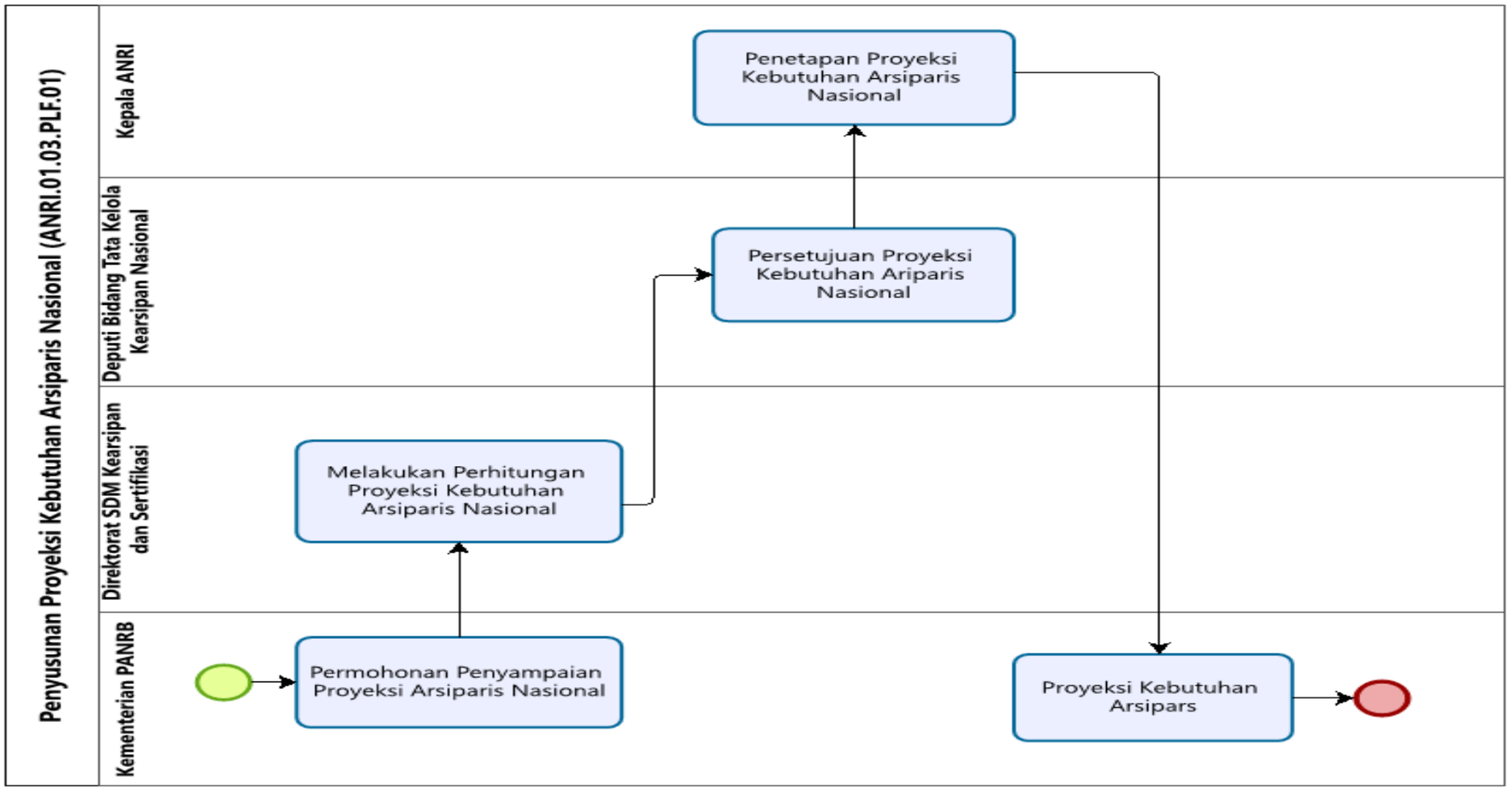

Gambar 19. Peta Lintas Fungsi (ANRI 01.03.PLF.01 Penyusunan Proyeksi Kebutuhan Arsiparis Nasional)

I.C.3.ii. Peta Lintas Fungsi (ANRI 01.03.PLF.02 Pemberian Rekomendasi Jabatan Fungsional Arsiparis);

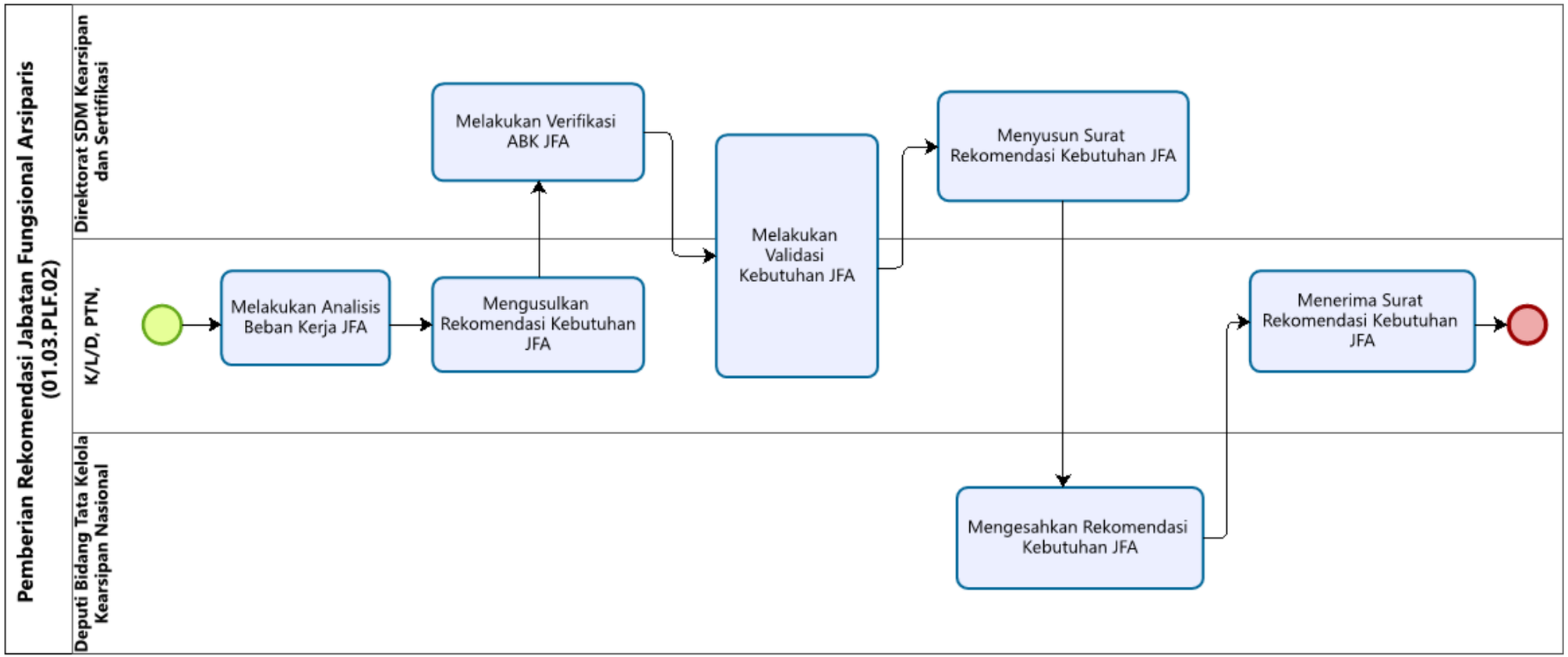

Gambar 20. Peta Lintas Fungsi (ANRI 01.03.PLF.02 Pemberian Rekomendasi Jabatan Fungsional Arsiparis)

I.C.3.iii. Peta Lintas Fungsi (ANRI 01.03.PLF.03 Penyusunan Kebijakan Jabatan Fungsional Arsiparis);

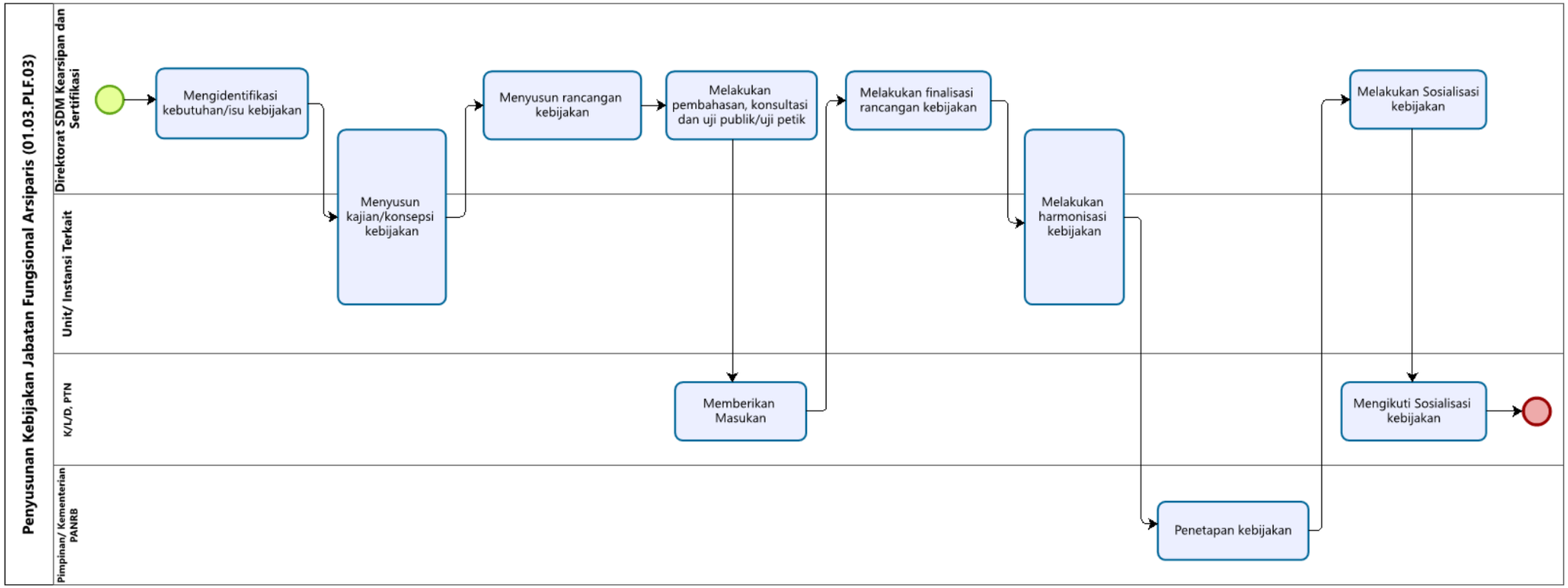

Gambar 21. Peta Lintas Fungsi (ANRI 01.03.PLF.03 Penyusunan Kebijakan Jabatan Fungsional Arsiparis)

I.C.3.iv. Peta Lintas Fungsi (ANRI 01.03.PLF.04 Pemberian Bimbingan Konsultasi SDM Kearsipan dan Sertifikasi);

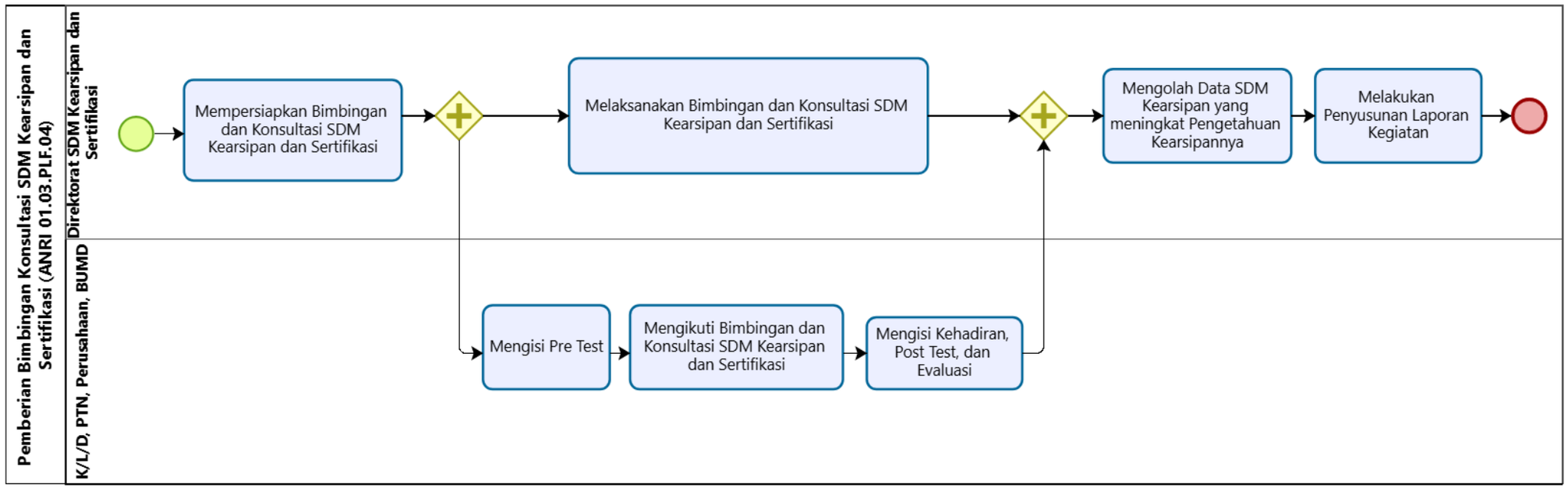

Gambar 22. Peta Lintas Fungsi (ANRI 01.03.PLF.04 Pemberian Bimbingan Konsultasi SDM Kearsipan dan Sertifikasi)

I.C.3.v. Peta Lintas Fungsi (ANRI 01.03.PLF.05 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional Arsiparis);

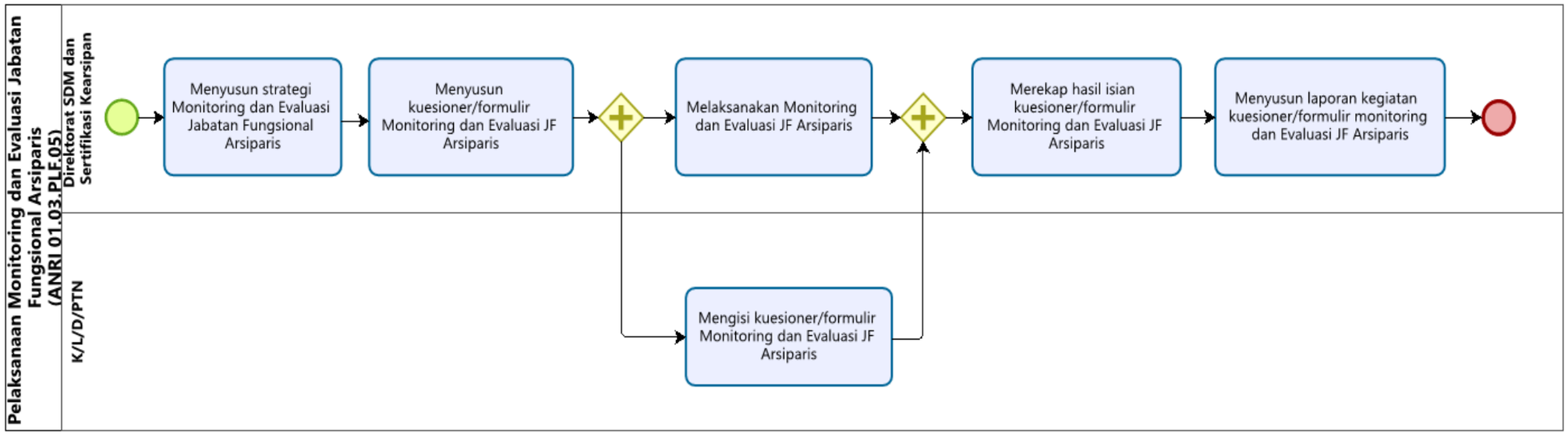

Gambar 23. Peta Lintas Fungsi (ANRI 01.03.PLF.05 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional Arsiparis)

I.C.3.vi. Peta Lintas Fungsi (ANRI 01.03.PLF.06 Pelaksanaan Uji Kompetensi JFA/Sertifikasi SDM Kearsipan);

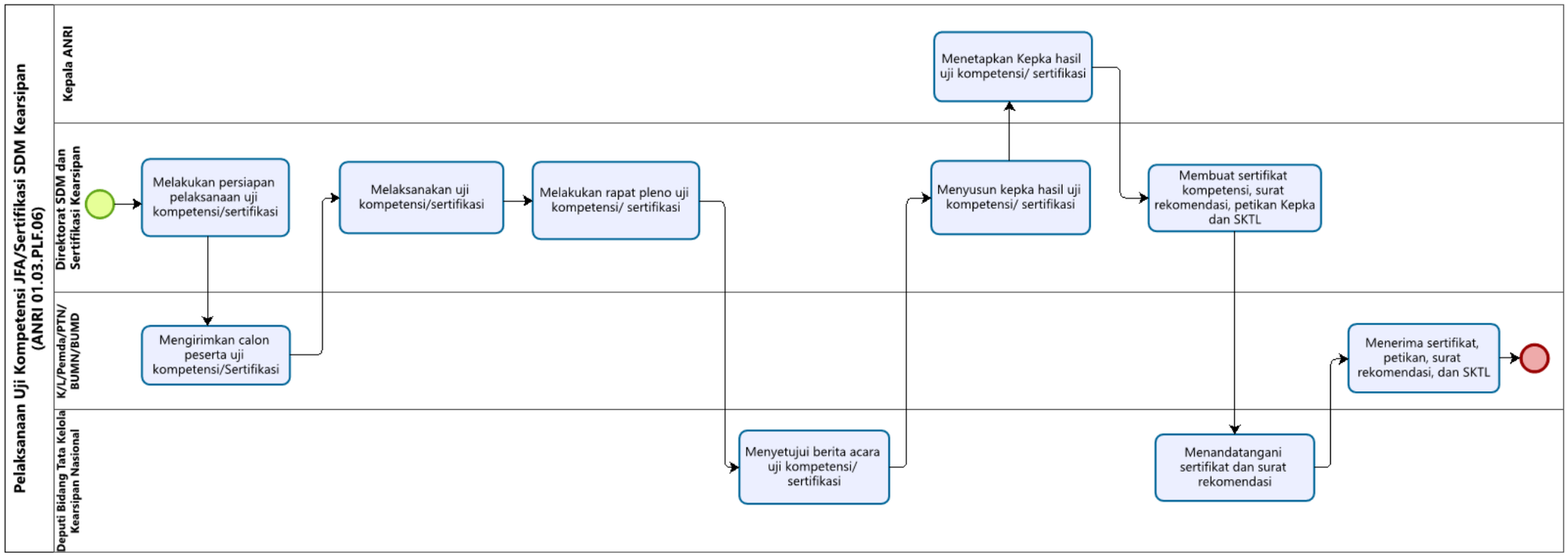

Gambar 24. Peta Lintas Fungsi (ANRI 01.03.PLF.06 Pelaksanaan Uji Kompetensi JFA/Sertifikasi SDM Kearsipan)

I.C.3.vii. Peta Lintas Fungsi (ANRI 01.03.PLF.07 Pengelolaan Data Arsiparis Nasional);

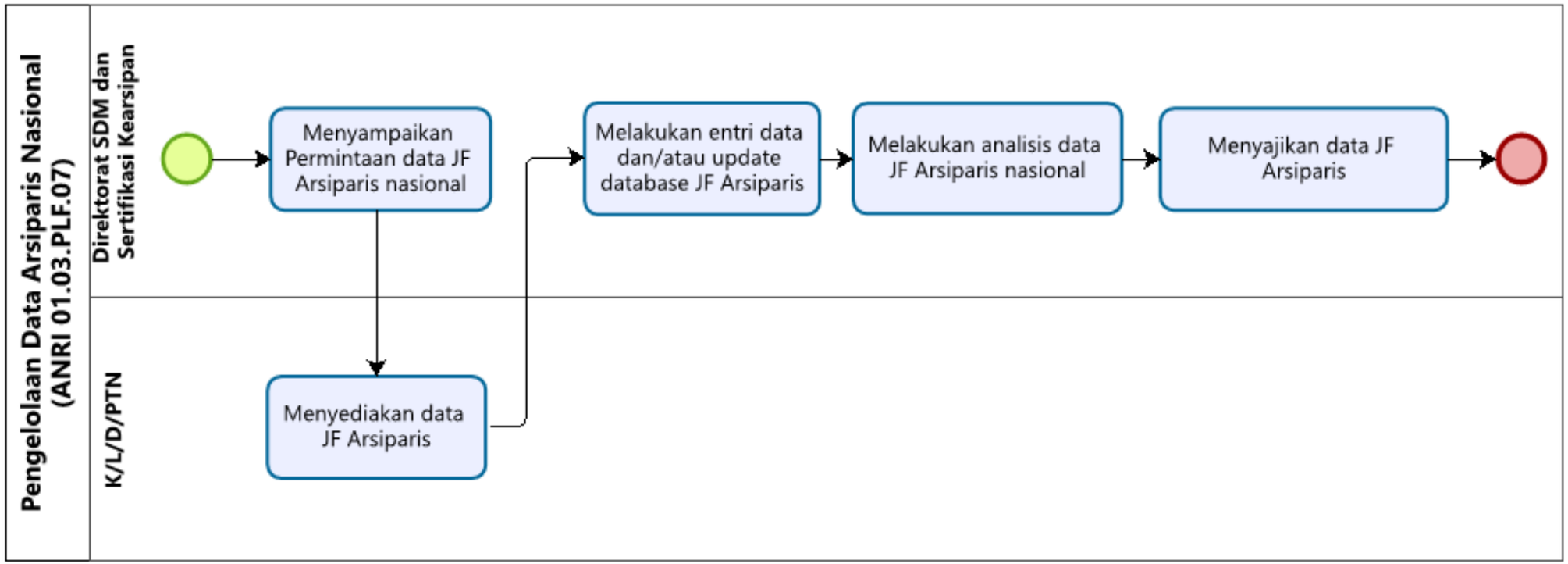

Gambar 25. Peta Lintas Fungsi (ANRI 01.03.PLF.07 Pengelolaan Data Arsiparis Nasional)

I.C.3.viii. Peta Lintas Fungsi (ANRI 01.03.PLF.08 Pemilihan Arsiparis Teladan/Berprestasi);

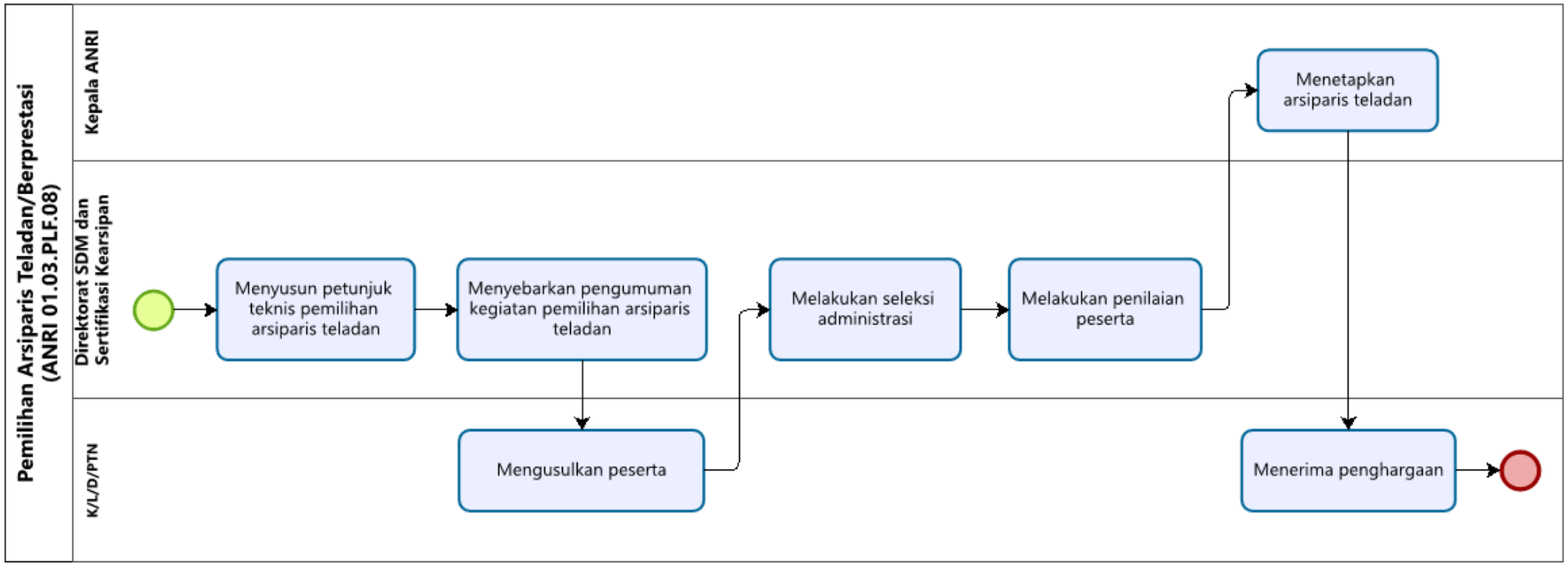

Gambar 26. Peta Lintas Fungsi (ANRI 01.03.PLF.08 Pemilihan Arsiparis Teladan/Berprestasi)

I.C.3.ix. Peta Lintas Fungsi (ANRI 01.03.PLF.09 Pelaksanaan Pembinaan Organisasi Profesi Arsiparis).

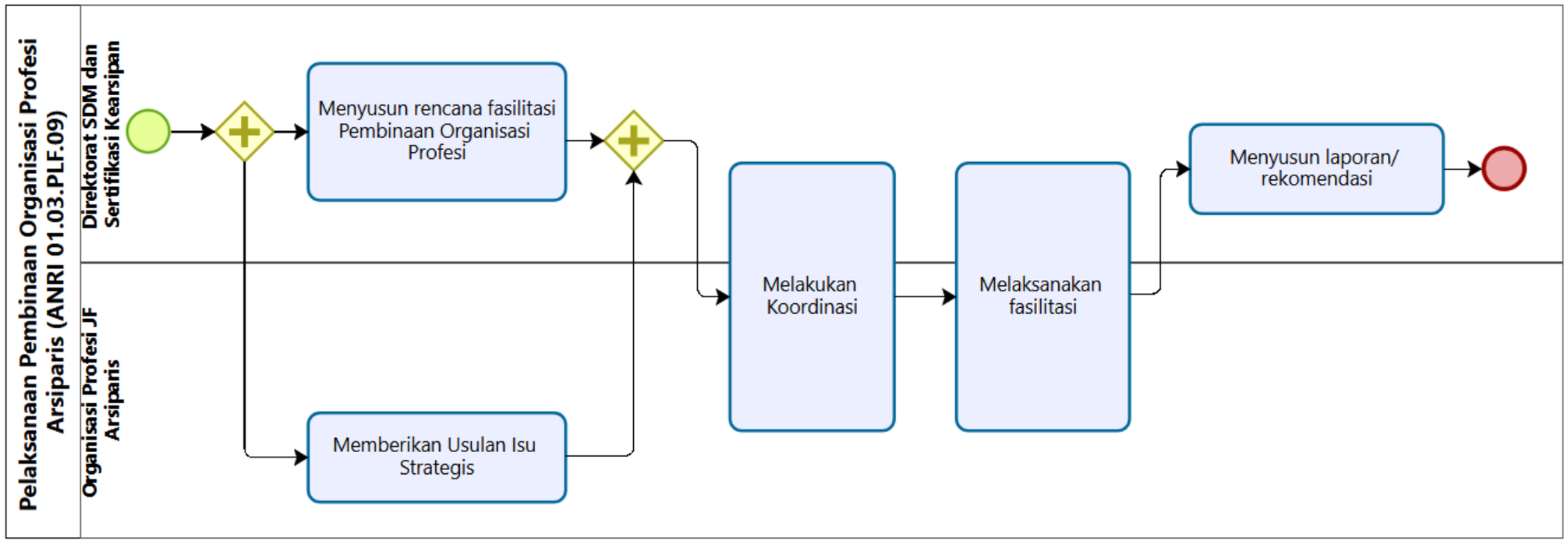

Gambar 27. Peta Lintas Fungsi (ANRI 01.03.PLF.09 Pelaksanaan Pembinaan Organisasi Profesi Arsiparis)

I.A.4. Proses Bisnis Level 2 (ANRI 01.04 Peningkatan Pelatihan Sumber Daya Manusia);

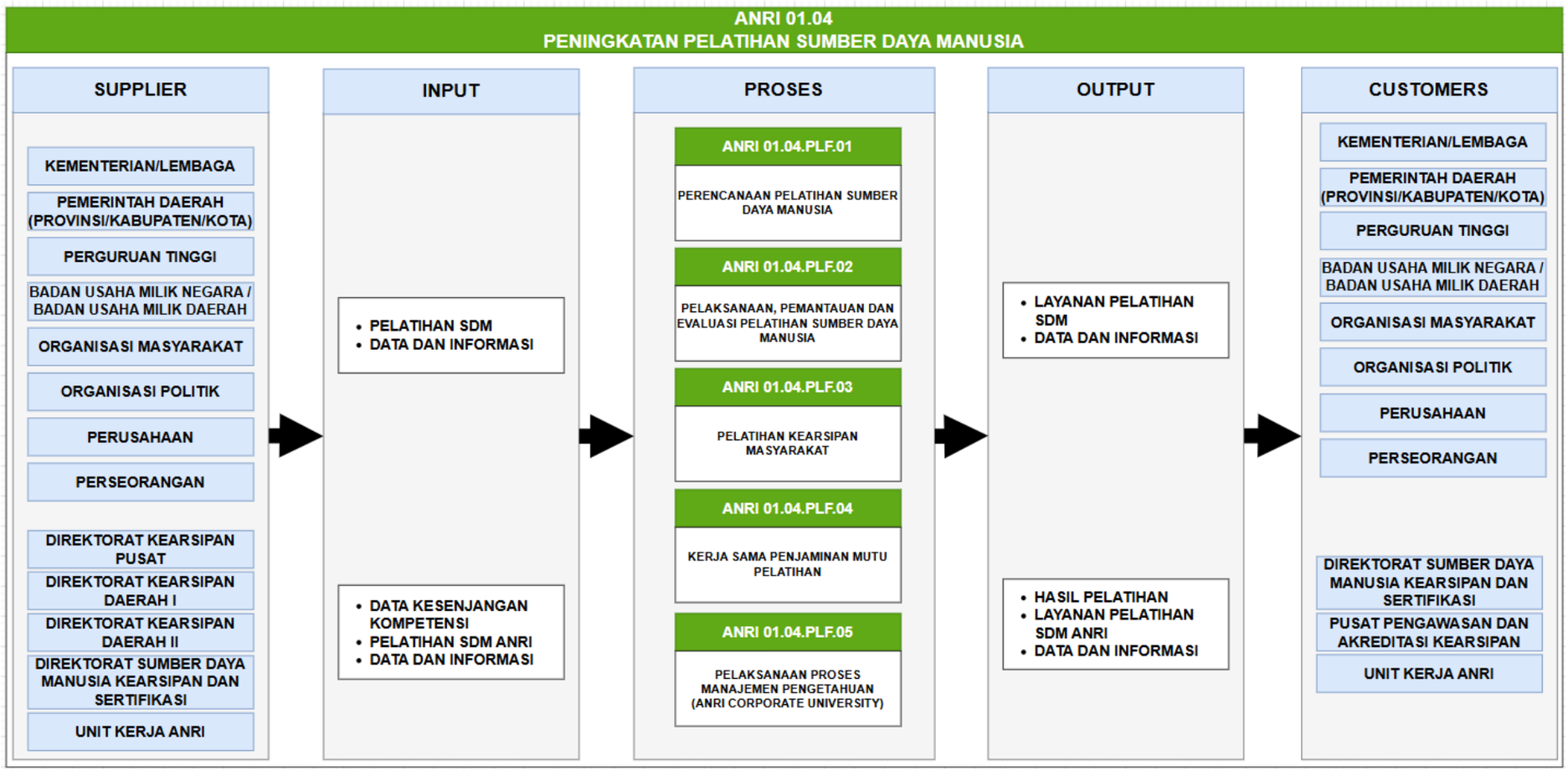

Gambar 28. Proses Bisnis Level 2 (ANRI 01.04 Peningkatan Pelatihan Sumber Daya Manusia)

I.B.4. Peta Relasi Proses Bisnis Level 2 (ANRI 01.04 Peningkatan Pelatihan Sumber Daya Manusia);

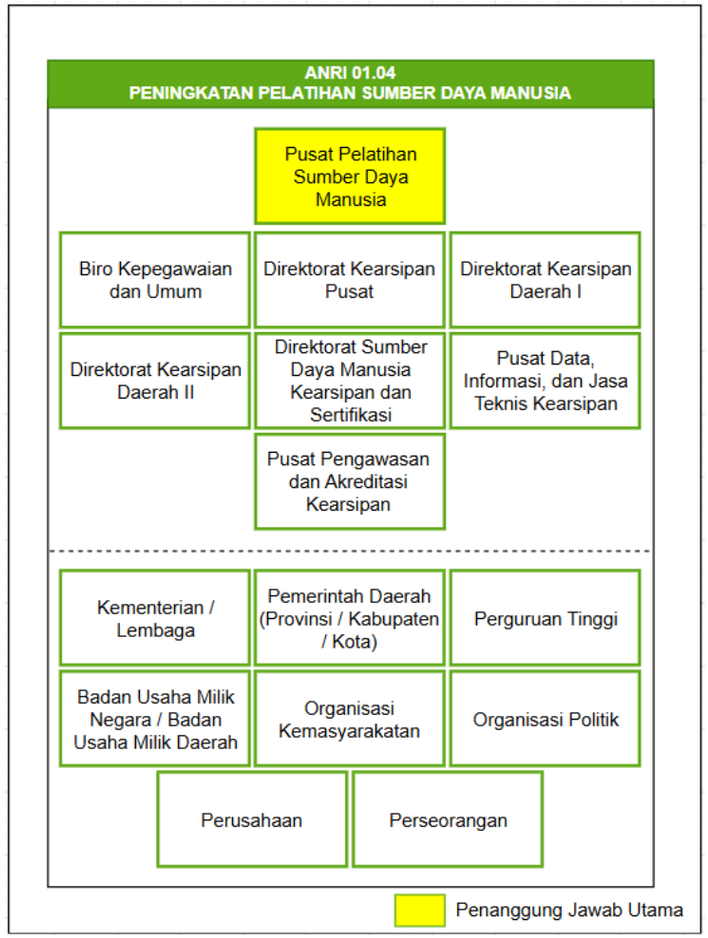

Gambar 29. Peta Relasi Proses Bisnis Level 2 (ANRI 01.04 Peningkatan Pelatihan Sumber Daya Manusia)

I.C.4.i. Peta Lintas Fungsi (ANRI 01.04.PLF.01 Perencanaan Pelatihan SDM);

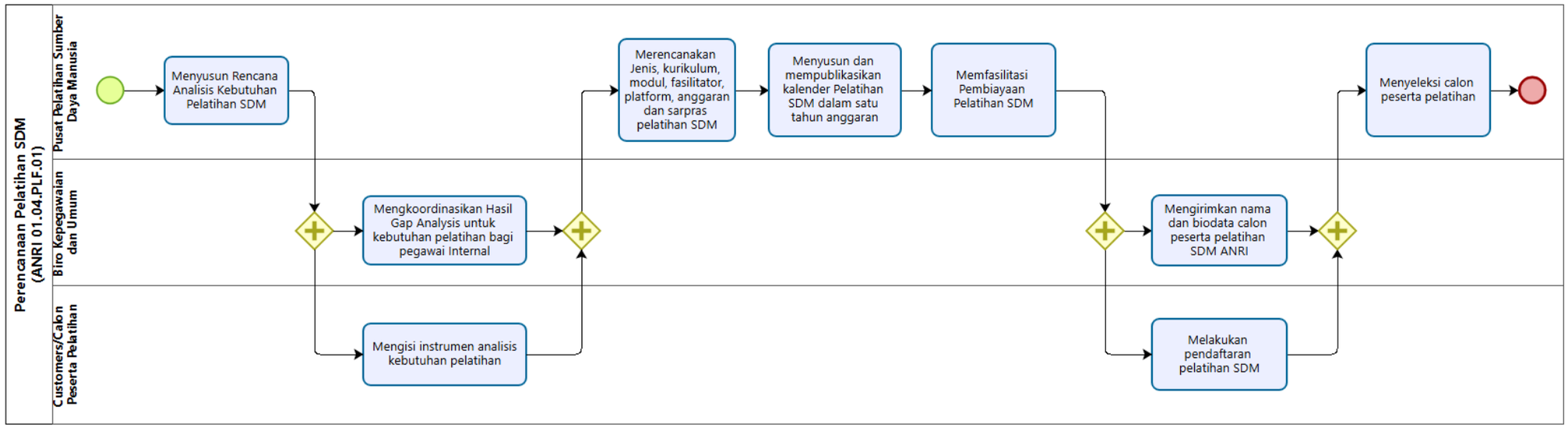

Gambar 30. Peta Lintas Fungsi (ANRI 01.04.PLF.01 Perencanaan Pelatihan SDM)

I.C.4.ii. Peta Lintas Fungsi (ANRI 01.04.PLF.02 Pelaksanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Pelatihan SDM);

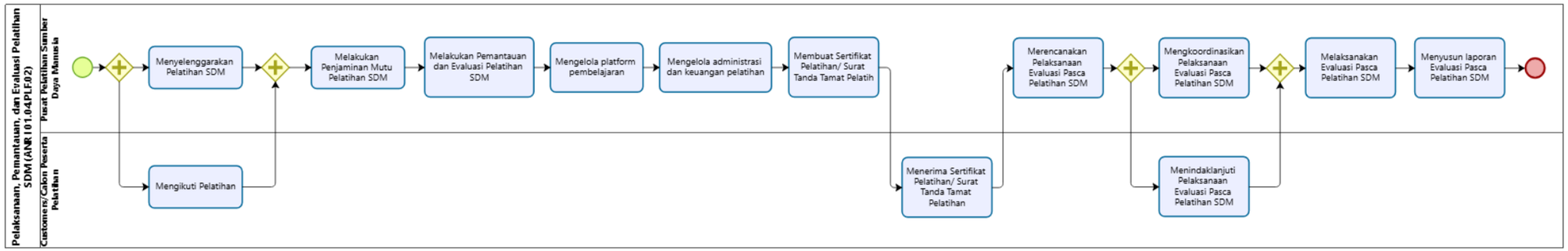

Gambar 31. Peta Lintas Fungsi (ANRI 01.04.PLF.02 Pelaksanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Pelatihan SDM)

I.C.4.iii. Peta Lintas Fungsi (ANRI 01.04.PLF.03 Pelatihan Kearsipan Masyarakat);

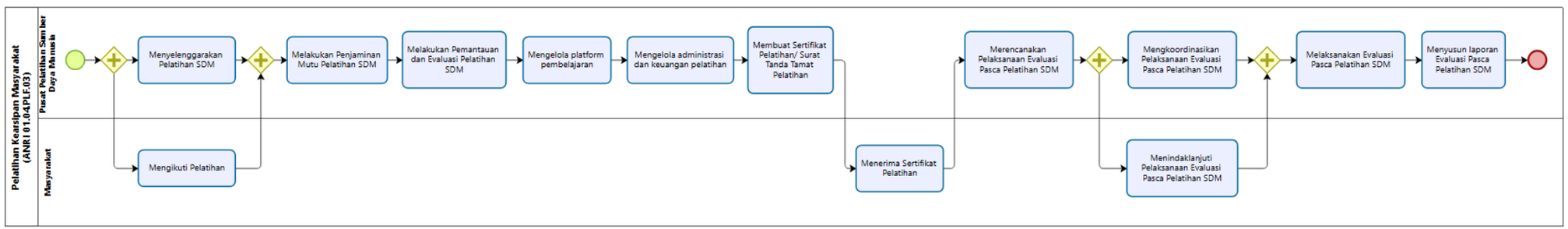

Gambar 32. Peta Lintas Fungsi (ANRI 01.04.PLF.03 Pelatihan Kearsipan Masyarakat)

I.C.4.iv. Peta Lintas Fungsi (ANRI 01.04.PLF.04 Kerja Sama Penjaminan Mutu Pelatihan);

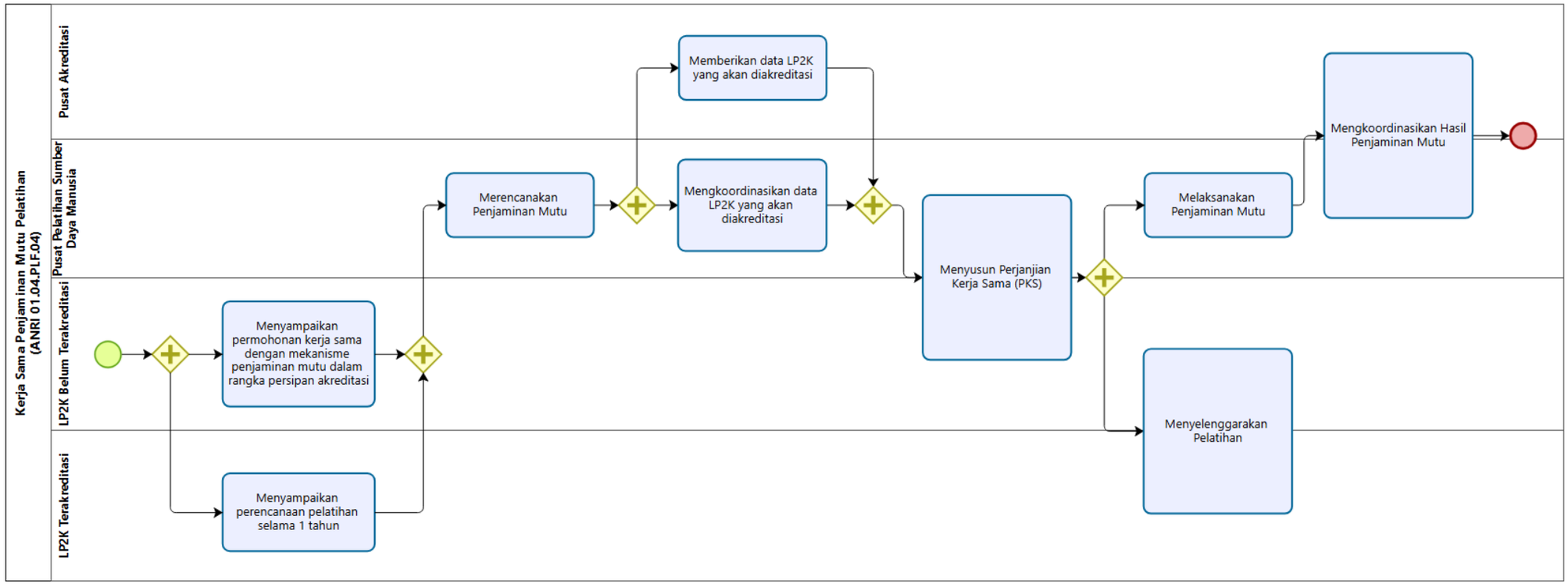

Gambar 33. Peta Lintas Fungsi (ANRI 01.04.PLF.04 Kerja Sama Penjaminan Mutu Pelatihan)

I.C.4.v. Peta Lintas Fungsi (ANRI 01.04.PLF.05 Pelaksanaan Proses Manajemen Pengetahuan (ANRI Corpu));

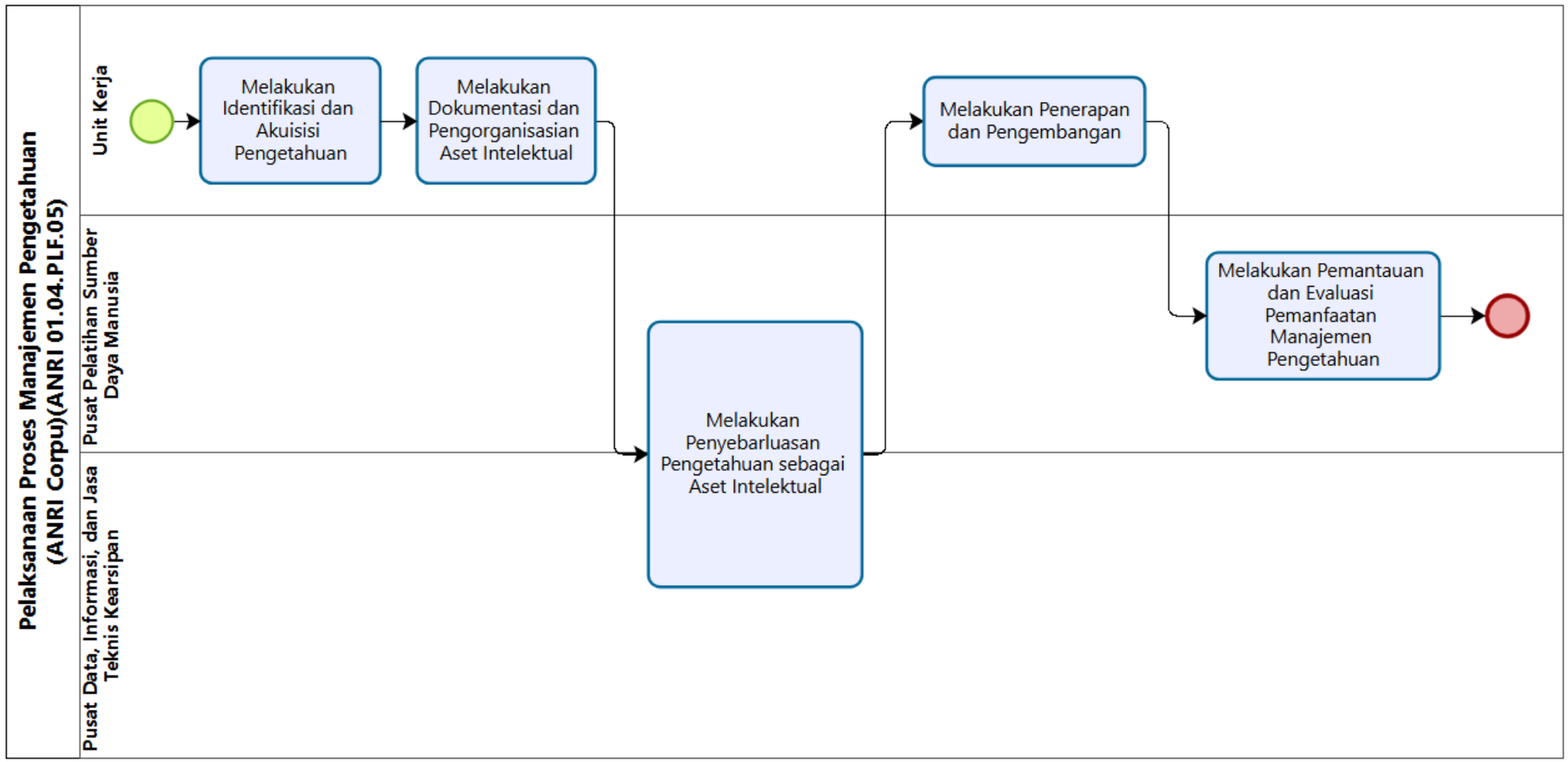

Gambar 34. Peta Lintas Fungsi (ANRI 01.04.PLF.05 Pelaksanaan Proses Manajemen Pengetahuan (ANRI Corpu))

I.A.5. Proses Bisnis Level 2 (ANRI 01.05 Peningkatan Pelayanan Jasa Kearsipan);

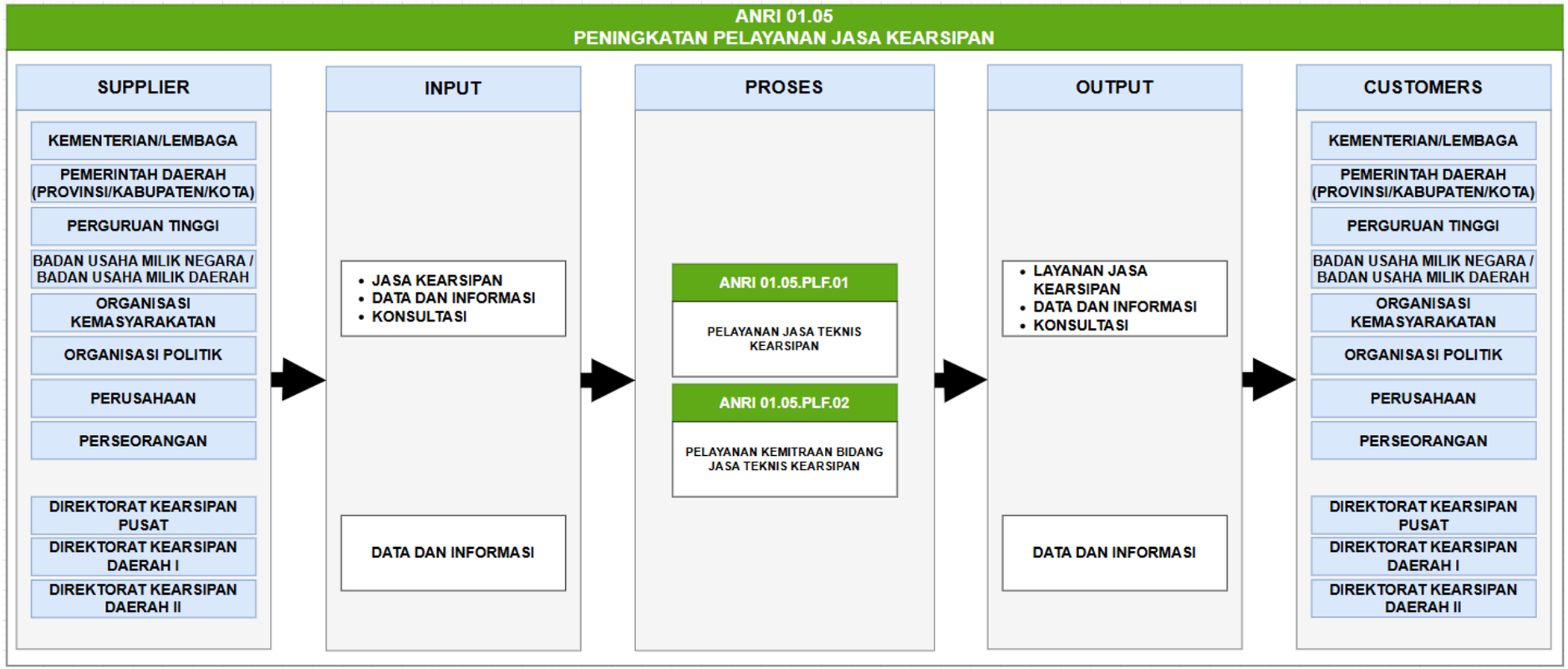

Gambar 35. Proses Bisnis Level 2 (ANRI 01.05 Peningkatan Pelayanan Jasa Kearsipan)

I.B.5. Peta Relasi Proses Bisnis Level 2 (ANRI 01.05 Peningkatan Pelayanan Jasa Kearsipan);

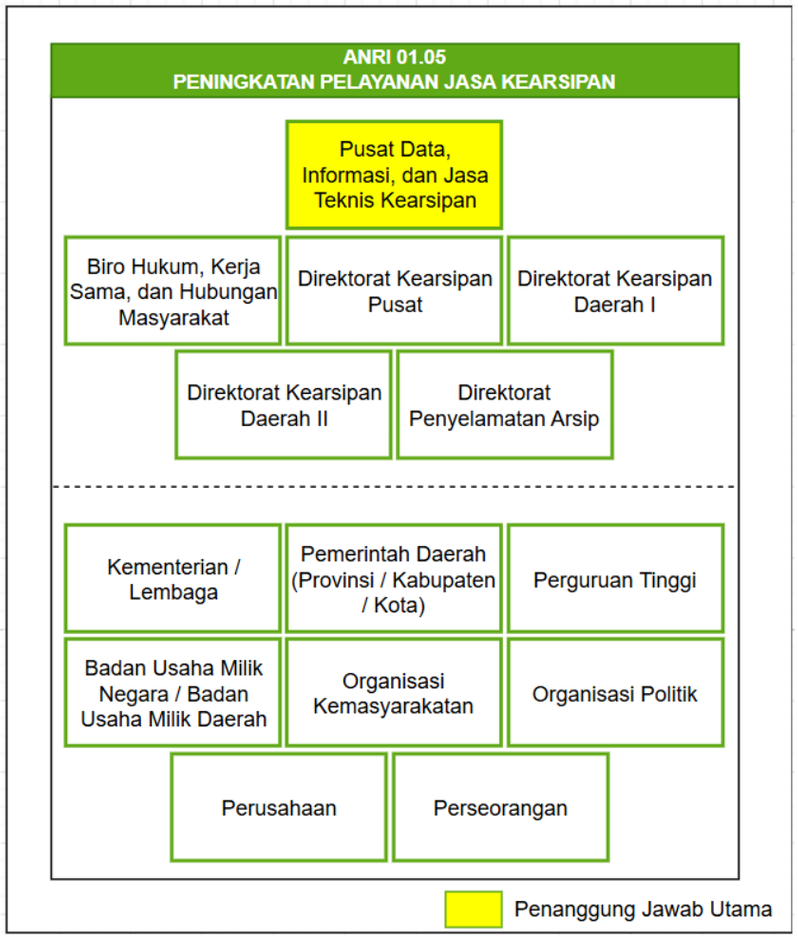

Gambar 36. Peta Relasi Proses Bisnis Level 2 (ANRI 01.05 Peningkatan Pelayanan Jasa Kearsipan)

I.C.5.i. Peta Lintas Fungsi (ANRI 01.05.PLF.01 Pelayanan Jasa Teknis Kearsipan);

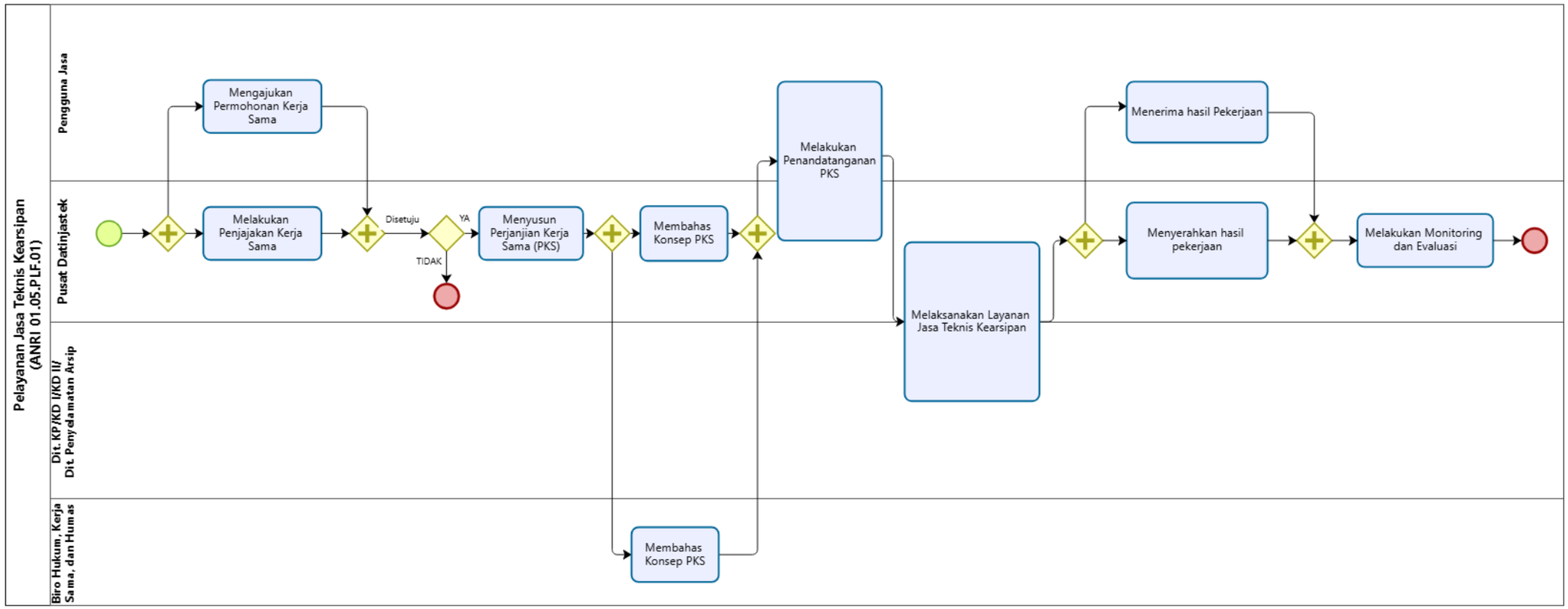

Gambar 37. Peta Lintas Fungsi (ANRI 01.05.PLF.01 Pelayanan Jasa Teknis Kearsipan)

I.C.5.ii. Peta Lintas Fungsi (ANRI 01.05.PLF.02 Pelayanan Kemitraan Bidang Jasa Teknis Kearsipan).

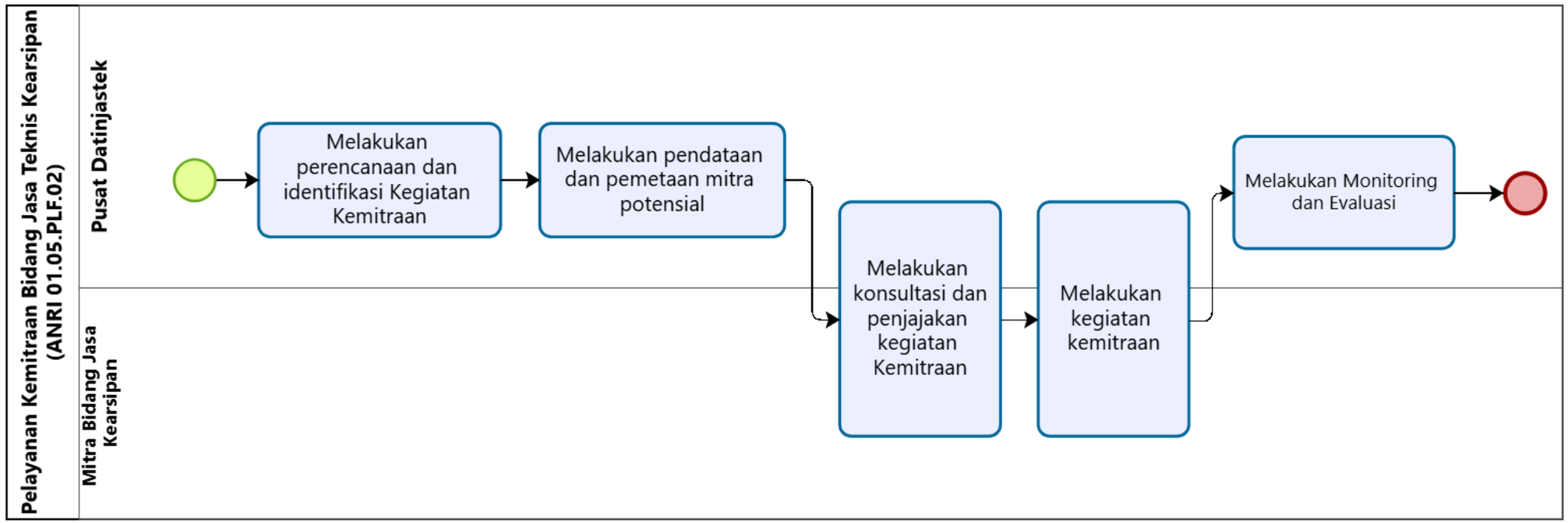

Gambar 38. Peta Lintas Fungsi (ANRI 01.05.PLF.02 Pelayanan Kemitraan Bidang Jasa Teknis Kearsipan)

I.A.6. Proses Bisnis Level 2 (ANRI 01.06 Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pengawasan Kearsipan);

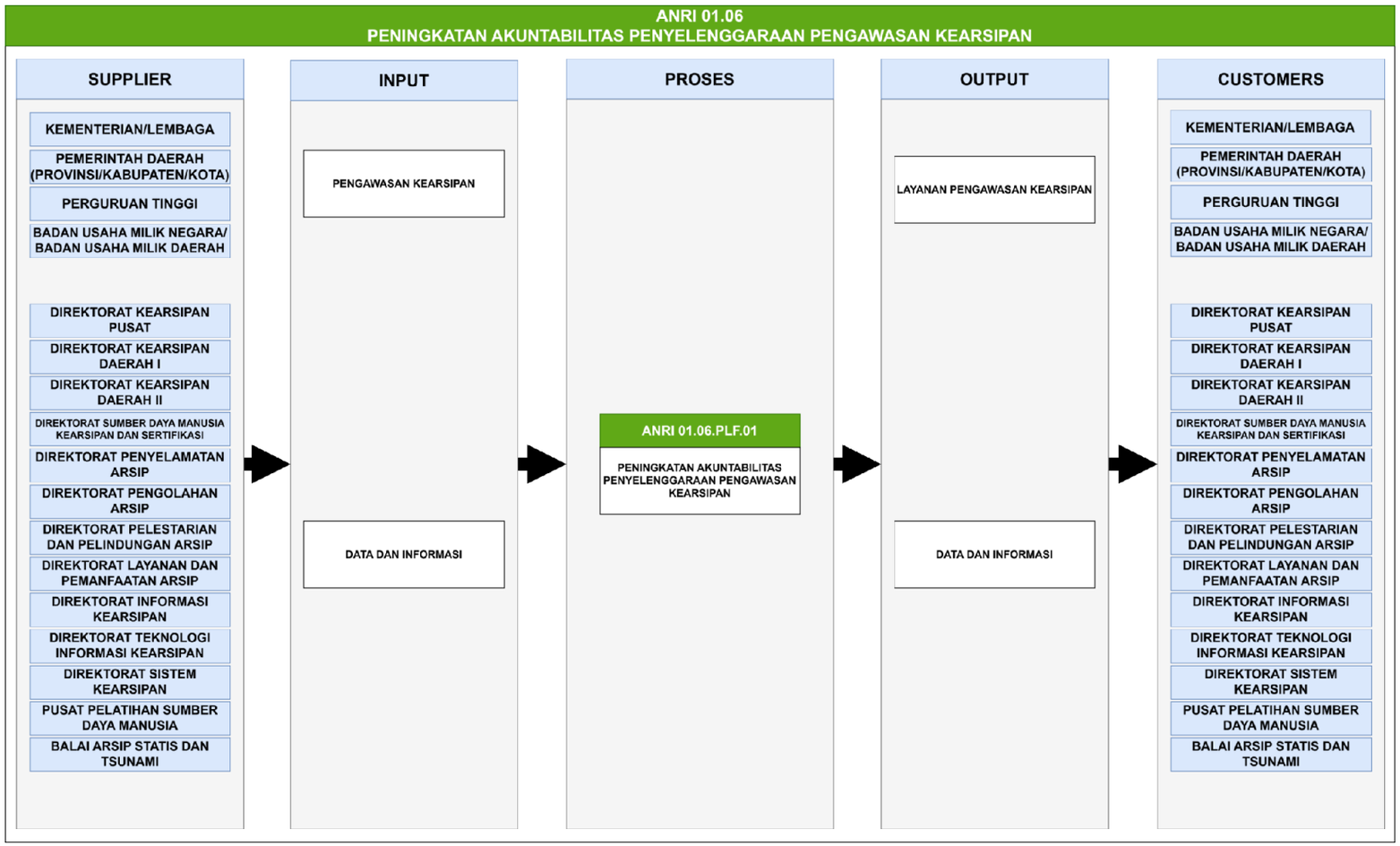

Gambar 39. Proses Bisnis Level 2 (ANRI 01.06 Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pengawasan Kearsipan)

I.B.6. Peta Relasi Proses Bisnis Level 2 (ANRI 01.06 Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pengawasan Kearsipan);

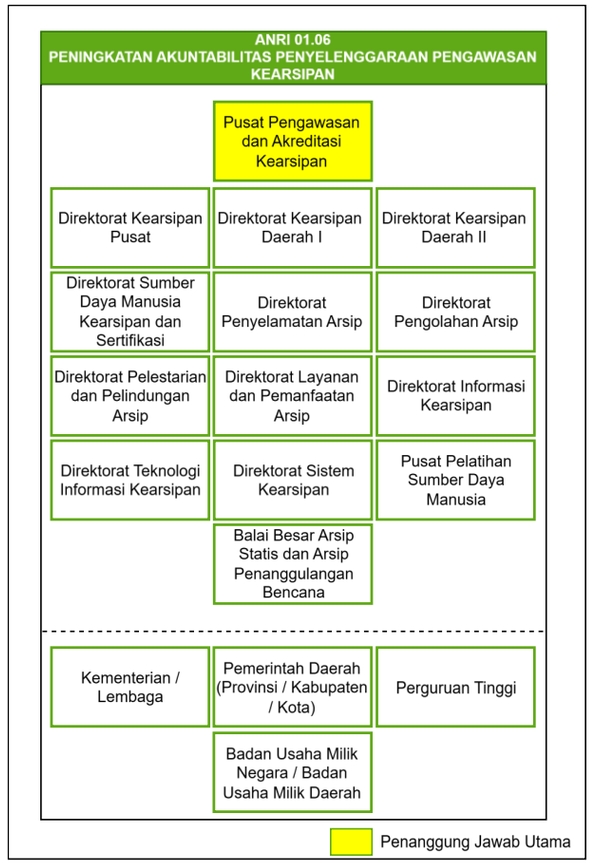

Gambar 40. Peta Relasi Proses Bisnis Level 2 (ANRI 01.06 Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pengawasan Kearsipan)

I.C.6.i. Peta Lintas Fungsi (ANRI 01.06.PLF.01 Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pengawasan Kearsipan).

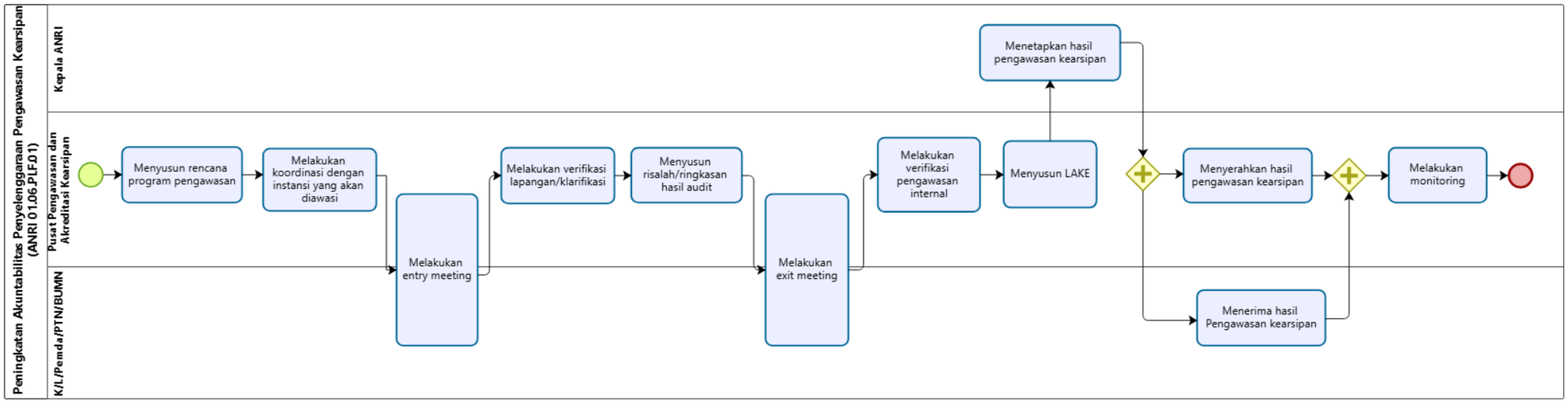

Gambar 41. Peta Lintas Fungsi (ANRI 01.06.PLF.01 Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pengawasan Kearsipan)

I.A.7. Proses Bisnis Level 2 (ANRI 01.07 Peningkatan Jaminan Mutu Akreditasi Kearsipan);

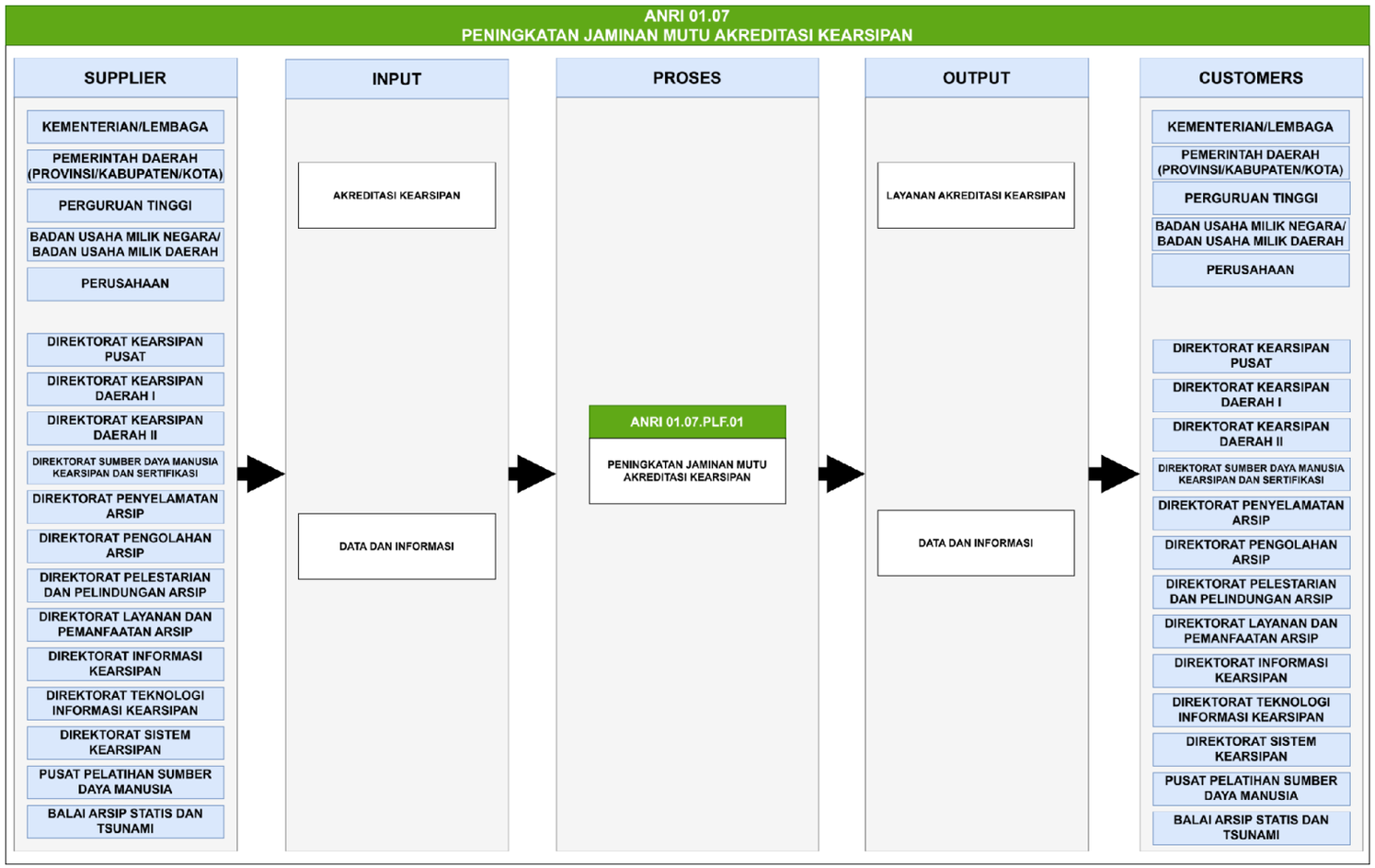

Gambar 42. Proses Bisnis Level 2 (ANRI 01.07 Peningkatan Jaminan Mutu Akreditasi Kearsipan)

I.B.7. Peta Relasi Proses Bisnis Level 2 (ANRI 01.07 Peningkatan Jaminan Mutu Akreditasi Kearsipan);

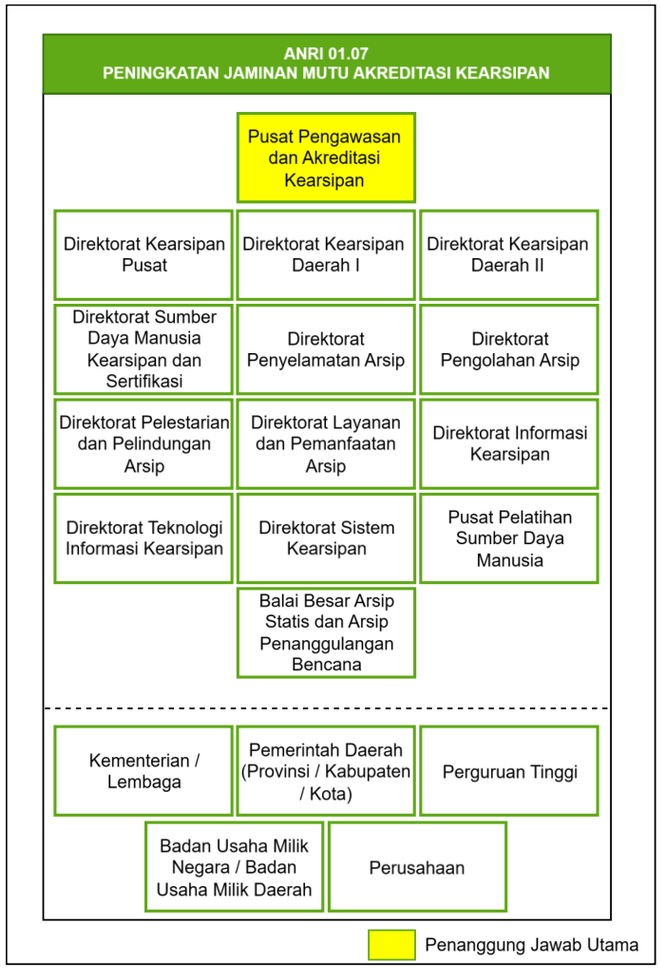

Gambar 43. Peta Relasi Proses Bisnis Level 2 (ANRI 01.07 Peningkatan Jaminan Mutu Akreditasi Kearsipan)

I.C.7.i. Peta Lintas Fungsi (ANRI 01.07.PLF.01 Peningkatan Jaminan Mutu Akreditasi Kearsipan).

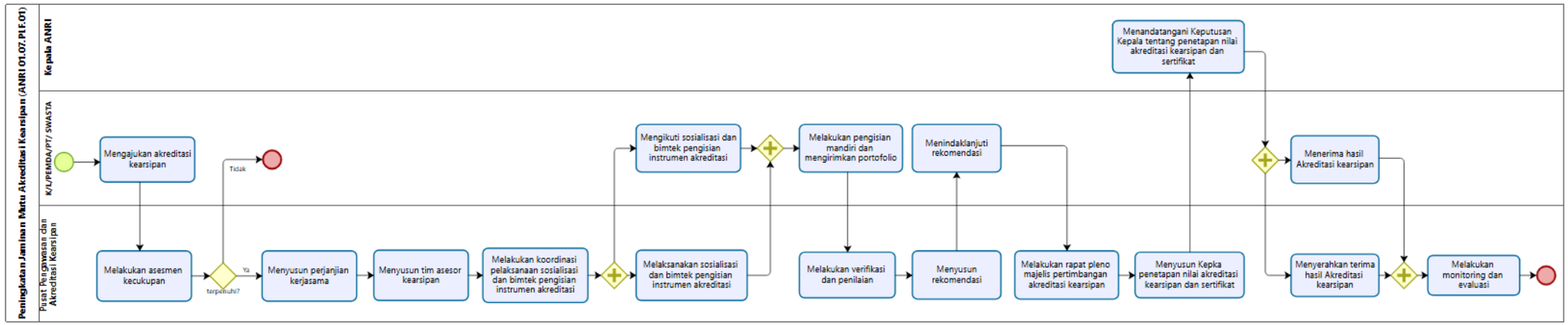

Gambar 44. Peta Lintas Fungsi (ANRI 01.07.PLF.01 Peningkatan Jaminan Mutu Akreditasi Kearsipan)

I.A.8. Proses Bisnis Level 2 (ANRI 01.08 Peningkatan Kualitas Kebijakan Kearsipan Nasional);

Gambar 45. Proses Bisnis Level 2 (ANRI 01.08 Peningkatan Kualitas Kebijakan Kearsipan Nasional)

I.B.8. Peta Relasi Proses Bisnis Level 2 (ANRI 01.08 Peningkatan Kualitas Kebijakan Kearsipan Nasional);

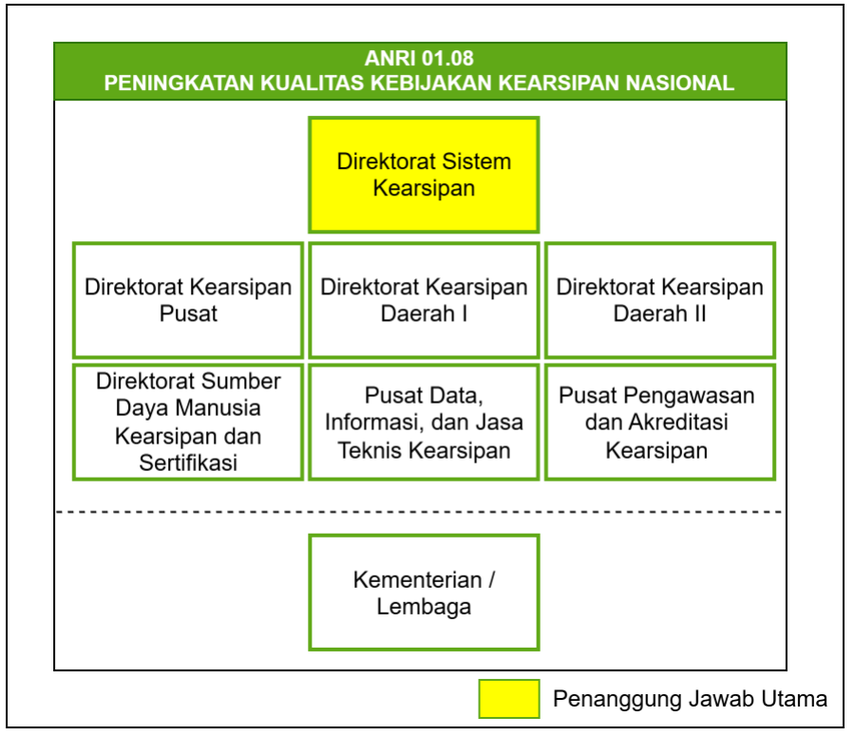

Gambar 46. Peta Relasi Proses Bisnis Level 2 (ANRI 01.08 Peningkatan Kualitas Kebijakan Kearsipan Nasional)

I.C.8.i. Peta Lintas Fungsi (ANRI 01.08.PLF.01 Penjaminan Mutu Kebijakan);

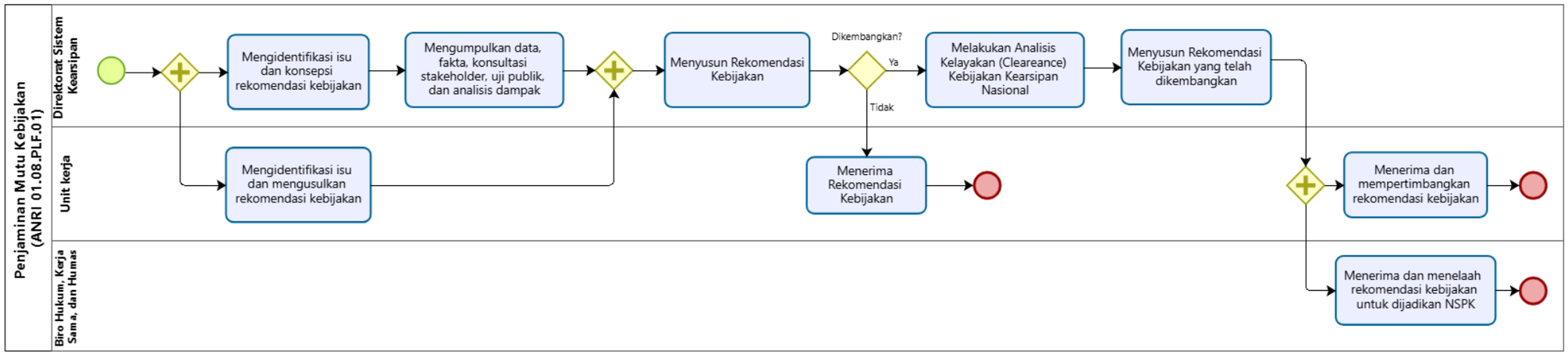

Gambar 47. Peta Lintas Fungsi (ANRI 01.08.PLF.01 Penjaminan Mutu Kebijakan)

I.C.8.ii. Peta Lintas Fungsi (ANRI 01.08.PLF.02 Pengelolaan Standarisasi Kebijakan);

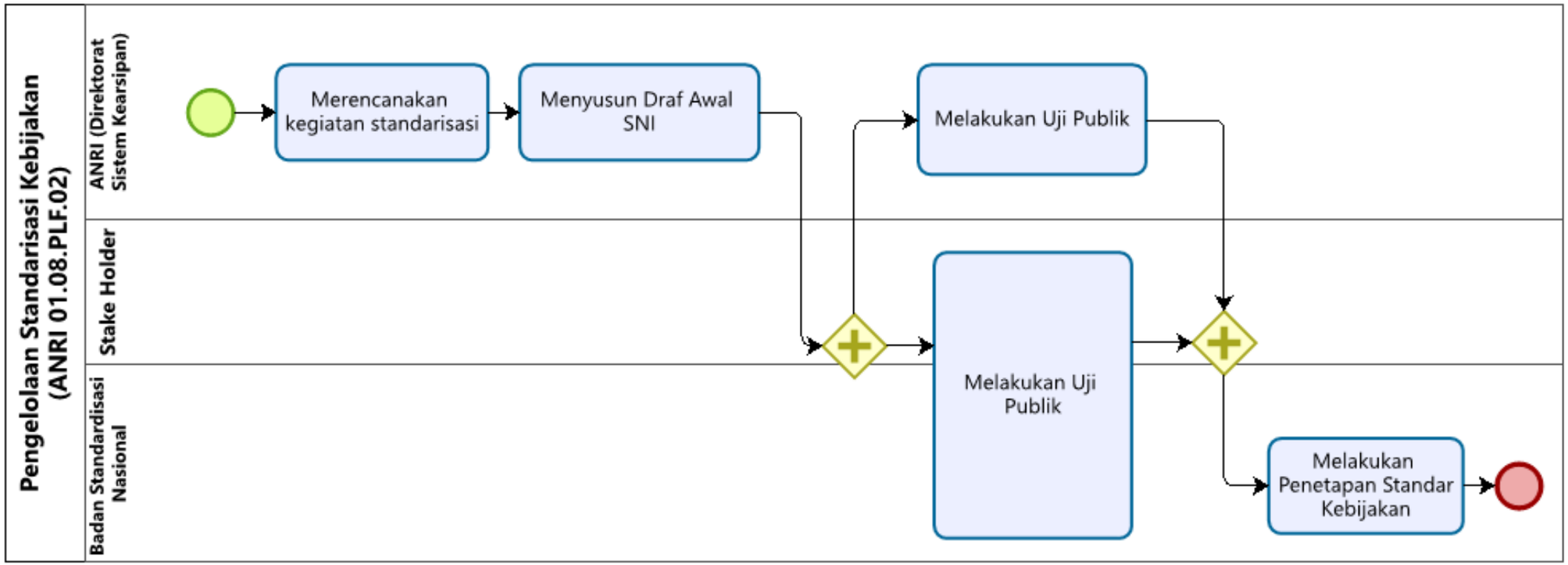

Gambar 48. Peta Lintas Fungsi (ANRI 01.08.PLF.02 Pengelolaan Standarisasi Kebijakan)

I.C.8.iii. Peta Lintas Fungsi (ANRI 01.08.PLF.03 Pengelolaan Manajemen Pengetahuan Kearsipan).

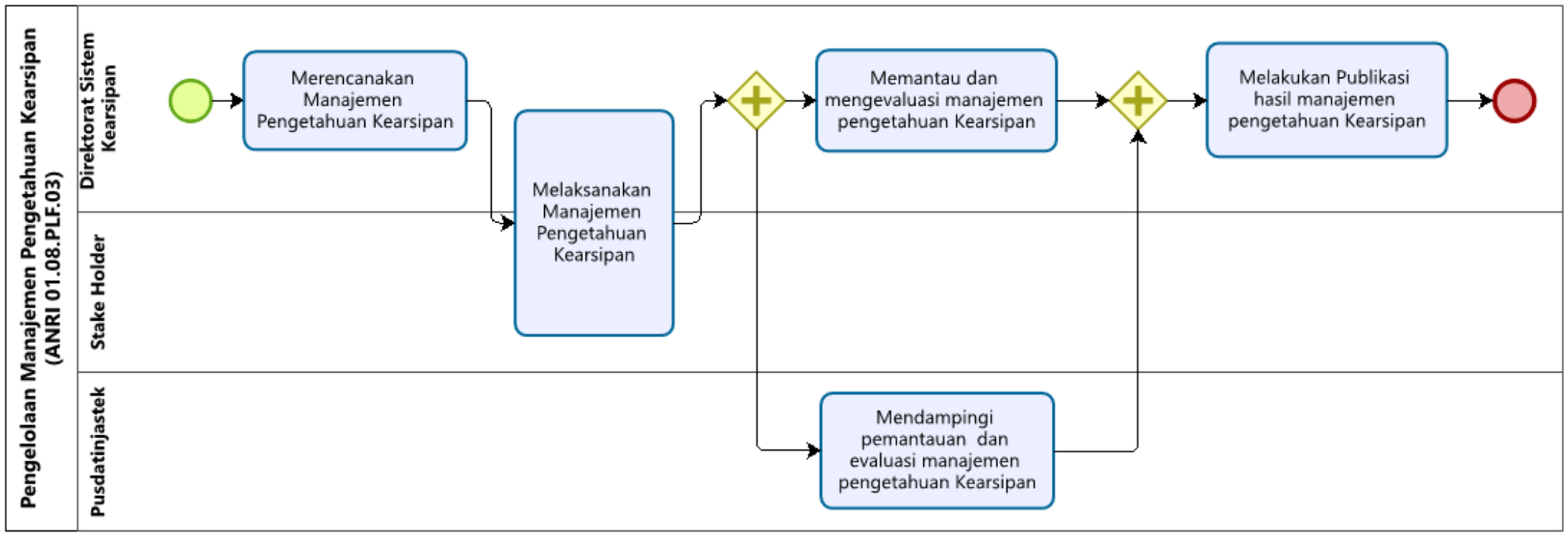

Gambar 49. Peta Lintas Fungsi (ANRI 01.08.PLF.03 Pengelolaan Manajemen Pengetahuan Kearsipan)

II.A. Proses Bisnis Level 1 (ANRI 02 Percepatan Digitalisasi Arsip);

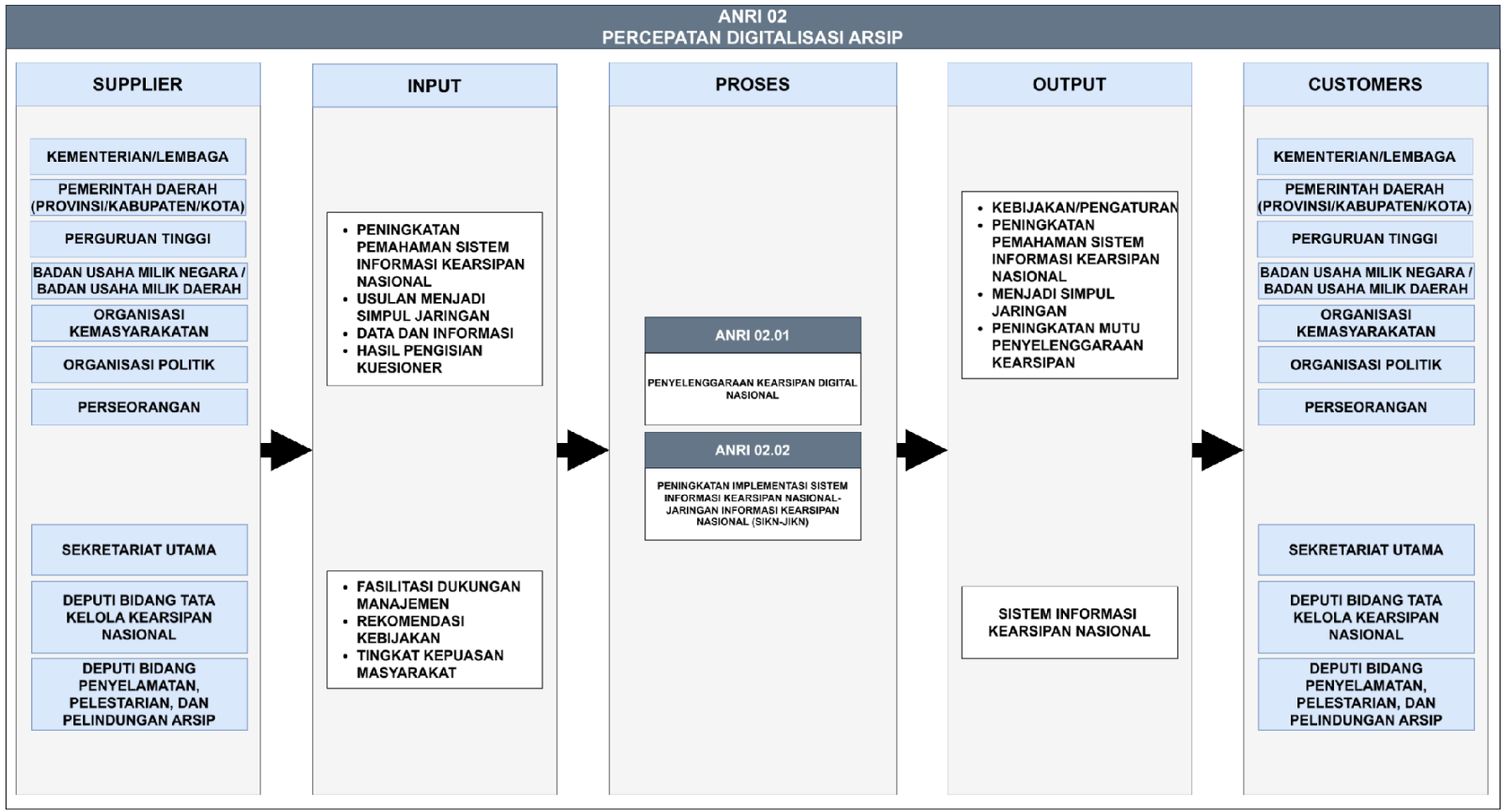

Gambar 50. Proses Bisnis Level 1 (ANRI 02. Percepatan Digitalisasi Arsip)

II.B. Peta Relasi Proses Bisnis Level 1 (ANRI 02. Percepatan Digitalisasi Arsip);

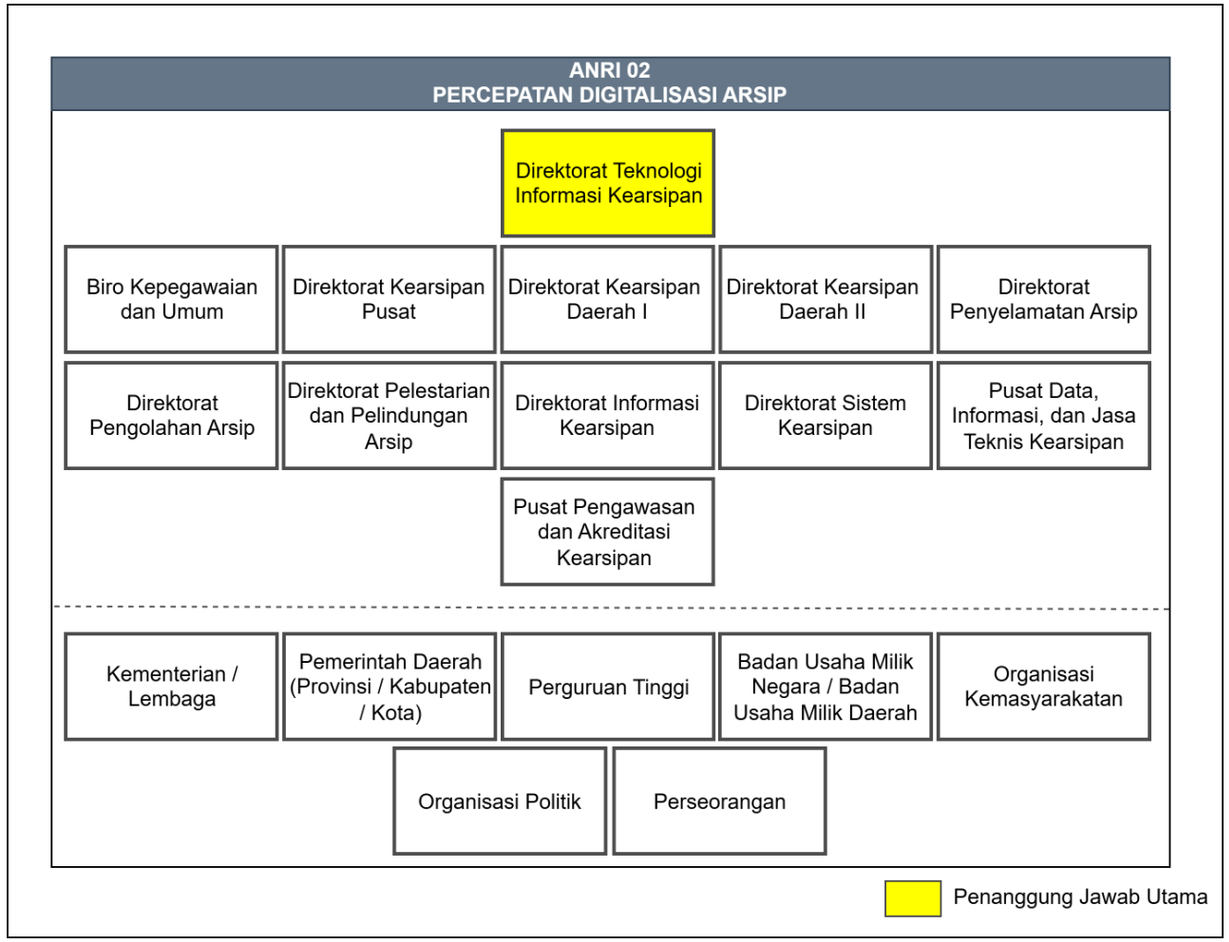

Gambar 51. Peta Relasi Proses Bisnis Level 1 (ANRI 02. Percepatan Digitalisasi Arsip)

II.A.1. Proses Bisnis Level 2 (ANRI 02.01 Penyelenggaraan Kearsipan Digital Nasional);

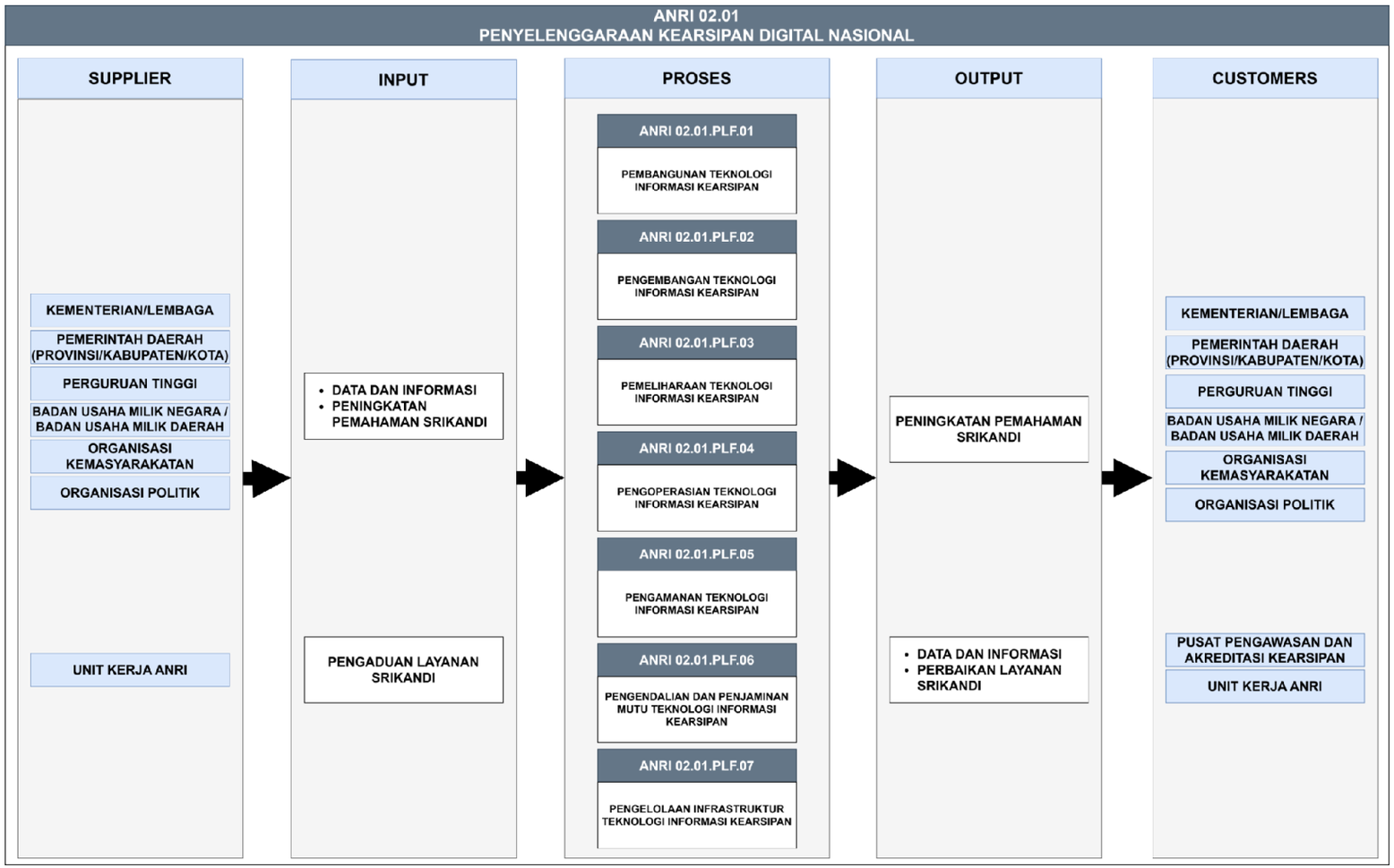

Gambar 52. Proses Bisnis Level 2 (ANRI 02.01 Penyelenggaraan Kearsipan Digital Nasional)

II.B.1. Peta Relasi Proses Bisnis Level 2 (ANRI 02.01 Penyelenggaraan Kearsipan Digital Nasional);

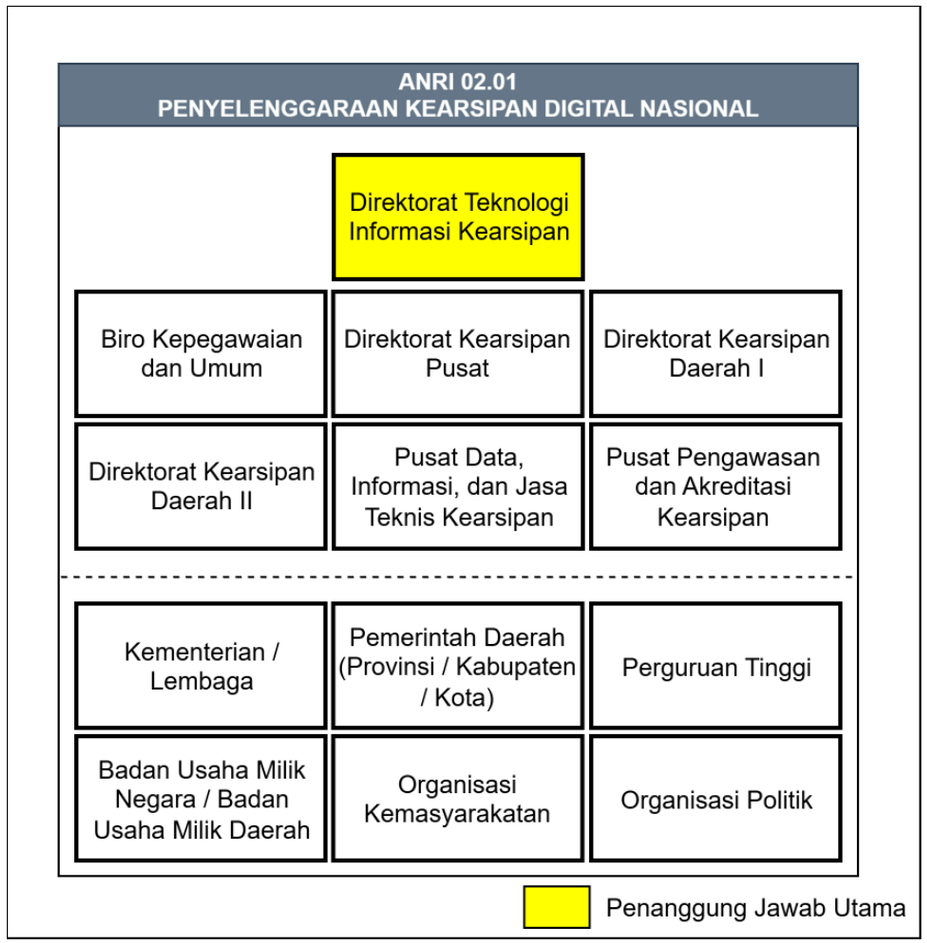

Gambar 53. Peta Relasi Proses Bisnis Level 2 (ANRI 02.01 Penyelenggaraan Kearsipan Digital Nasional)

II.C.1.i. Peta Lintas Fungsi (ANRI 02.01.PLF.01 Pembangunan Teknologi Informasi Kearsipan);

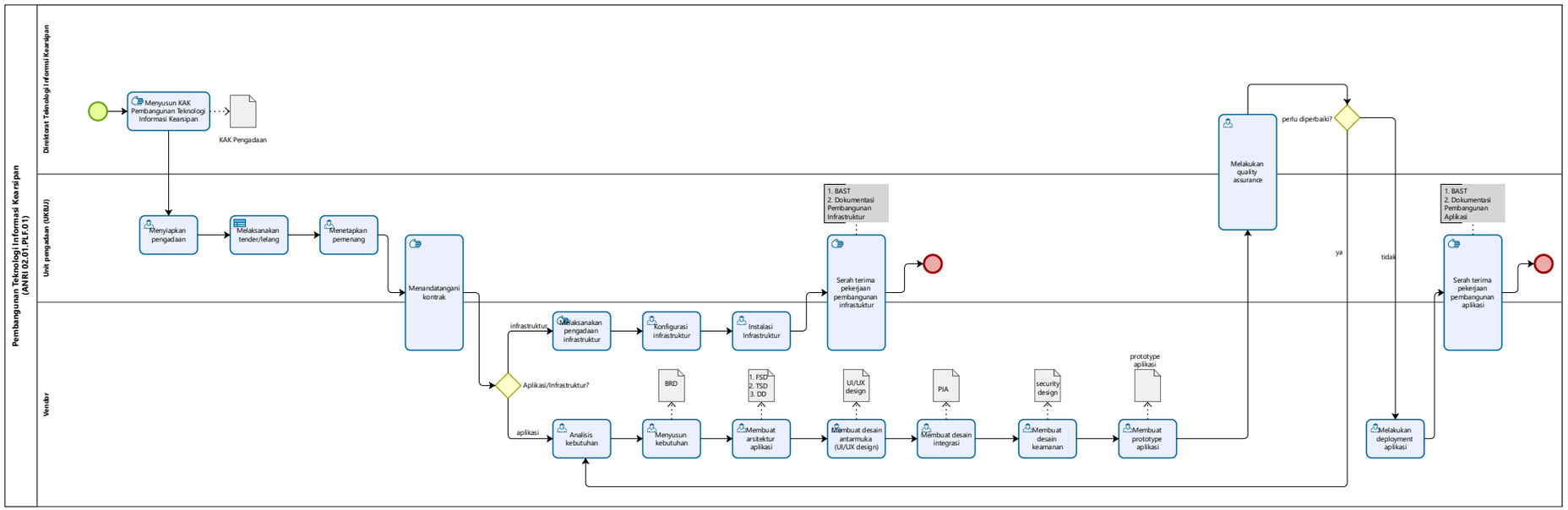

Gambar 54. Peta Lintas Fungsi (ANRI 02.01.PLF.01 Pembangunan Teknologi Informasi Kearsipan)

II.C.1.ii. Peta Lintas Fungsi (ANRI 02.01.PLF.02 Pengembangan Teknologi Informasi Kearsipan);

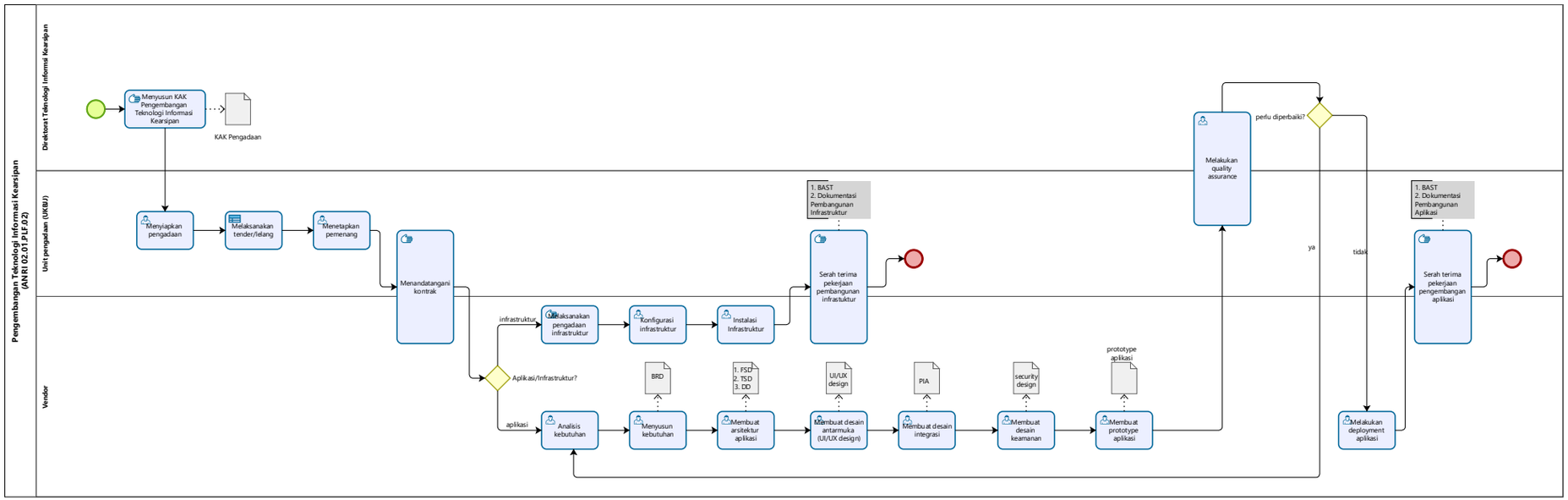

Gambar 55. Peta Lintas Fungsi (ANRI 02.01.PLF.02 Pengembangan Teknologi Informasi Kearsipan)

II.C.1.iii. Peta Lintas Fungsi (ANRI 02.01.PLF.03 Pemeliharaan Teknologi Informasi Kearsipan);

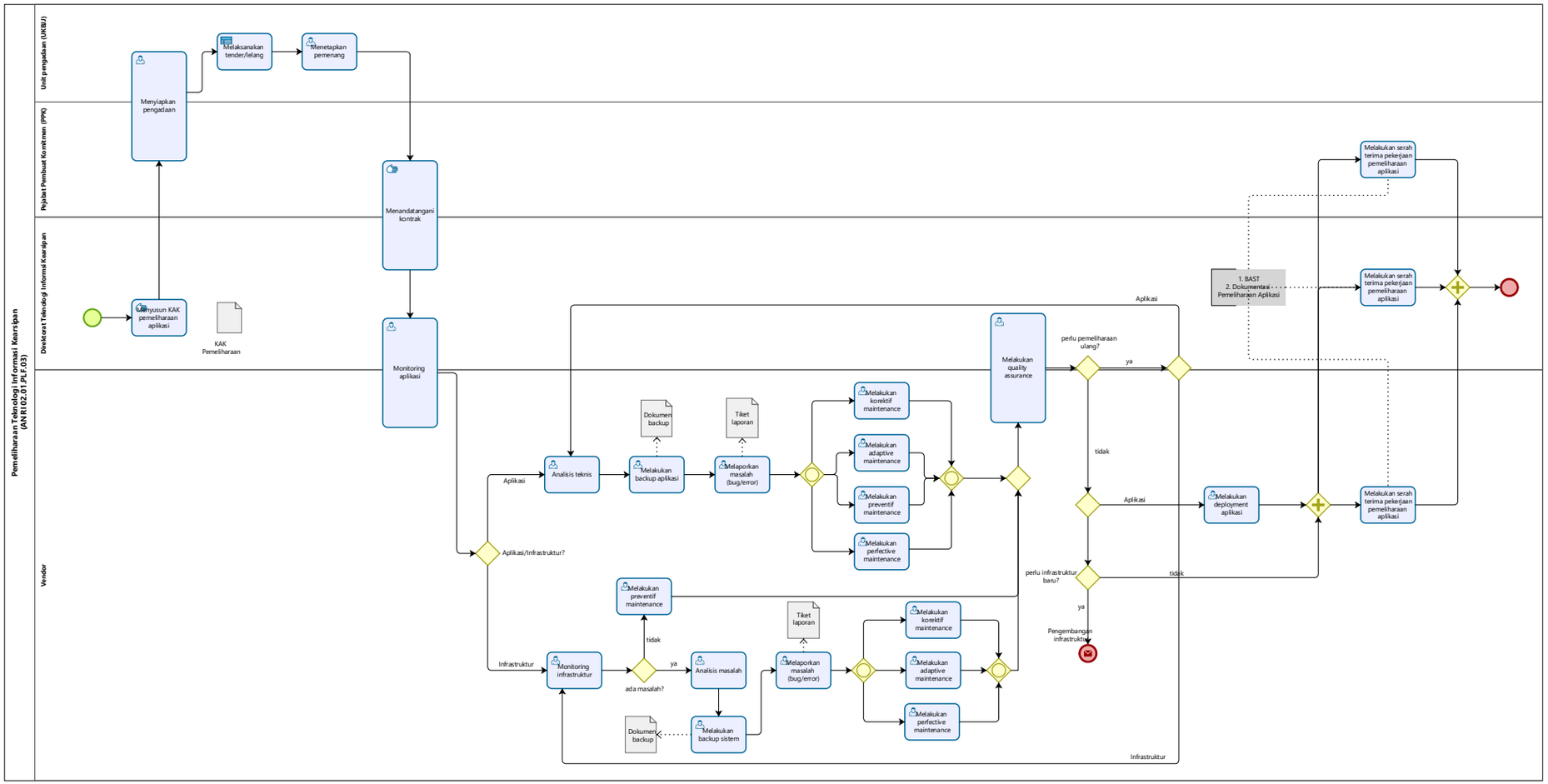

Gambar 56. Peta Lintas Fungsi (ANRI 02.01.PLF.03 Pemeliharaan Teknologi Informasi Kearsipan)

II.C.1.iv. Peta Lintas Fungsi (ANRI 02.01.PLF.04 Pengoperasian Teknologi Informasi Kearsipan);

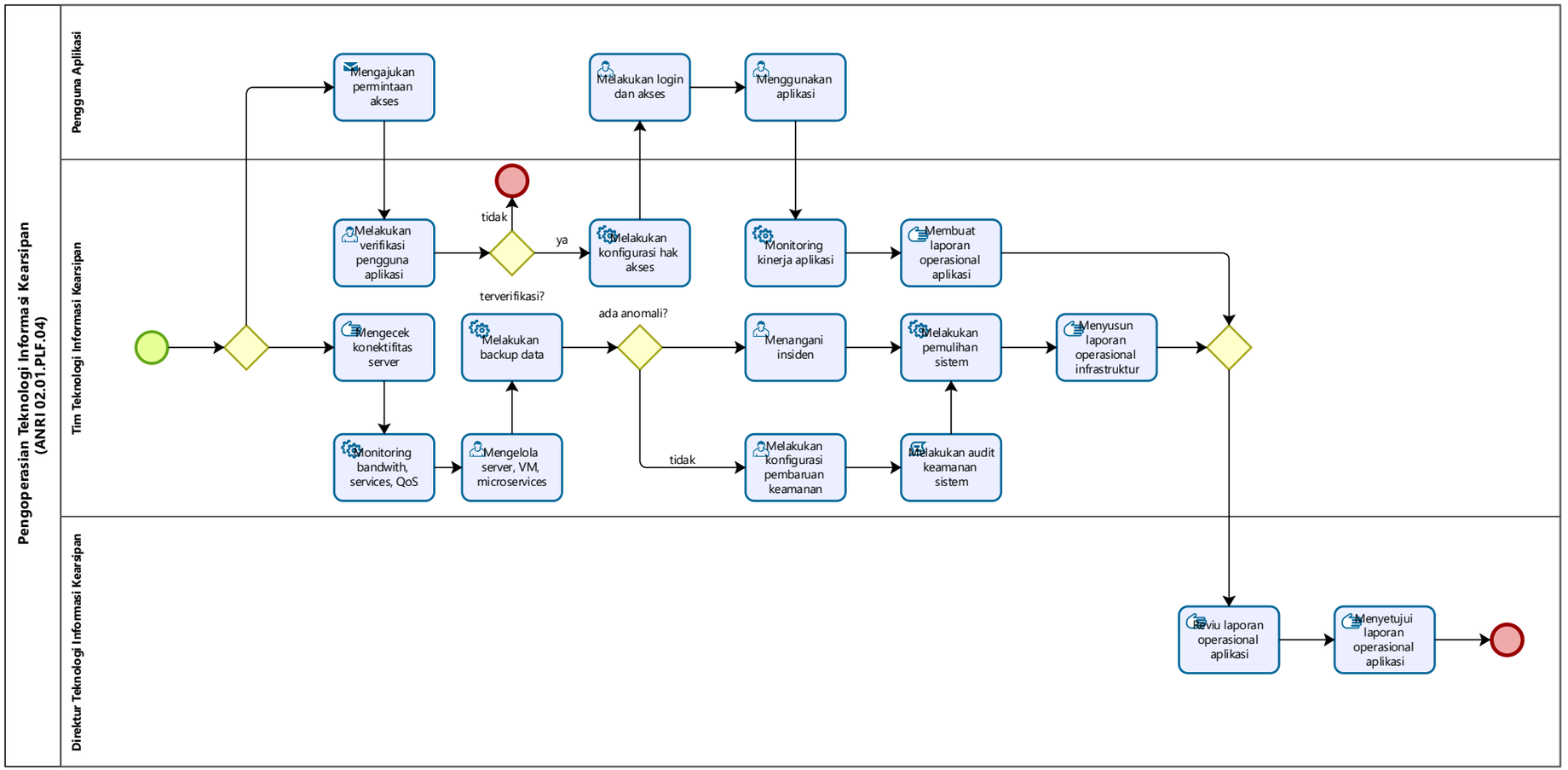

Gambar 57. Peta Lintas Fungsi (ANRI 02.01.PLF.04 Pengoperasian Teknologi Informasi Kearsipan)

II.C.1.v. Peta Lintas Fungsi (ANRI 02.01.PLF.05 Pengamanan Teknologi Informasi Kearsipan);

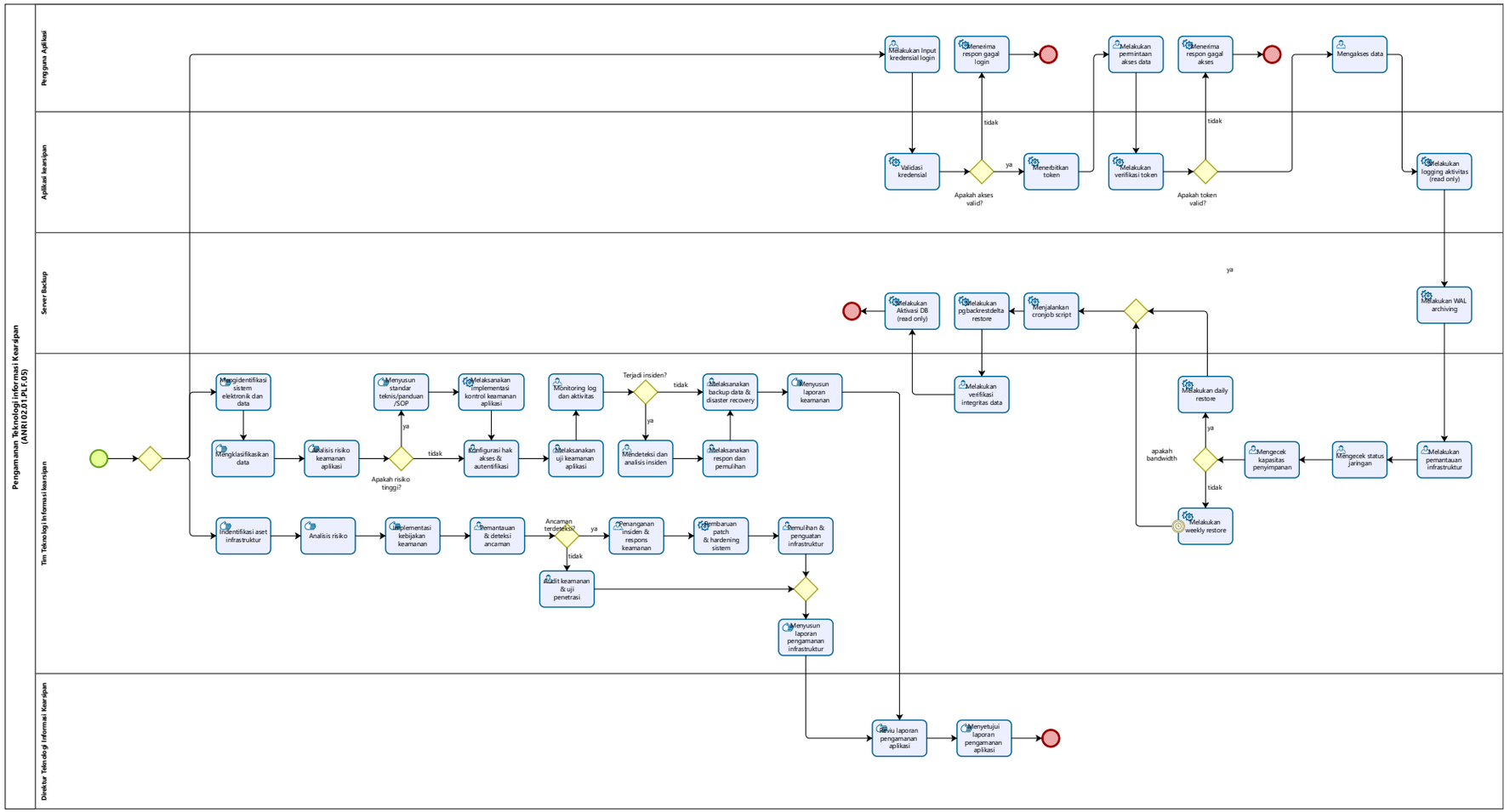

Gambar 58. Peta Lintas Fungsi (ANRI 02.01.PLF.05 Pengamanan Teknologi Informasi Kearsipan)

II.C.1.vi. Peta Lintas Fungsi (ANRI 02.01.PLF.06 Pengendalian dan Penjaminan Mutu Teknologi Informasi Kearsipan);

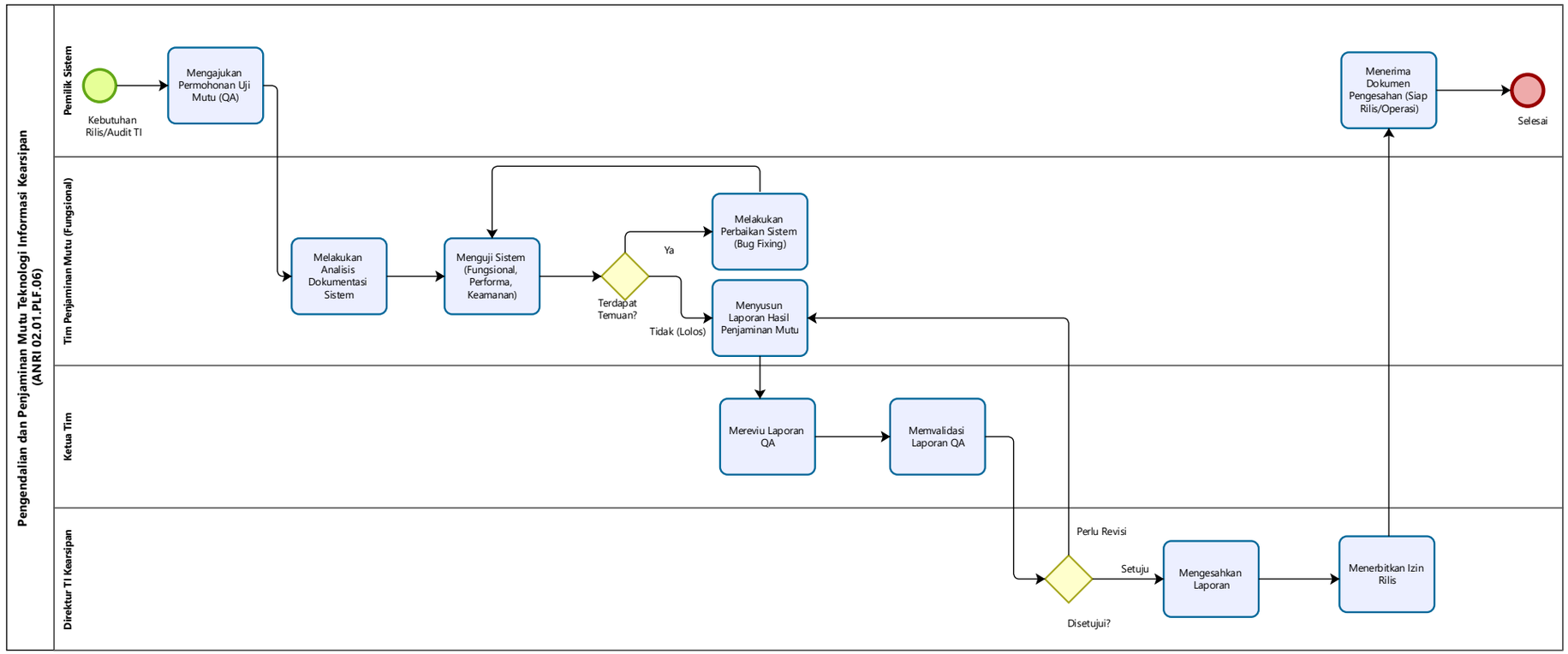

Gambar 59. Peta Lintas Fungsi (ANRI 02.01.PLF.06 Pengendalian dan Penjaminan Mutu Teknologi Informasi Kearsipan)

II.C.1.vii. Peta Lintas Fungsi (ANRI 02.01.PLF.07 Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi Kearsipan).

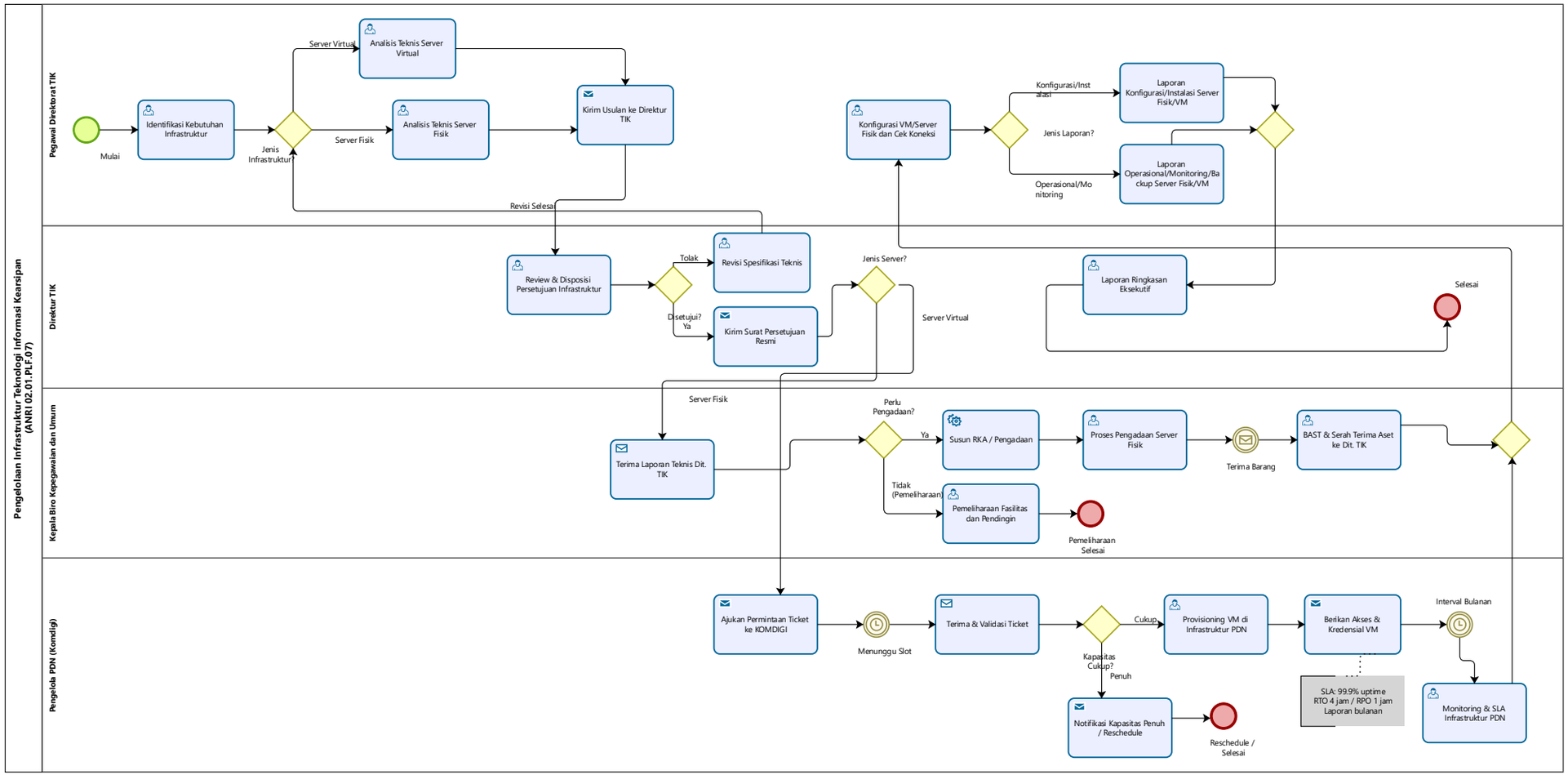

Gambar 60. Peta Lintas Fungsi (ANRI 02.01.PLF.07 Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi Kearsipan)

II.A.2. Proses Bisnis Level 2 (ANRI 02.02 Peningkatan Implementasi SIKN-JIKN);

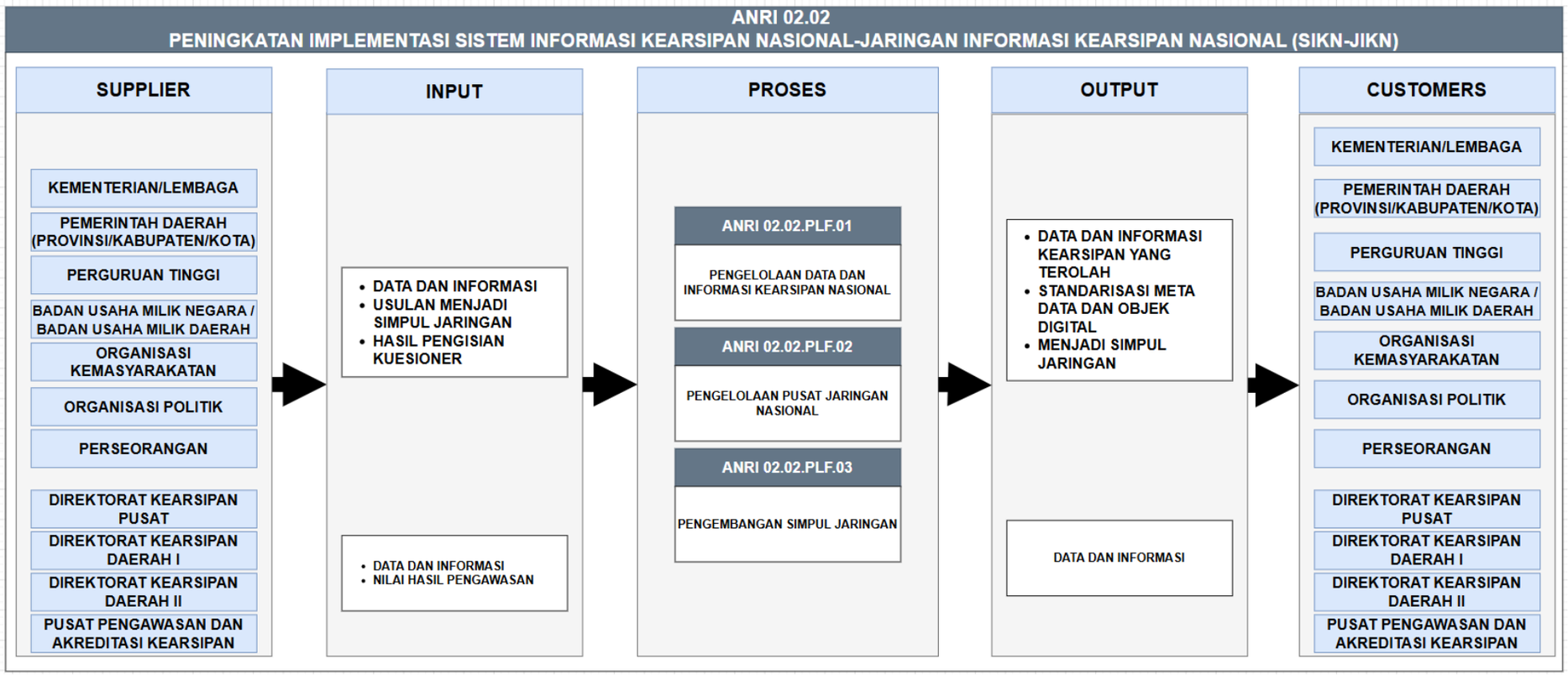

Gambar 61. Proses Bisnis Level 2 (ANRI 02.02 Peningkatan Implementasi SIKN-JIKN)

II.B.2. Peta Relasi Proses Bisnis Level 2 (ANRI 02.02 Peningkatan Implementasi SIKN-JIKN);

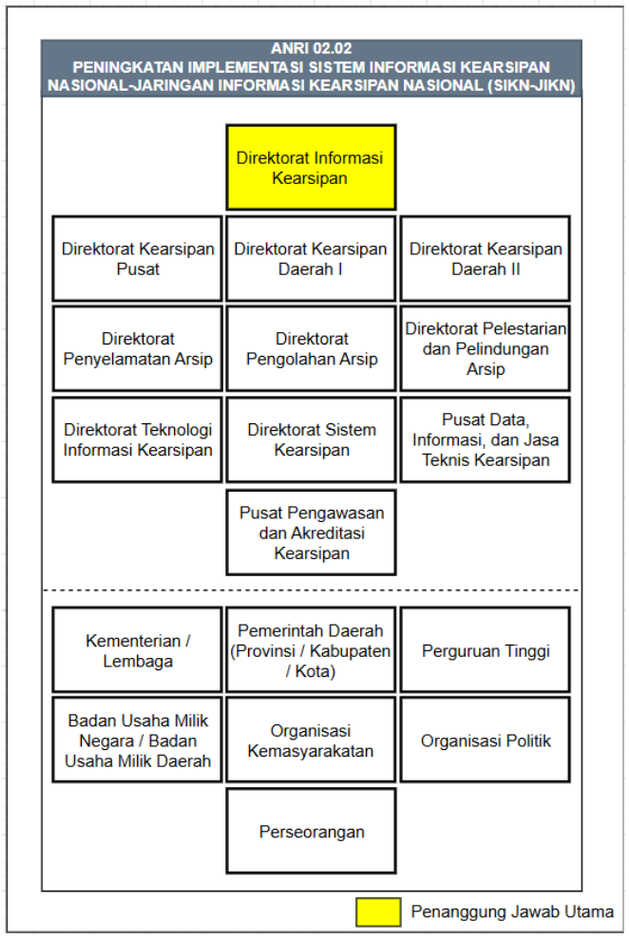

Gambar 62. Peta Relasi Proses Bisnis Level 2 (ANRI 02.02 Peningkatan Implementasi SIKN-JIKN)

II.C.2.i. Peta Lintas Fungsi (ANRI 02.02.PLF.01 Pengelolaan Data dan Informasi Kearsipan Nasional);

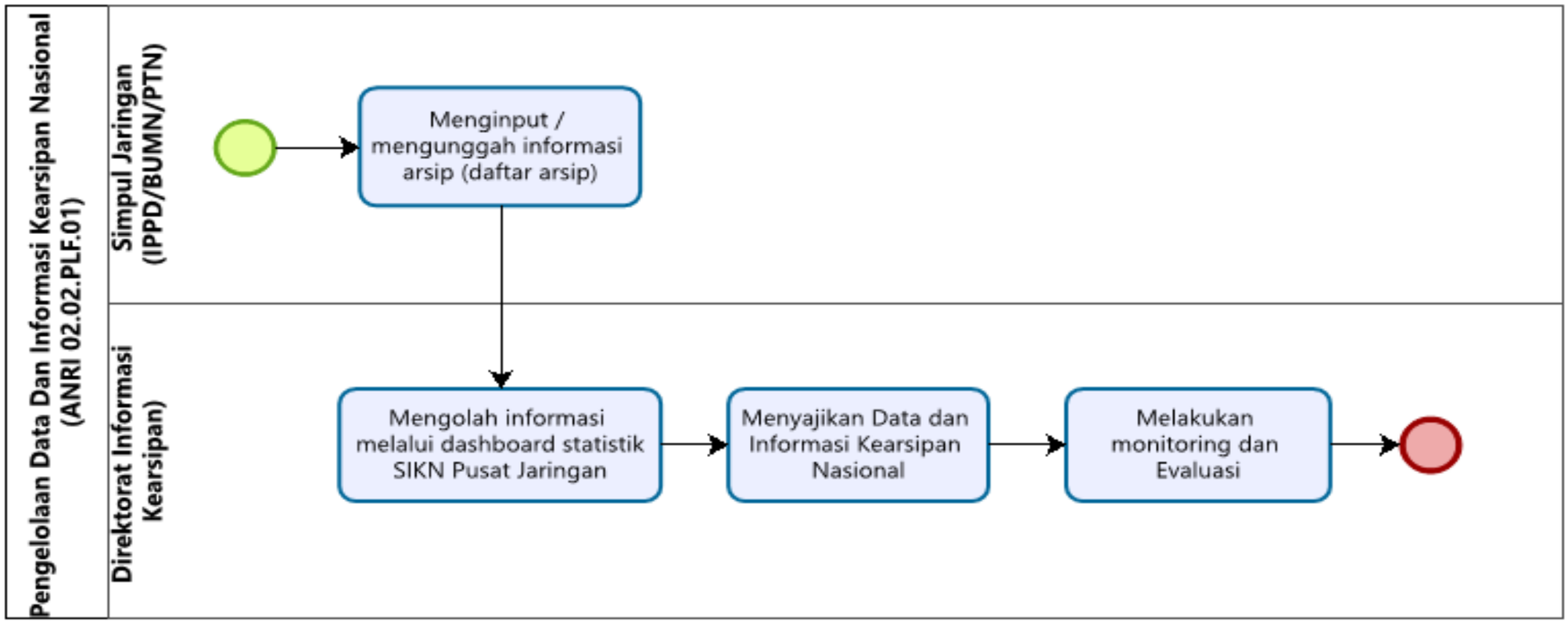

Gambar 63. Peta Lintas Fungsi (ANRI 02.02.PLF.01 Pengelolaan Data dan Informasi Kearsipan Nasional)

II.C.2.ii. Peta Lintas Fungsi (ANRI 02.02.PLF.02 Pengelolaan Pusat Jaringan Nasional);

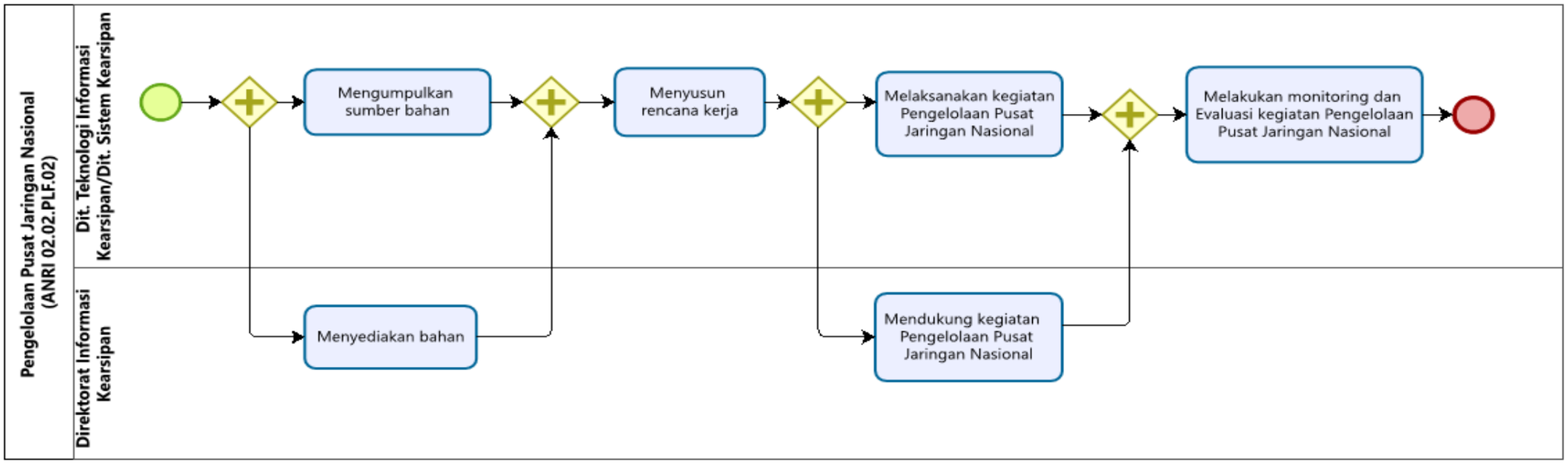

Gambar 64. Peta Lintas Fungsi (ANRI 02.02.PLF.02 Pengelolaan Pusat Jaringan Nasional)

II.C.2.iii. Peta Lintas Fungsi (ANRI 02.02.PLF.03 Pengembangan Simpul Jaringan).

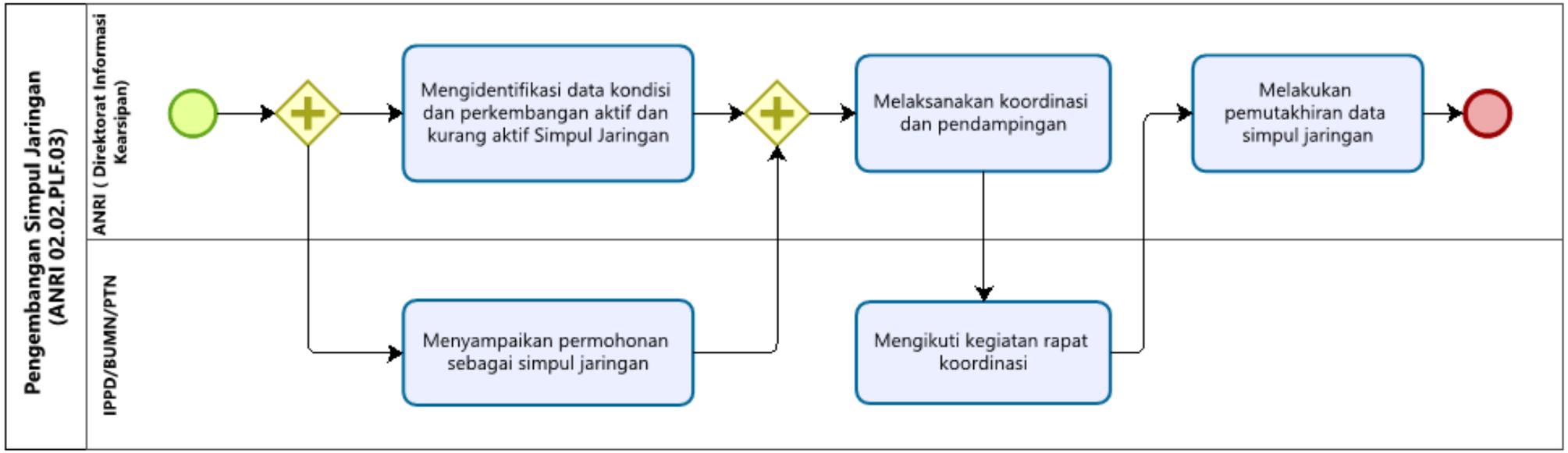

Gambar 65. Peta Lintas Fungsi (ANRI 02.02.PLF. 03 Pengembangan Simpul Jaringan)

III.A. Proses Bisnis Level 1 (ANRI 03 Peningkatan Ketersediaan Arsip secara Nasional);

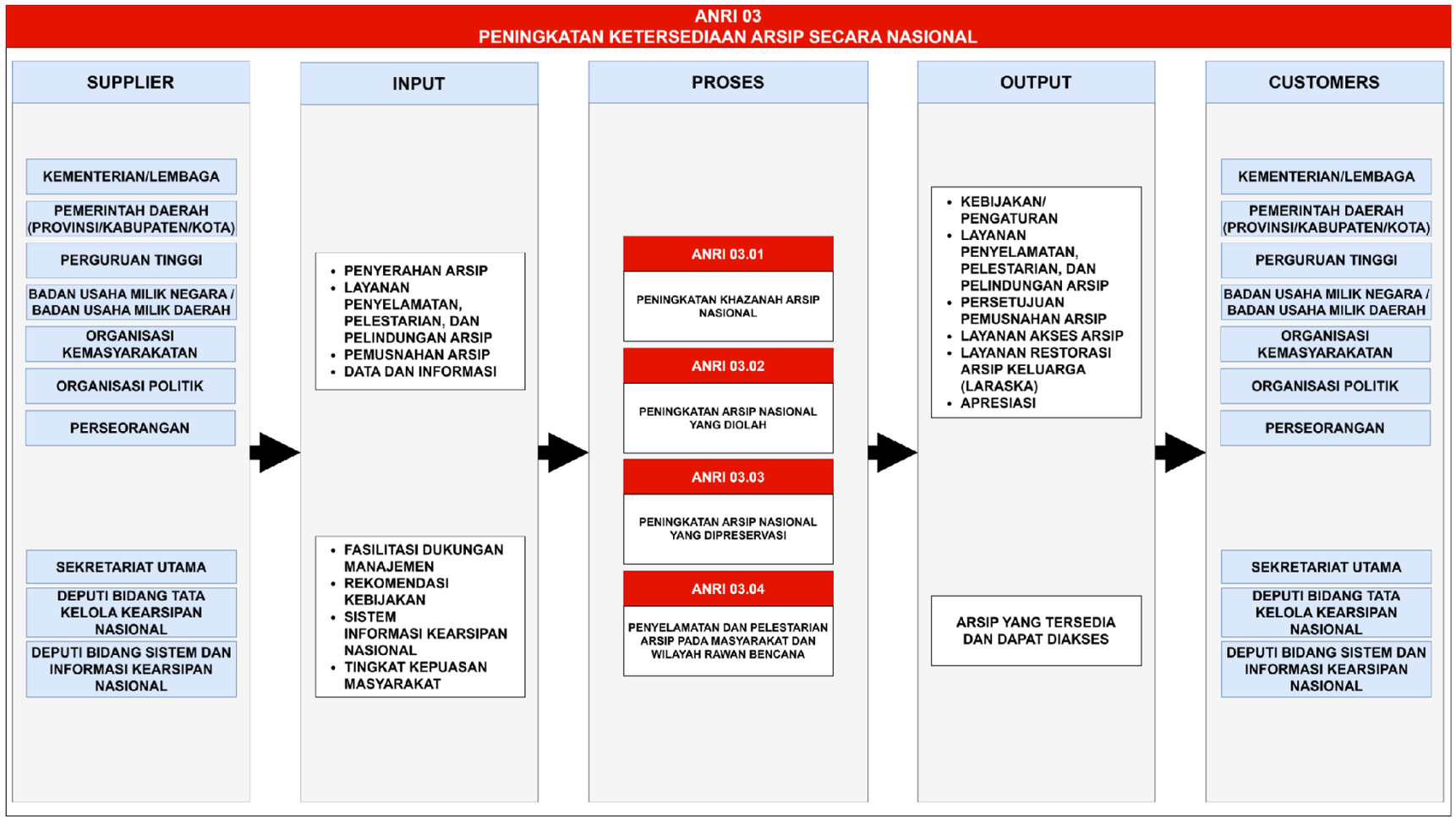

Gambar 66. Proses Bisnis Level 1 (ANRI 03 Peningkatan Ketersediaan Arsip secara Nasional)

III.B. Peta Relasi Proses Bisnis Level 1 (ANRI 03 Peningkatan Ketersediaan Arsip secara Nasional);

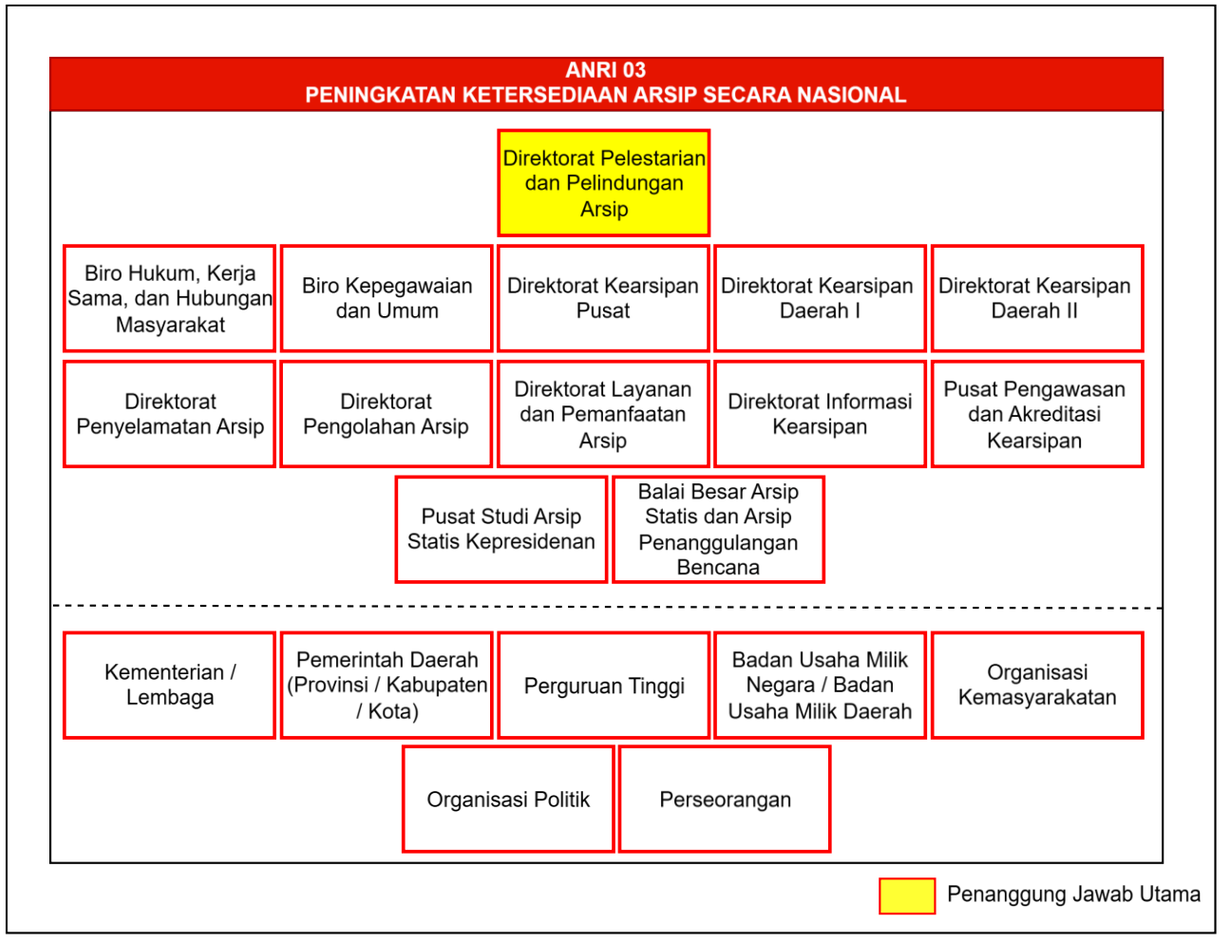

Gambar 67. Peta Relasi Proses Bisnis Level 1 (ANRI 03 Peningkatan Ketersediaan Arsip secara Nasional)

III.A.1. Proses Bisnis Level 2 (ANRI 03.01 Peningkatan Khazanah Arsip Nasional);

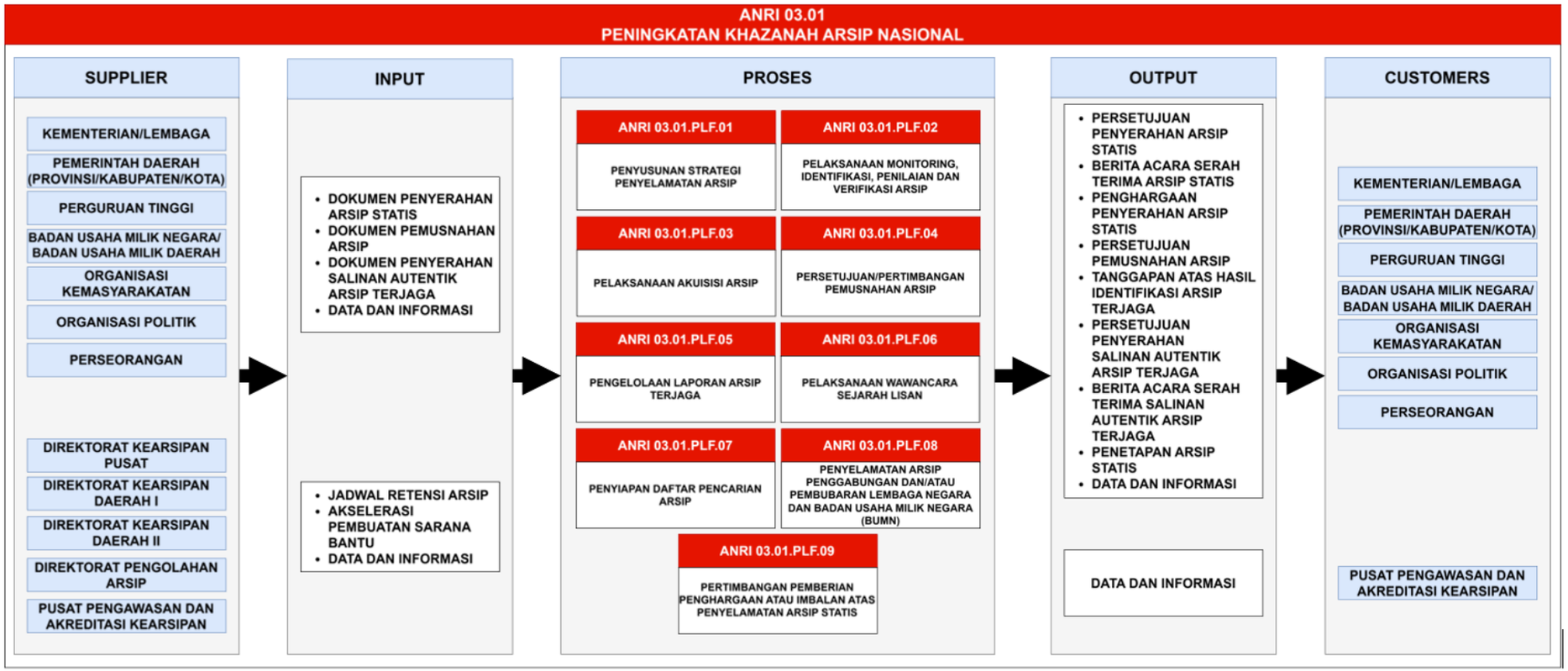

Gambar 68. Proses Bisnis Level 2 (ANRI 03.01 Peningkatan Khazanah Arsip Nasional)

III.B.1. Peta Relasi Proses Bisnis Level 2 (ANRI 03.01 Peningkatan Khazanah Arsip Nasional);

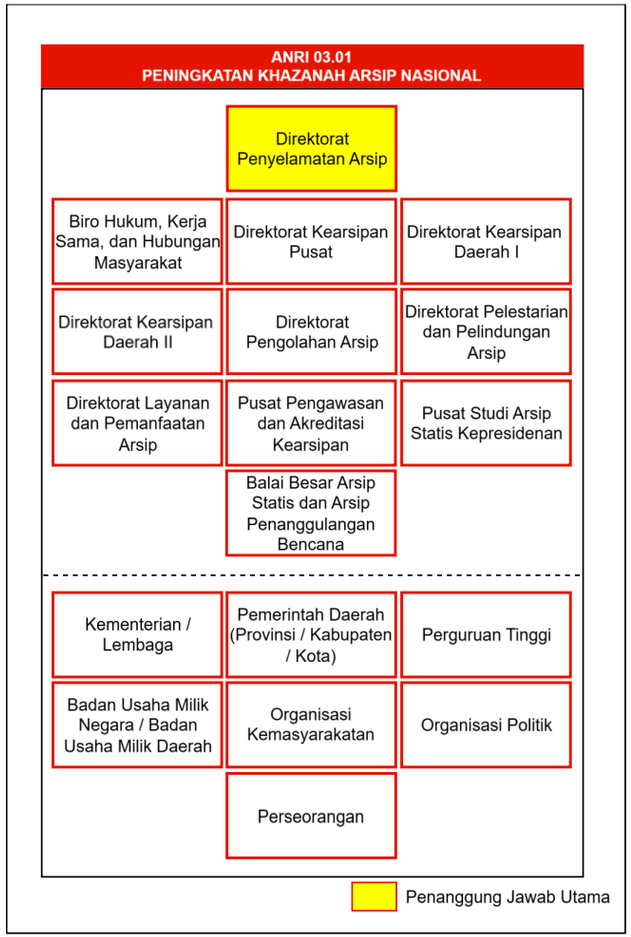

Gambar 69. Peta Relasi Proses Bisnis Level 2 (ANRI 03.01 Peningkatan Khazanah Arsip Nasional)

III.C.1.i. Peta Lintas Fungsi (ANRI 03.01.PLF.01 Penyusunan Strategi Penyelamatan Arsip);

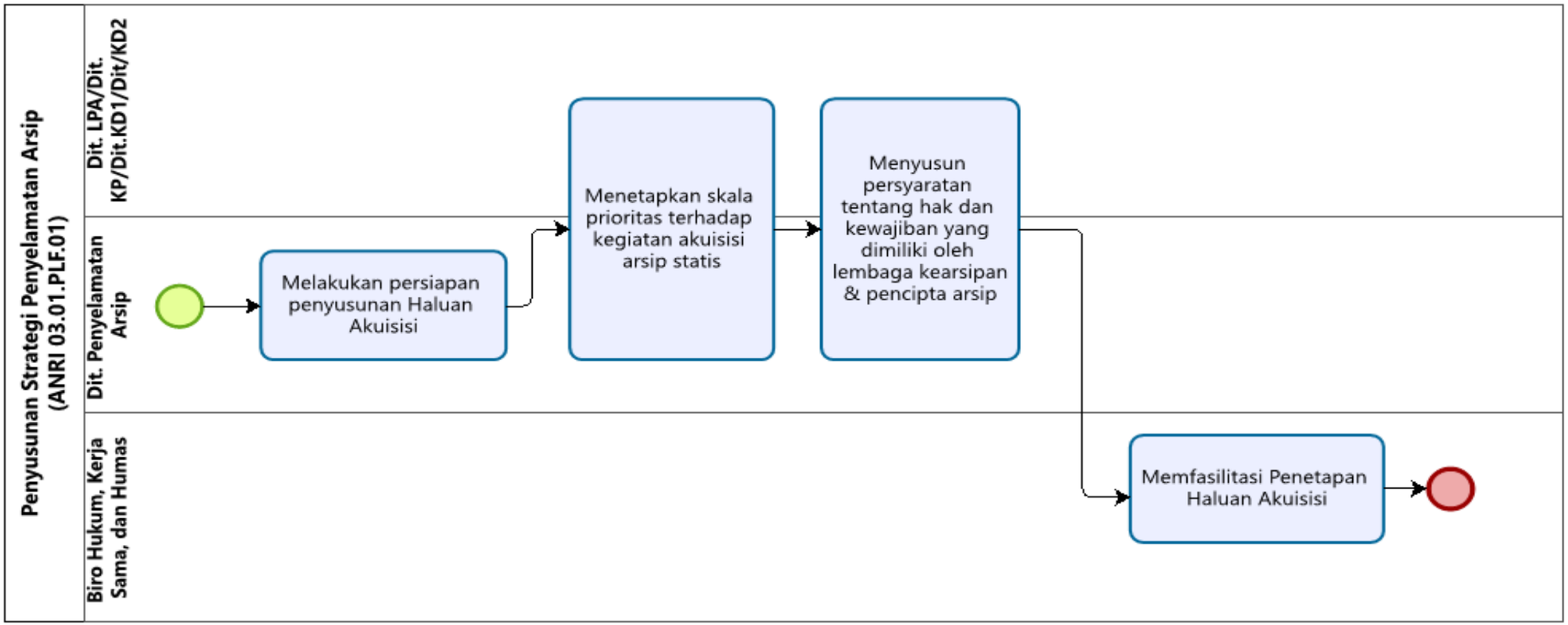

Gambar 70. Peta Lintas Fungsi (ANRI 03.01.PLF.01 Penyusunan Strategi Penyelamatan Arsip)

III.C.1.ii. Peta Lintas Fungsi (ANRI 03.01.PLF.02 Pelaksanaan Monitoring, Identifikasi, Penilaian dan Verifikasi Arsip);

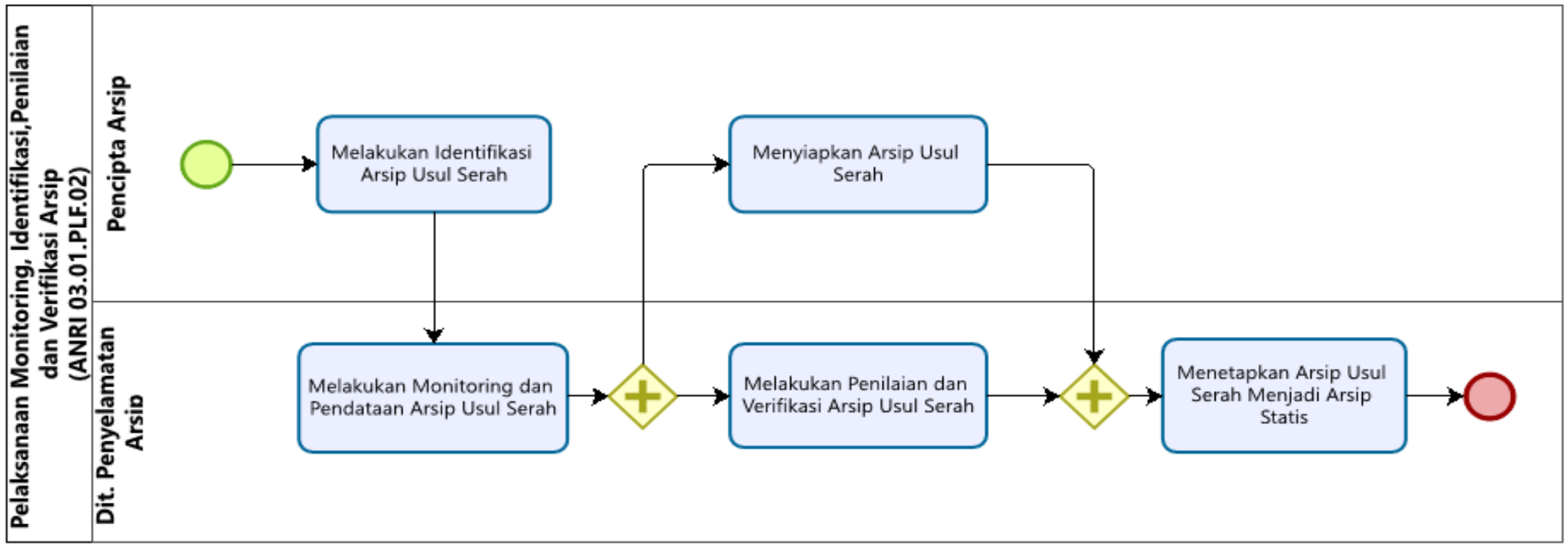

Gambar 71. Peta Lintas Fungsi (ANRI 03.01.PLF.02 Pelaksanaan Monitoring, Identifikasi, Penilaian dan Verifikasi Arsip)

III.C.1.iii. Peta Lintas Fungsi (ANRI 03.01.PLF.03 Pelaksanaan Akuisisi Arsip);

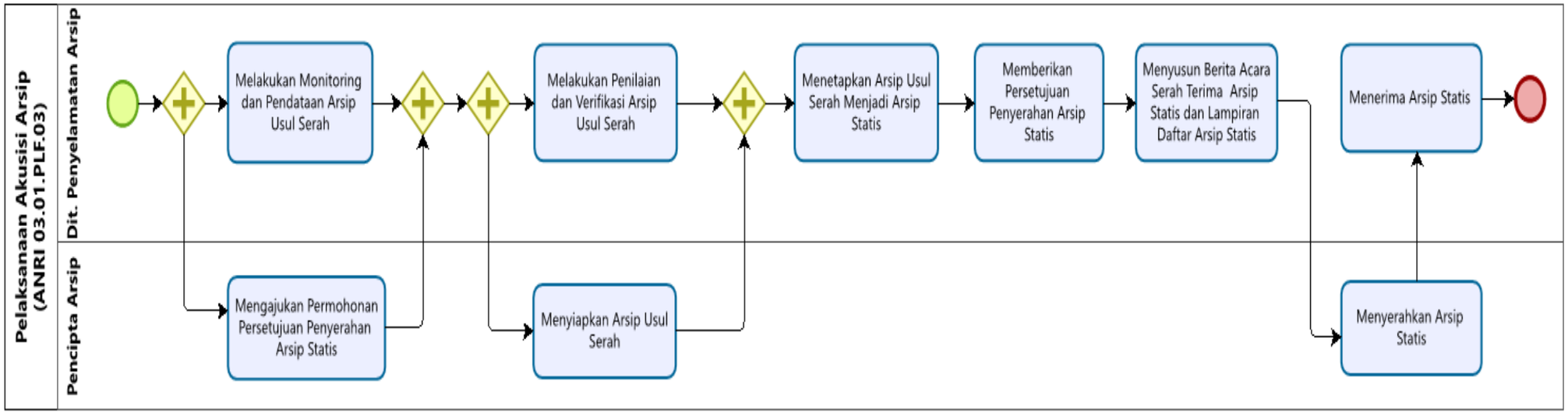

Gambar 72. Peta Lintas Fungsi (ANRI 03.01.PLF.03 Pelaksanaan Akuisisi Arsip)

III.C.1.iv. Peta Lintas Fungsi (ANRI 03.01.PLF.04 Persetujuan/Pertimbangan Pemusnahan Arsip);

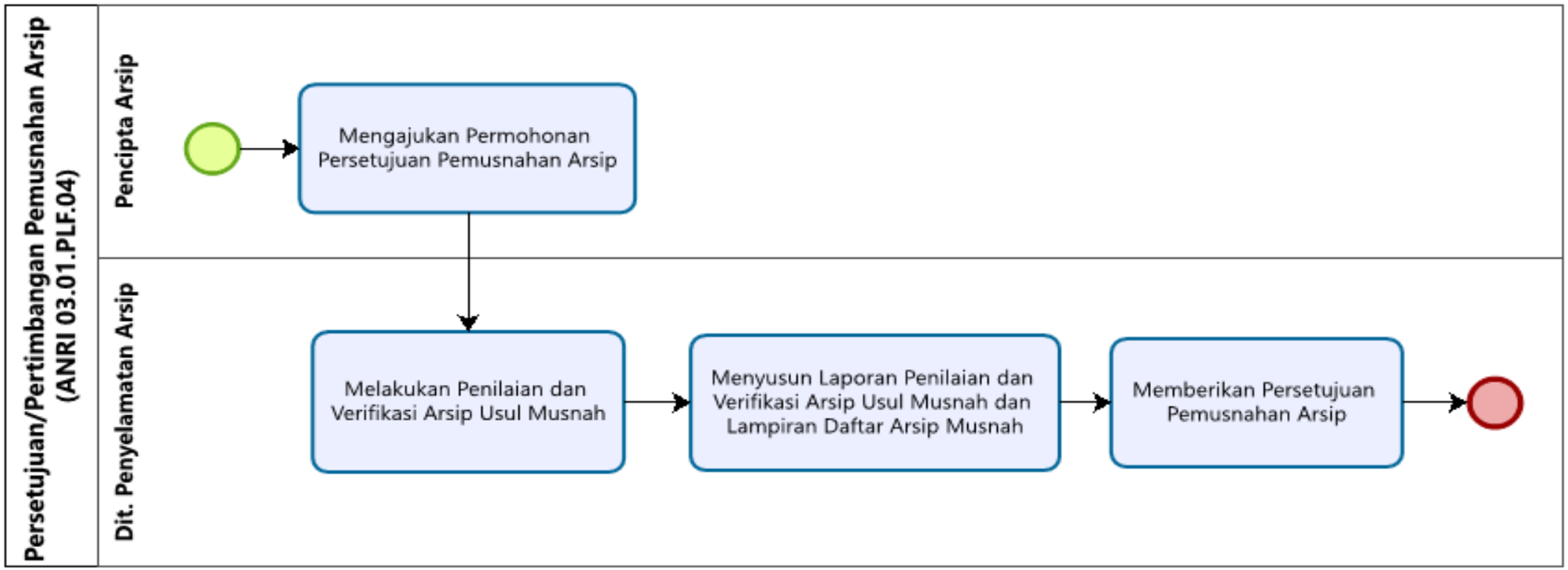

Gambar 73. Peta Lintas Fungsi (ANRI 03.01.PLF.04 Persetujuan/Pertimbangan Pemusnahan Arsip)

III.C.1.v. Peta Lintas Fungsi (ANRI 03.01.PLF.05 Pengelolaan Laporan Arsip Terjaga);

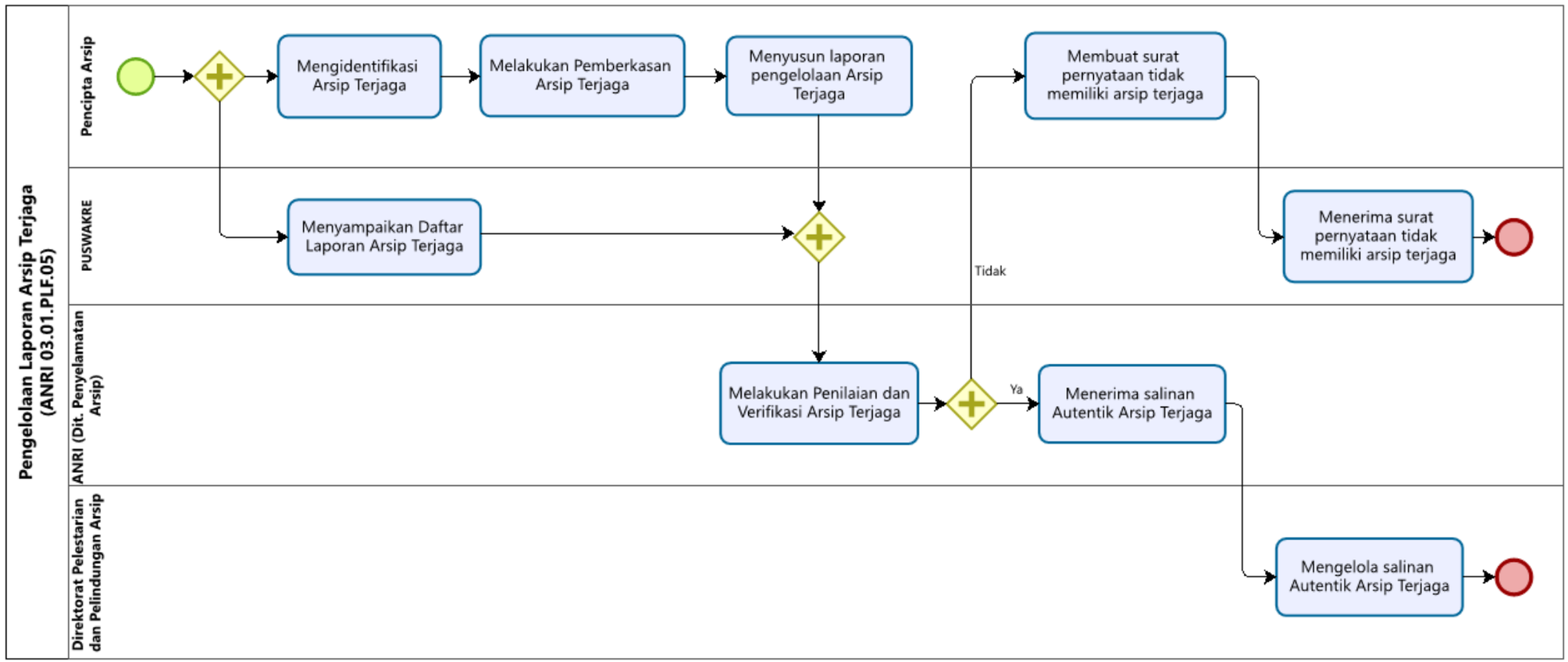

Gambar 74. Peta Lintas Fungsi (ANRI 03.01.PLF.05 Pengelolaan Laporan Arsip Terjaga)

III.C.1.vi. Peta Lintas Fungsi (ANRI 03.01.PLF.06 Pelaksanaan Wawancara Sejarah Lisan);

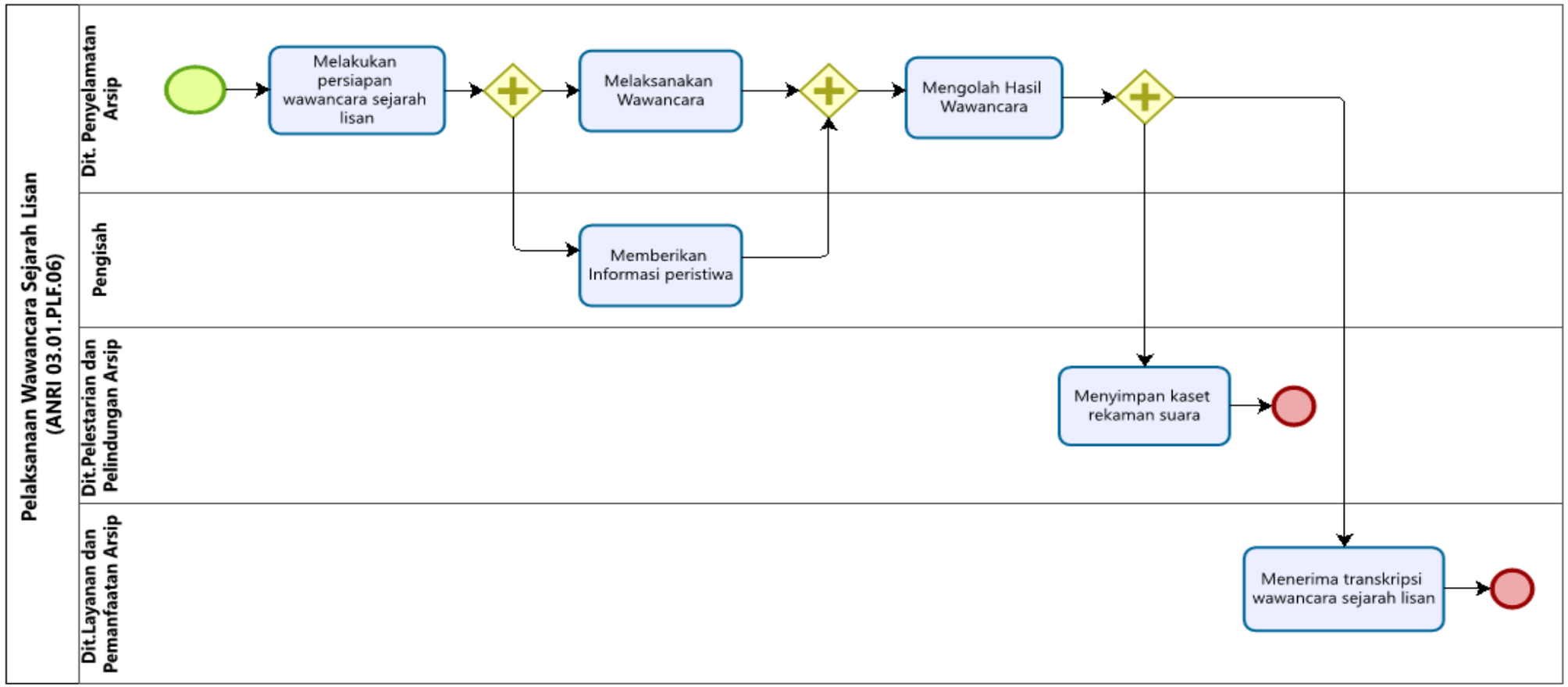

Gambar 75. Peta Lintas Fungsi (ANRI 03.01.PLF.06 Pelaksanaan Wawancara Sejarah Lisan)

III.C.1.vii. Peta Lintas Fungsi (ANRI 03.01.PLF.07 Penyiapan Daftar Pencarian Arsip);

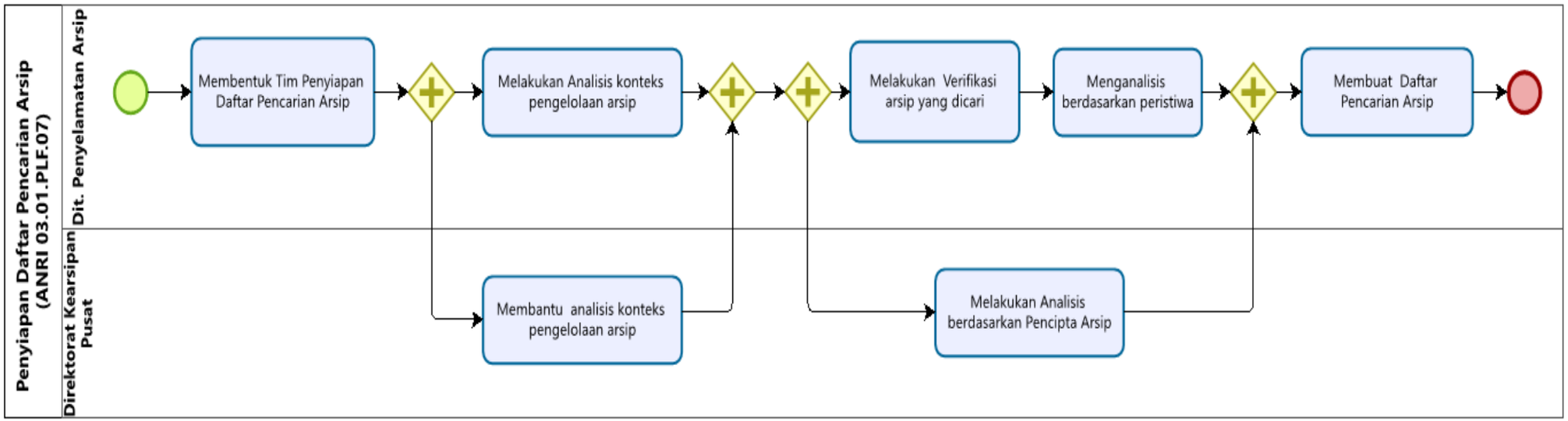

Gambar 76. Peta Lintas Fungsi (ANRI 03.01.PLF.07 Penyiapan Daftar Pencarian Arsip)

III.C.1.viii. Peta Lintas Fungsi (ANRI 03.01.PLF.08 Penyelamatan Arsip Penggabungan dan/atau Pembubaran Lembaga Negara dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN));

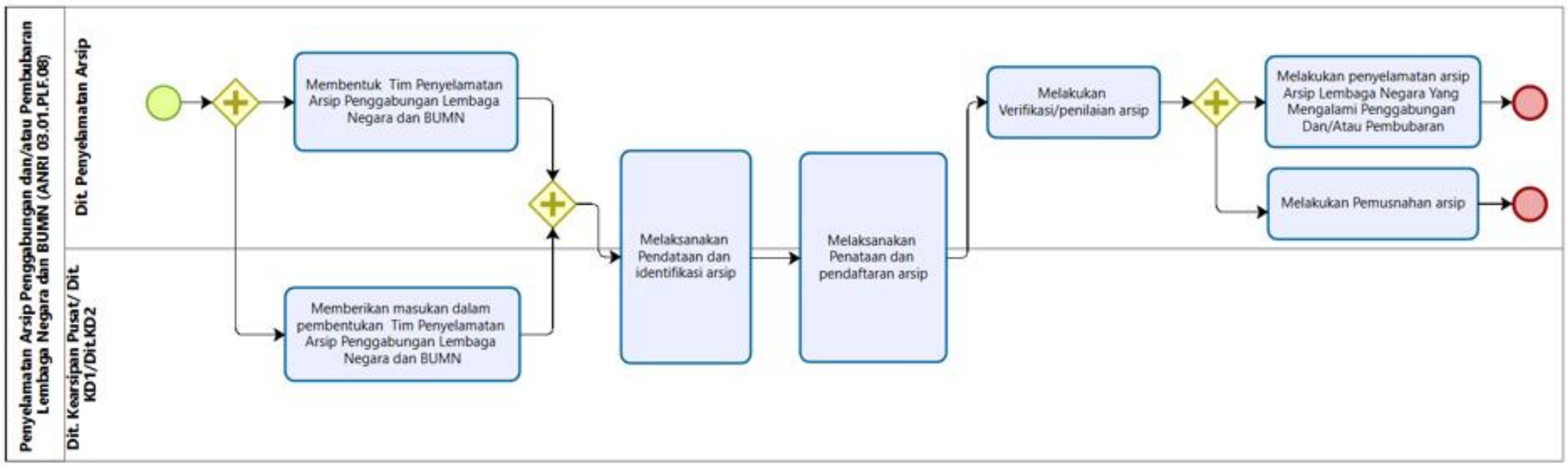

Gambar 77. Peta Lintas Fungsi (ANRI 03.01.PLF.08 Penyelamatan Arsip Penggabungan dan/atau Pembubaran Lembaga Negara dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN))

III.C.1.ix. Peta Lintas Fungsi (ANRI 03.01.PLF.09 Pertimbangan Pemberian Penghargaan atau Imbalan atas Penyelamatan Arsip Statis).

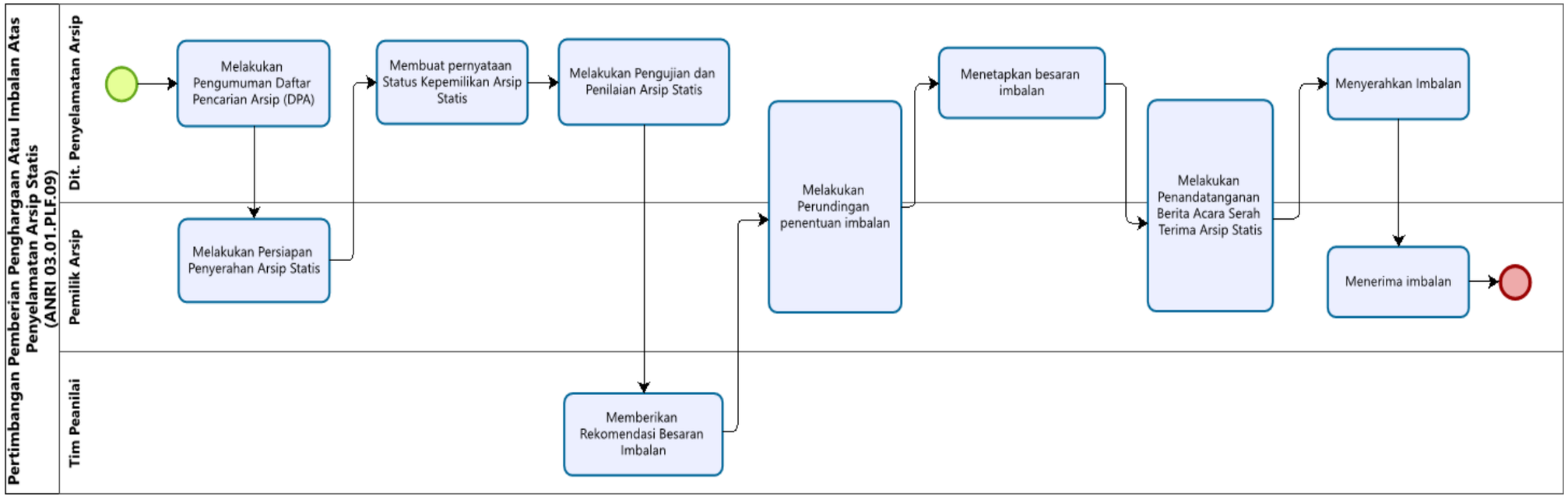

Gambar 78. Peta Lintas Fungsi (ANRI 03.01.PLF.09 Pertimbangan Pemberian Penghargaan atau Imbalan atas Penyelamatan Arsip Statis)

III.A.2. Proses Bisnis Level 2 (ANRI 03.02 Peningkatan Arsip Nasional yang Diolah);

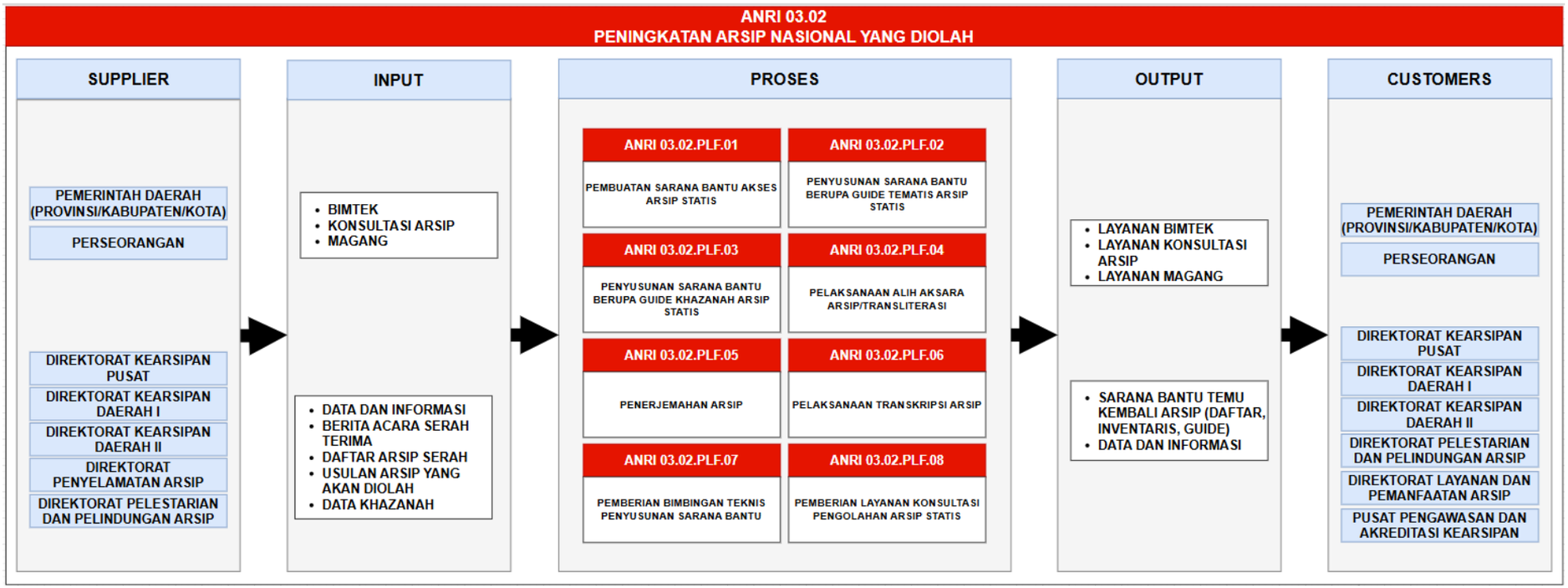

Gambar 79. Proses Bisnis Level 2 (ANRI 03.02 Peningkatan Arsip Nasional yang Diolah)

III.B.2. Peta Relasi Proses Bisnis Level 2 (ANRI 03.02 Peningkatan Arsip Nasional yang Diolah);

Gambar 80. Peta Relasi Proses Bisnis Level 2 (ANRI 03.02 Peningkatan Arsip Nasional yang Diolah)

III.C.2.i. Peta Lintas Fungsi (ANRI 03.02.PLF.01 Pembuatan Sarana Bantu Akses Arsip Statis);

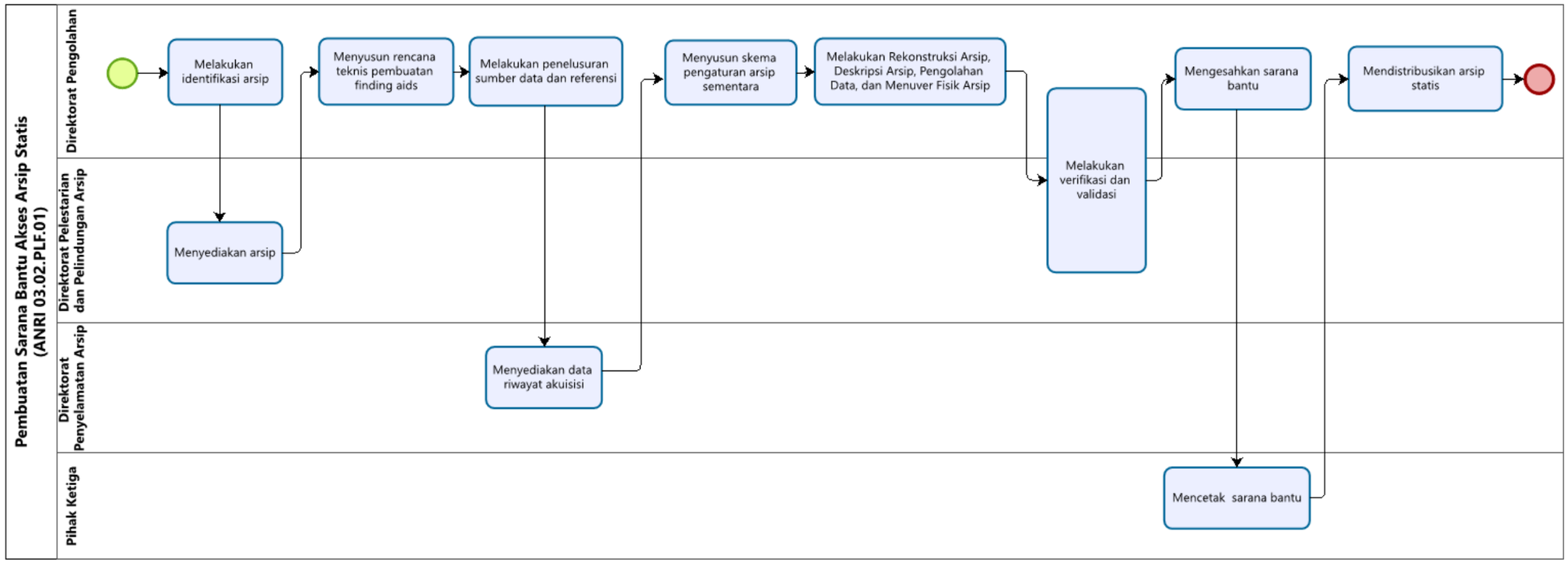

Gambar 81. Peta Lintas Fungsi (ANRI 03.02.PLF.01 Pembuatan Sarana Bantu Akses Arsip Statis)

III.C.2.ii. Peta Lintas Fungsi (ANRI 03.02.PLF.02 Penyusunan Sarana Bantu Berupa Guide Tematis Arsip Statis);

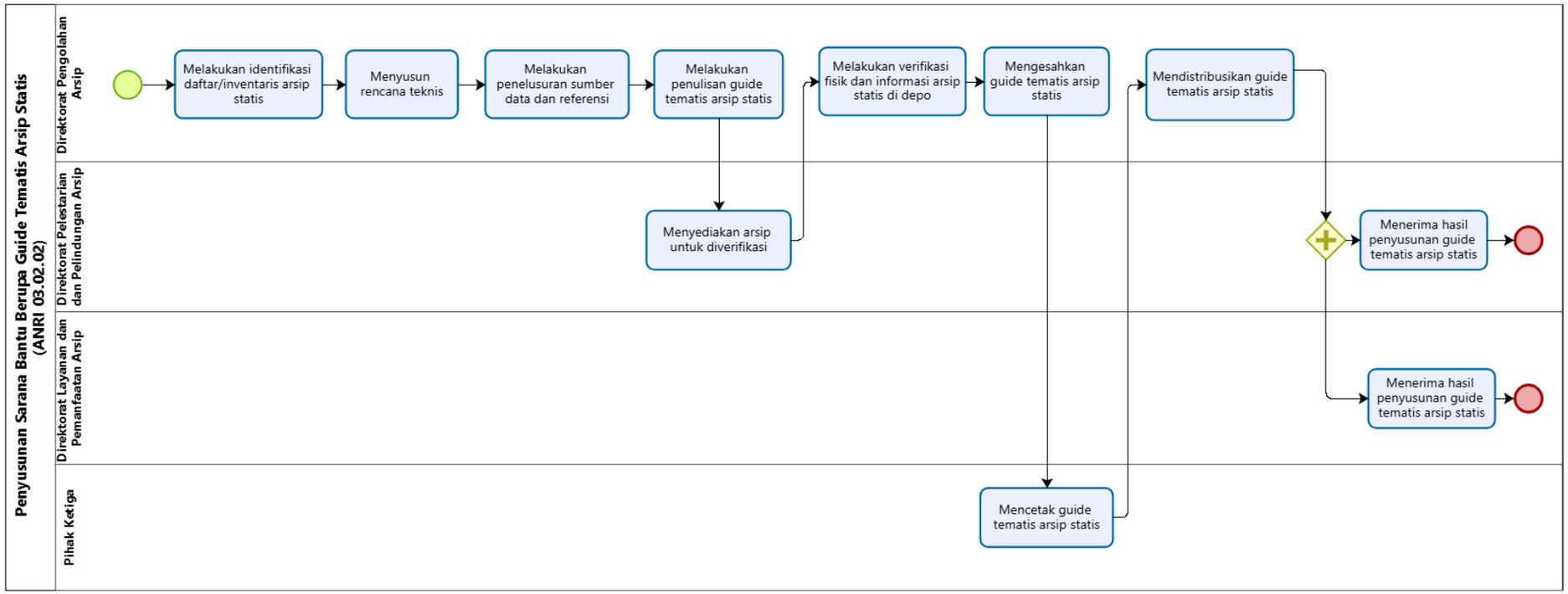

Gambar 82. Peta Lintas Fungsi (ANRI 03.02.PLF.02 Penyusunan Sarana Bantu Berupa Guide Tematis Arsip Statis)

III.C.2.iii. Peta Lintas Fungsi (ANRI 03.02.PLF.03 Penyusunan Sarana Bantu Berupa Guide Khazanah Arsip Statis);

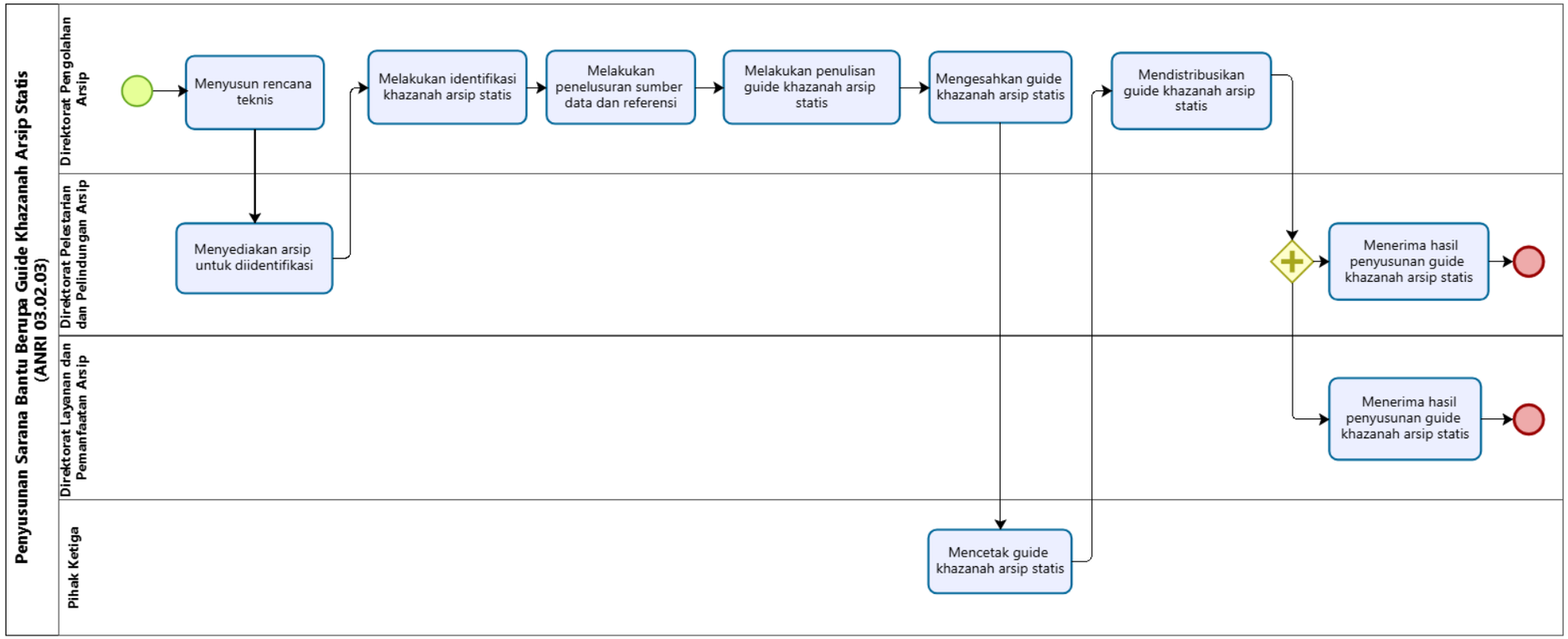

Gambar 83. Peta Lintas Fungsi (ANRI 03.02.PLF.03 Penyusunan Sarana Bantu Berupa Guide Khazanah Arsip Statis)

III.C.2.iv. Peta Lintas Fungsi (ANRI 03.02.PLF.04 Pelaksanaan Alih Aksara Arsip/Transliterasi);

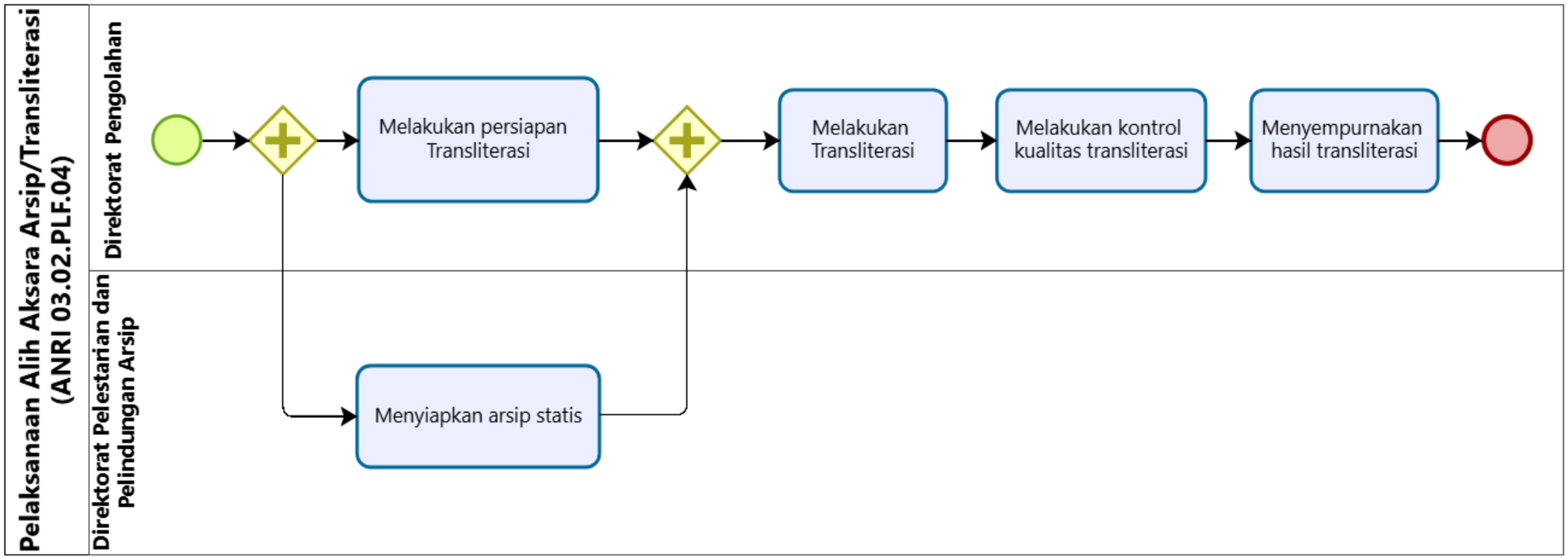

Gambar 84. Peta Lintas Fungsi (ANRI 03.02.PLF.04 Pelaksanaan Alih Aksara Arsip/Transliterasi)

III.C.2.v. Peta Lintas Fungsi (ANRI 03.02.PLF.05 Penerjemahan Arsip);

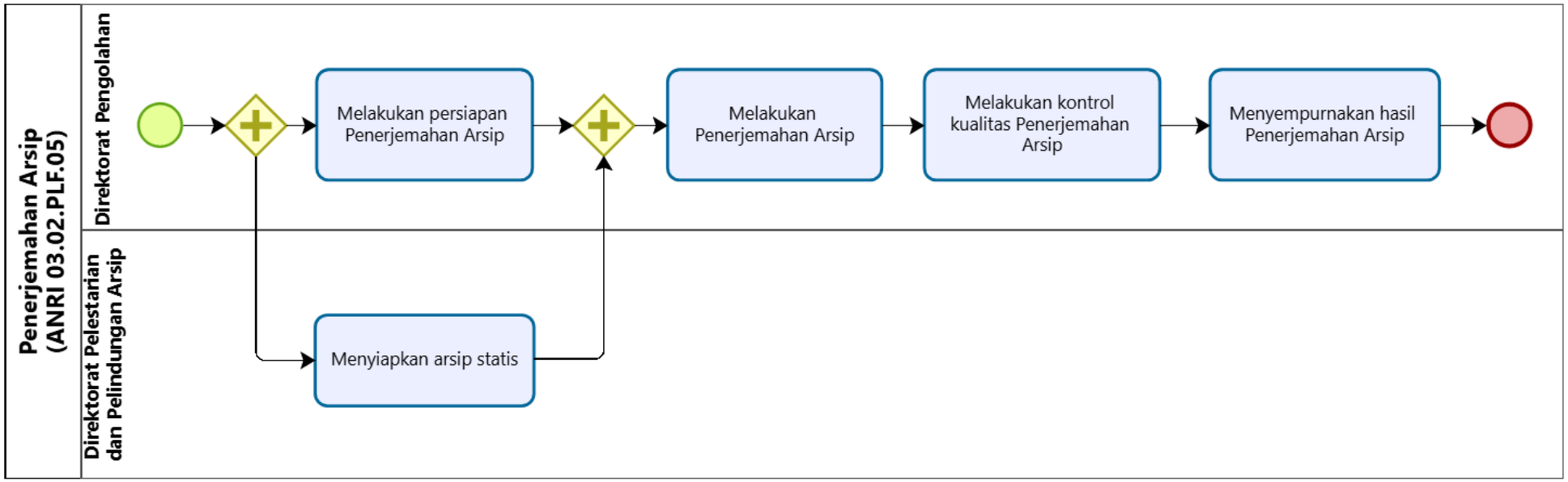

Gambar 85. Peta Lintas Fungsi (ANRI 03.02.PLF.05 Penerjemahan Arsip)

III.C.2.vi. Peta Lintas Fungsi (ANRI 03.02.PLF.06 Pelaksanaan Transkripsi Arsip);

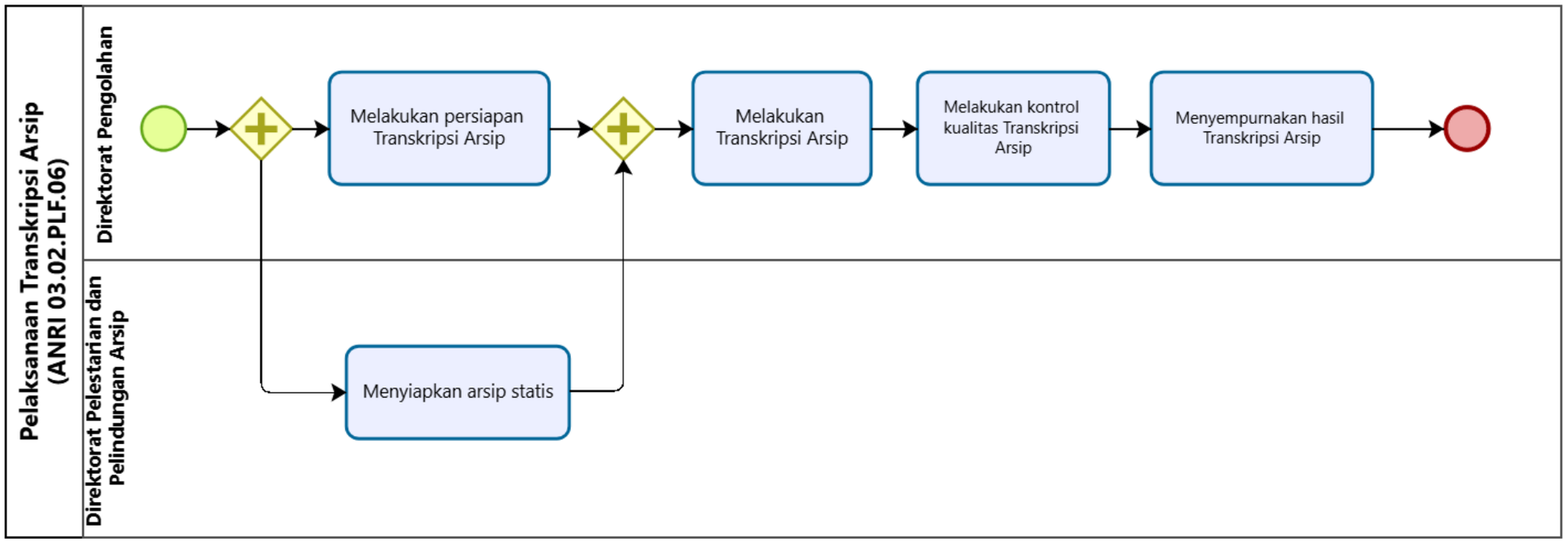

Gambar 86. Peta Lintas Fungsi (ANRI 03.02.PLF.06 Pelaksanaan Transkripsi Arsip)

III.C.2.vii. Peta Lintas Fungsi (ANRI 03.02.PLF.07 Pemberian Bimbingan Teknis Penyusunan Sarana Bantu);

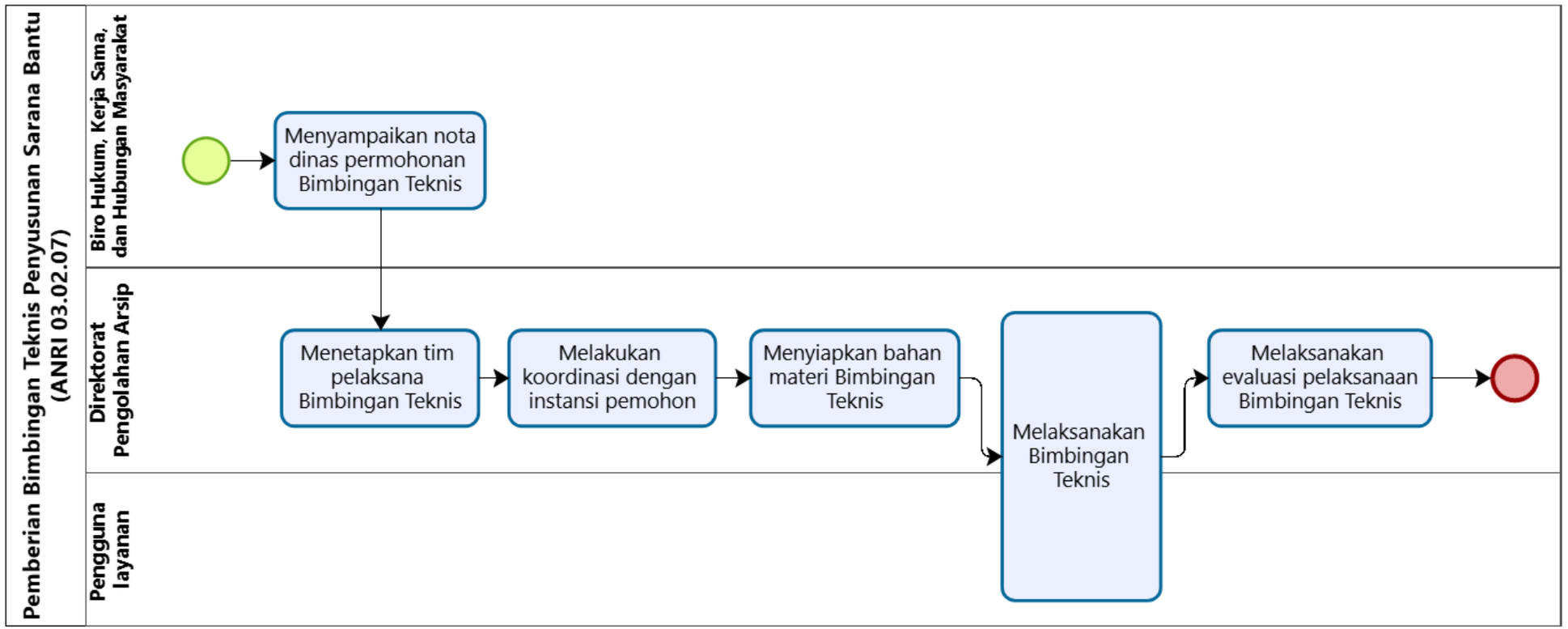

Gambar 87. Peta Lintas Fungsi (ANRI 03.02.PLF.07 Pemberian Bimbingan Teknis Penyusunan Sarana Bantu)

III.C.2.viii. Peta Lintas Fungsi (ANRI 03.02.PLF.08 Pemberian Layanan Konsultasi Pengolahan Arsip Statis).

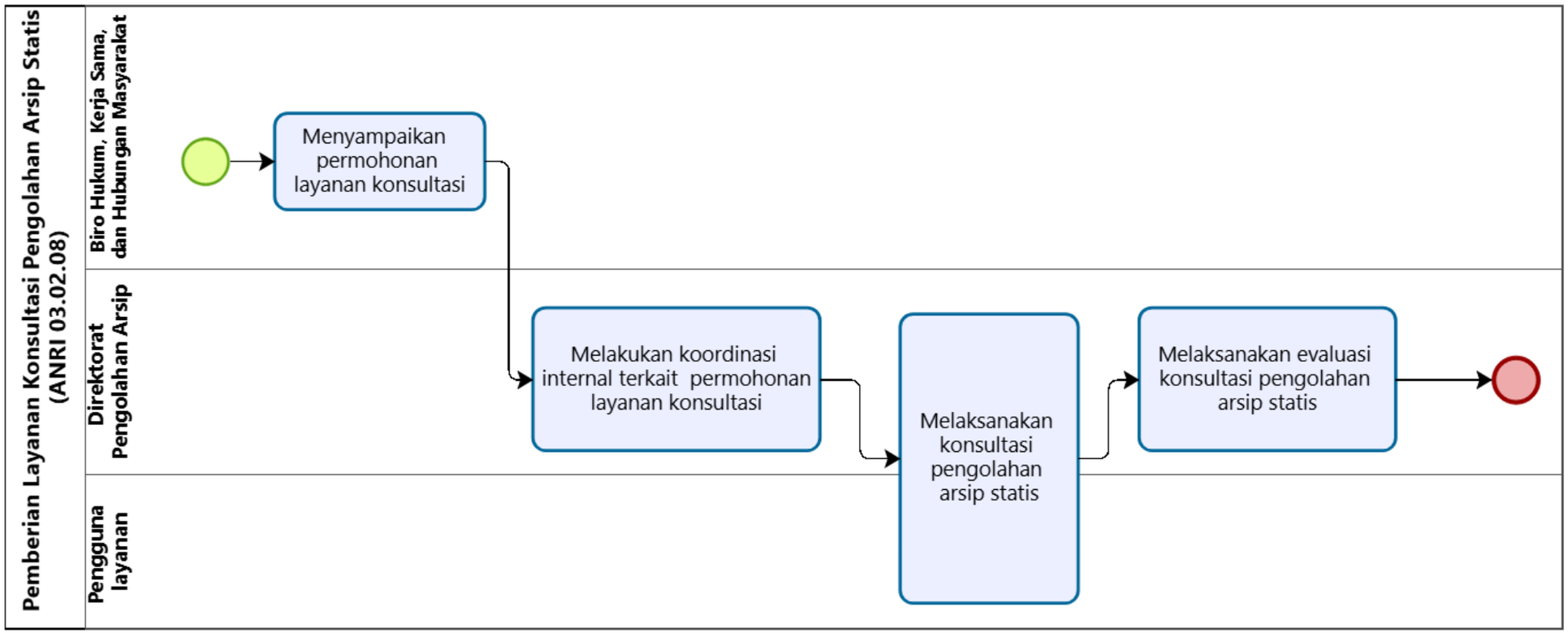

Gambar 88. Peta Lintas Fungsi (ANRI 03.02.PLF.08 Pemberian Layanan Konsultasi Pengolahan Arsip Statis)

III.A.3. Proses Bisnis Level 2 (ANRI 03.03 Peningkatan Arsip Nasional yang Dipreservasi);

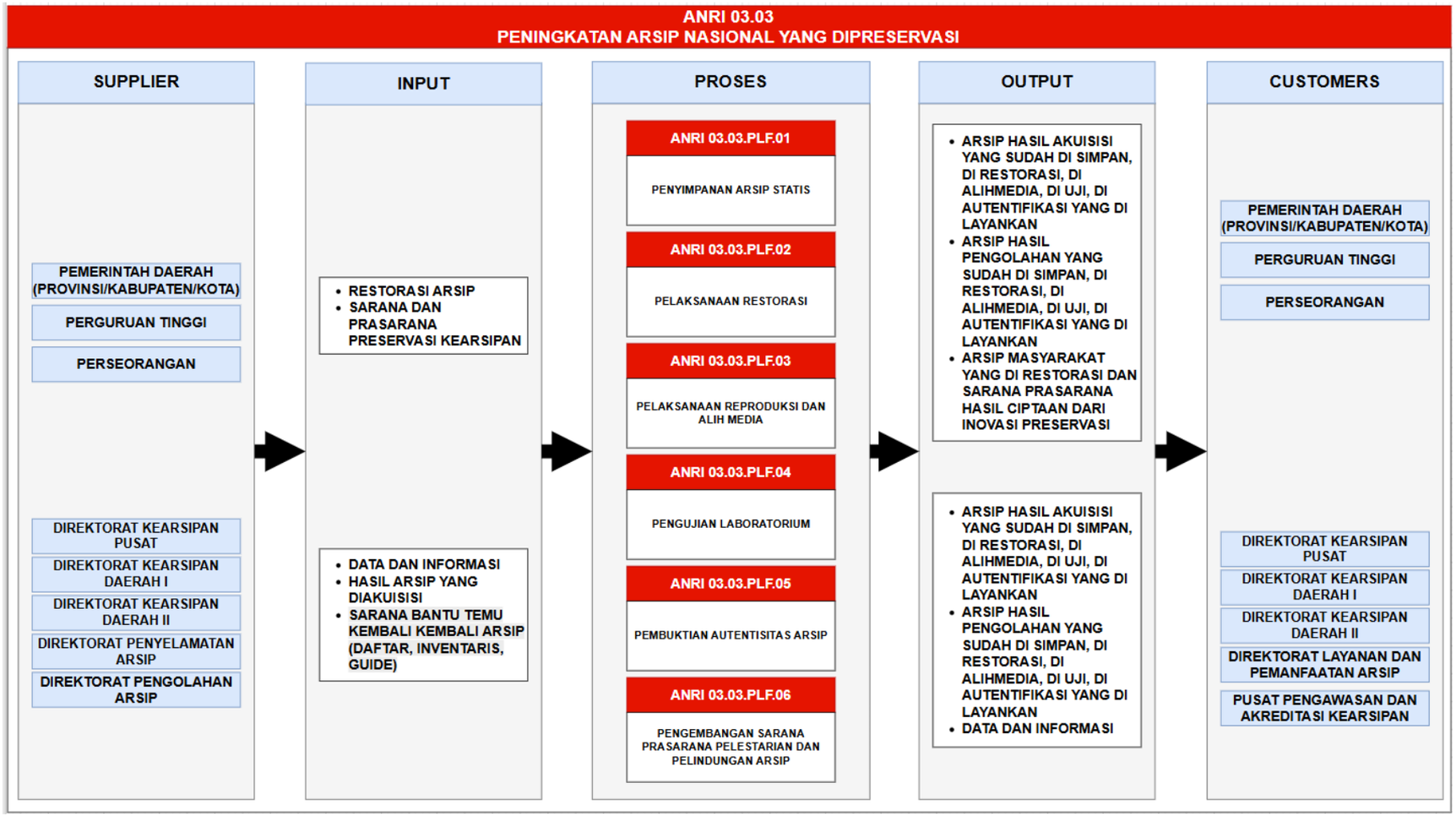

Gambar 89. Proses Bisnis Level 2 (ANRI 03.03 Peningkatan Arsip Nasional yang Dipreservasi)

III.B.3. Peta Relasi Proses Bisnis Level 2 (ANRI 03.03 Peningkatan Arsip Nasional yang Dipreservasi);

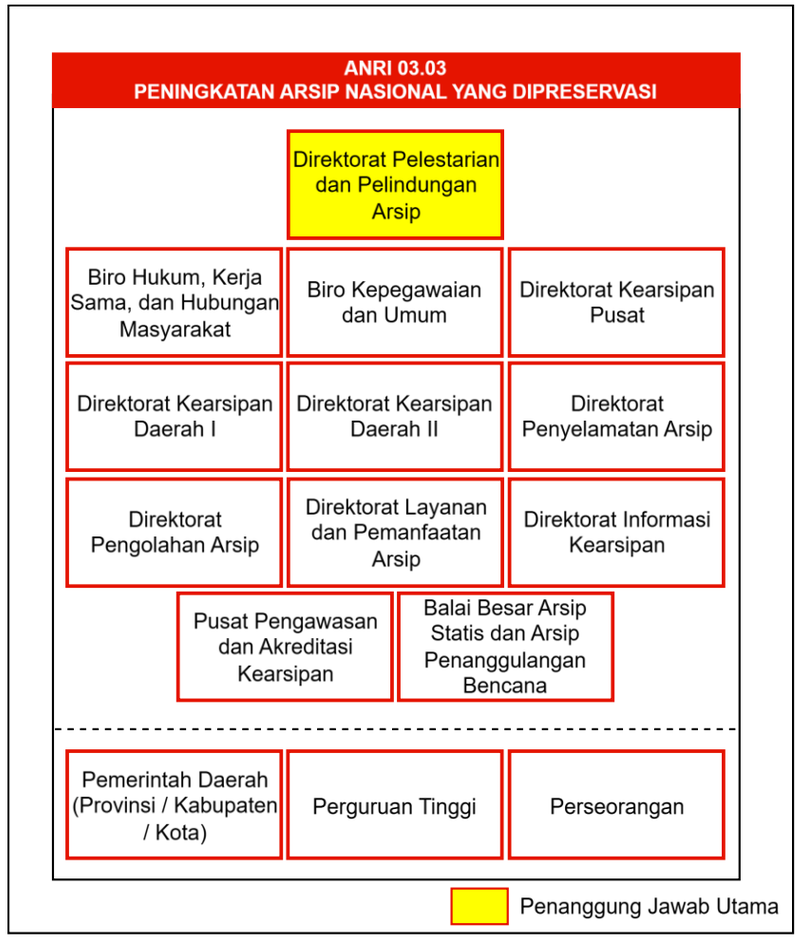

Gambar 90. Peta Relasi Proses Bisnis Level 2 (ANRI 03.03 Peningkatan Arsip Nasional yang Dipreservasi)

III.C.3.i. Peta Lintas Fungsi (ANRI 03.03.PLF.01 Penyimpanan Arsip Statis);

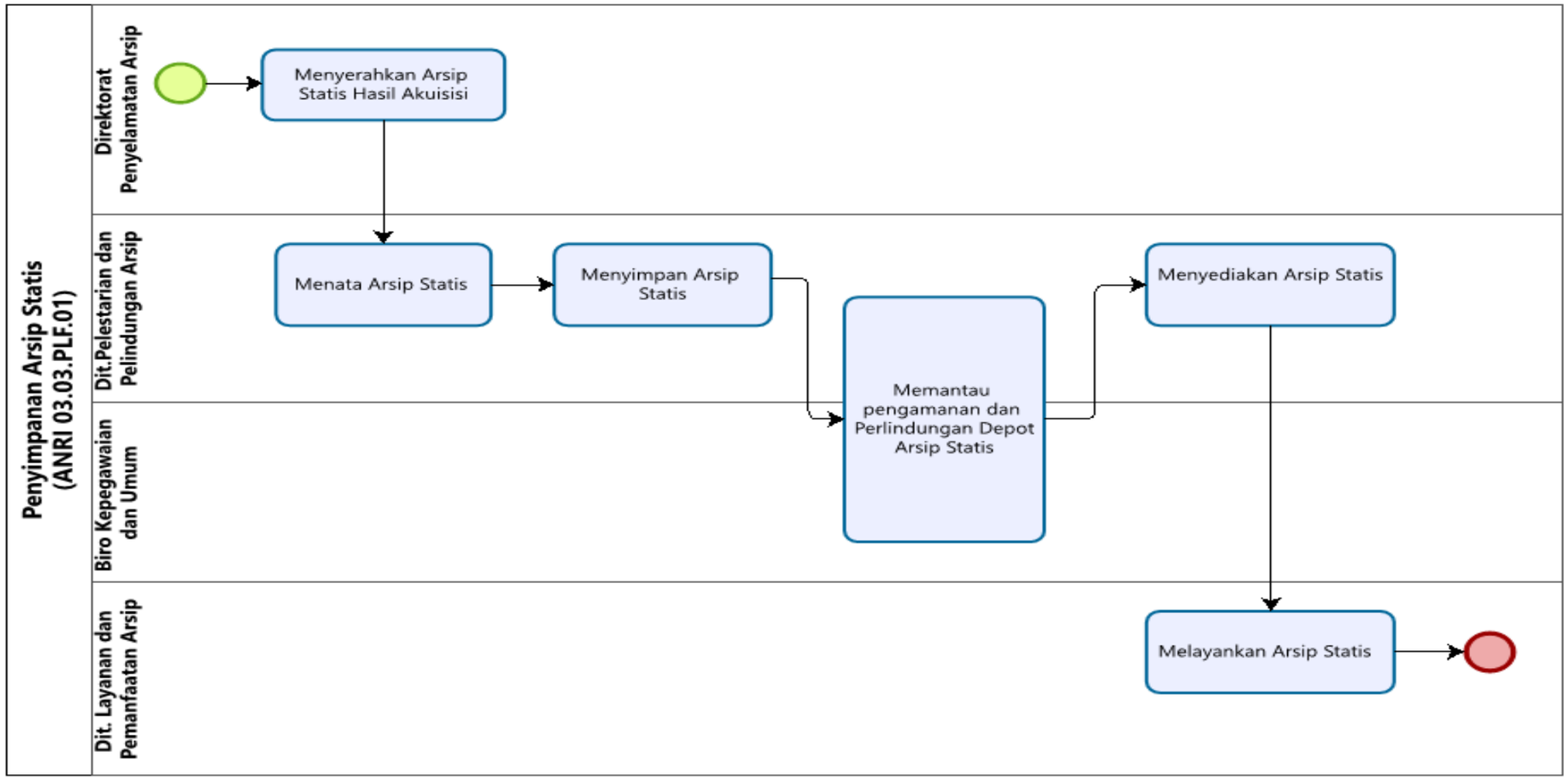

Gambar 91. Peta Lintas Fungsi (ANRI 03.03.PLF.01 Penyimpanan Arsip Statis)

III.C.3.ii. Peta Lintas Fungsi (ANRI 03.03.PLF.02 Pelaksanaan Restorasi);

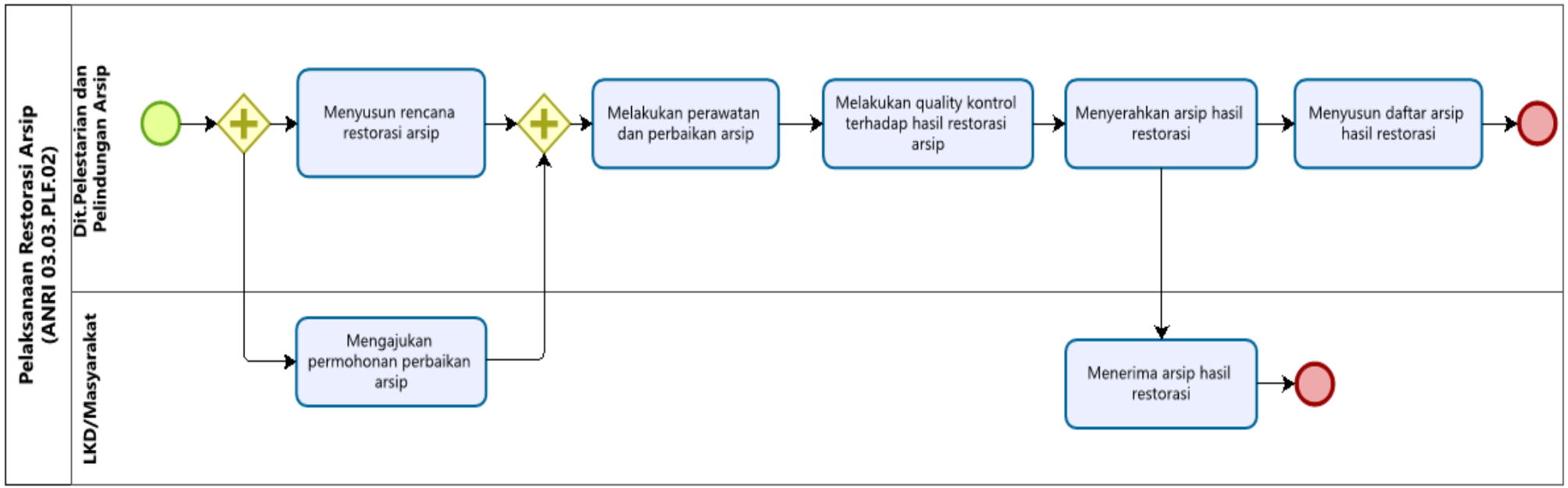

Gambar 92. Peta Lintas Fungsi (ANRI 03.03.PLF.02 Pelaksanaan Restorasi)

III.C.3.iii. Peta Lintas Fungsi (ANRI 03.03.PLF.03 Pelaksanaan Reproduksi dan Alih Media);

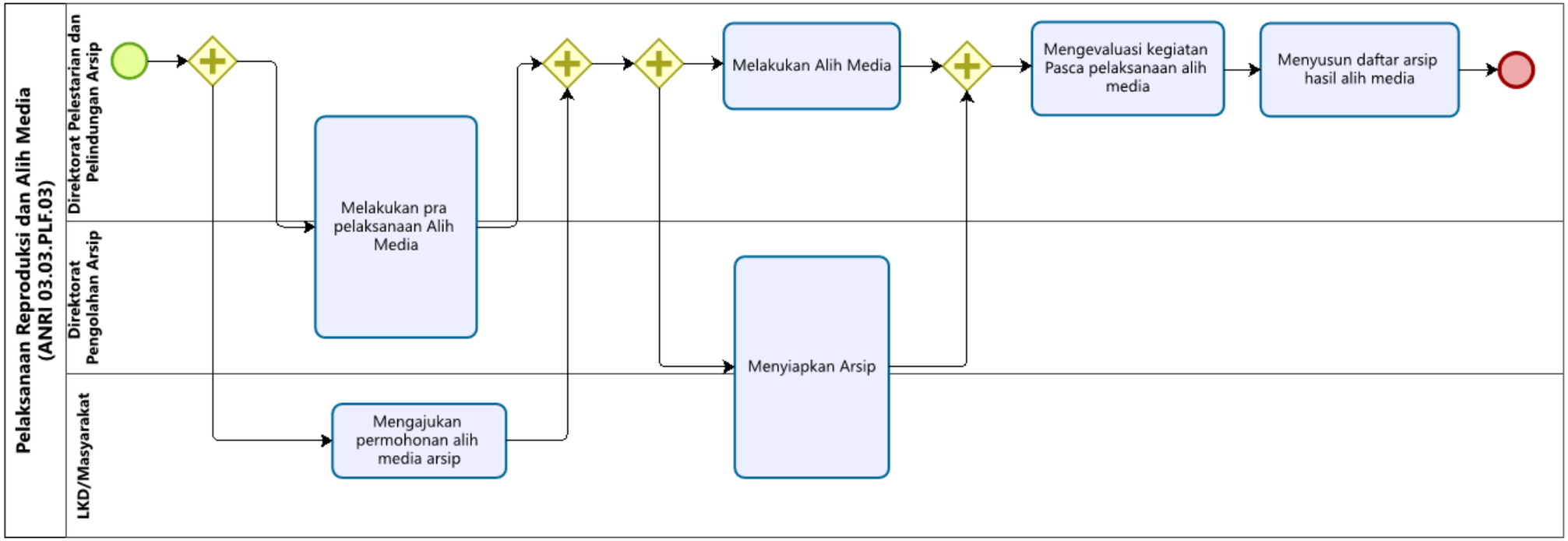

Gambar 93. Peta Lintas Fungsi (ANRI 03.03.PLF.03 Pelaksanaan Reproduksi dan Alih Media)

III.C.3.iv. Peta Lintas Fungsi (ANRI 03.03.PLF.04 Pengujian Laboratorium);

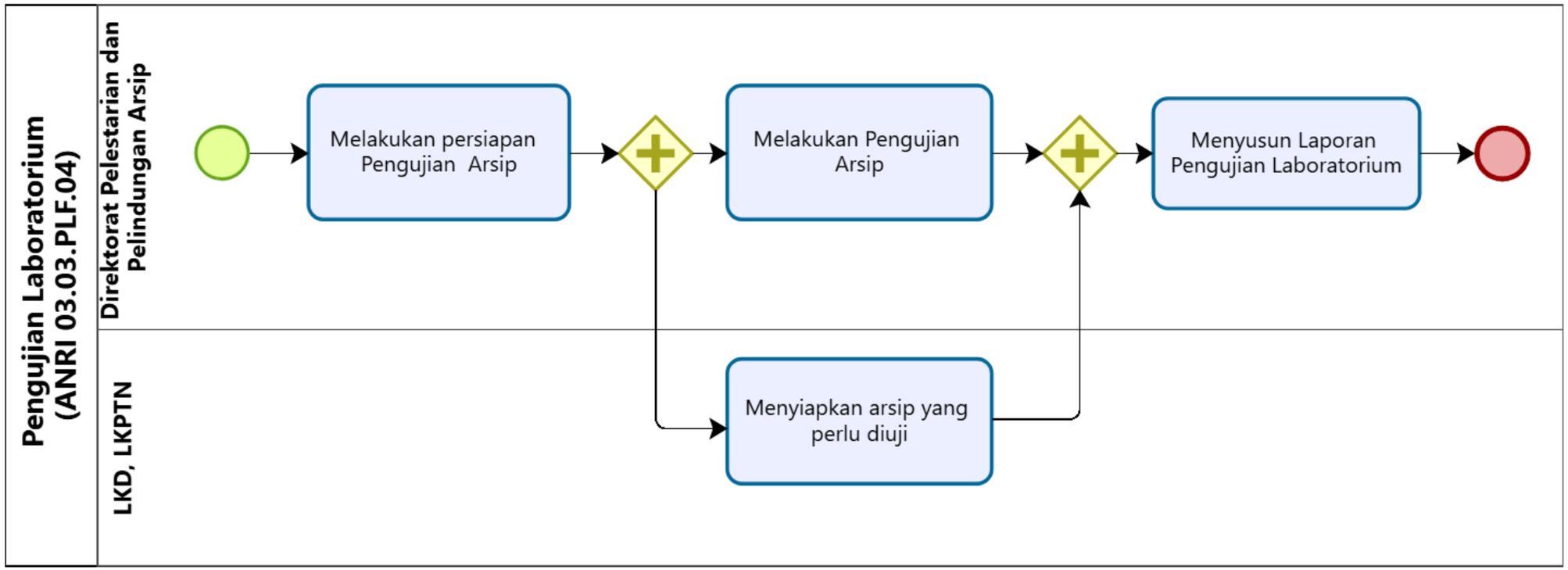

Gambar 94. Peta Lintas Fungsi (ANRI 03.03.PLF.04 Pengujian Laboratorium)

III.C.3.v. Peta Lintas Fungsi (ANRI 03.03.PLF.05 Pembuktian Autentisitas Arsip);

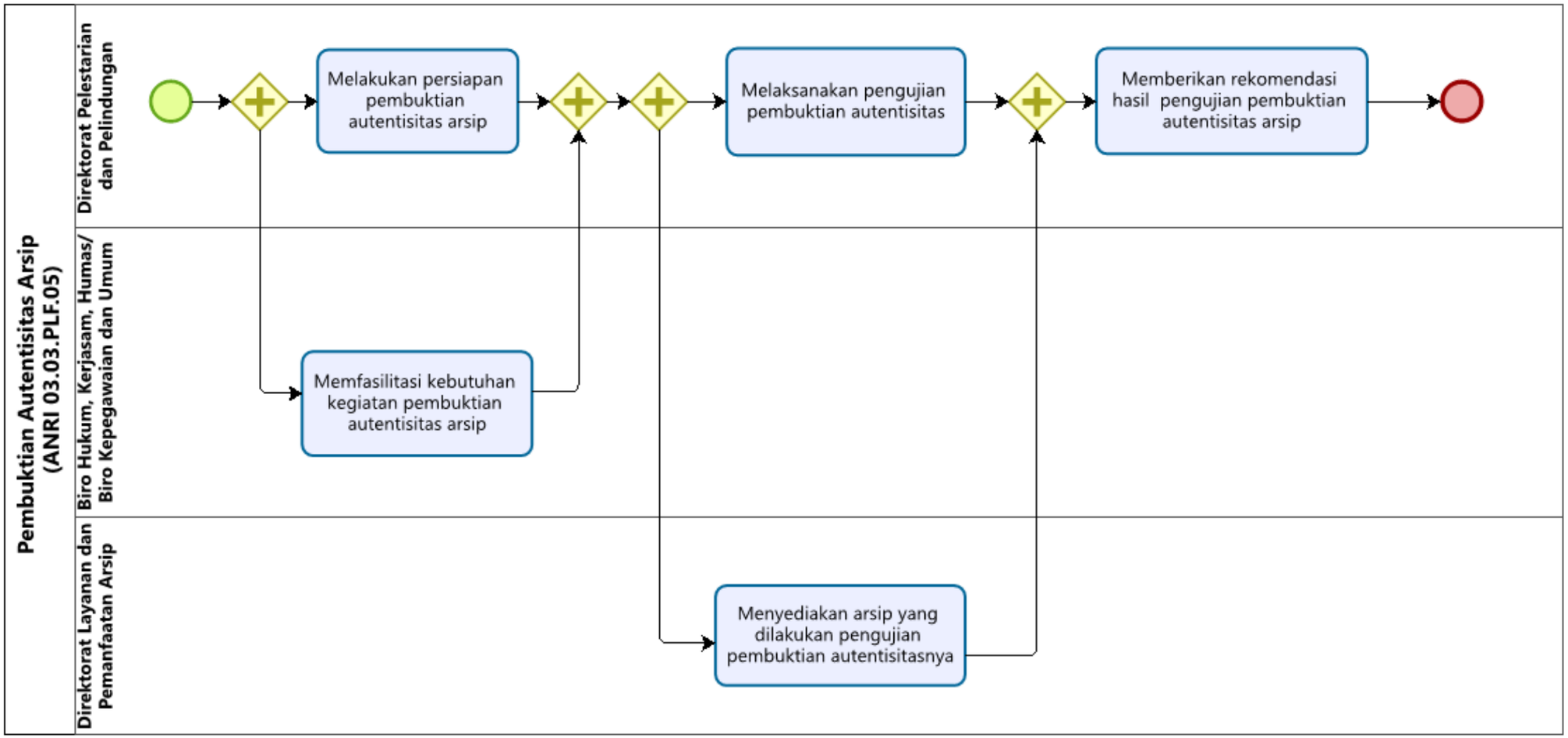

Gambar 95. Peta Lintas Fungsi (ANRI 03.03.PLF.05 Pembuktian Autentisitas Arsip)

III.C.3.vi. Peta Lintas Fungsi (ANRI 03.03.PLF.06 Pengembangan Sarana Prasarana Pelestarian dan Pelindungan Arsip).

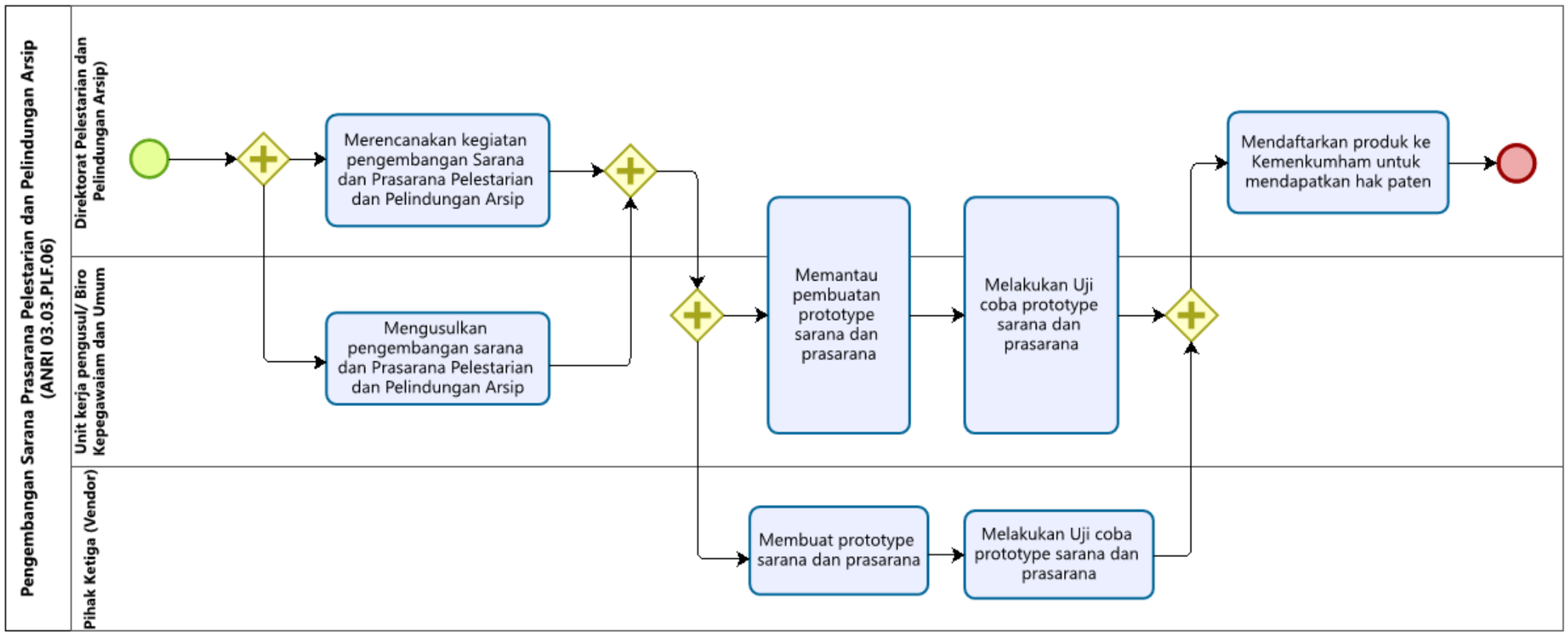

Gambar 96. Peta Lintas Fungsi (ANRI 03.03.PLF.06 Pengembangan Sarana Prasarana Pelestarian dan Pelindungan Arsip)

III.A.4. Proses Bisnis Level 2 (ANRI 03.04 Penyelamatan dan Pelestarian Arsip pada Masyarakat dan Wilayah Rawan Bencana);

Gambar 97. Proses Bisnis Level 2 (ANRI 03.04 Penyelamatan dan Pelestarian Arsip pada Masyarakat dan Wilayah Rawan Bencana)

III.B.4. Peta Relasi Proses Bisnis Level 2 (ANRI 03.04 Penyelamatan dan Pelestarian Arsip pada Masyarakat dan Wilayah Rawan Bencana);

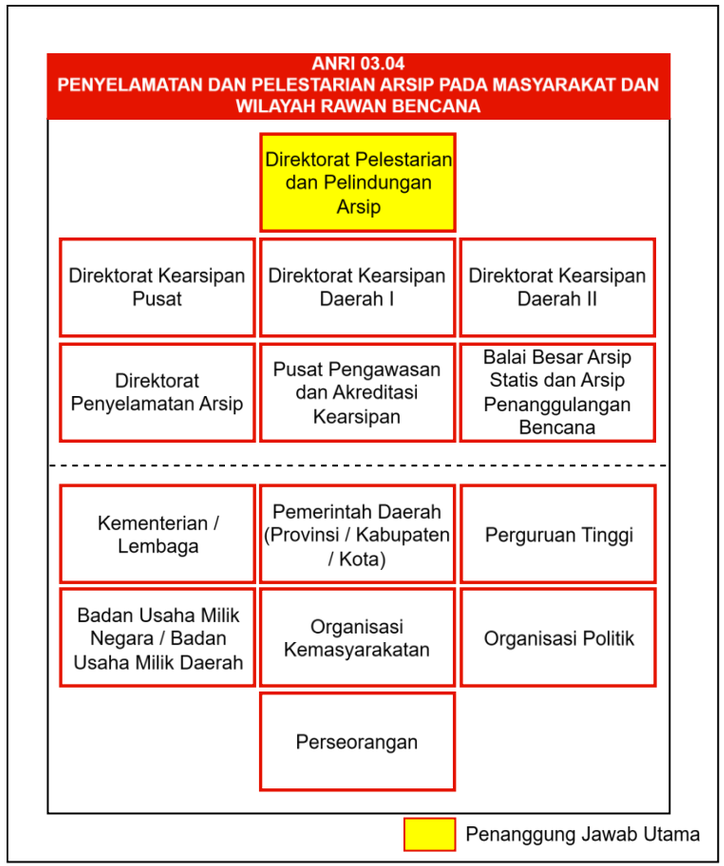

Gambar 98. Peta Relasi Proses Bisnis Level 2 (ANRI 03.04 Penyelamatan dan Pelestarian Arsip pada Masyarakat dan Wilayah Rawan Bencana)

III.C.4.i. Peta Lintas Fungsi (ANRI 03.04.PLF.01 Pelayanan Arsip Statis dan Arsip Penanggulangan Bencana).

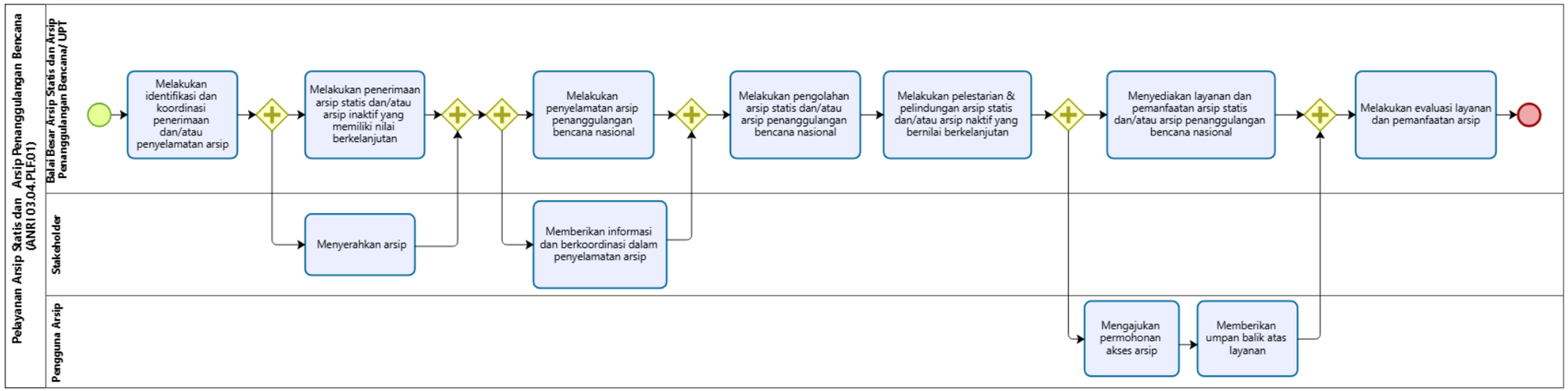

Gambar 99. Peta Lintas Fungsi (ANRI 03.04.PLF.01 Pelayanan Arsip Statis dan Arsip Penanggulangan Bencana)

IV.A. Proses Bisnis Level 1 (ANRI 04 Peningkatan Pelayanan Kearsipan dan Pemanfaatan Informasi Kearsipan melalui Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN));

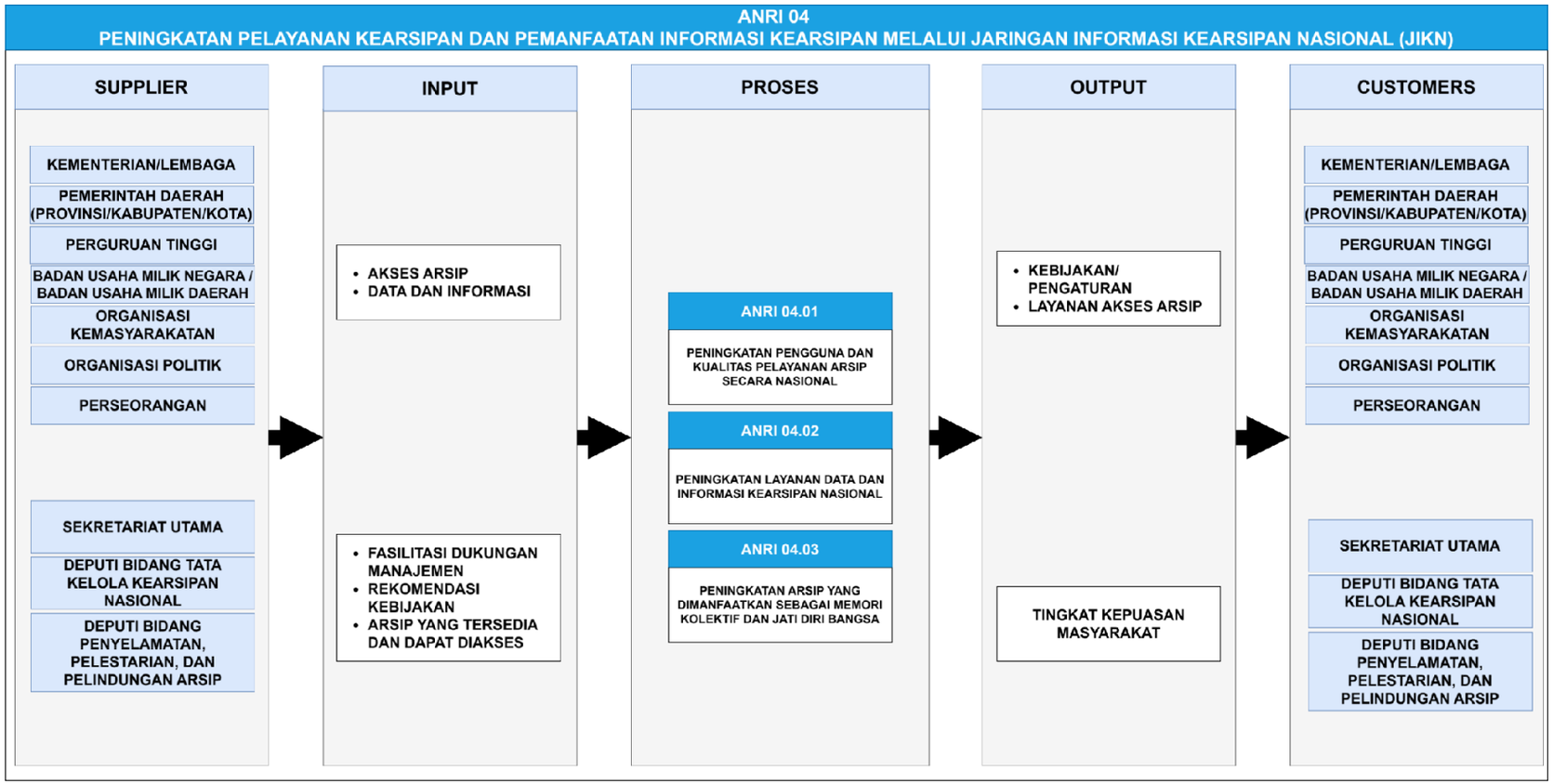

Gambar 100. Proses Bisnis Level 1 (ANRI 04 Peningkatan Pelayanan Kearsipan dan Pemanfaatan Informasi Kearsipan melalui Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN))

IV.B. Peta Relasi Proses Bisnis Level 1 (ANRI 04 Peningkatan Pelayanan Kearsipan dan Pemanfaatan Informasi Kearsipan melalui Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN));

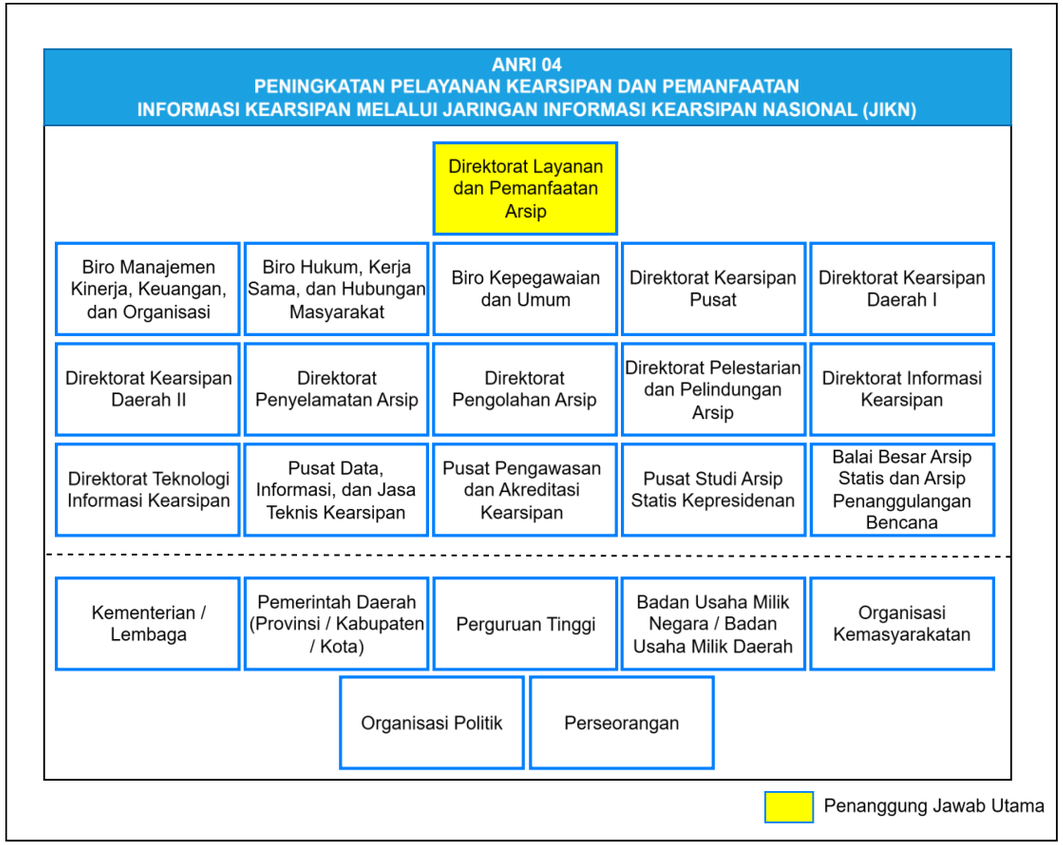

Gambar 101. Peta Relasi Proses Bisnis Level 1 (ANRI 04 Peningkatan Pelayanan Kearsipan dan Pemanfaatan Informasi Kearsipan melalui Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN))

IV.A.1. Proses Bisnis Level 2 (ANRI 04.01 Peningkatan Pengguna dan Kualitas Pelayanan Arsip secara Nasional);

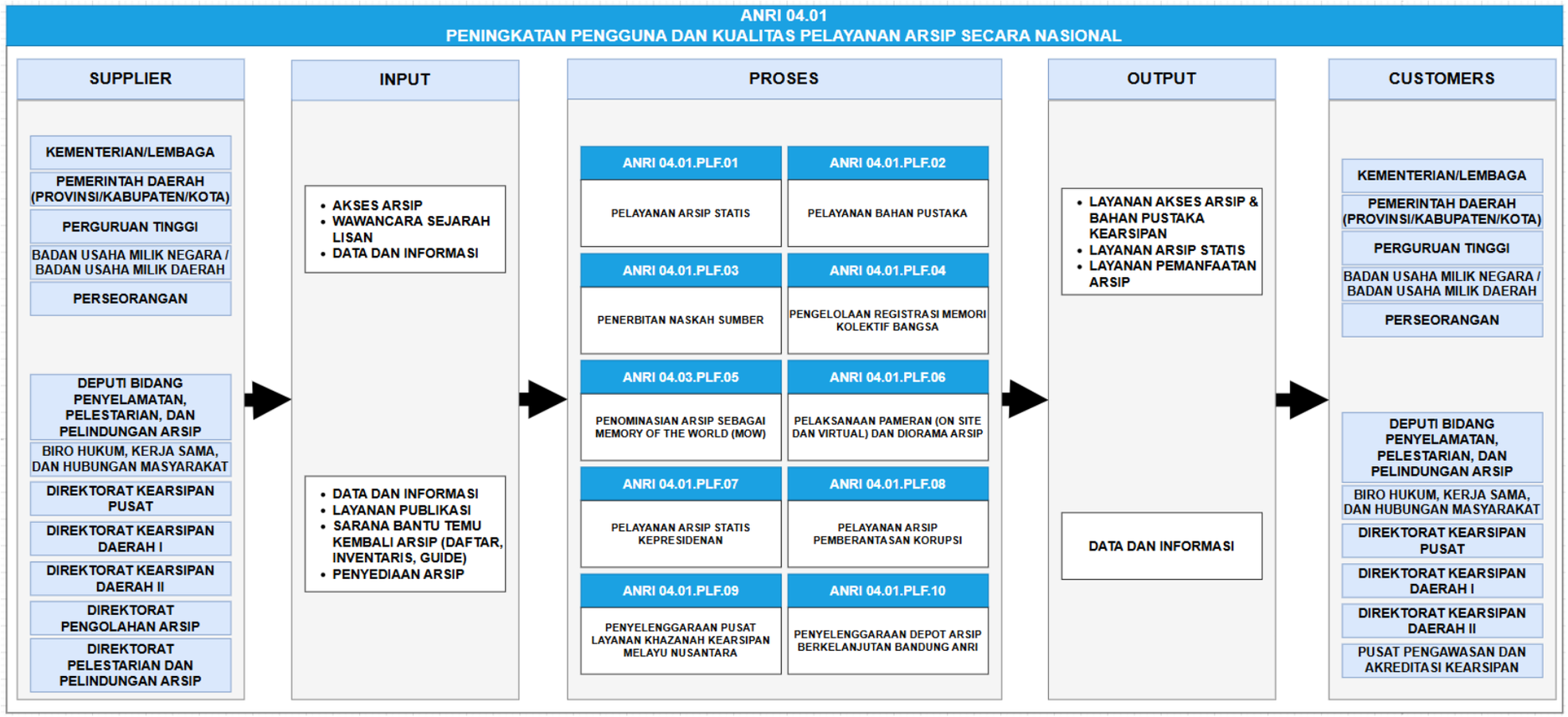

Gambar 102. Proses Bisnis Level 2 (ANRI 04.01 Peningkatan Pengguna dan Kualitas Pelayanan Arsip secara Nasional)

IV.B.1. Peta Relasi Proses Bisnis Level 2 (ANRI 04.01 Peningkatan Pengguna dan Kualitas Pelayanan Arsip secara Nasional);

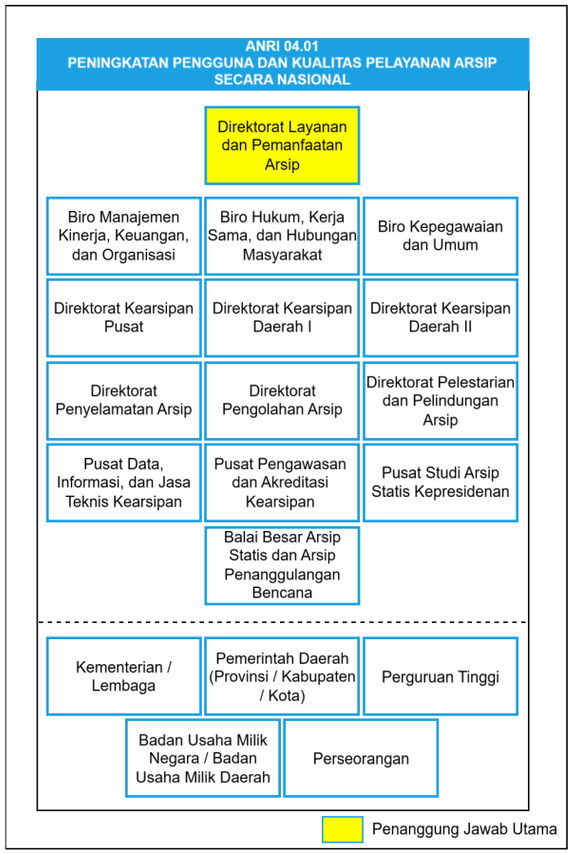

Gambar 103. Peta Relasi Proses Bisnis Level 2 (ANRI 04.01 Peningkatan Pengguna dan Kualitas Pelayanan Arsip secara Nasional)

IV.C.1.i. Peta Lintas Fungsi (ANRI 04.01.PLF.01 Pelayanan Arsip Statis);

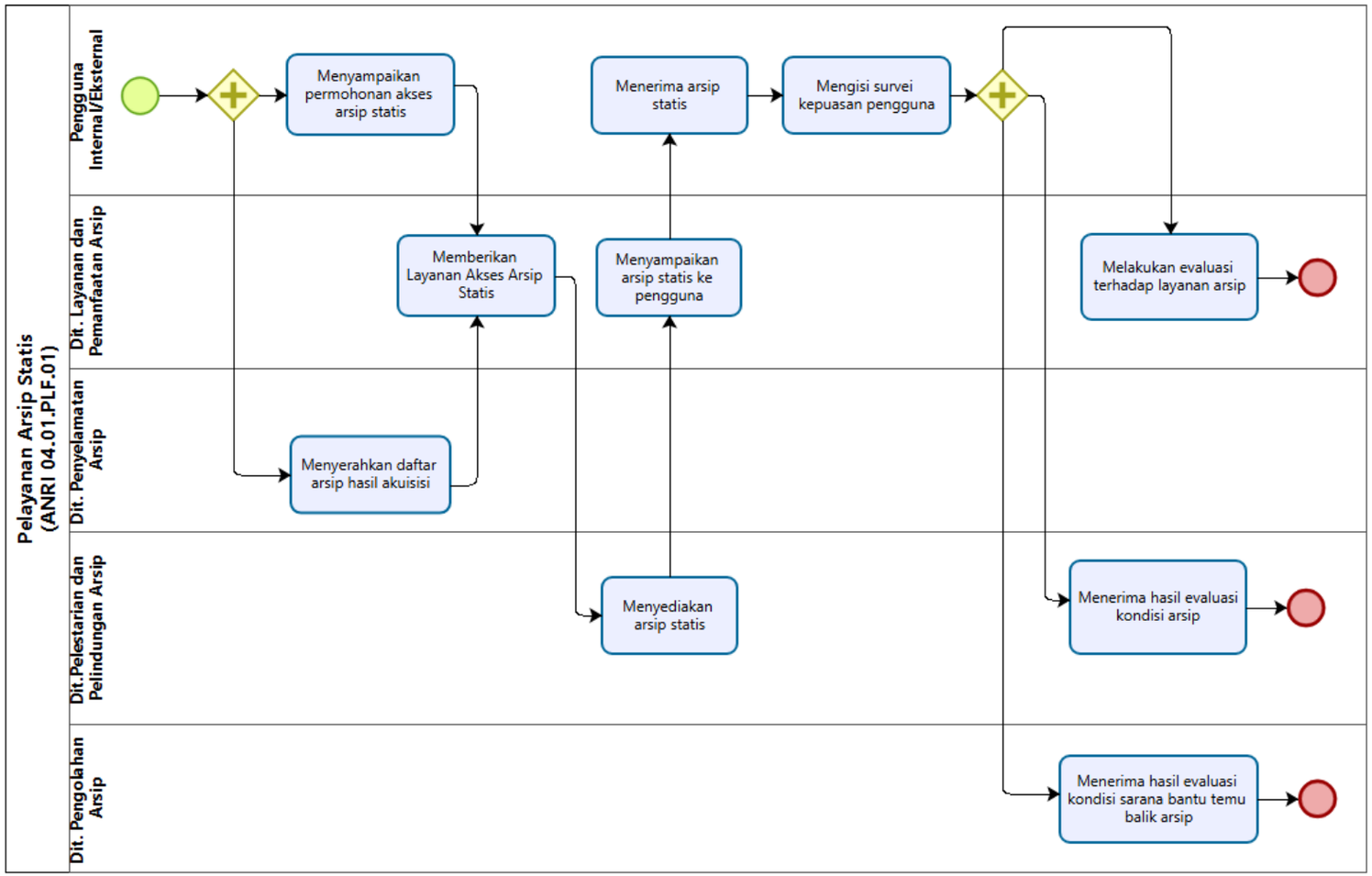

Gambar 104. Peta Lintas Fungsi (ANRI 04.01.PLF.01 Pelayanan Arsip Statis)

IV.C.1.ii. Peta Lintas Fungsi (ANRI 04.01.PLF.02 Pelayanan Bahan Pustaka);

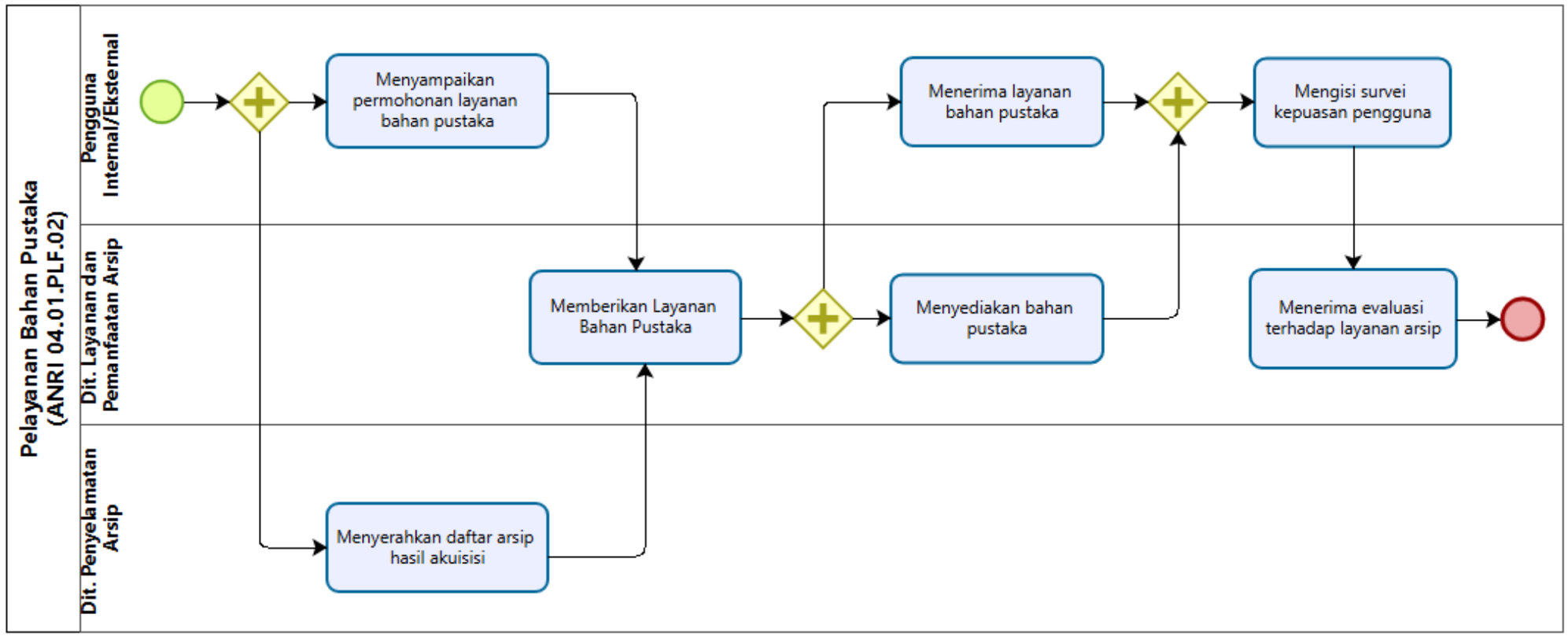

Gambar 105. Peta Lintas Fungsi (ANRI 04.01.PLF.02 Pelayanan Bahan Pustaka)

IV.C.1.iii. Peta Lintas Fungsi (ANRI 04.01.PLF.03 Penerbitan Naskah Sumber);

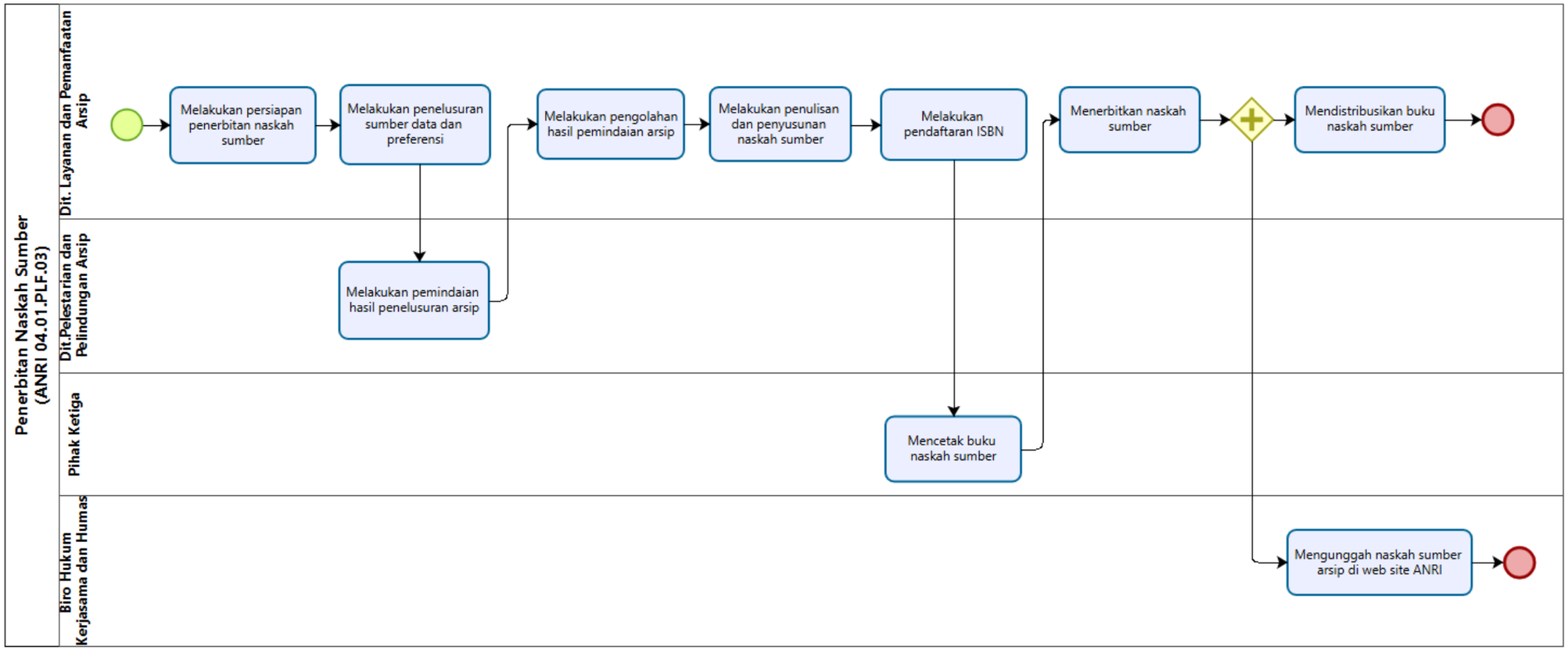

Gambar 106. Peta Lintas Fungsi (ANRI 04.01.PLF.03 Penerbitan Naskah Sumber)

IV.C.1.iv. Peta Lintas Fungsi (ANRI 04.01.PLF.04 Pengelolaan Registrasi Memori Kolektif Bangsa);

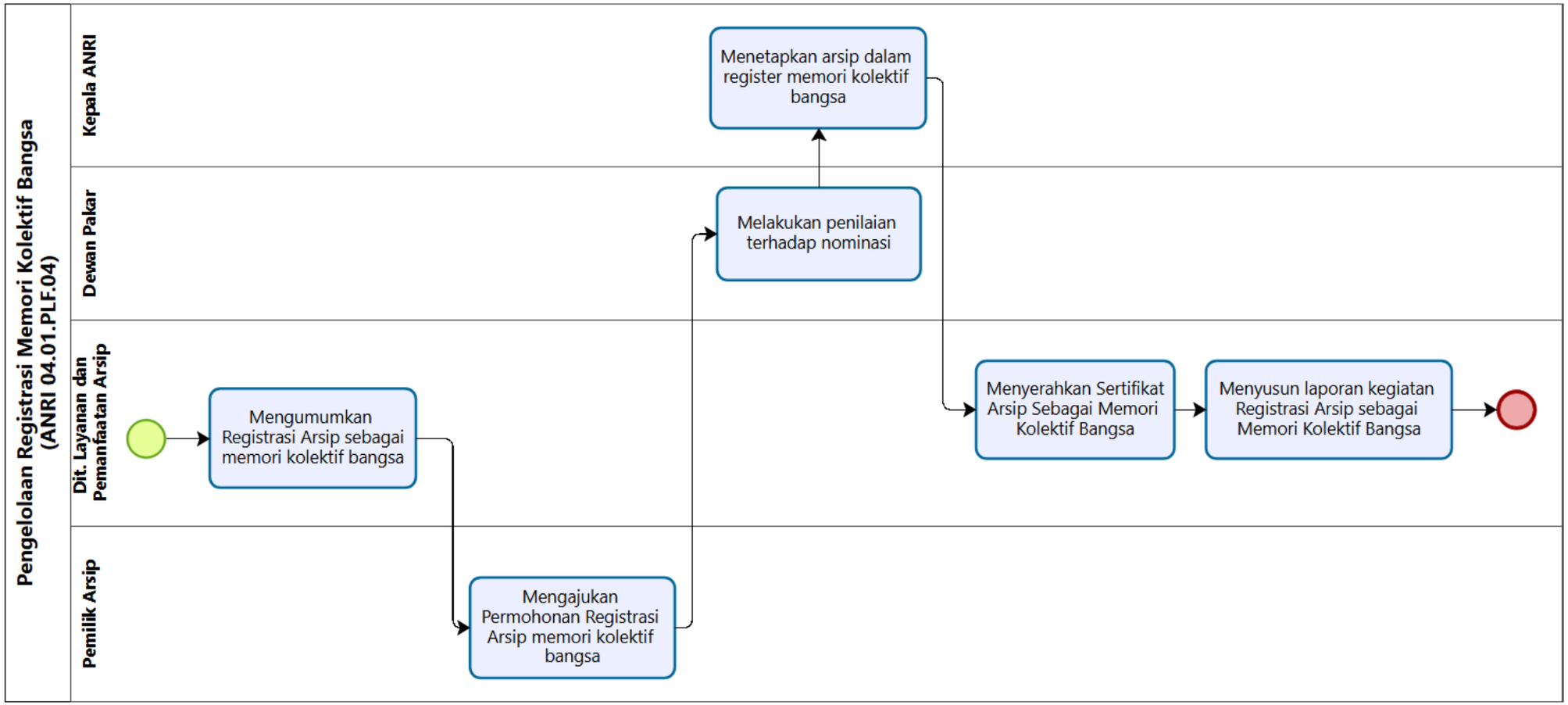

Gambar 107. Peta Lintas Fungsi (ANRI 04.01.PLF.04 Pengelolaan Registrasi Memori Kolektif Bangsa)

IV.C.1.v. Peta Lintas Fungsi (ANRI 04.01.PLF.05 Penominasian Arsip sebagai *Memory of the World* (MoW));

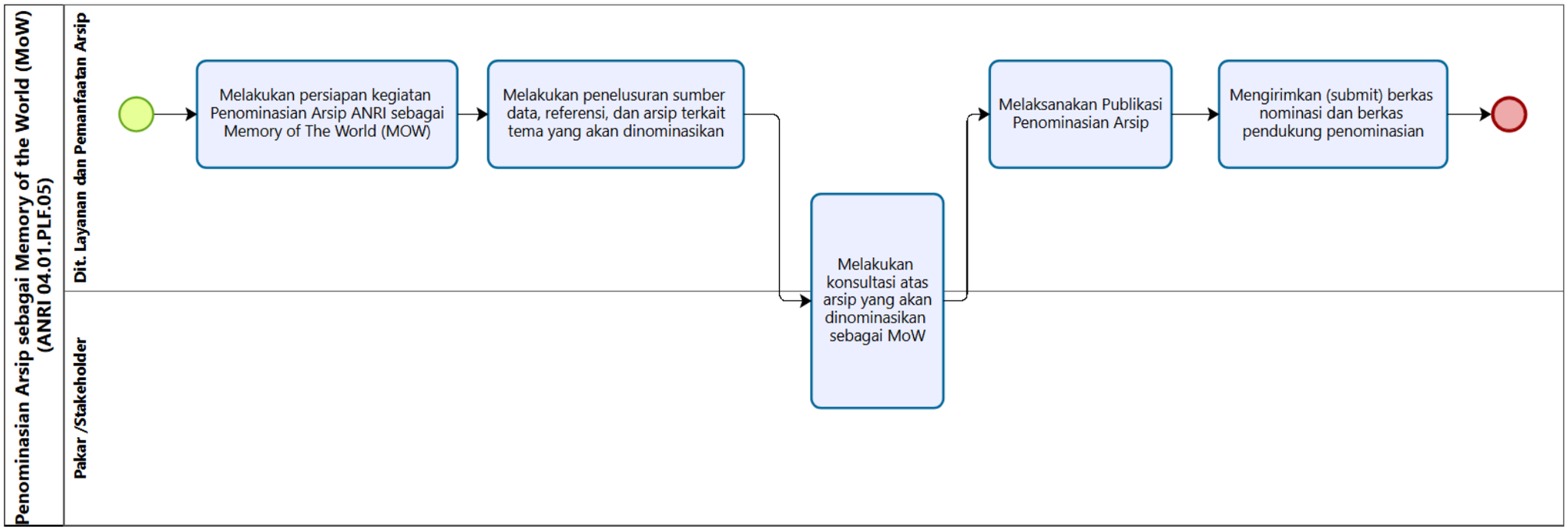

Gambar 108. Peta Lintas Fungsi (ANRI 04.01.PLF.05 Penominasian Arsip sebagai *Memory of the World* (MoW))

IV.C.1.vi. Peta Lintas Fungsi (ANRI 04.01.PLF.06 Pelaksanaan Pameran dan Diorama Arsip);

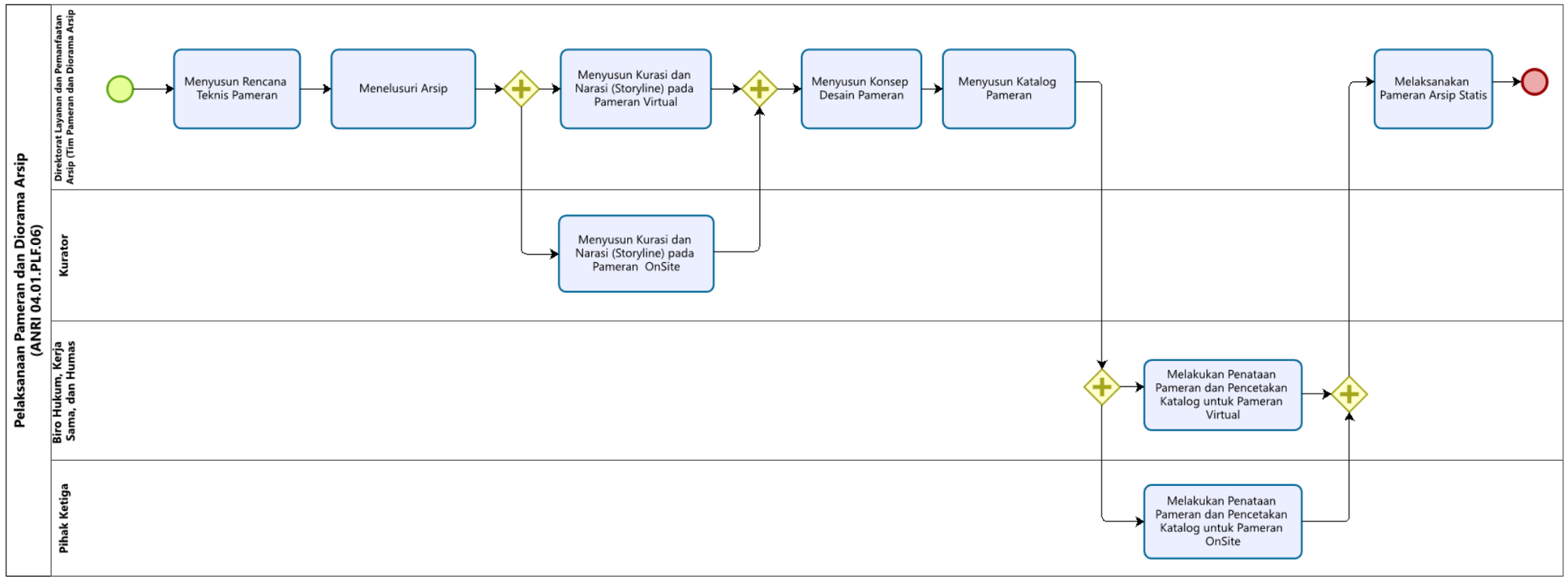

Gambar 109. Peta Lintas Fungsi (ANRI 04.01.PLF.06 Pelaksanaan Pameran dan Diorama Arsip)

IV.C.1.vii. Peta Lintas Fungsi (ANRI 04.01.PLF.07 Pelayanan Arsip Statis Kepresidenan);

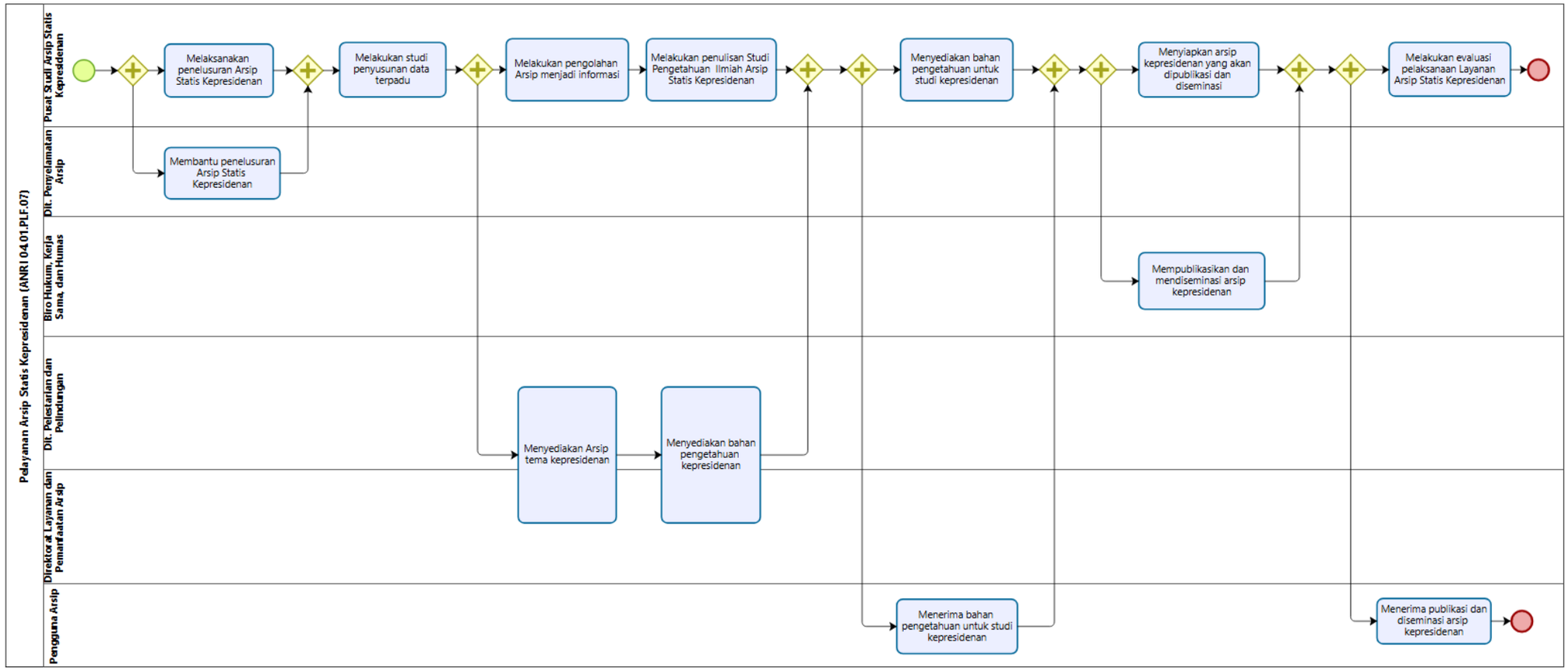

Gambar 110. Peta Lintas Fungsi (ANRI 04.01.PLF.07 Pelayanan Arsip Statis Kepresidenan)

IV.C.1.viii. Peta Lintas Fungsi (ANRI 04.01.PLF.08 Pelayanan Arsip Pemberantasan Korupsi);

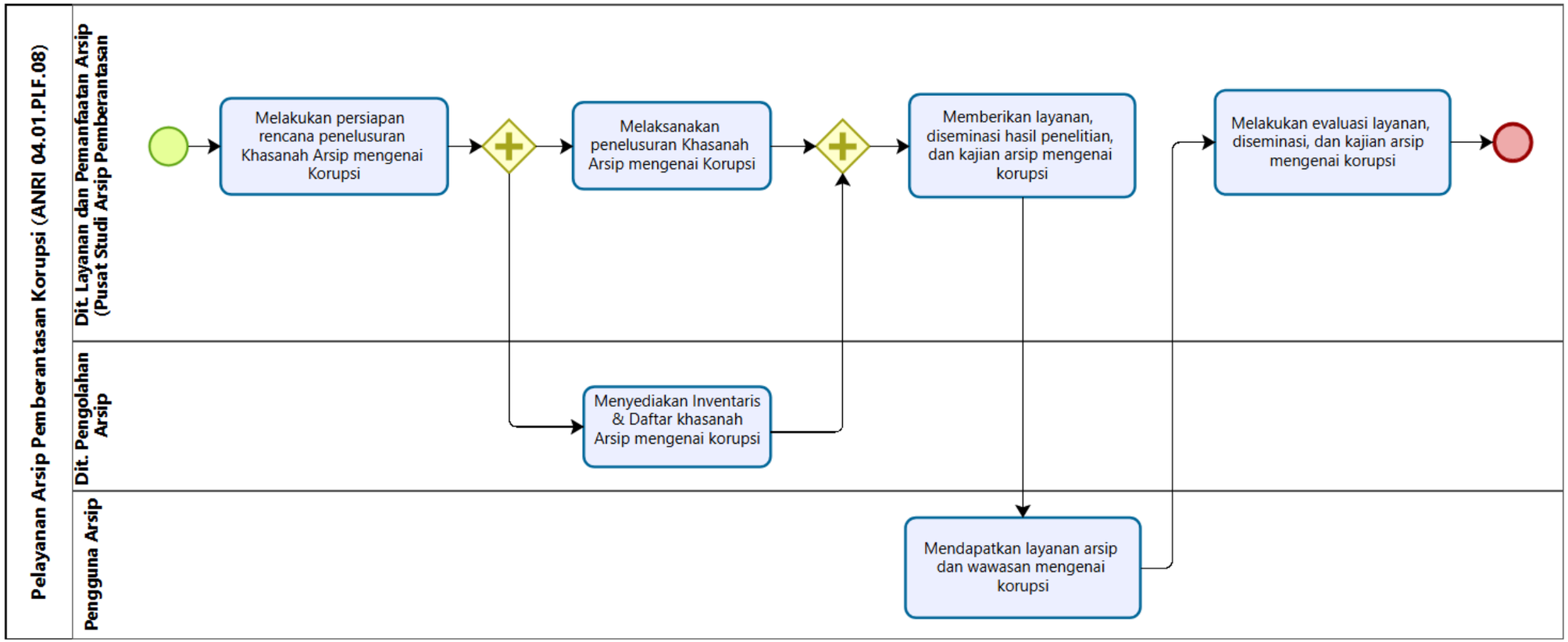

Gambar 111. Peta Lintas Fungsi (ANRI 04.01.PLF.08 Pelayanan Arsip Pemberantasan Korupsi)

IV.C.1.ix. Peta Lintas Fungsi (ANRI 04.01.PLF.09 Penyelenggaraan Pusat Layanan Khazanah Kearsipan Melayu Nusantara);

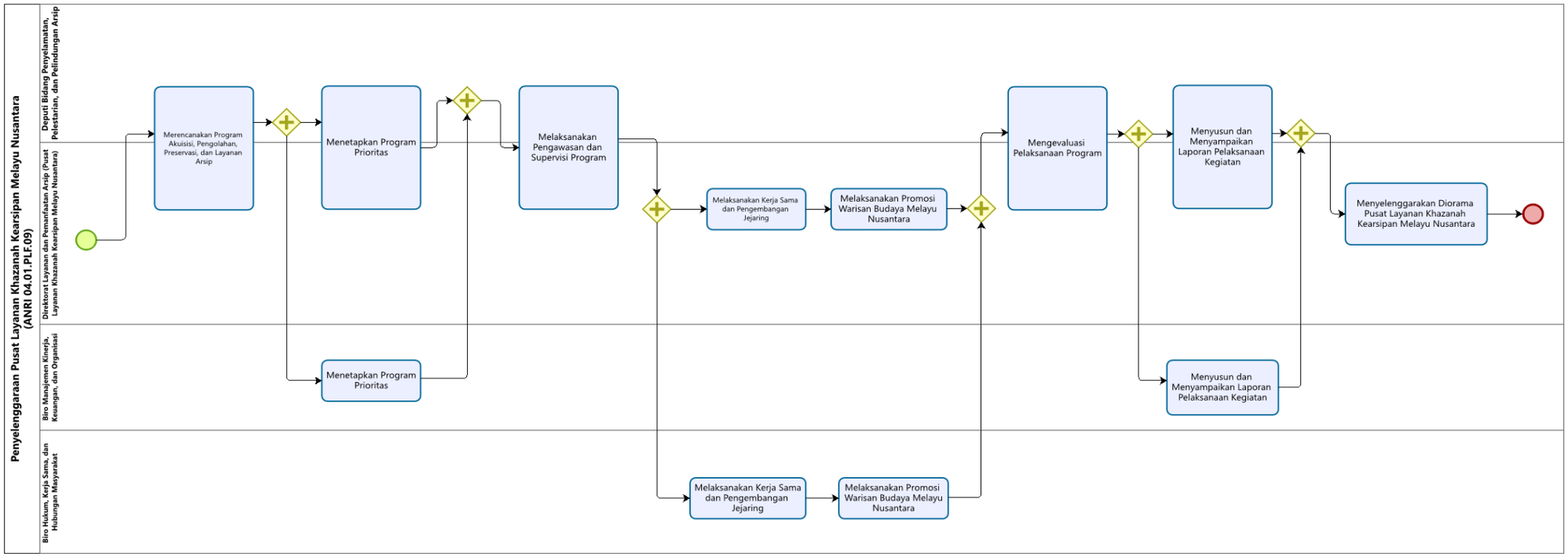

Gambar 112. Peta Lintas Fungsi (ANRI 04.01.PLF.09 Penyelenggaraan Pusat Layanan Khazanah Kearsipan Melayu Nusantara)

IV.C.1.x. Peta Lintas Fungsi (ANRI 04.01.PLF.10 Penyelenggaraan Depot Arsip Berkelanjutan Bandung ANRI).

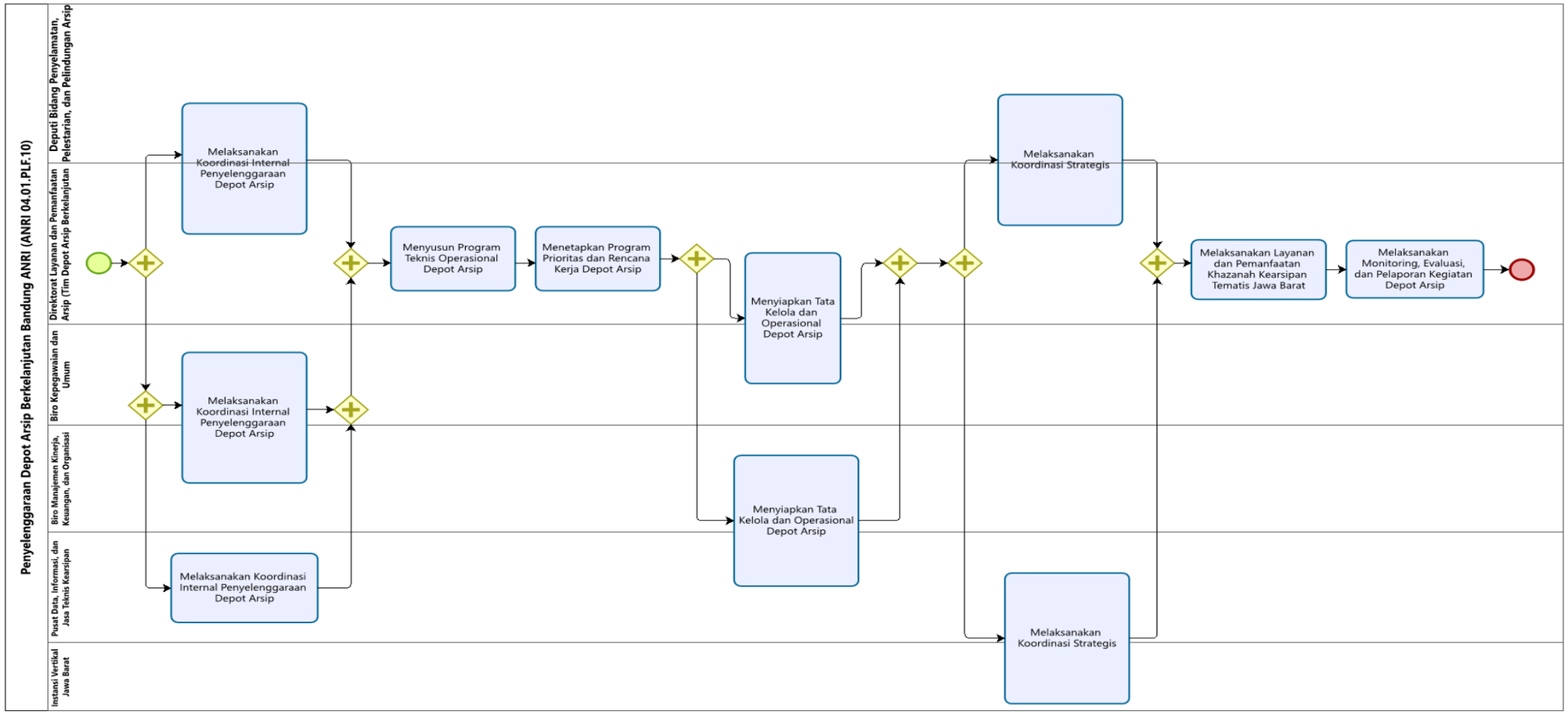

Gambar 113. Peta Lintas Fungsi (ANRI 04.01.PLF.10 Penyelenggaraan Depot Arsip Berkelanjutan Bandung ANRI)

IV.A.2. Proses Bisnis Level 2 (ANRI 04.02 Peningkatan Layanan Data dan Informasi Kearsipan Nasional);

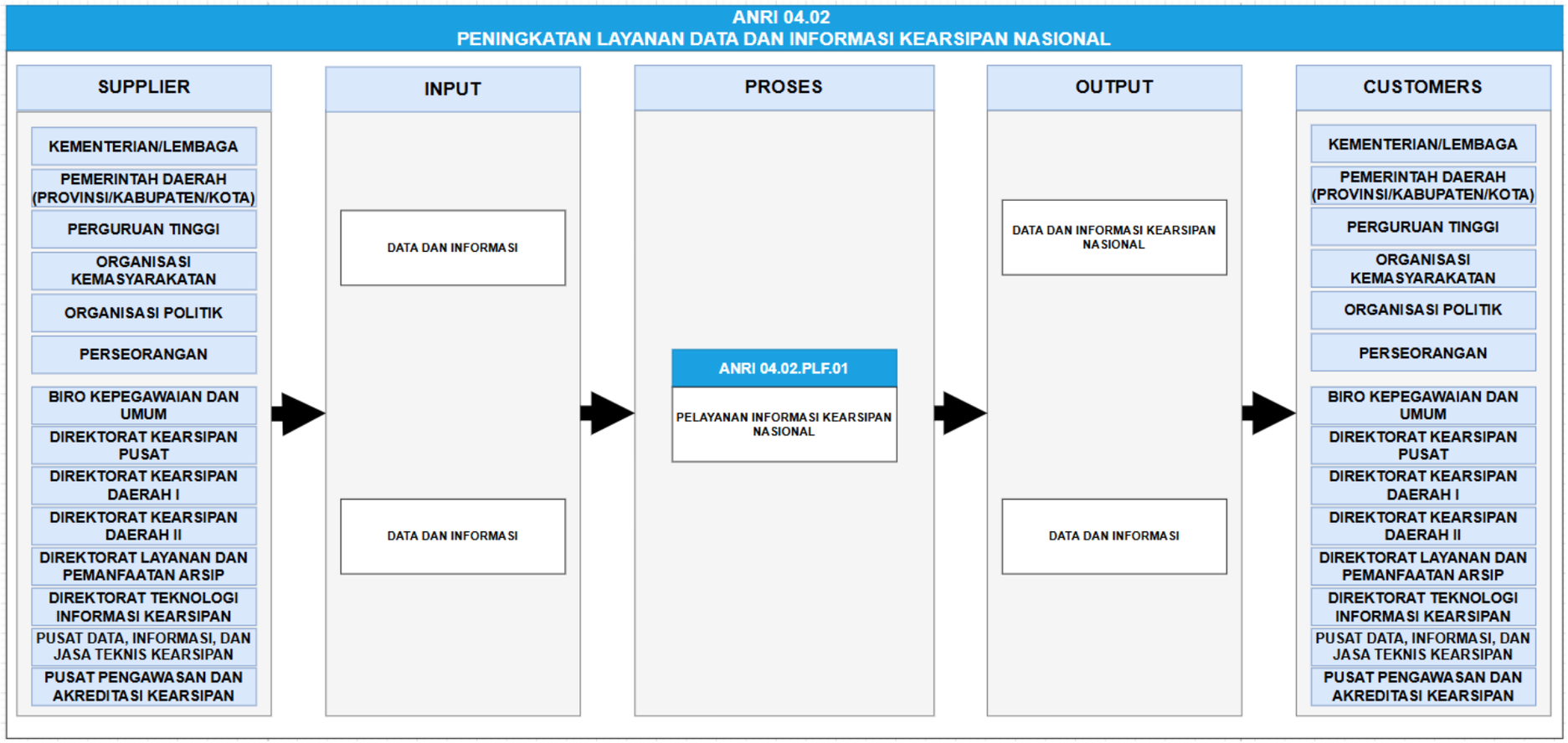

Gambar 114. Proses Bisnis Level 2 (ANRI 04.02 Peningkatan Layanan Data dan Informasi Kearsipan Nasional)

IV.B.2. Peta Relasi Proses Bisnis Level 2 (ANRI 04.02 Peningkatan Layanan Data dan Informasi Kearsipan Nasional);

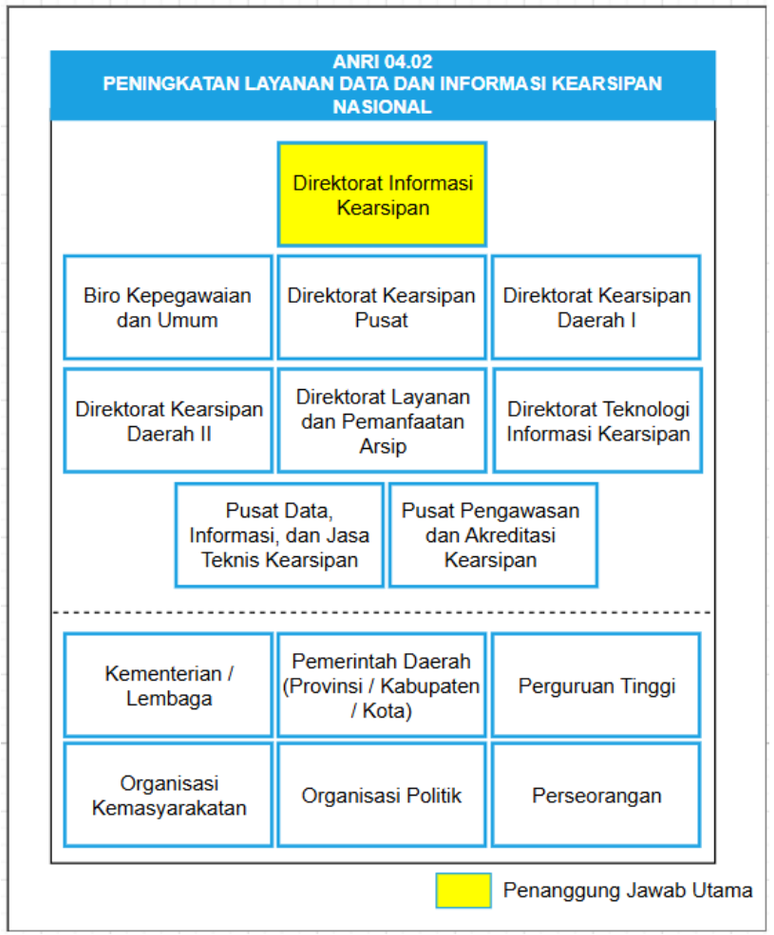

Gambar 115. Peta Relasi Proses Bisnis Level 2 (ANRI 04.02 Peningkatan Layanan Data dan Informasi Kearsipan Nasional)

IV.C.2.i. Peta Lintas Fungsi (ANRI 04.02.PLF.01 Pelayanan Informasi Kearsipan Nasional).

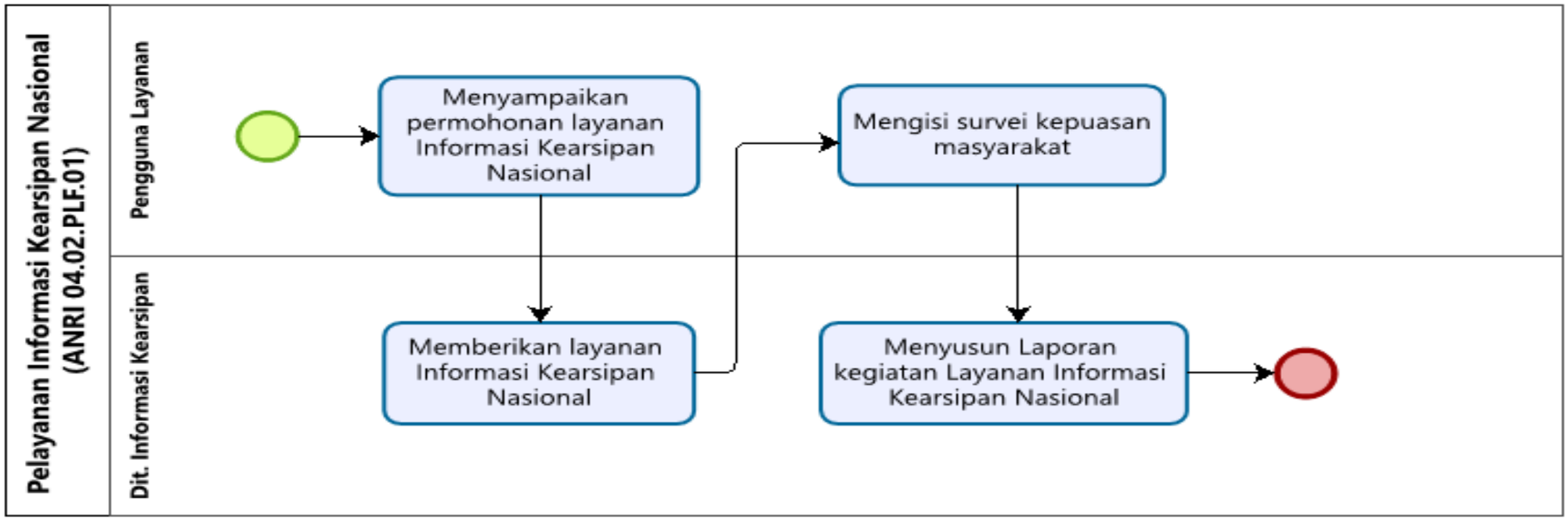

Gambar 116. Peta Lintas Fungsi (ANRI 04.02.PLF.01 Pelayanan Informasi Kearsipan Nasional)

IV.A.3. Proses Bisnis Level 2 (ANRI 04.03 Peningkatan Arsip yang Dimanfaatkan sebagai Memori Kolektif dan Jati Diri Bangsa);

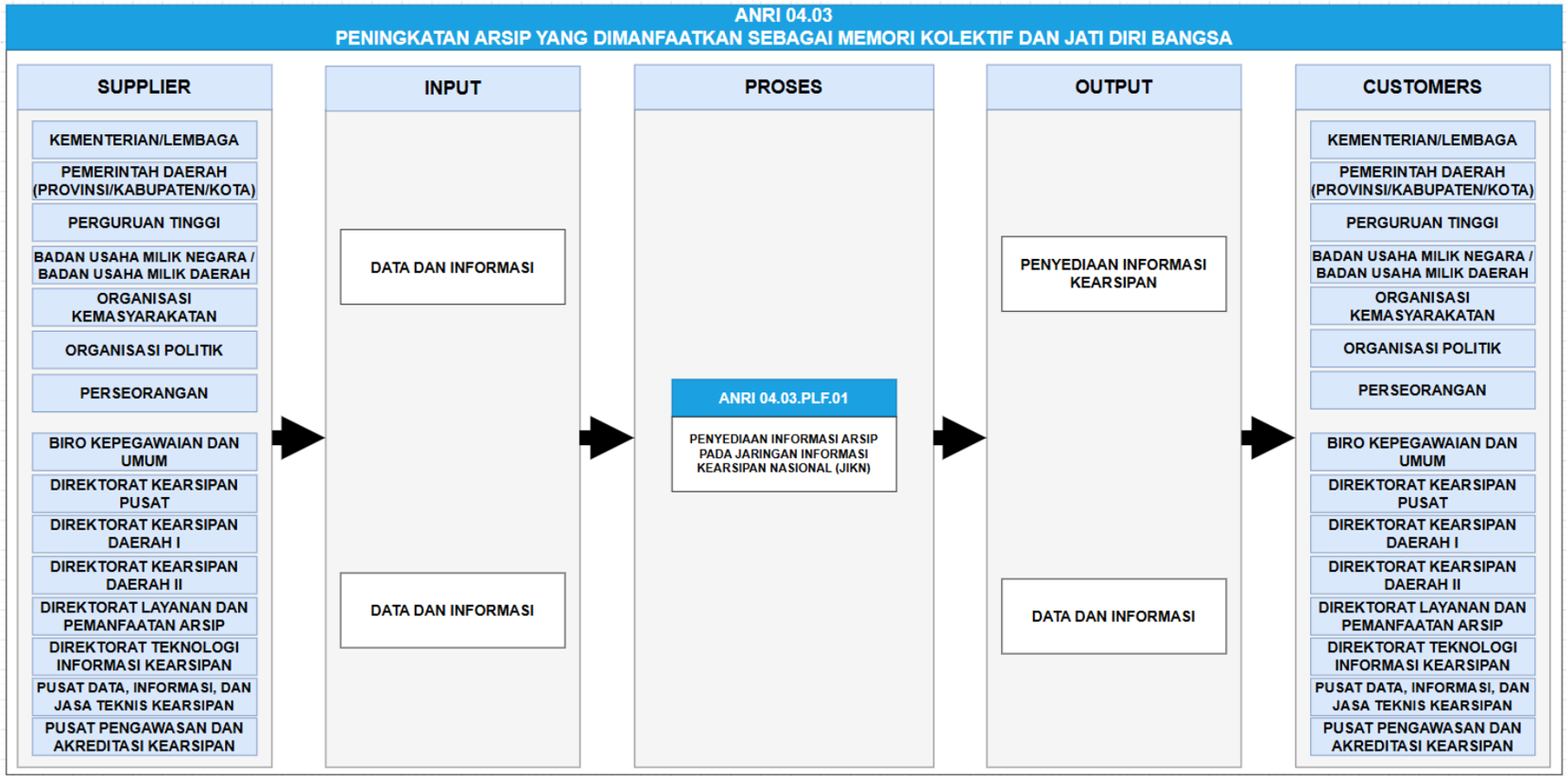

Gambar 117. Proses Bisnis Level 2 (ANRI 04.03 Peningkatan Arsip yang Dimanfaatkan sebagai Memori Kolektif dan Jati Diri Bangsa)

IV.B.3. Peta Relasi Proses Bisnis Level 2 (ANRI 04.03 Peningkatan Arsip yang Dimanfaatkan sebagai Memori Kolektif dan Jati Diri Bangsa);

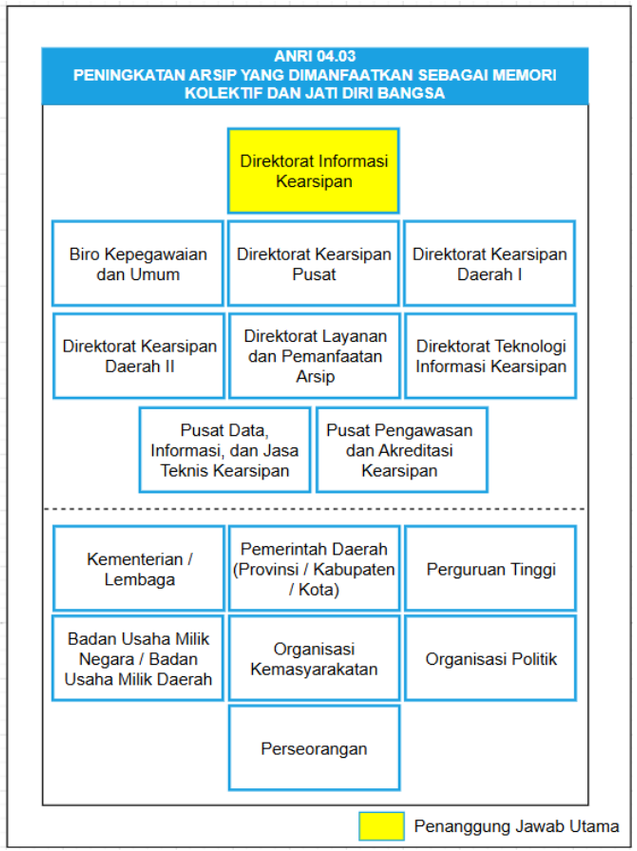

Gambar 118. Peta Relasi Proses Bisnis Level 2

(ANRI 04.03 Peningkatan Arsip yang Dimanfaatkan sebagai Memori Kolektif dan Jati Diri Bangsa)

IV.C.3.i. Peta Lintas Fungsi (ANRI 04.03.PLF.01 Penyediaan Informasi Arsip pada Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN)).

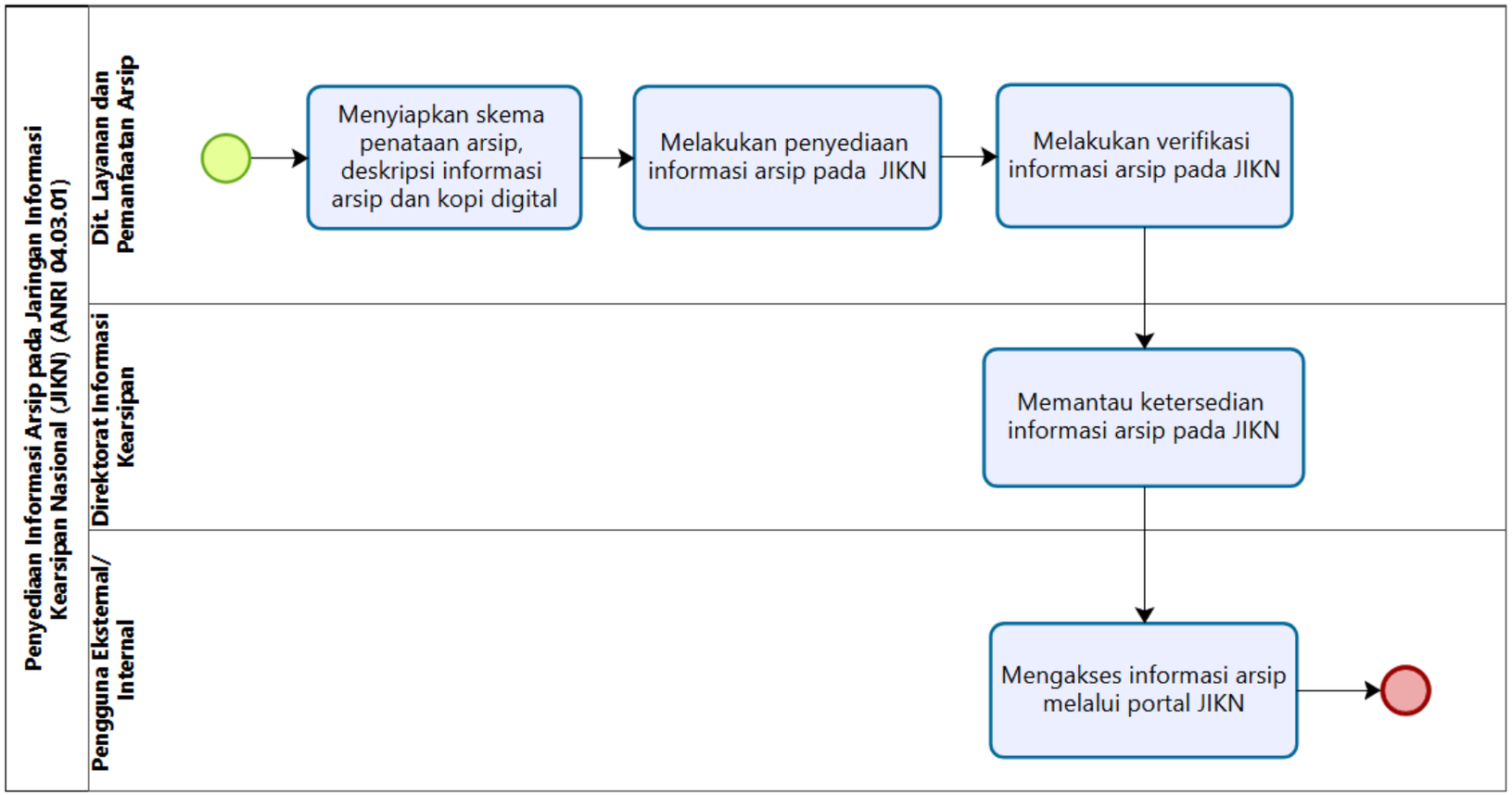

Gambar 119. Peta Lintas Fungsi (ANRI 04.03.PLF.01 Penyediaan Informasi Arsip pada Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN))

II. Proses Pendukung

II.A. Proses Bisnis Level 1 (ANRI 05 Pelayanan Perencanaan);

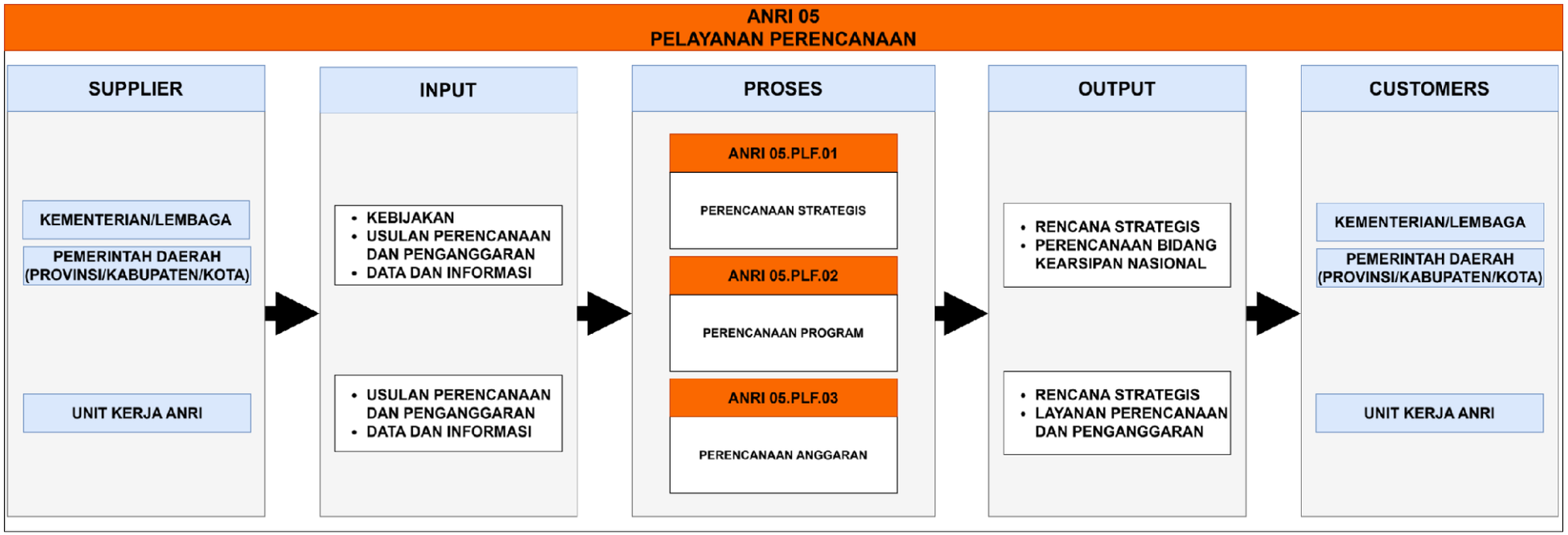

Gambar 120. Proses Bisnis Level 1 (ANRI 05 Pelayanan Perencanaan)

II.B. Peta Relasi Proses Bisnis Level 1 (ANRI 05 Pelayanan Perencanaan);

Gambar 121. Peta Relasi Proses Bisnis Level 1 (ANRI 05 Pelayanan Perencanaan)

II.C.1.i. Peta Lintas Fungsi (ANRI 05.PLF.01 Perencanaan Strategis);

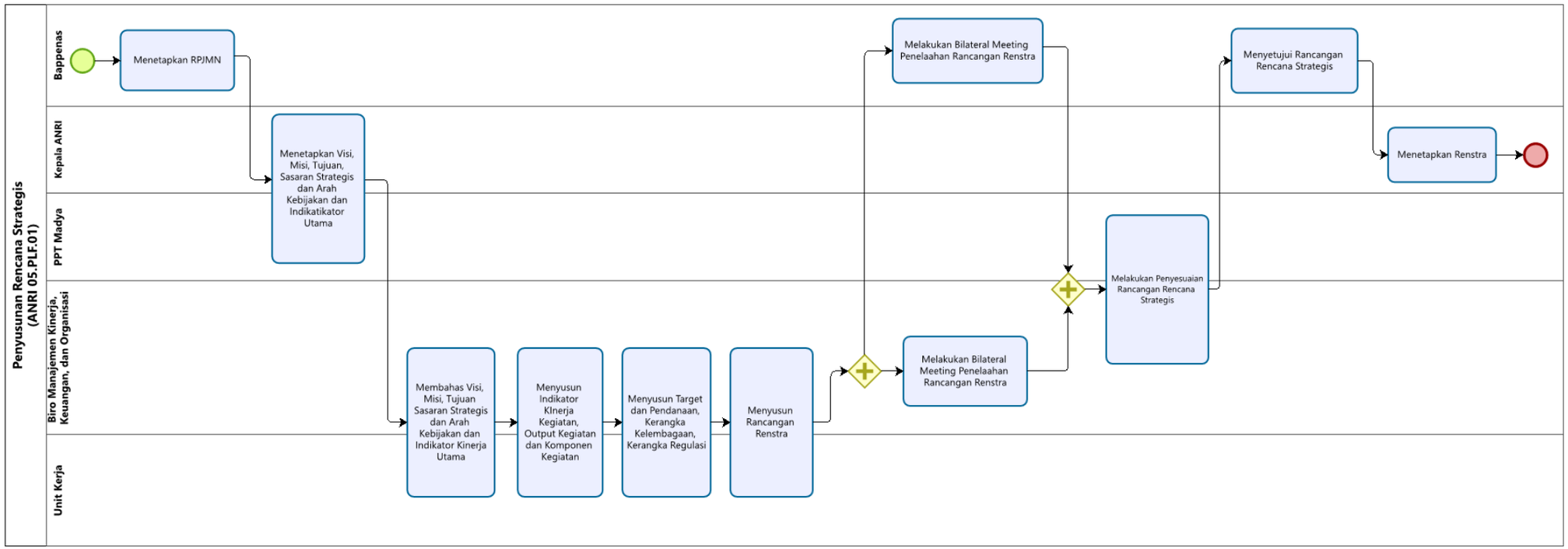

Gambar 122. Peta Lintas Fungsi (ANRI 05.PLF.01 Perencanaan Strategis)

II.C.1.ii. Peta Lintas Fungsi (ANRI 05.PLF.02 Perencanaan Program);

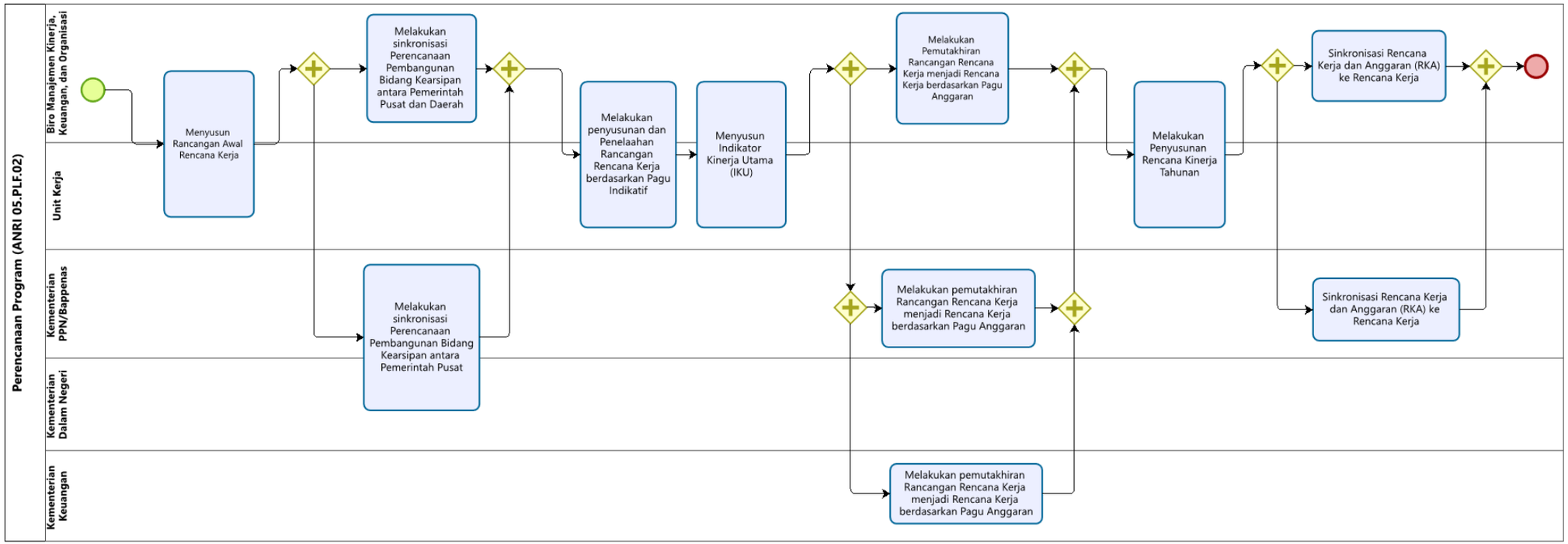

Gambar 123. Peta Lintas Fungsi (ANRI 05.PLF.02 Perencanaan Program)

II.C.1.iii. Peta Lintas Fungsi (ANRI 05.PLF.03 Perencanaan Anggaran).

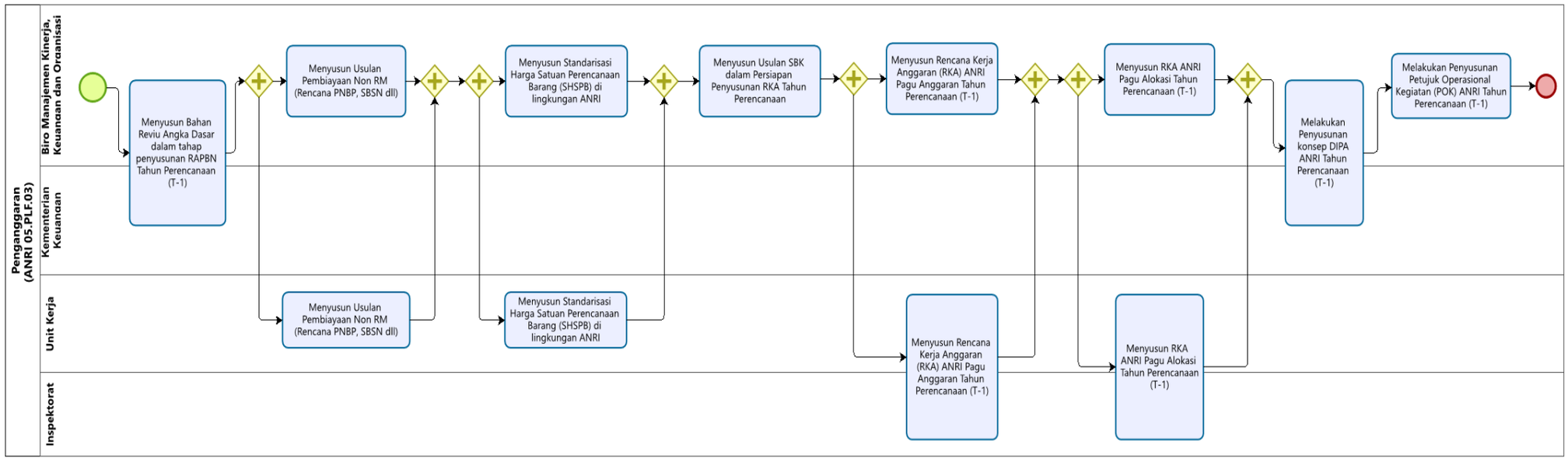

Gambar 124. Peta Lintas Fungsi (ANRI 05.PLF.03 Perencanaan Anggaran)

II.A. Proses Bisnis Level 1 (ANRI 06 Pelayanan Organisasi dan Tata Laksana);

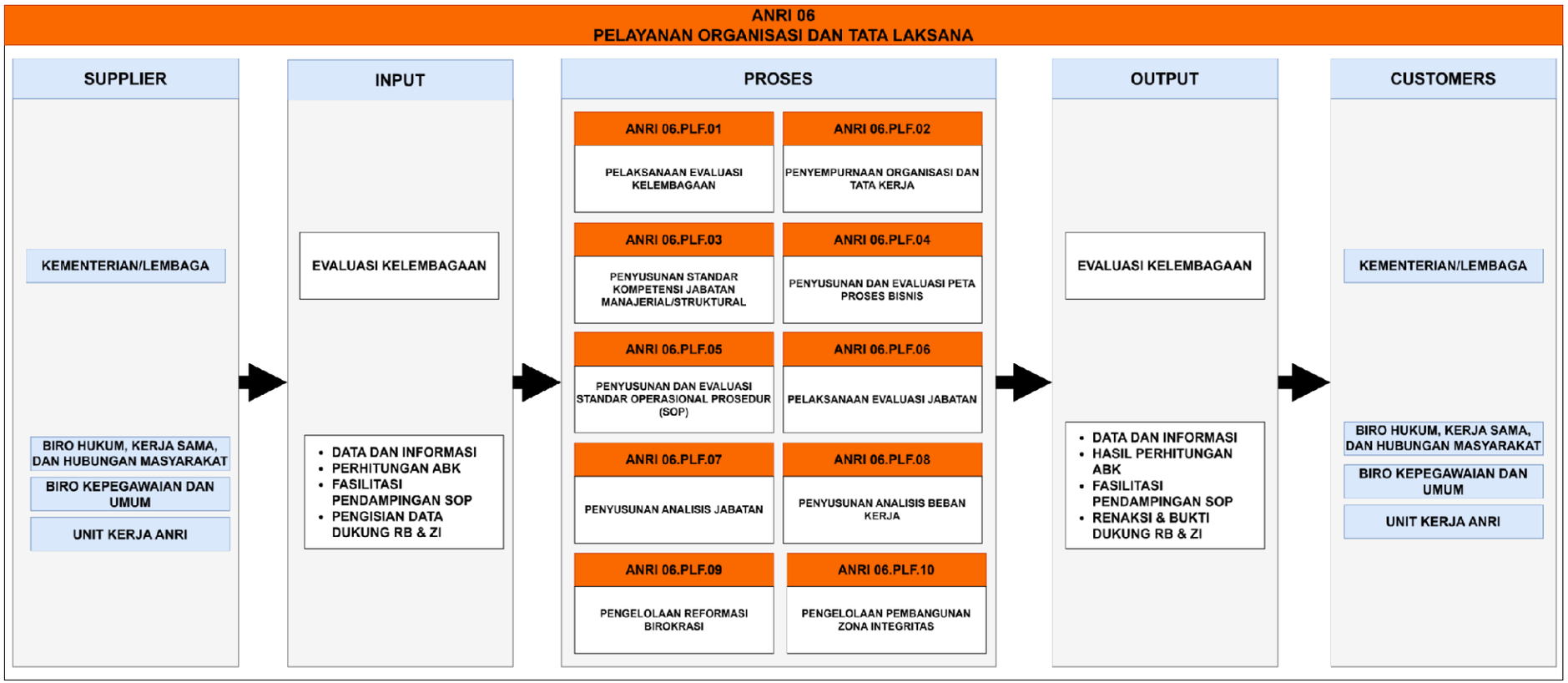

Gambar 125. Proses Bisnis Level 1 (ANRI 06 Pelayanan Organisasi dan Tata Laksana)

II.B. Peta Relasi Proses Bisnis Level 1 (ANRI 06 Pelayanan Organisasi dan Tata Laksana);

Gambar 126. Peta Relasi Proses Bisnis Level 1 (ANRI 06 Pelayanan Organisasi dan Tata Laksana)

II.C.1.i. Peta Lintas Fungsi (ANRI 06.PLF.01 Pelaksanaan Evaluasi Kelembagaan);

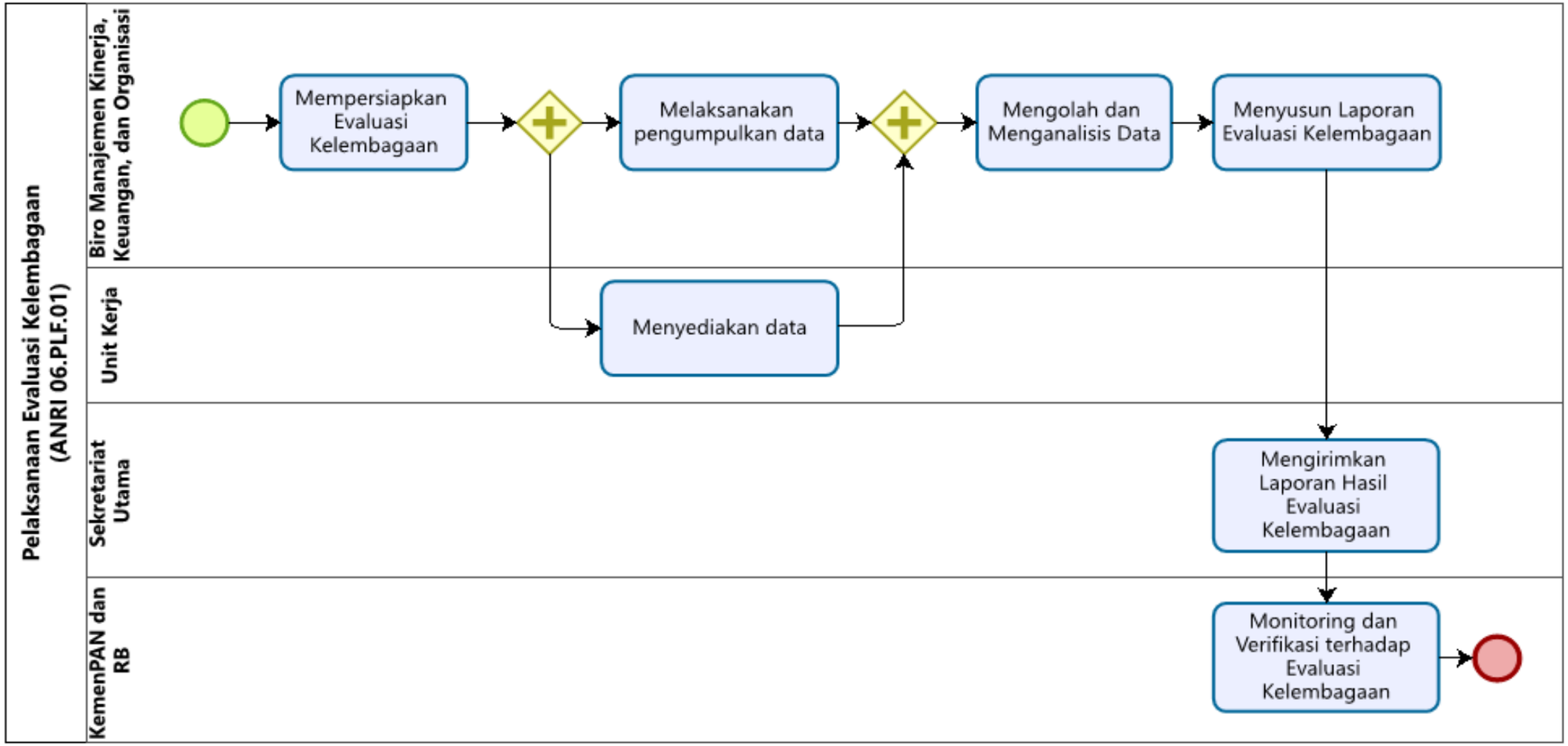

Gambar 127. Peta Lintas Fungsi (ANRI 06.PLF.01 Pelaksanaan Evaluasi Kelembagaan)

II.C.1.ii. Peta Lintas Fungsi (ANRI 06.PLF.02 Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja);

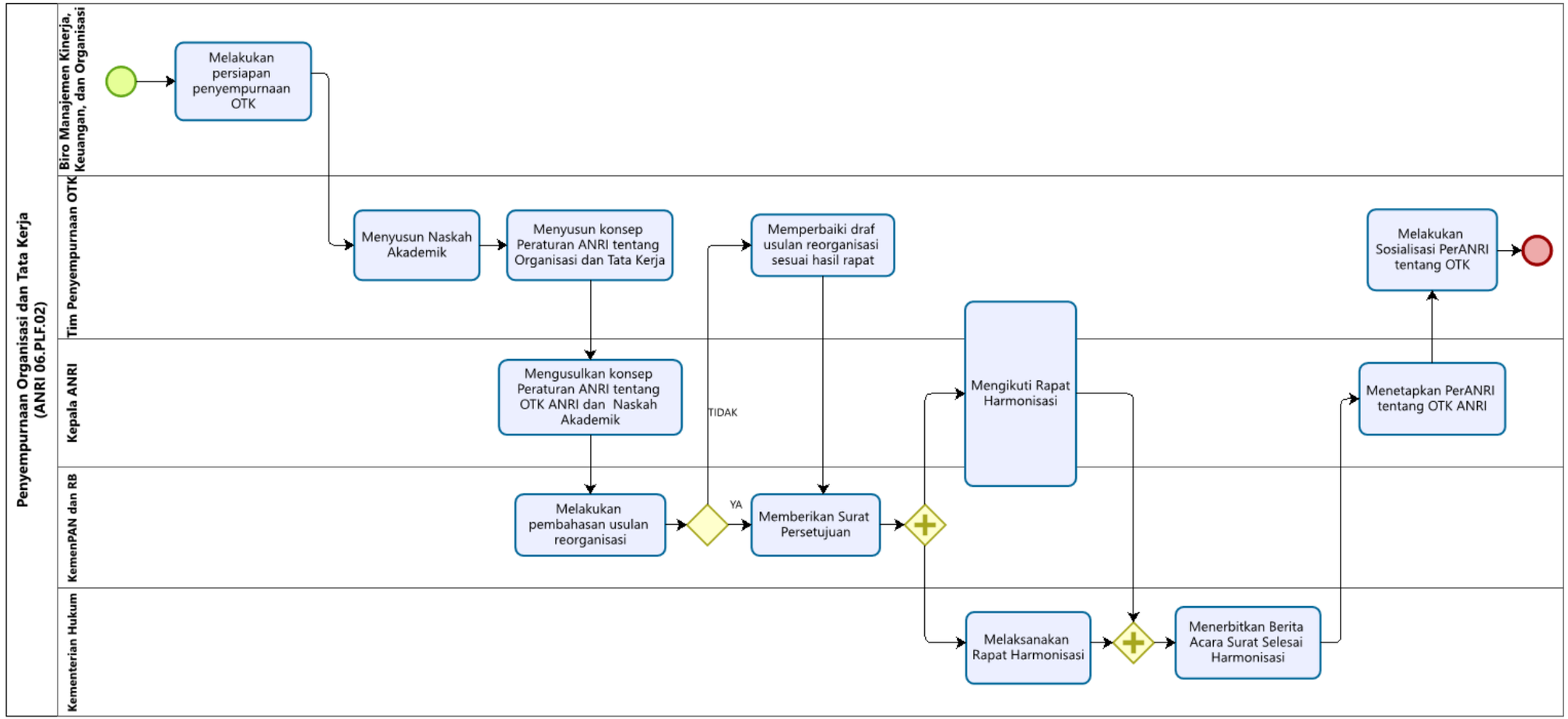

Gambar 128. Peta Lintas Fungsi (ANRI 06.PLF.02 Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja)

II.C.1.iii. Peta Lintas Fungsi (ANRI 06.PLF.03 Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Manajerial/Struktural);

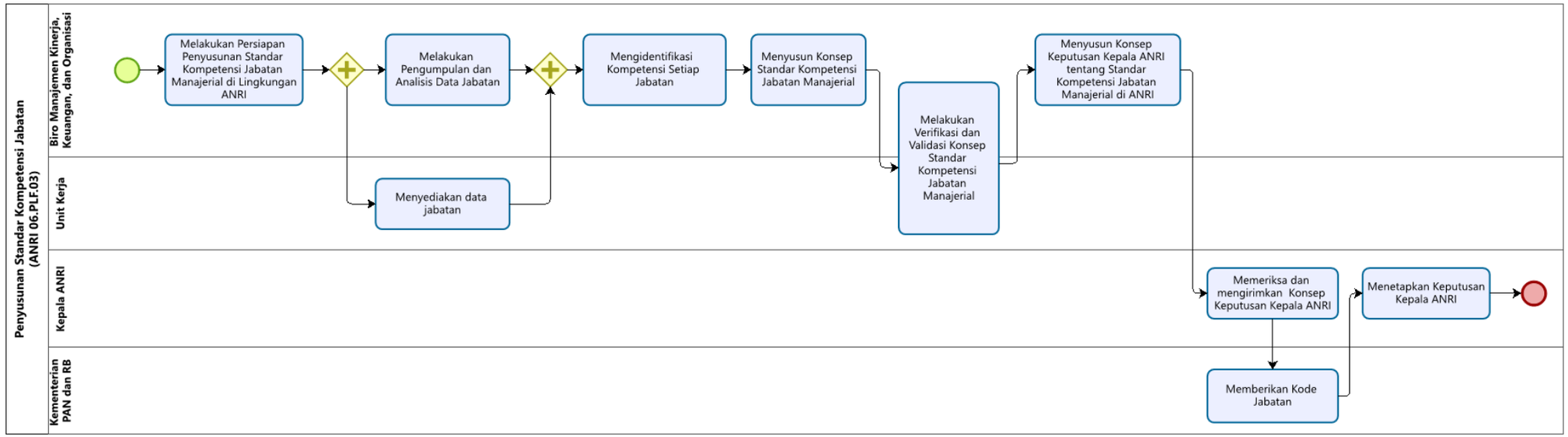

Gambar 129. Peta Lintas Fungsi (ANRI 06.PLF.03 Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Manajerial/Struktural)

II.C.1.iv. Peta Lintas Fungsi (ANRI 06.PLF.04 Penyusunan dan Evaluasi Peta Proses Bisnis);

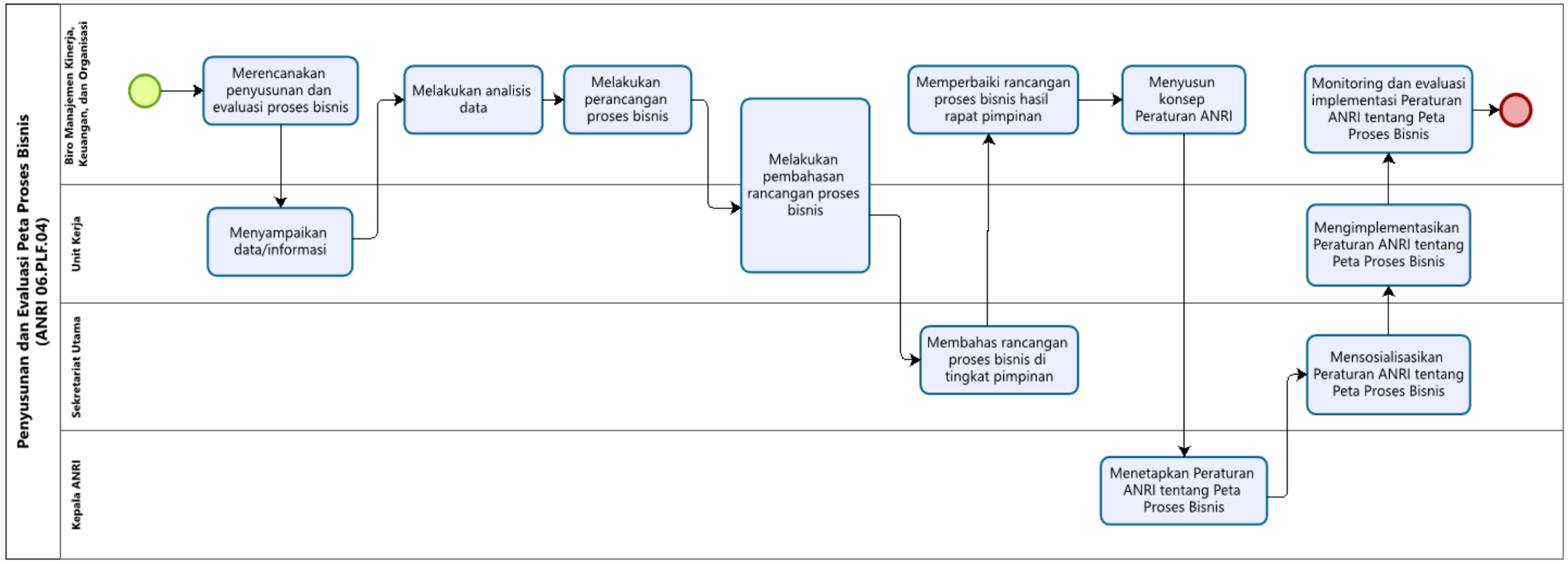

Gambar 130. Peta Lintas Fungsi (ANRI 06.PLF.04 Penyusunan dan Evaluasi Peta Proses Bisnis)

II.C.1.v. Peta Lintas Fungsi (ANRI 06.PLF.05 Penyusunan dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP));

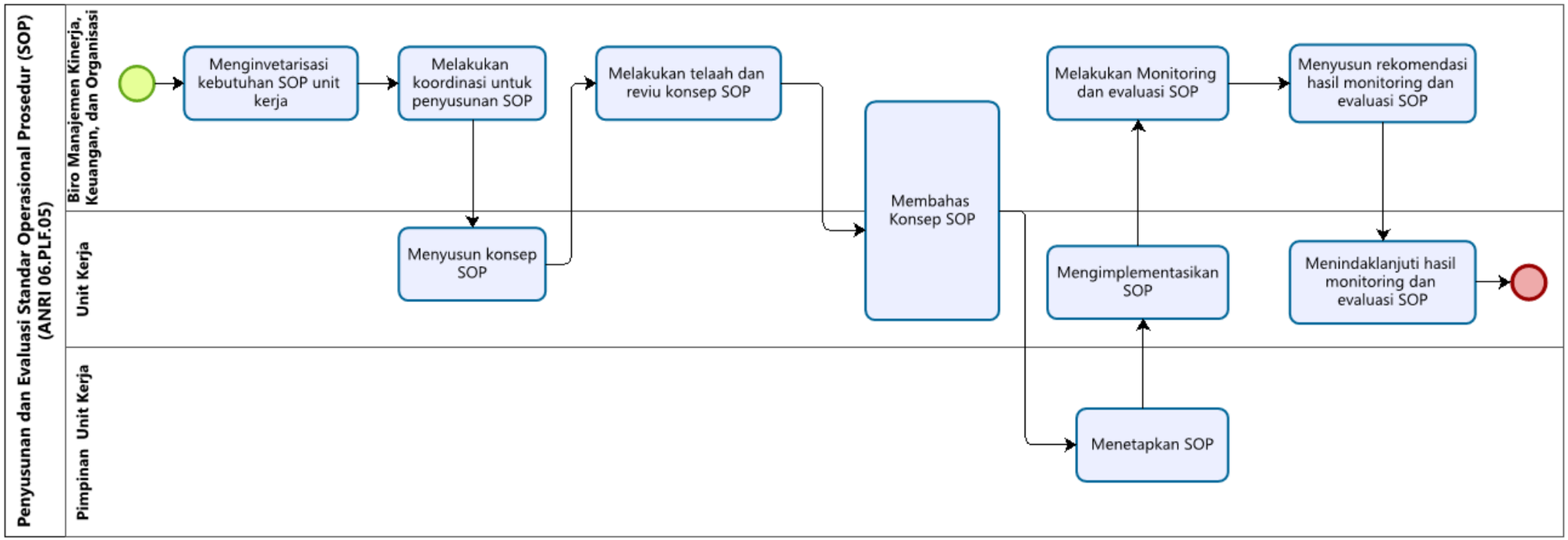

Gambar 131. Peta Lintas Fungsi (ANRI 06.PLF.05 Penyusunan dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP))

II.C.1.vi. Peta Lintas Fungsi (ANRI 06.PLF.06 Pelaksanaan Evaluasi Jabatan);

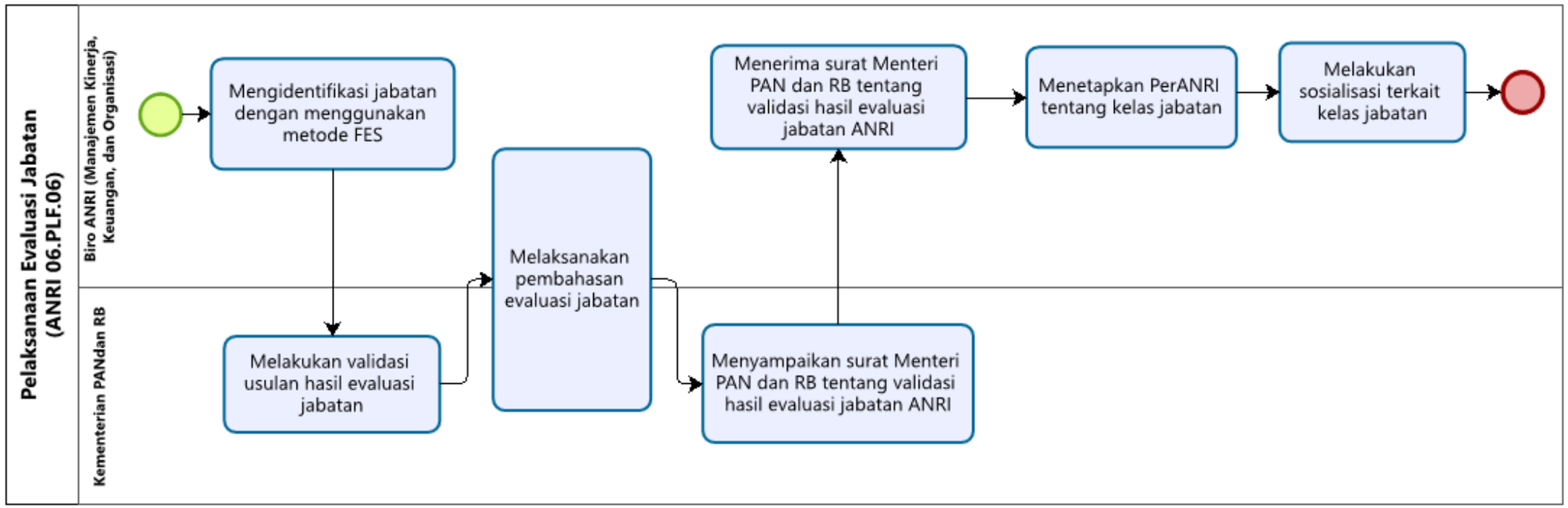

Gambar 132. Peta Lintas Fungsi (ANRI 06.PLF.06 Pelaksanaan Evaluasi Jabatan)

II.C.1.vii. Peta Lintas Fungsi (ANRI 06.PLF.07 Penyusunan Analisis Jabatan);

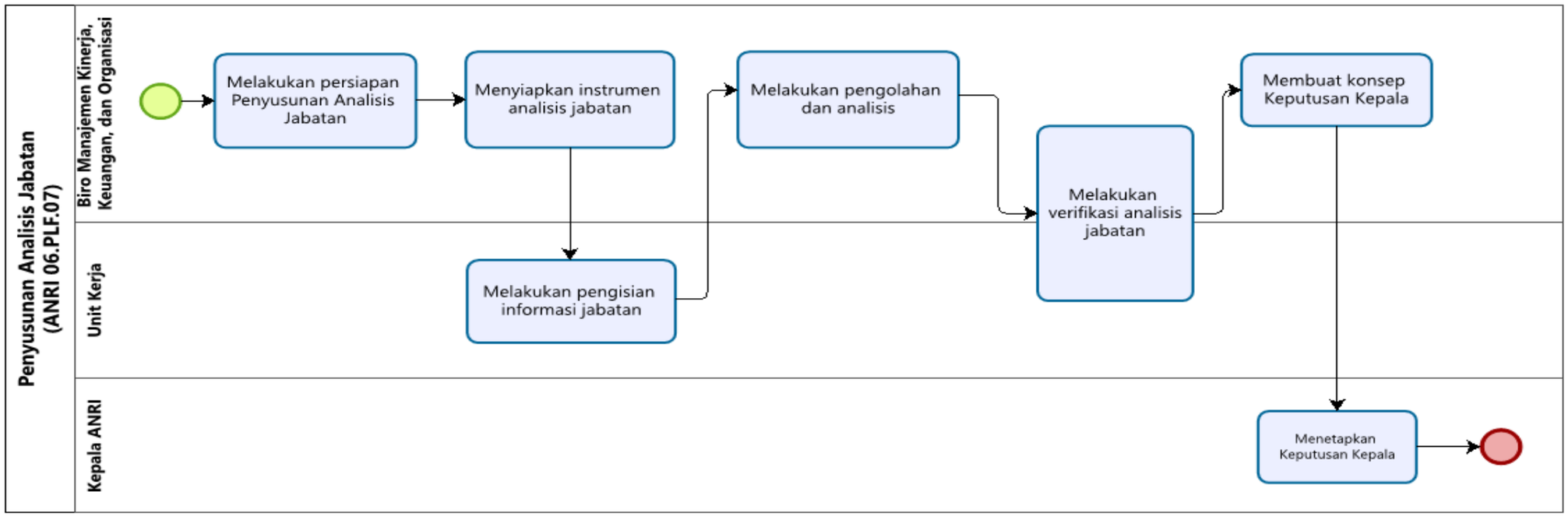

Gambar 133. Peta Lintas Fungsi (ANRI 06.PLF.07 Penyusunan Analisis Jabatan)

II.C.1.viii. Peta Lintas Fungsi (ANRI 06.PLF.08 Penyusunan Analisis Beban Kerja);

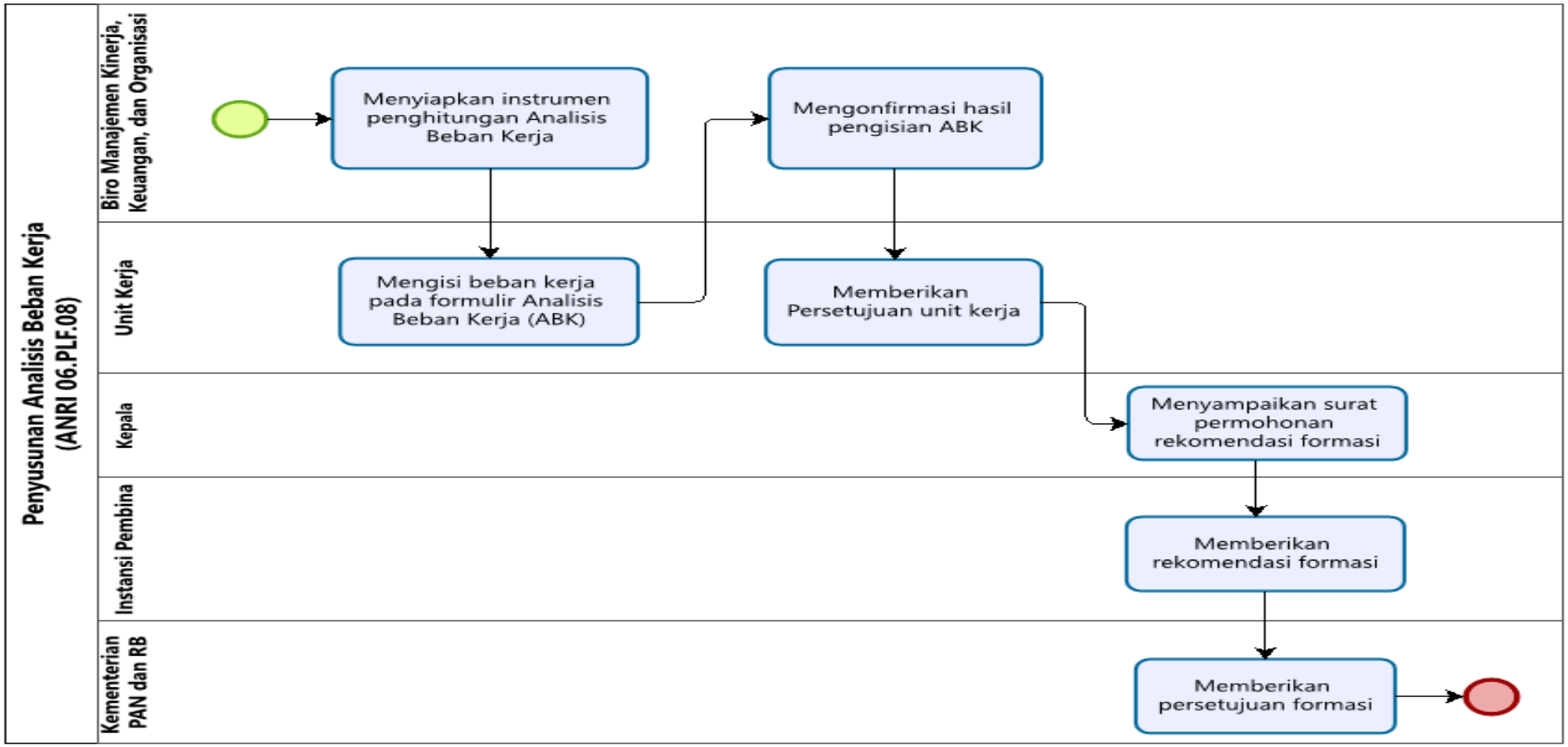

Gambar 134. Peta Lintas Fungsi (ANRI 06.PLF.08 Penyusunan Analisis Beban Kerja)

II.C.1.ix. Peta Lintas Fungsi (ANRI 06.PLF.09 Pengelolaan Reformasi Birokrasi);

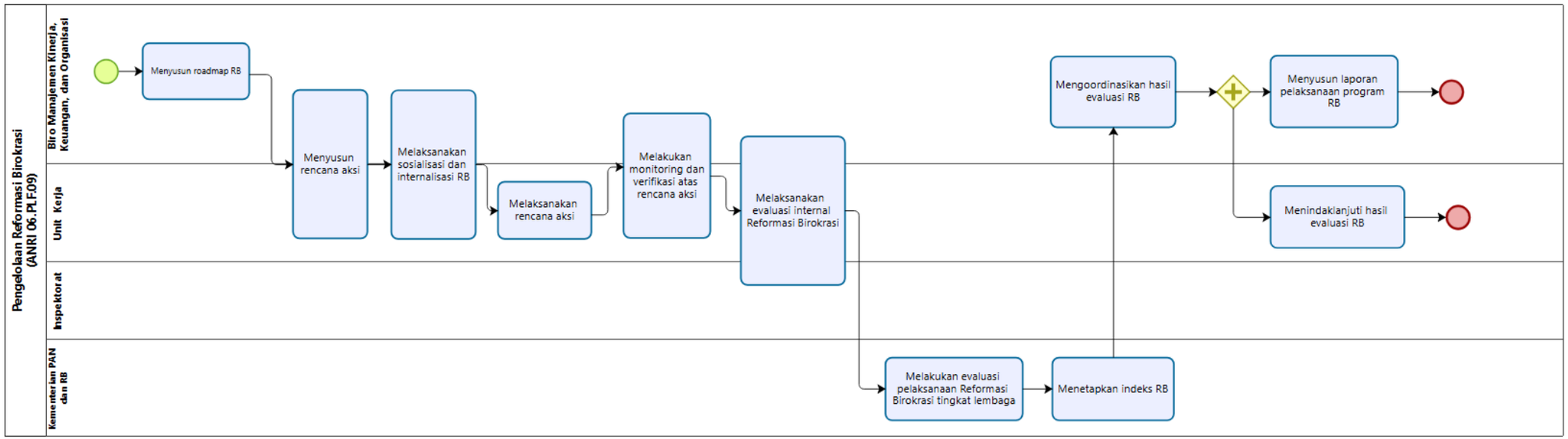

Gambar 135. Peta Lintas Fungsi (ANRI 06.PLF.09 Pengelolaan Reformasi Birokrasi)

II.C.1.x. Peta Lintas Fungsi (ANRI 06.PLF.10 Pengelolaan Pembangunan Zona Integritas).

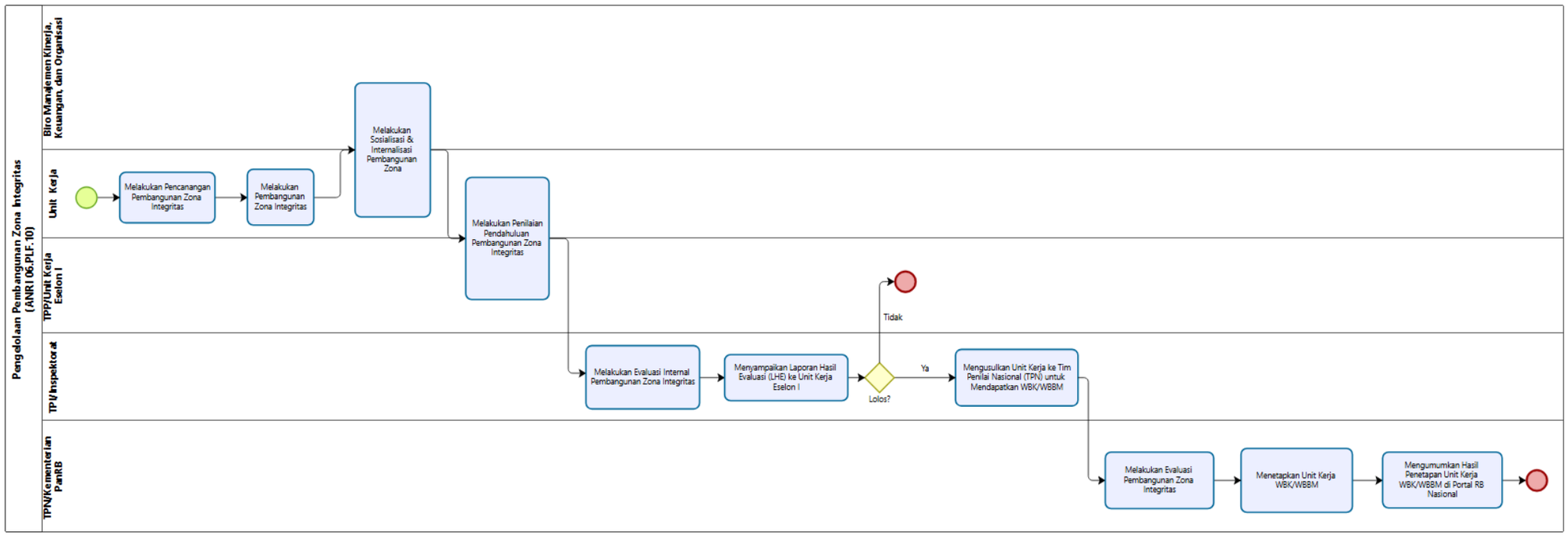

Gambar 136. Peta Lintas Fungsi (ANRI 06.PLF.10 Pengelolaan Pembangunan Zona Integritas)

III.A. Proses Bisnis Level 1 (ANRI 07 Pelayanan Keuangan);

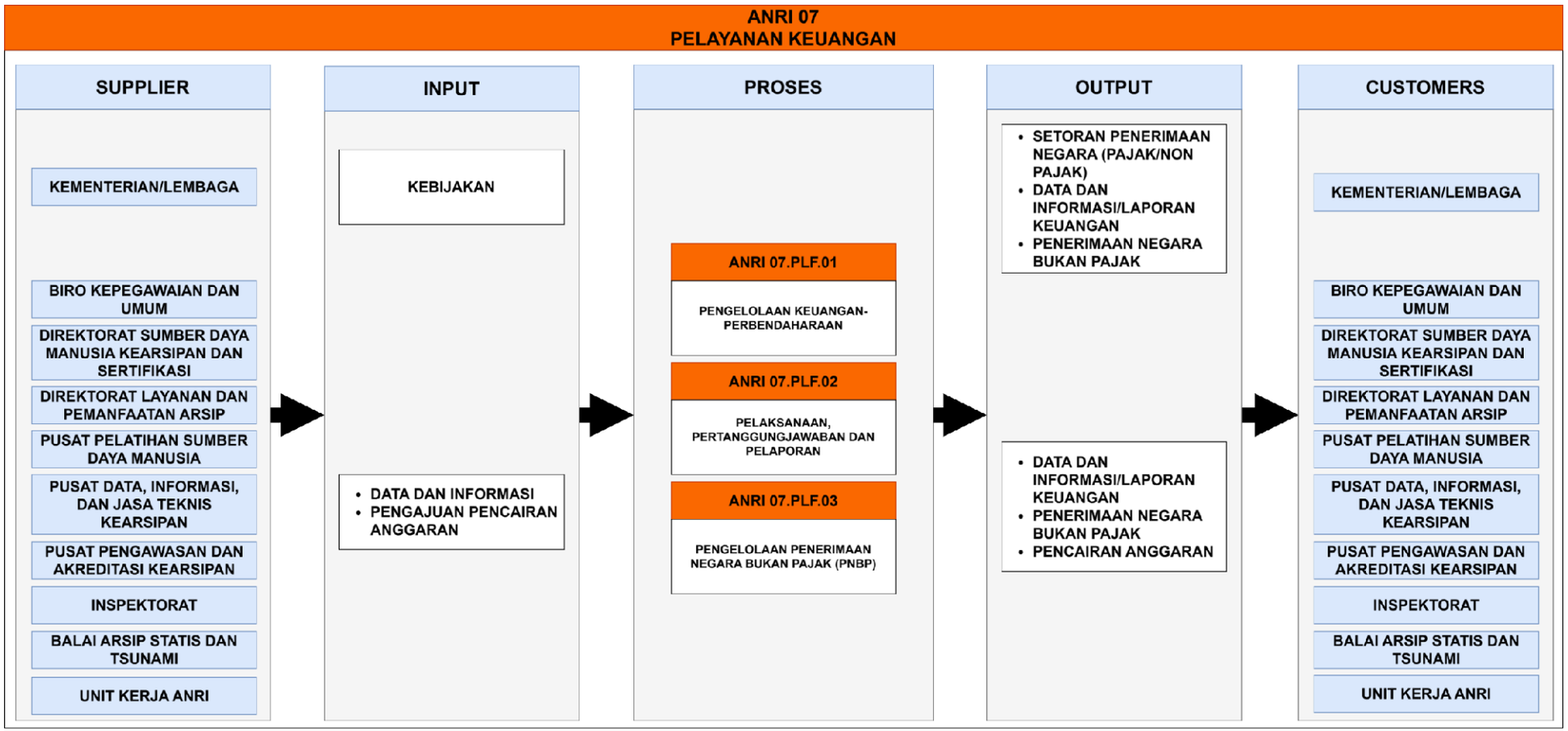

Gambar 137. Proses Bisnis Level 1 (ANRI 07 Pelayanan Keuangan)

III.B. Peta Relasi Proses Bisnis Level 1 (ANRI 07 Pelayanan Keuangan);

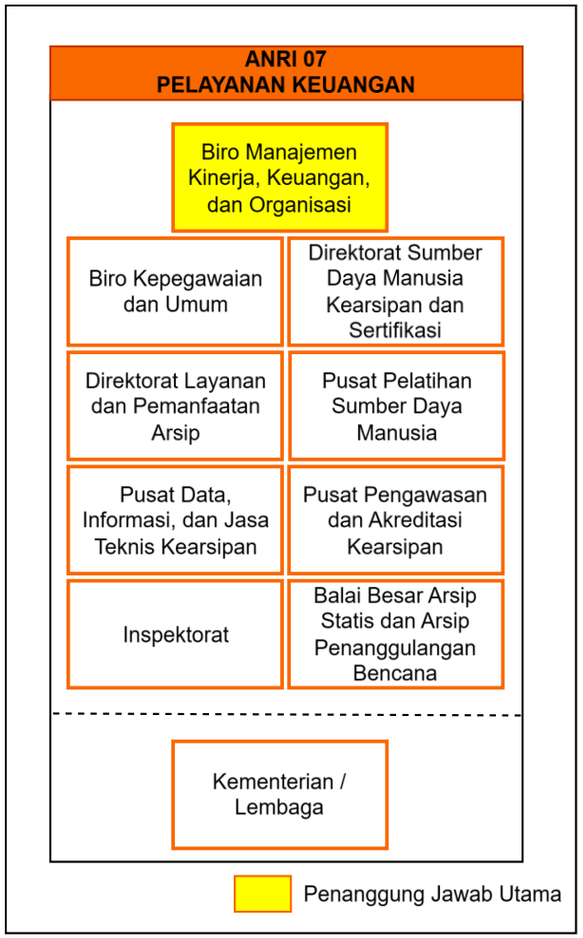

Gambar 138. Peta Relasi Proses Bisnis Level 1 (ANRI 07 Pelayanan Keuangan)

III.C.1.i. Peta Lintas Fungsi (ANRI 07.PLF.01 Pengelolaan Keuangan-Perbendaharaan);

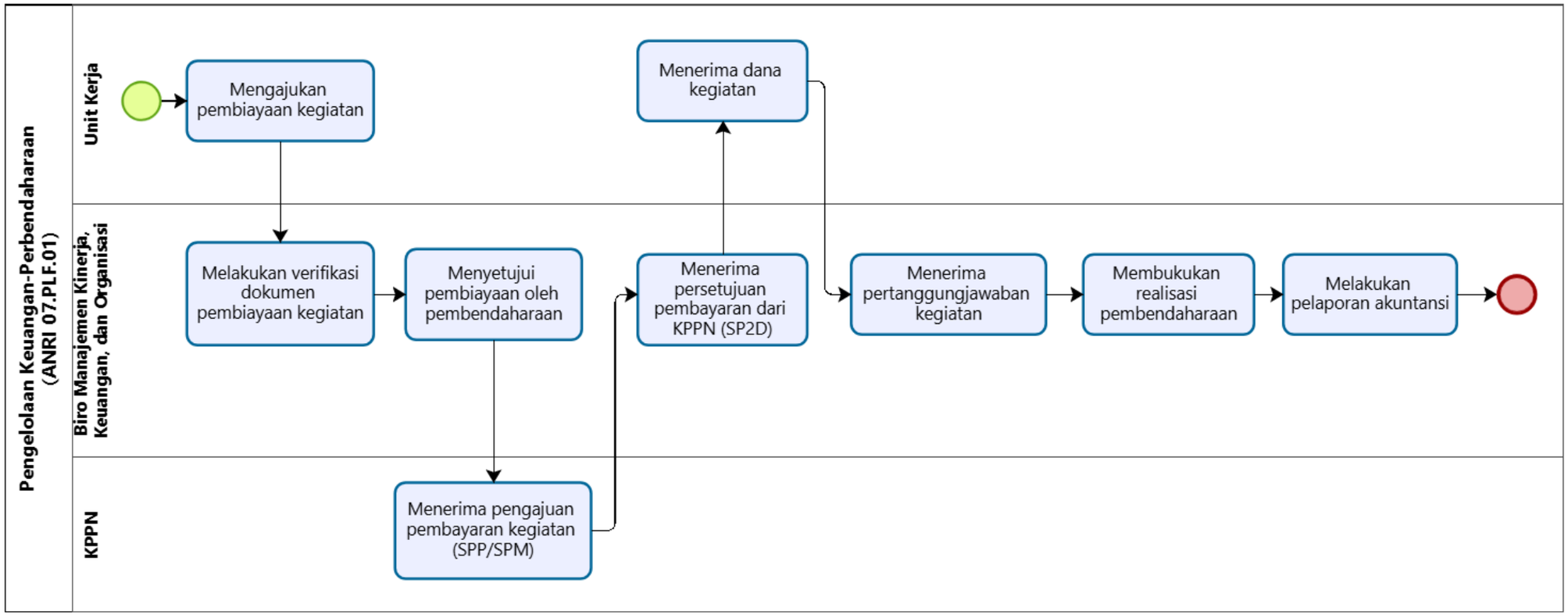

Gambar 139. Peta Lintas Fungsi (ANRI 07.PLF.01 Pengelolaan Keuangan-Perbendaharaan)

III.C.1.ii. Peta Lintas Fungsi (ANRI 07.PLF.02 Pelaksanaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan);

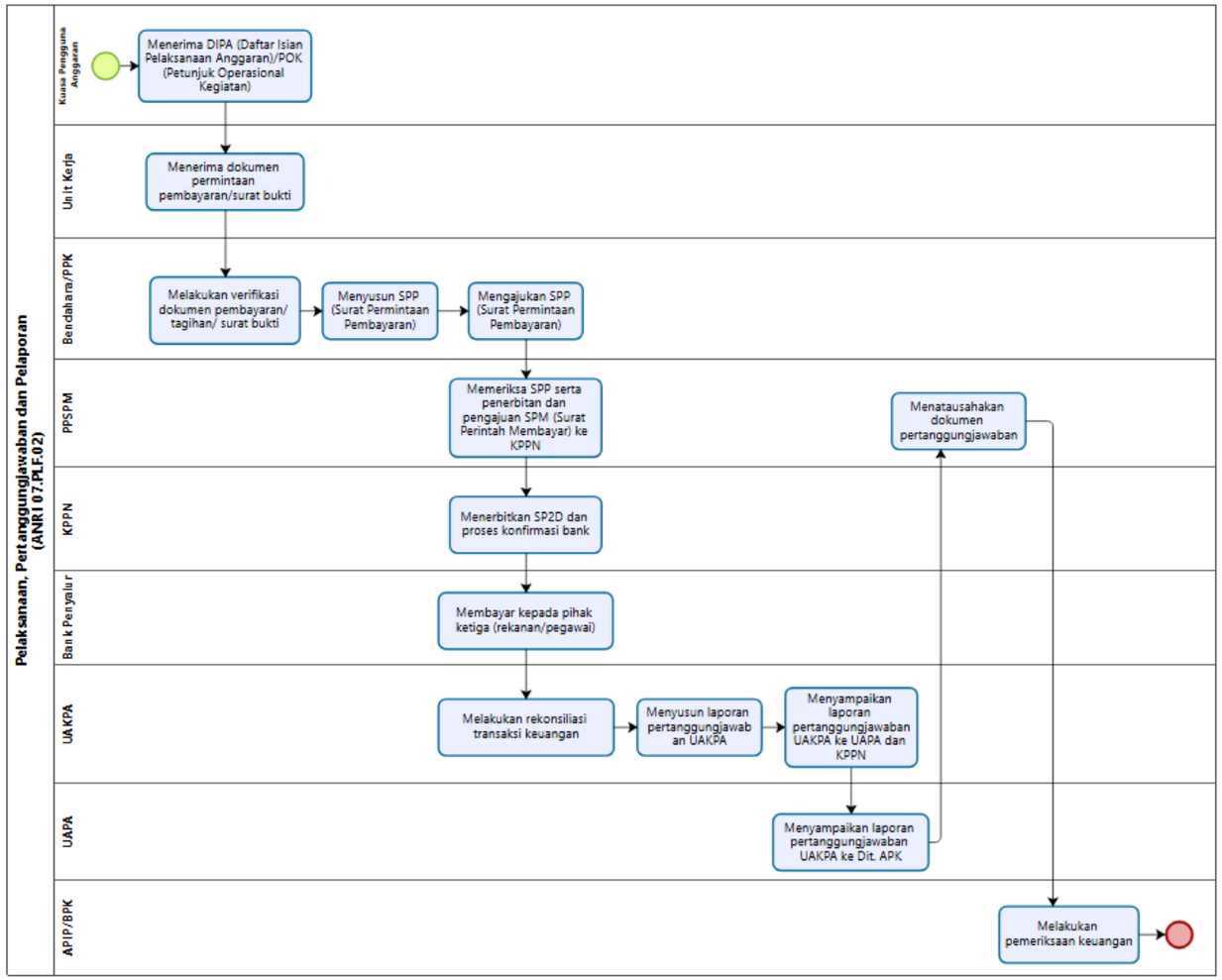

Gambar 140. Peta Lintas Fungsi (ANRI 07.PLF.02 Pelaksanaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan)

III.C.1.iii. Peta Lintas Fungsi (ANRI 07.PLF.03 Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)).

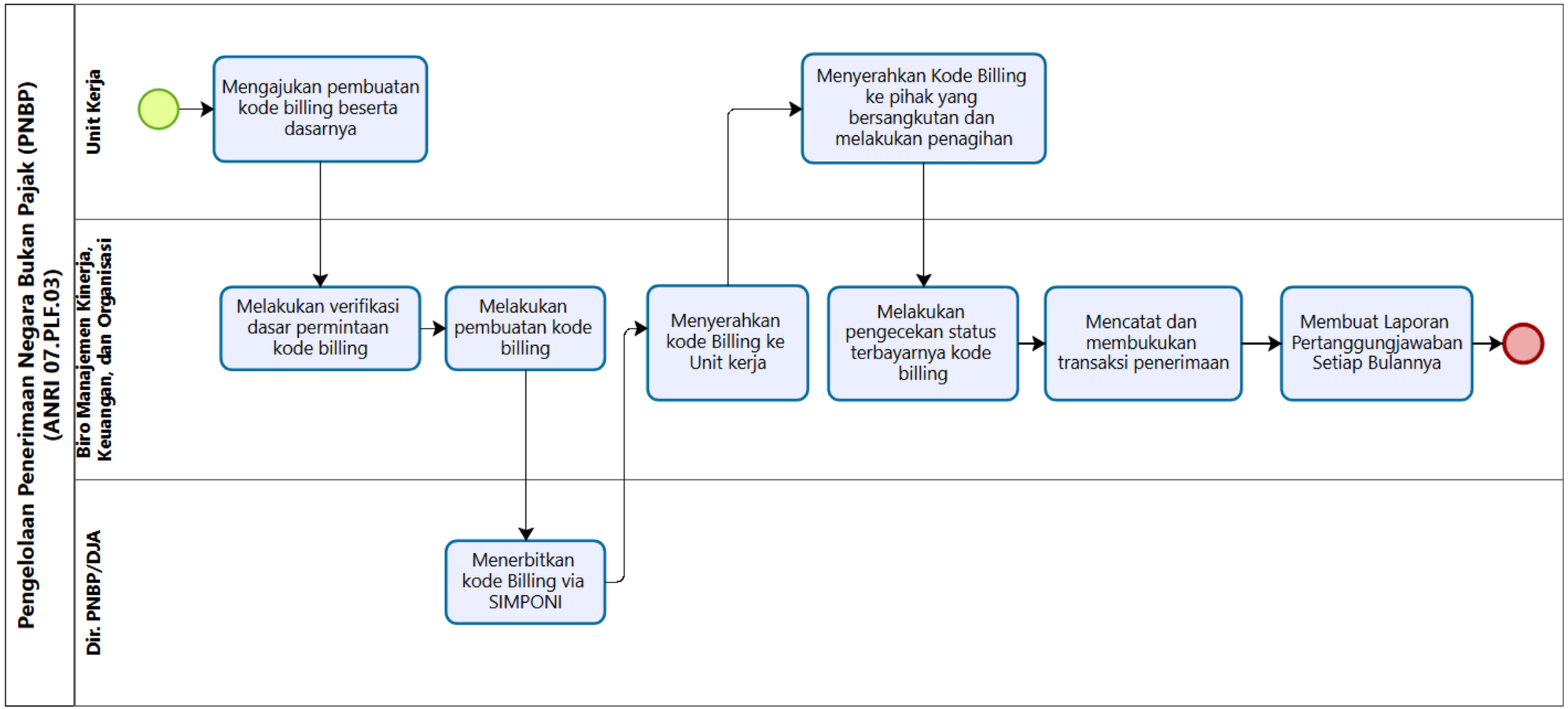

Gambar 141. Peta Lintas Fungsi (ANRI 07.PLF.03 Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP))

IV.A. Proses Bisnis Level 1 (ANRI 08 Pelayanan Monitoring dan Evaluasi Serta Pelaporan);

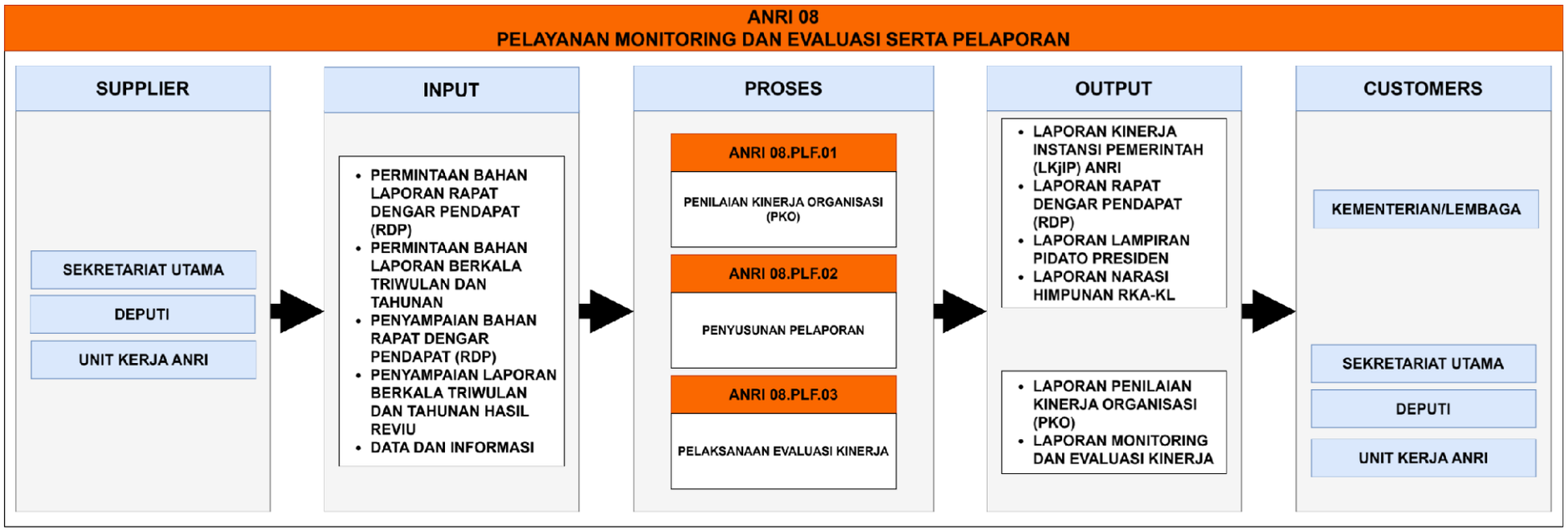

Gambar 142. Proses Bisnis Level 1 (ANRI 08 Pelayanan Monitoring dan Evaluasi Serta Pelaporan)

IV.B. Peta Relasi Proses Bisnis Level 1 (ANRI 08 Pelayanan Monitoring dan Evaluasi Serta Pelaporan);

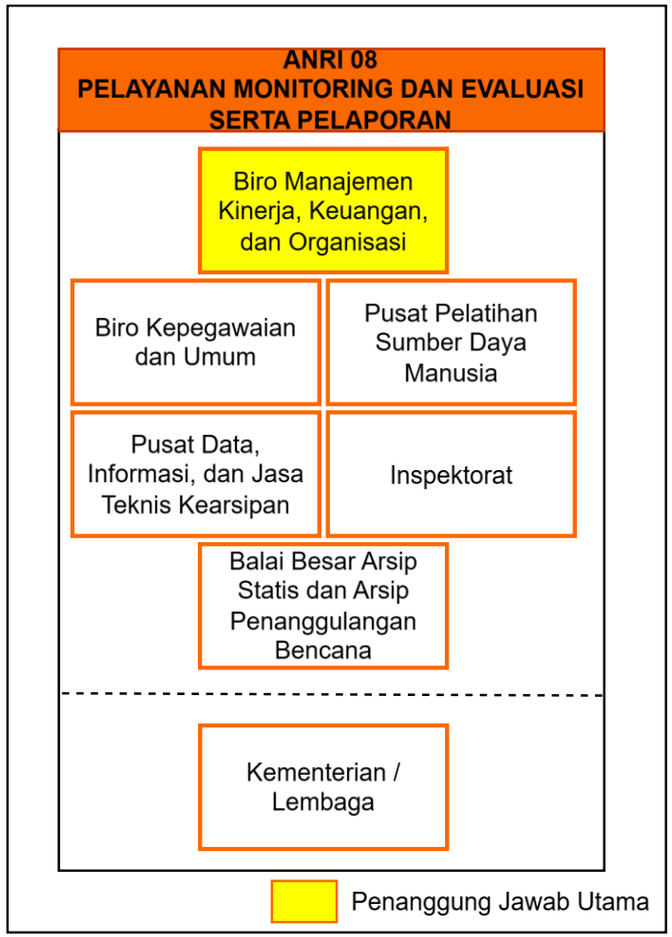

Gambar 143. Peta Relasi Proses Bisnis Level 1 (ANRI 08 Pelayanan Monitoring dan Evaluasi Serta Pelaporan)

IV.C.1.i. Peta Lintas Fungsi (ANRI 08.PLF.01 Penilaian Kinerja Organisasi (PKO));

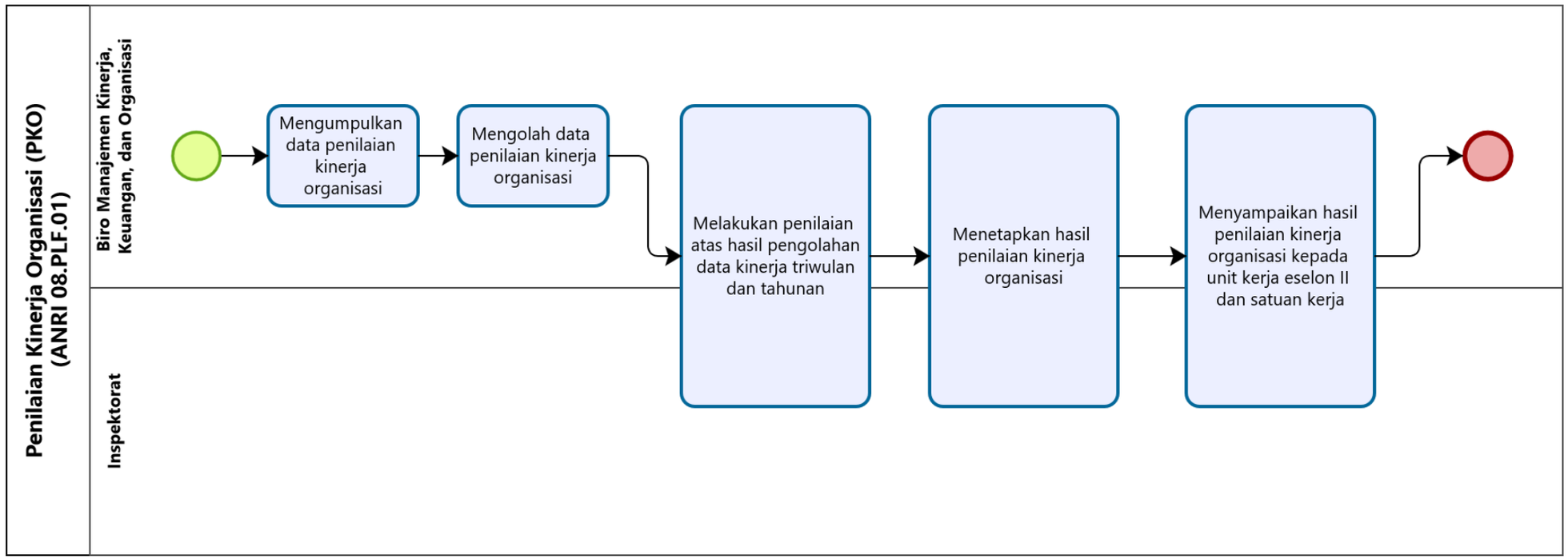

Gambar 144. Peta Lintas Fungsi (ANRI 08.PLF.01 Penilaian Kinerja Organisasi (PKO))

IV.C.1.ii. Peta Lintas Fungsi (ANRI 08.PLF.02 Penyusunan Pelaporan);

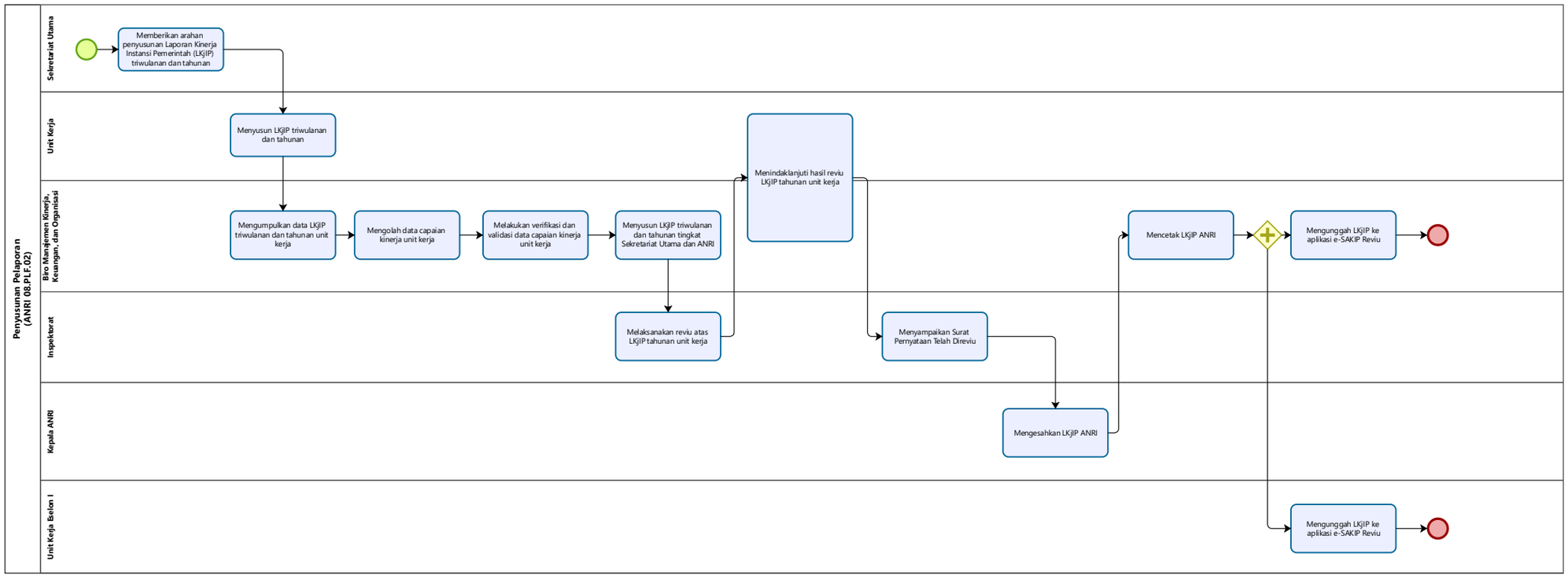

Gambar 145. Peta Lintas Fungsi (ANRI 08.PLF.02 Penyusunan Pelaporan)

IV.C.1.iii. Peta Lintas Fungsi (ANRI 08.PLF.03 Pelaksanaan Evaluasi Kinerja).

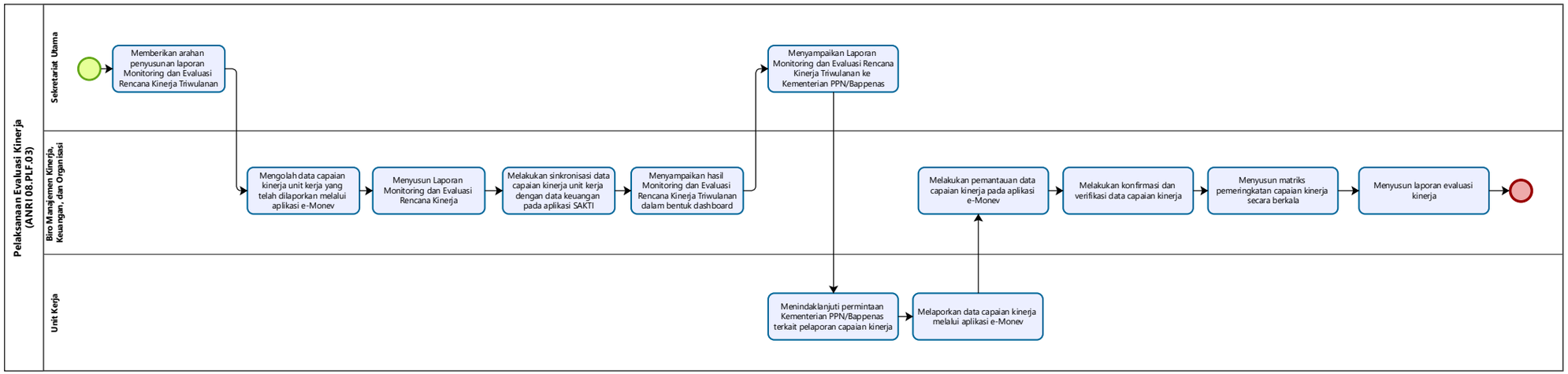

Gambar 146. Peta Lintas Fungsi (ANRI 08.PLF.03 Pelaksanaan Evaluasi Kinerja)

V.A. Proses Bisnis Level 1 (ANRI 09 Pelayanan Hukum);

Gambar 147. Proses Bisnis Level 1 (ANRI 09 Pelayanan Hukum)

V.B. Peta Relasi Proses Bisnis Level 1 (ANRI 09 Pelayanan Hukum);

Gambar 148. Peta Relasi Proses Bisnis Level 1 (ANRI 09 Pelayanan Hukum)

V.C.1.i. Peta Lintas Fungsi (ANRI 09.PLF.01 Penyusunan Undang-Undang);

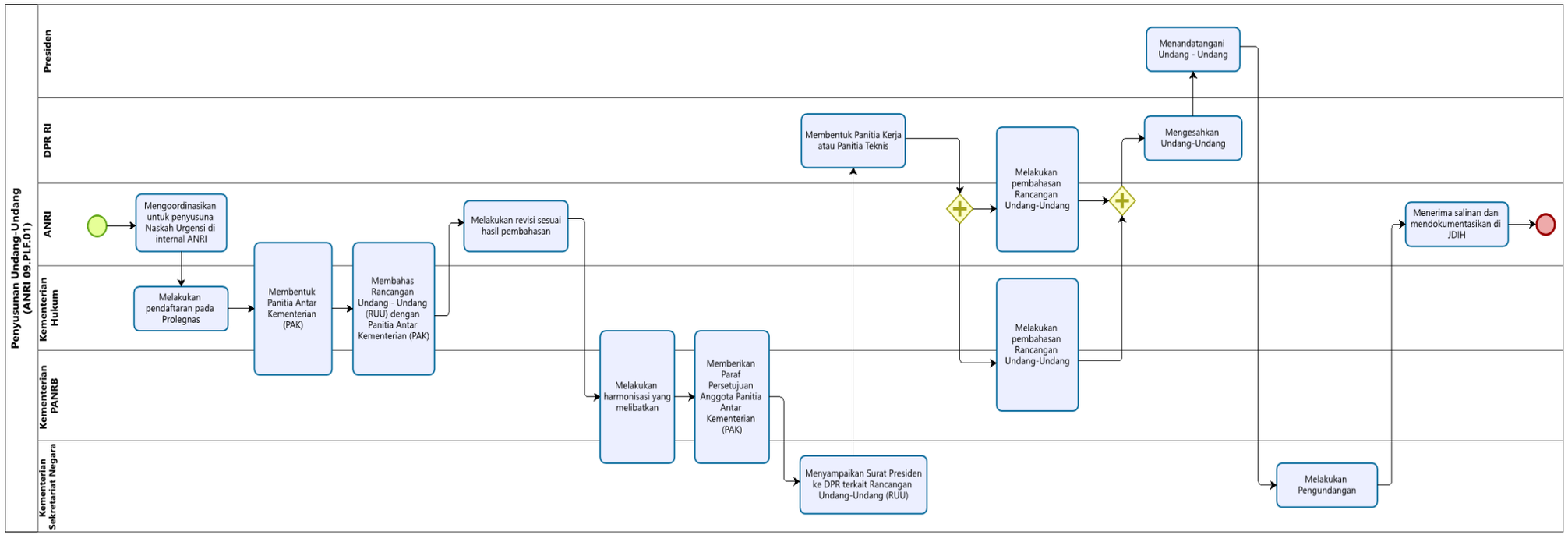

Gambar 149. Peta Lintas Fungsi (ANRI 09.PLF.01 Penyusunan Undang-Undang)

V.C.1.ii. Peta Lintas Fungsi (ANRI 09.PLF.02 Penyusunan Peraturan Pemerintah);

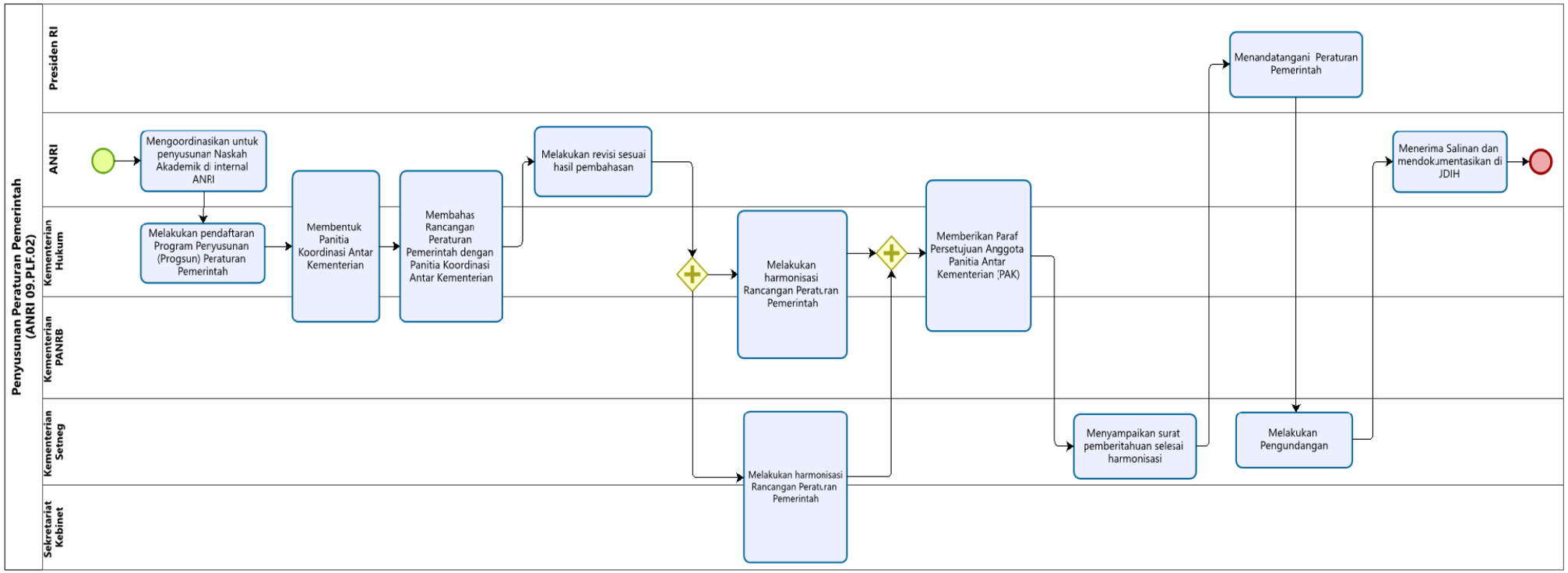

Gambar 150. Peta Lintas Fungsi (ANRI 09.PLF.02 Penyusunan Peraturan Pemerintah)

V.C.1.iii. Peta Lintas Fungsi (ANRI 09.PLF.03 Penyusunan Peraturan Presiden);

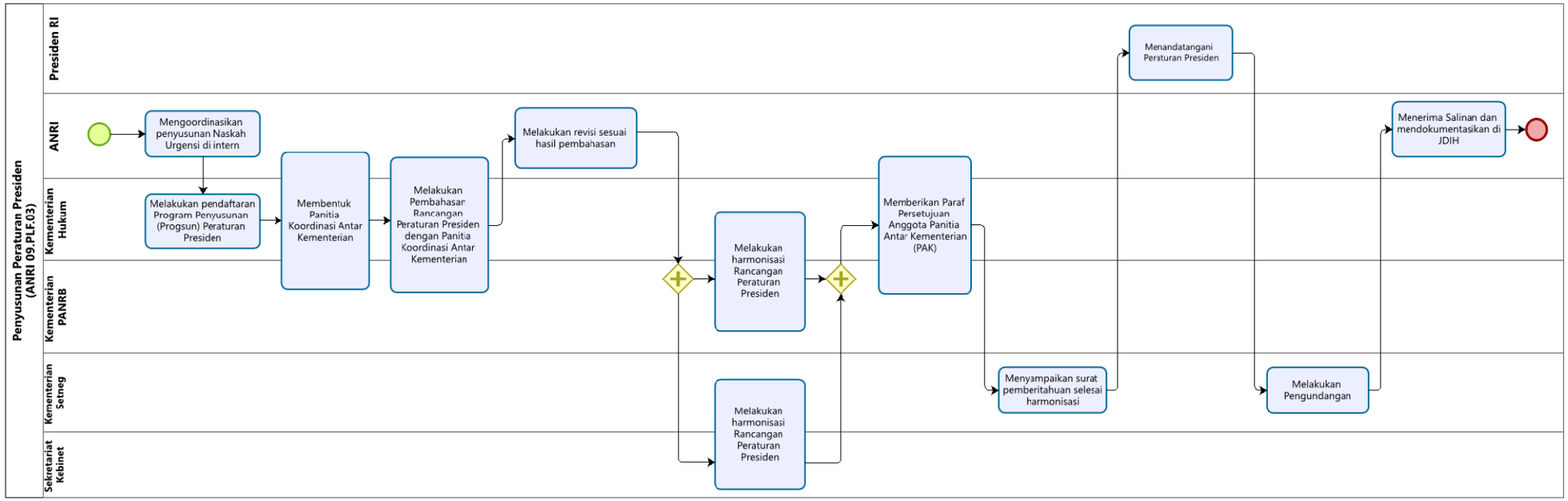

Gambar 151. Peta Lintas Fungsi (ANRI 09.PLF.03 Penyusunan Peraturan Presiden)

V.C.1.iv. Peta Lintas Fungsi (ANRI 09.PLF.04 Penyusunan Peraturan ANRI);

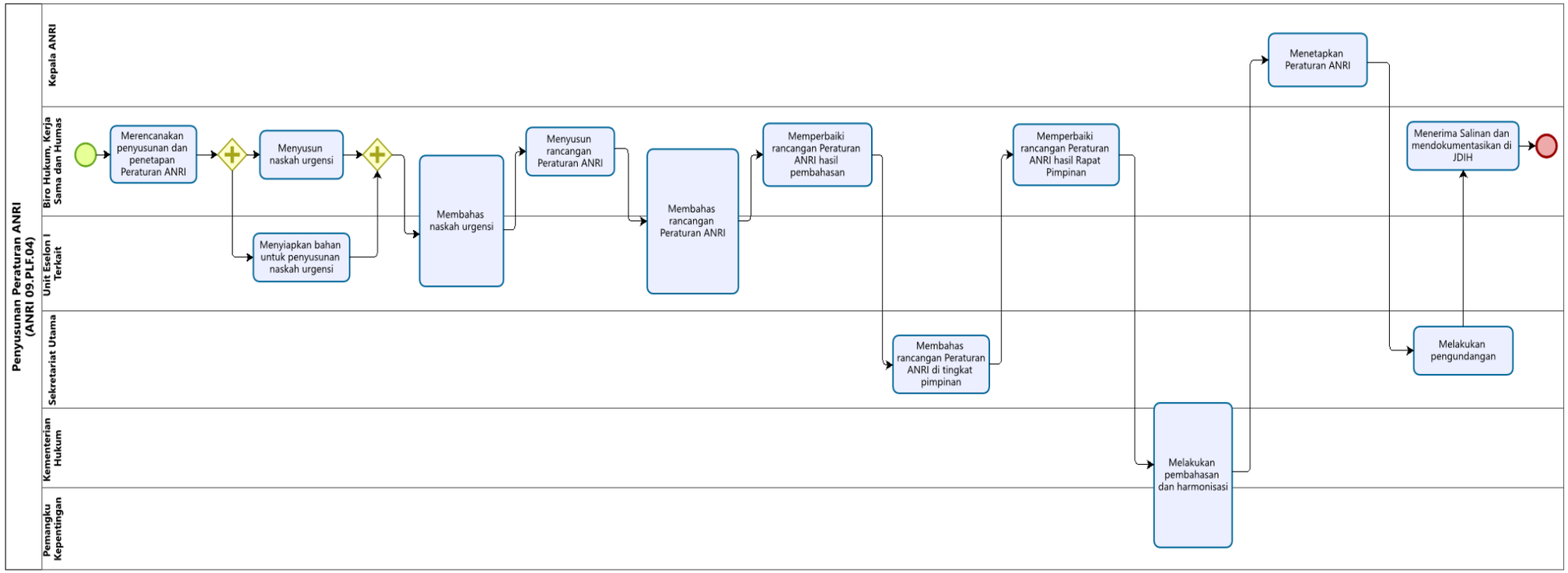

Gambar 152. Peta Lintas Fungsi (ANRI 09.PLF.04 Penyusunan Peraturan ANRI)

V.C.1.v. Peta Lintas Fungsi (ANRI 09.PLF.05 Penyusunan Keputusan Kepala dan Instrumen lainnya);

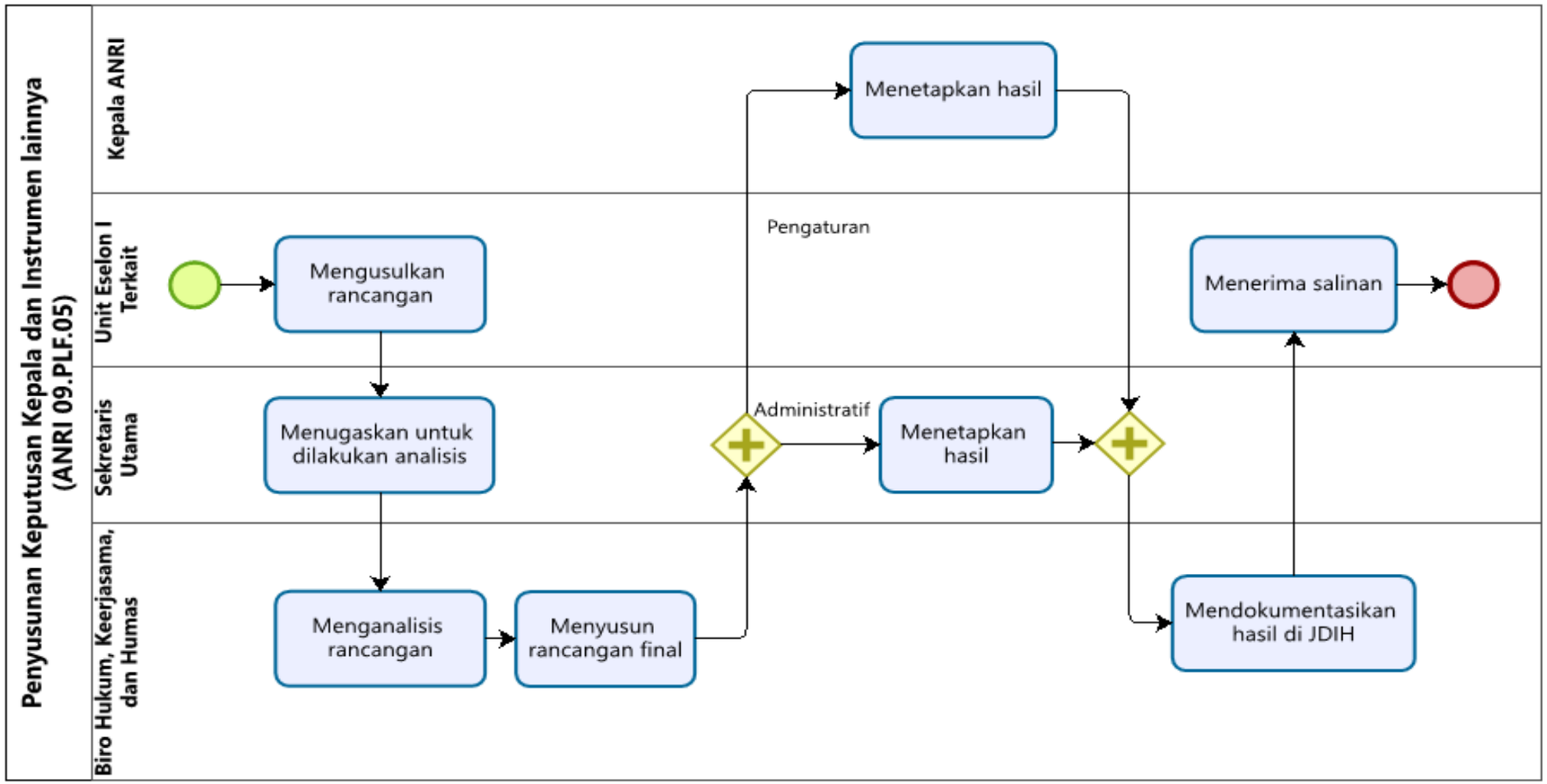

Gambar 153. Peta Lintas Fungsi (ANRI 09.PLF.05 Penyusunan Keputusan Kepala dan Instrumen lainnya)

V.C.1.vi. Peta Lintas Fungsi (ANRI 09.PLF.06 Pelayanan Bantuan Perkara Hukum);

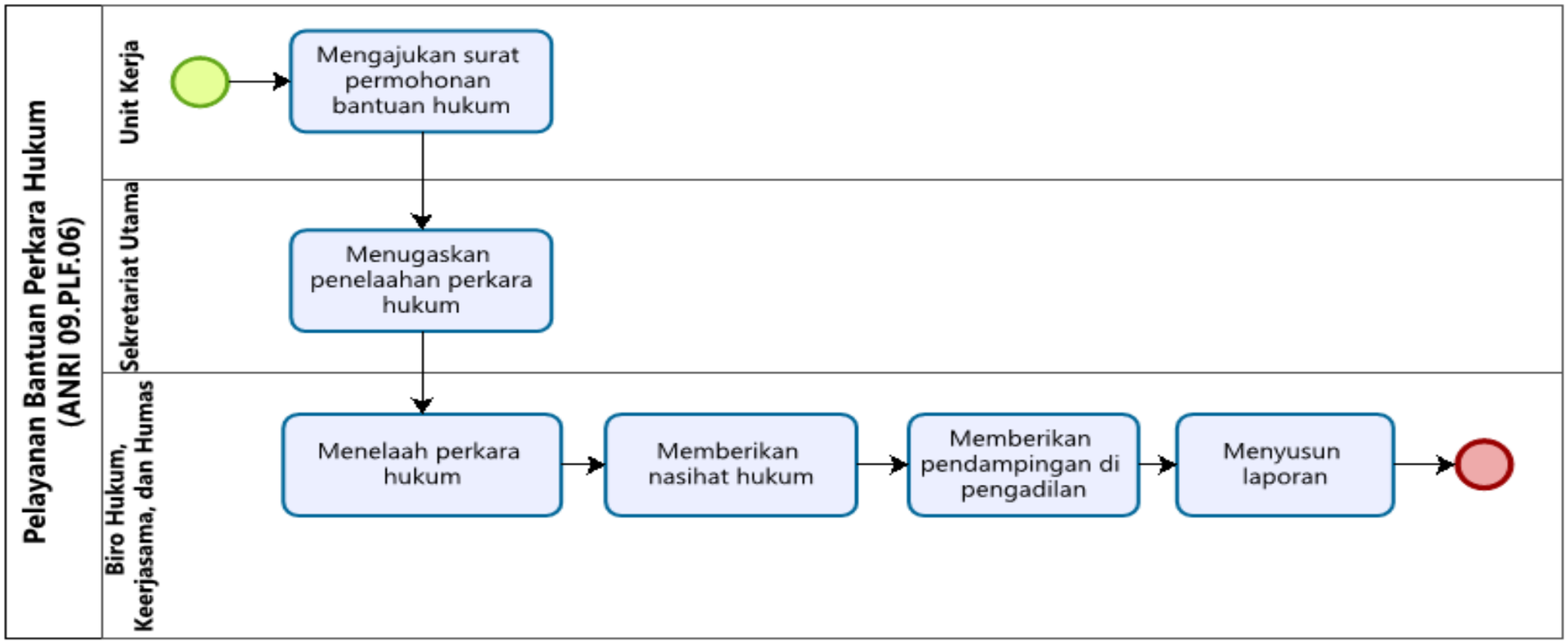

Gambar 154. Peta Lintas Fungsi (ANRI 09.PLF.06 Pelayanan Bantuan Perkara Hukum)

V.C.1.vii. Peta Lintas Fungsi (ANRI 09.PLF.07 Pendampingan Saksi atau Ahli).

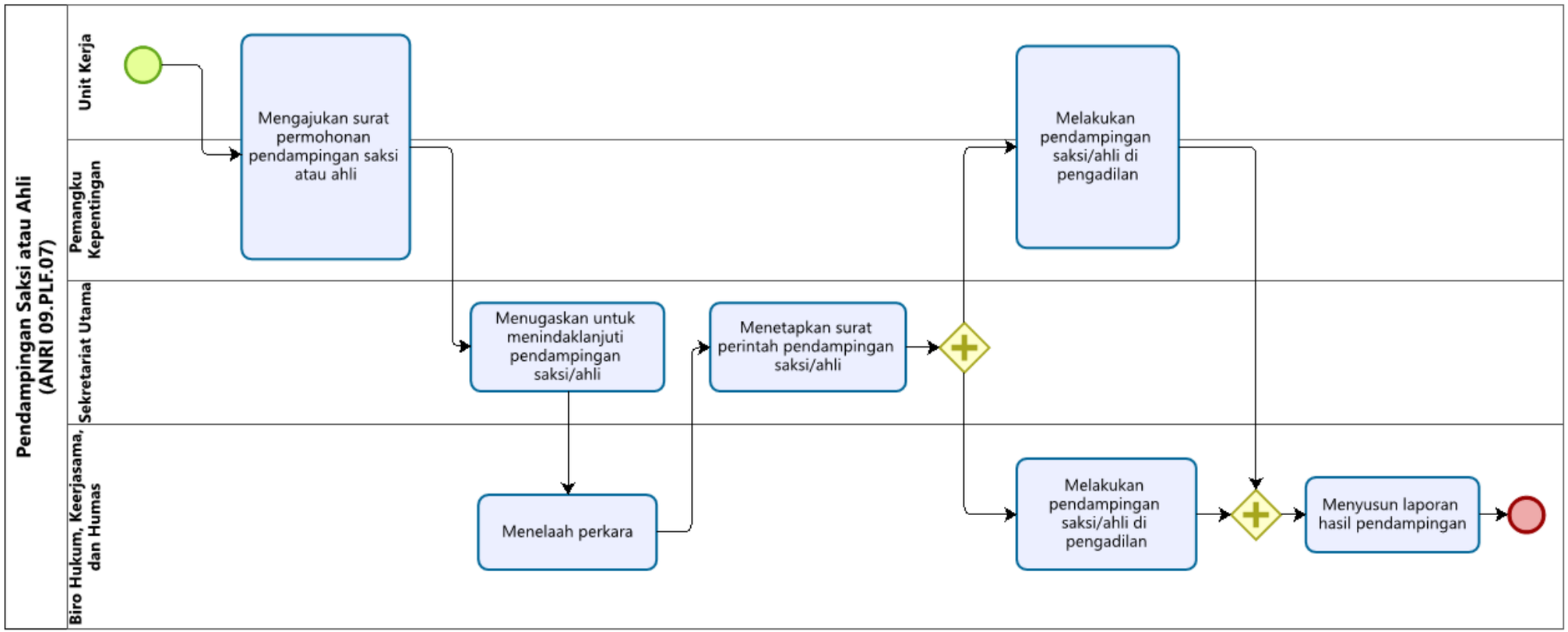

Gambar 155. Peta Lintas Fungsi (ANRI 09.PLF.07 Pendampingan Saksi atau Ahli)

VI.A. Proses Bisnis Level 1 (ANRI 10 Pelayanan Kerja Sama);

Gambar 156. Proses Bisnis Level 1 (ANRI 10 Pelayanan Kerja Sama)

VI.B. Peta Relasi Proses Bisnis Level 1 (ANRI 10 Pelayanan Kerja Sama);

Gambar 157. Peta Relasi Proses Bisnis Level 1 (ANRI 10 Pelayanan Kerja Sama)

VI.C.1.i. Peta Lintas Fungsi (ANRI 10.PLF.01 Kelembagaan);

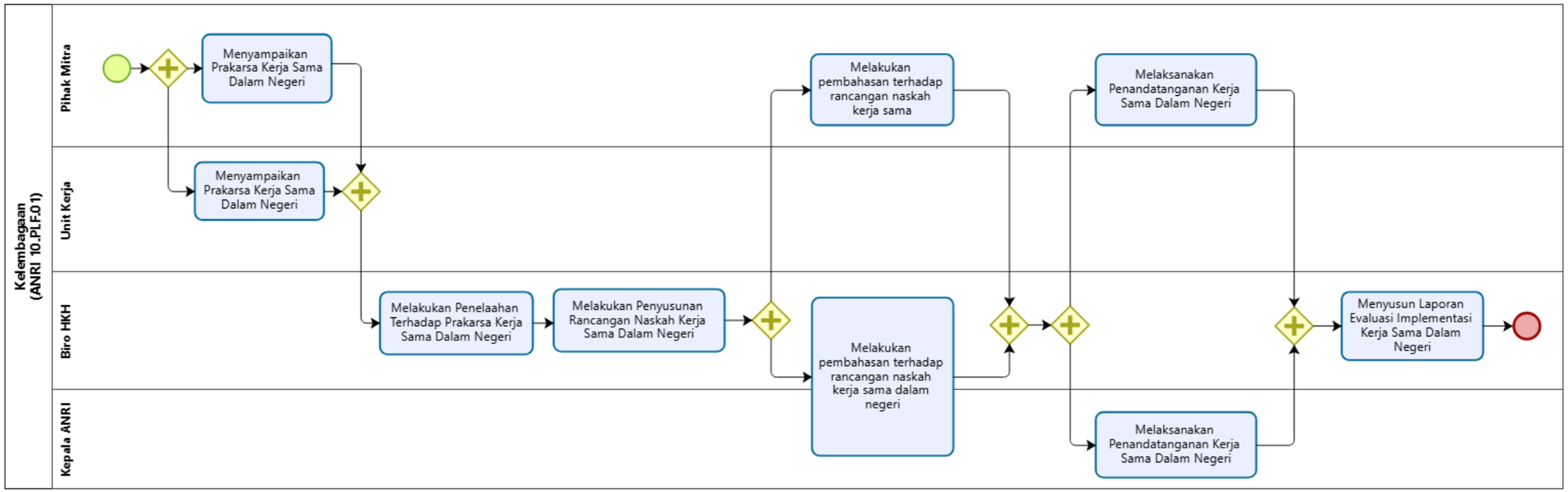

Gambar 158. Peta Lintas Fungsi (ANRI 10.PLF.01 Kelembagaan)

VI.C.1.ii. Peta Lintas Fungsi (ANRI 10.PLF.02 Kontraktual);

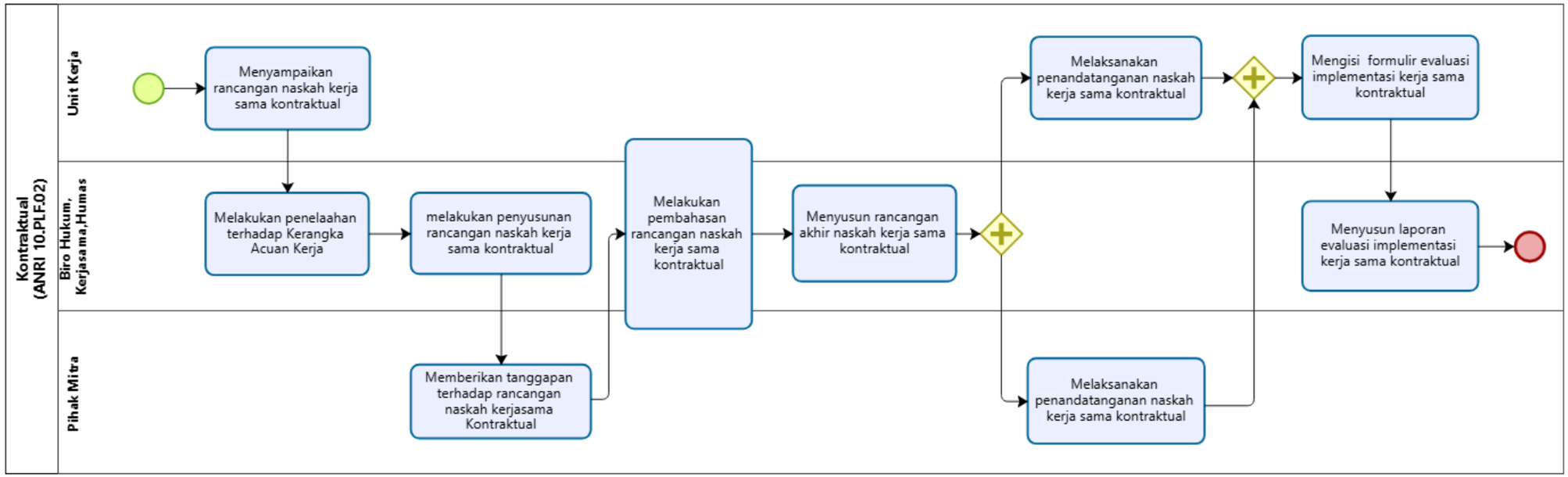

Gambar 159. Peta Lintas Fungsi (ANRI 10.PLF.02 Kontraktual)

VI.C.2.i. Peta Lintas Fungsi (ANRI 10.PLF.03 Bilateral);

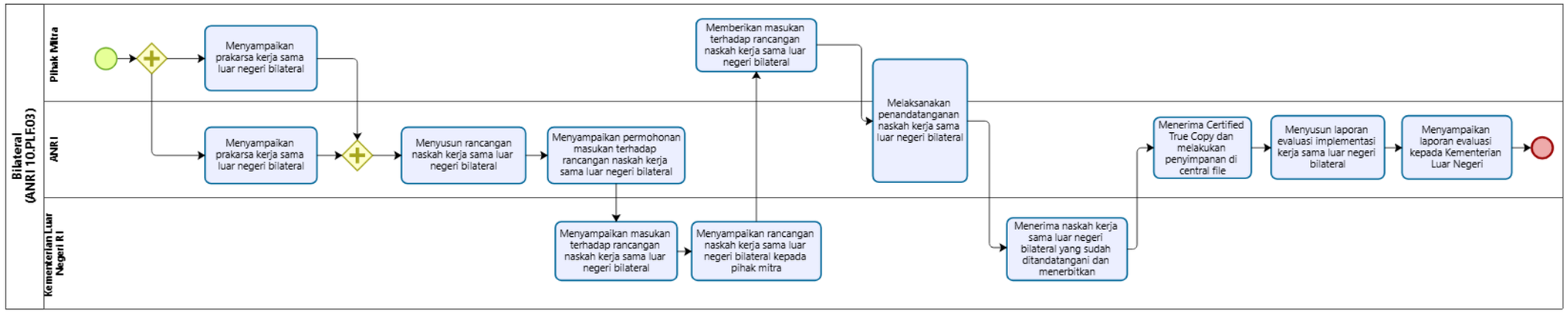

Gambar 160. Peta Lintas Fungsi (ANRI 10.PLF.03 Bilateral)

VI.C.2.ii. Peta Lintas Fungsi (ANRI 10.PLF.04 Multilateral);

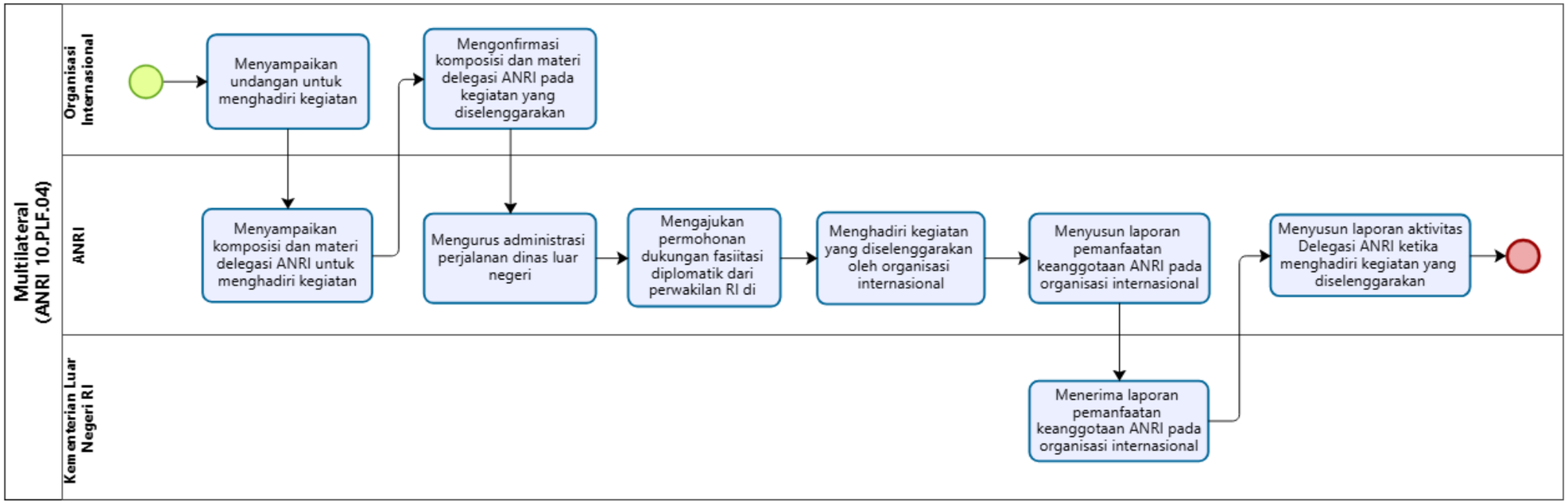

Gambar 161. Peta Lintas Fungsi (ANRI 10.PLF.04 Multilateral)

VI.C.2.iii. Peta Lintas Fungsi (ANRI 10.PLF.05 Teknis);

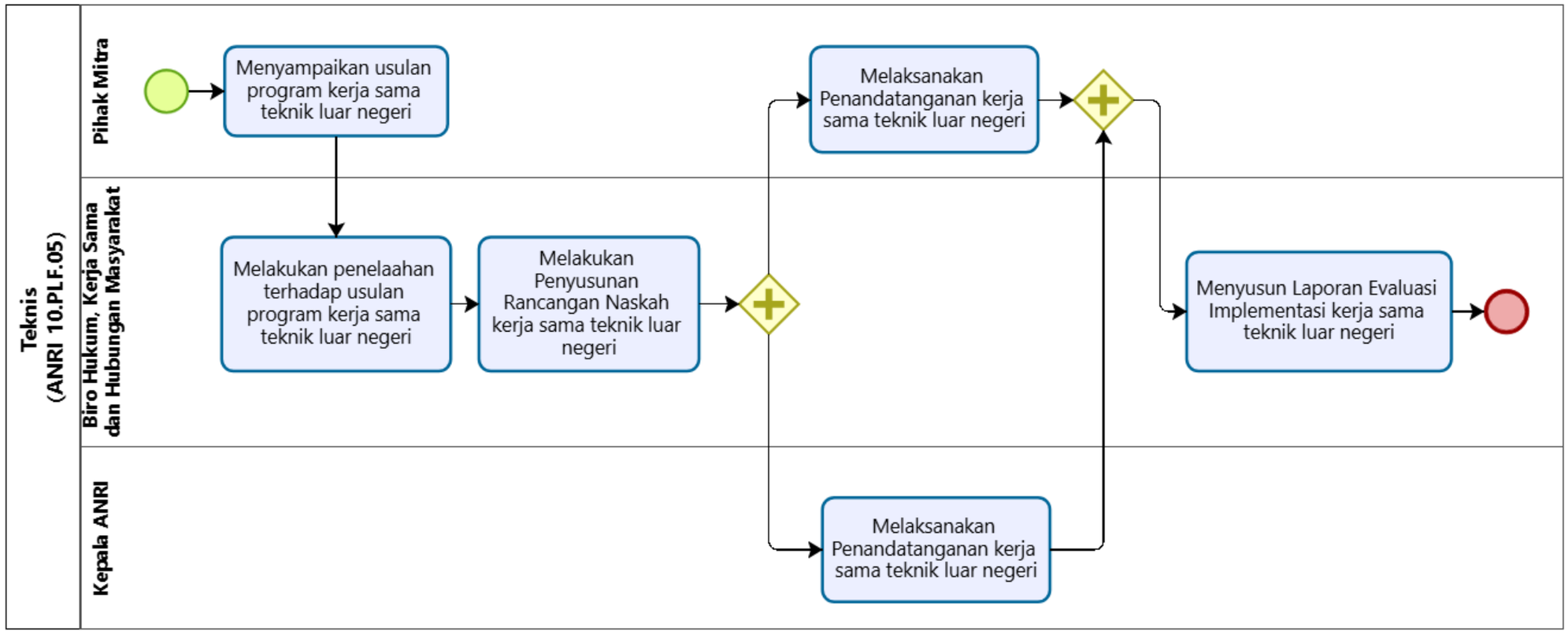

Gambar 162. Peta Lintas Fungsi (ANRI 10.PLF.05 Teknis)

VI.C.3.i. Peta Lintas Fungsi (ANRI 10.PLF.06 Pelayanan Fasilitasi Kerja Sama).

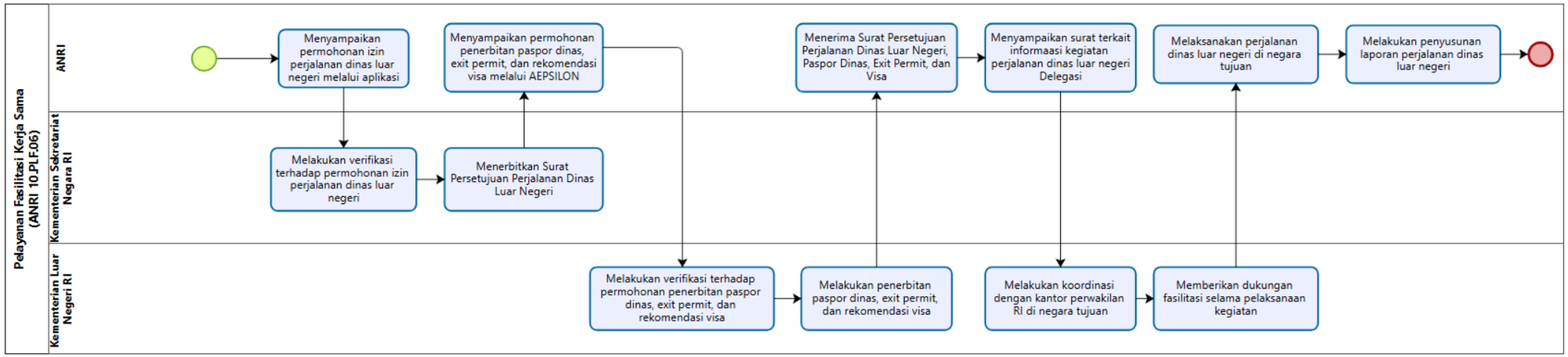

Gambar 163. Peta Lintas Fungsi (ANRI 10.PLF.06 Pelayanan Fasilitasi Kerja Sama)

VII.A. Proses Bisnis Level 1 (ANRI 11 Pelayanan Hubungan Masyarakat);

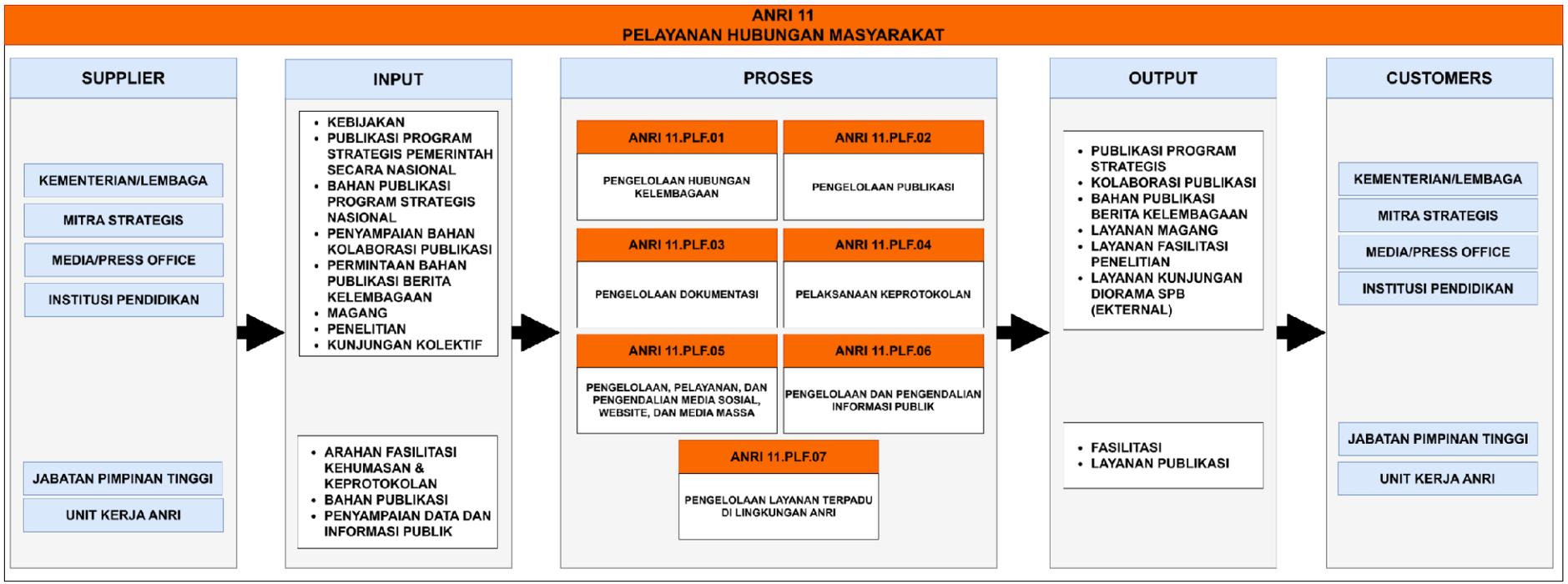

Gambar 164. Proses Bisnis Level 1 (ANRI 11 Pelayanan Hubungan Masyarakat)

VII.B. Peta Relasi Proses Bisnis Level 1 (ANRI 11 Pelayanan Hubungan Masyarakat);

Gambar 165. Peta Relasi Proses Bisnis Level 1 (ANRI 11 Pelayanan Hubungan Masyarakat)

VII.C.1. Peta Lintas Fungsi (ANRI 11.PLF.01 Pengelolaan Hubungan Kelembagaan);

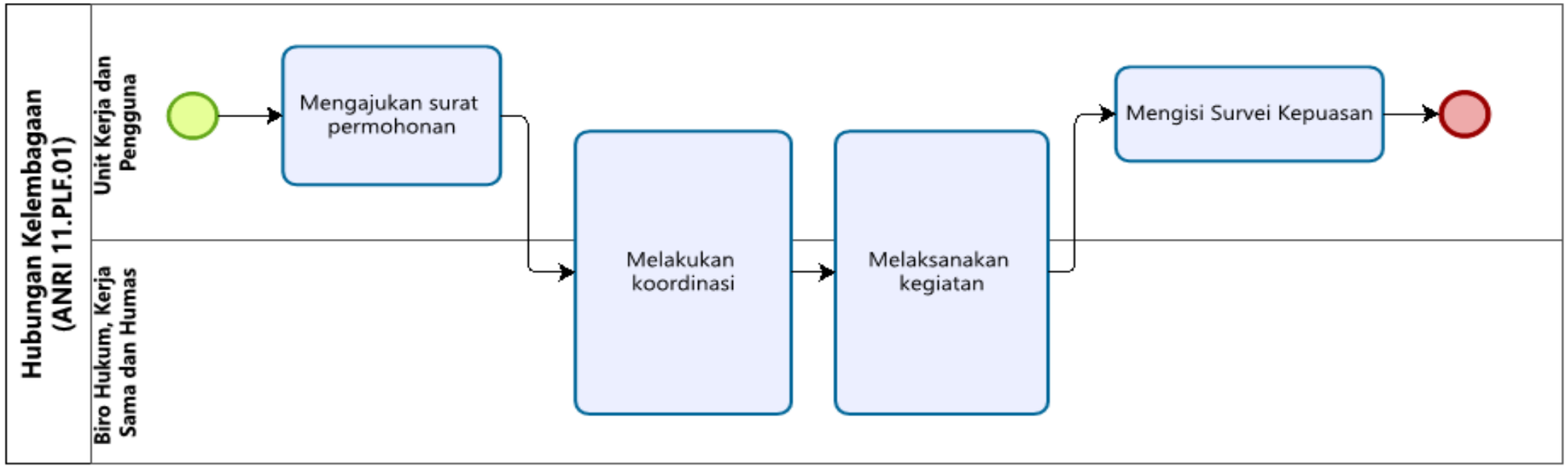

Gambar 166. Peta Lintas Fungsi (ANRI 11.PLF.01 Pengelolaan Hubungan Kelembagaan)

VII.C.2. Peta Lintas Fungsi (ANRI 11.PLF.02 Pengelolaan Publikasi);

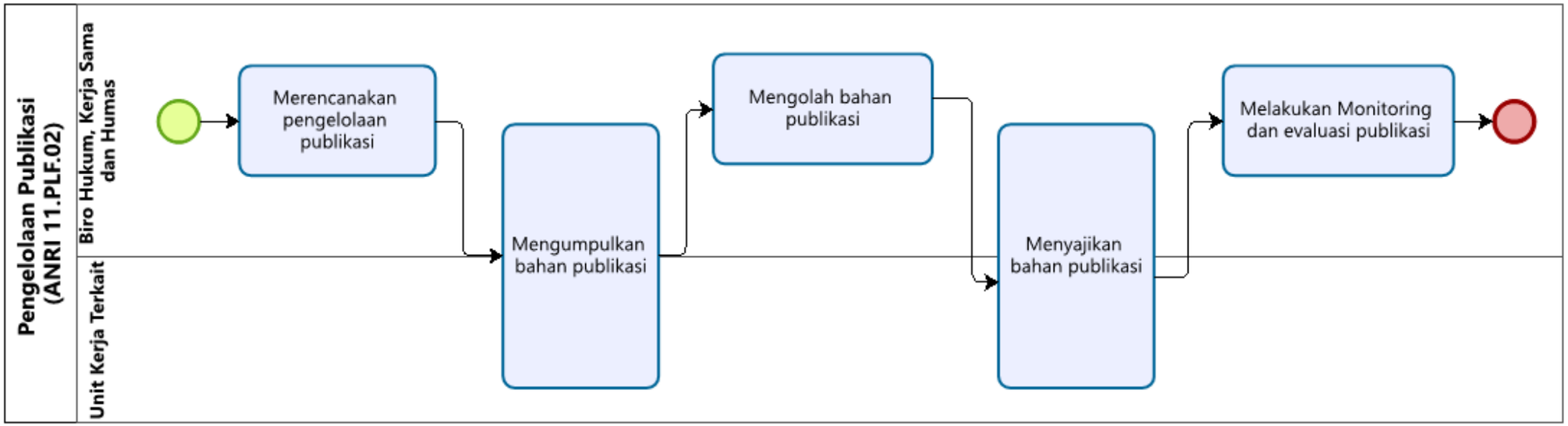

Gambar 167. Peta Lintas Fungsi (ANRI 11.PLF.02 Pengelolaan Publikasi)

VII.C.3. Peta Lintas Fungsi (ANRI 11.PLF.03 Pengelolaan Dokumentasi);

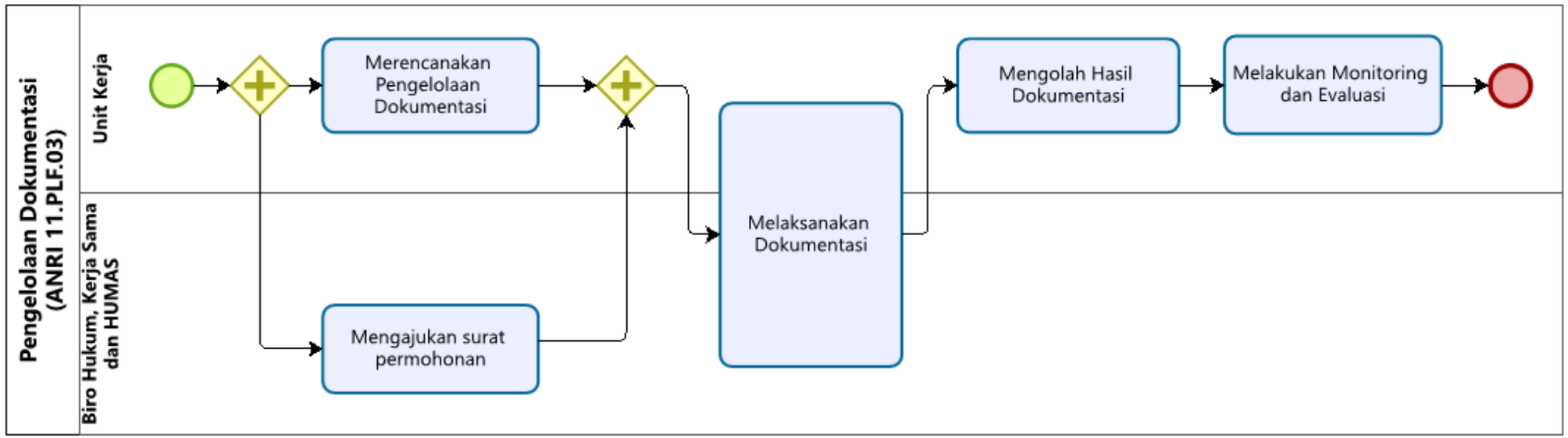

Gambar 168. Peta Lintas Fungsi (ANRI 11.PLF.03 Pengelolaan Dokumentasi)

VII.C.4. Peta Lintas Fungsi (ANRI 11.PLF.04 Pelaksanaan Keprotokolan);

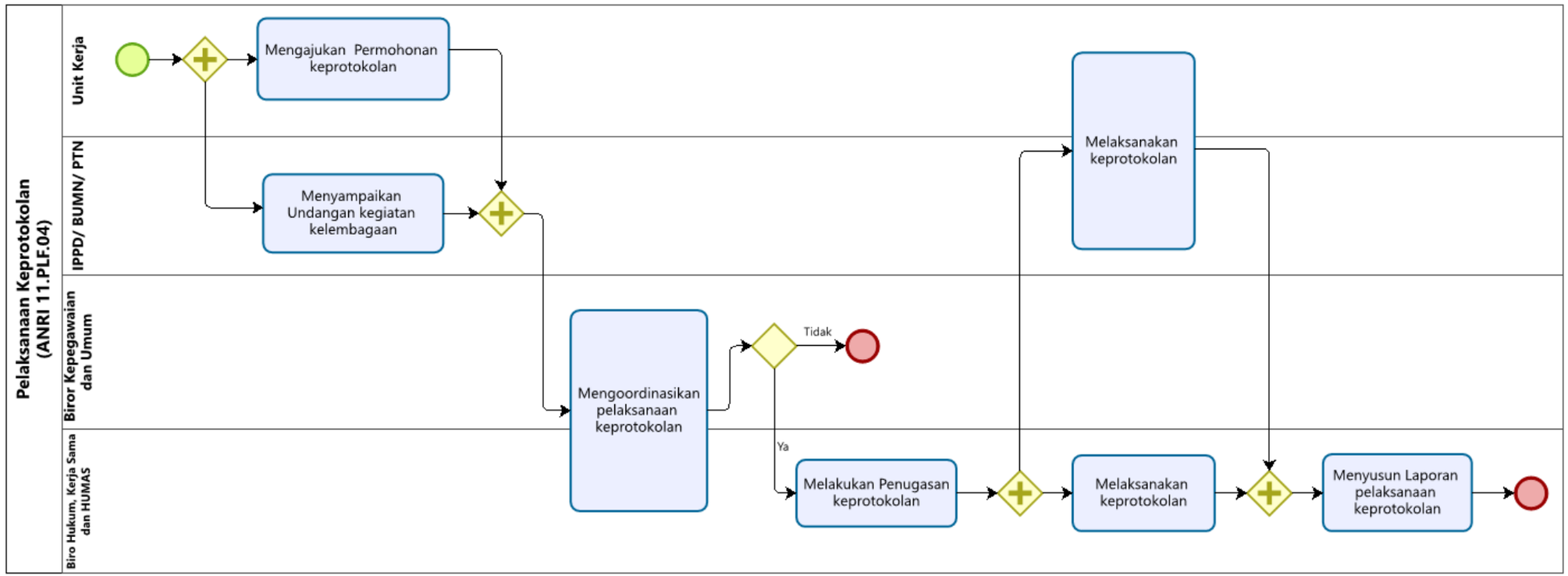

Gambar 169. Peta Lintas Fungsi (ANRI 11.PLF.04 Pelaksanaan Keprotokolan)

VII.C.5. Peta Lintas Fungsi (ANRI 11.PLF.05 Pengelolaan, Pelayanan, dan Pengendalian Media Sosial, Website, dan Media Massa);

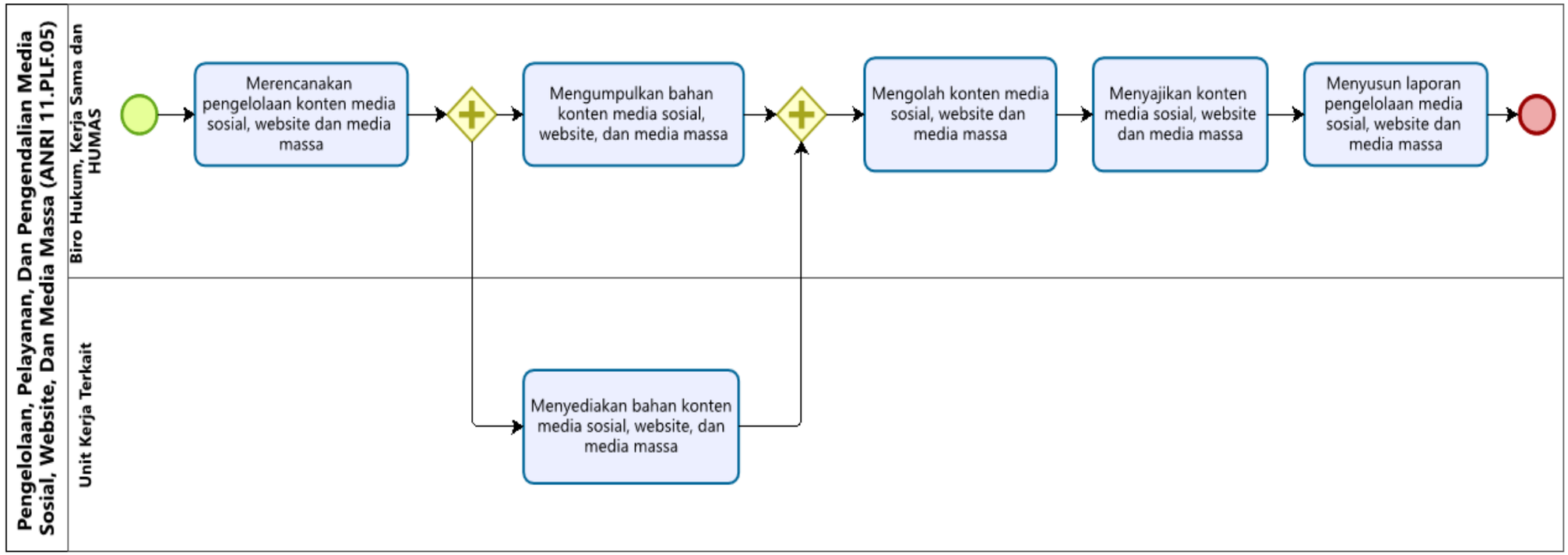

Gambar 170. Peta Lintas Fungsi (ANRI 11.PLF.05 Pengelolaan, Pelayanan, dan Pengendalian Media Sosial, Website, dan Media Massa)

VII.C.6. Peta Lintas Fungsi (ANRI 11.PLF.06 Pengelolaan dan Pengendalian Informasi Publik);

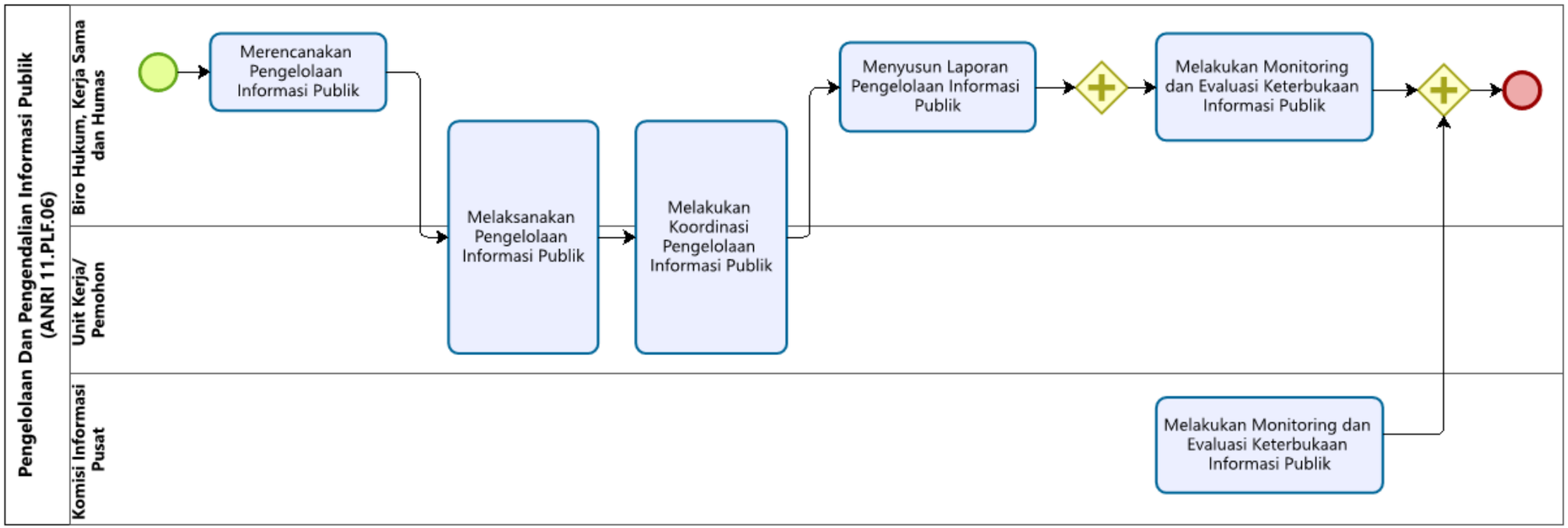

Gambar 171. Peta Lintas Fungsi (ANRI 11.PLF.06 Pengelolaan dan Pengendalian Informasi Publik)

VII.C.7. Peta Lintas Fungsi (ANRI 11.PLF.07 Pengelolaan Layanan Terpadu di Lingkungan ANRI).

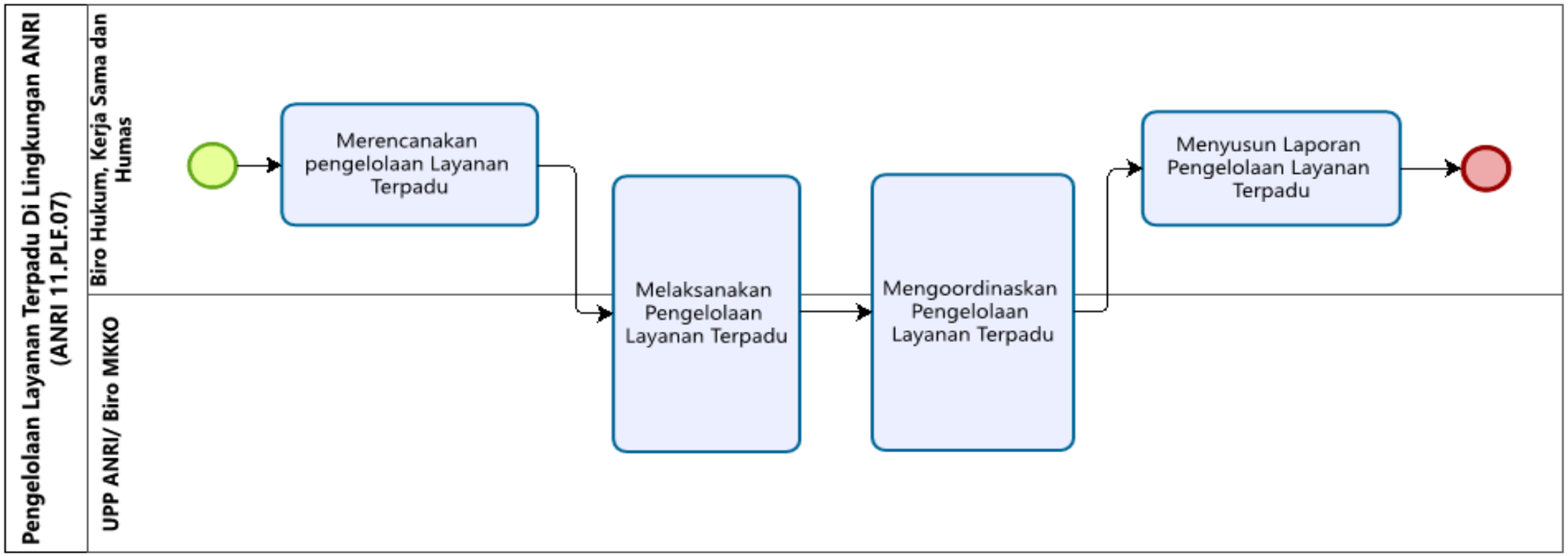

Gambar 172. Peta Lintas Fungsi (ANRI 11.PLF.07 Pengelolaan Layanan Terpadu di Lingkungan ANRI)

VIII.A. Proses Bisnis Level 1 (ANRI 12 Pelayanan Kepegawaian);

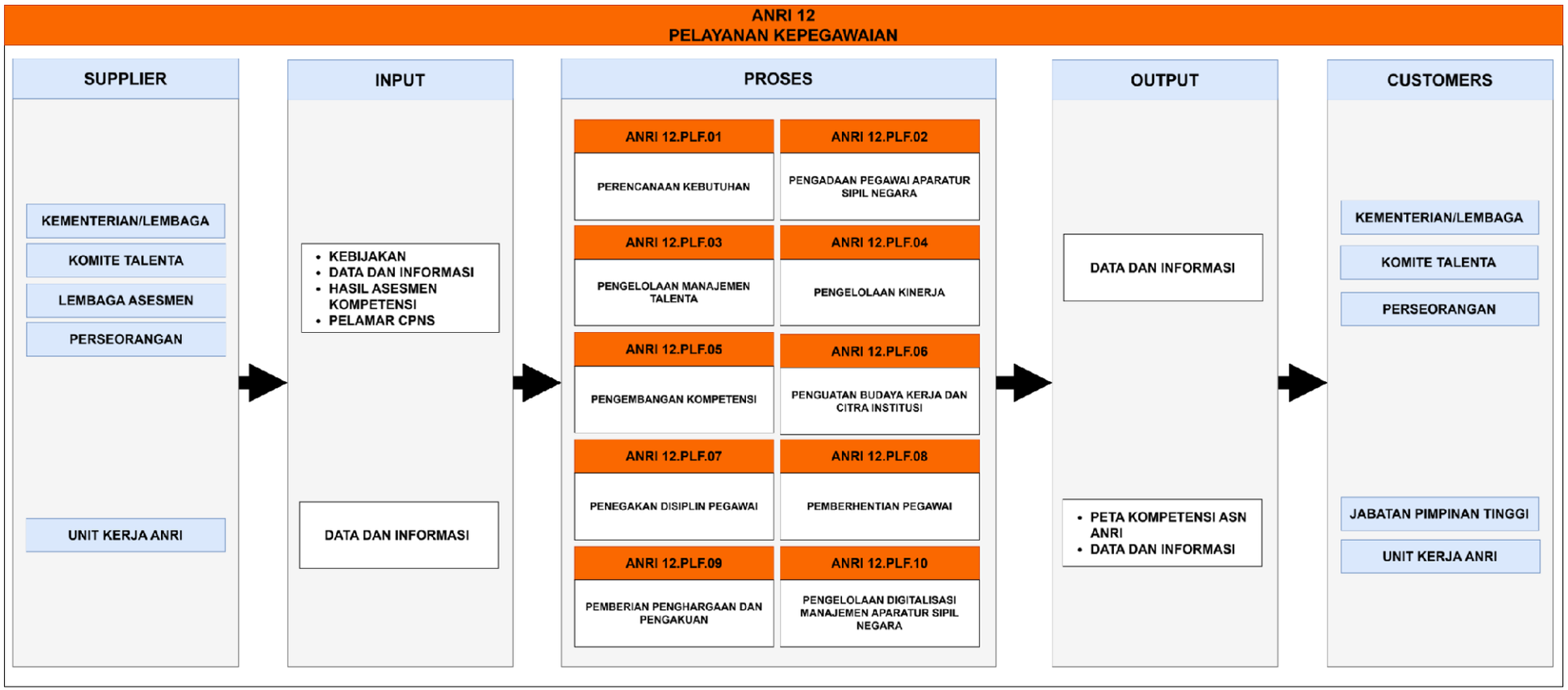

Gambar 173. Proses Bisnis Level 1 (ANRI 12 Pelayanan Kepegawaian)

VIII.B. Peta Relasi Proses Bisnis Level 1 (ANRI 12 Pelayanan Kepegawaian);

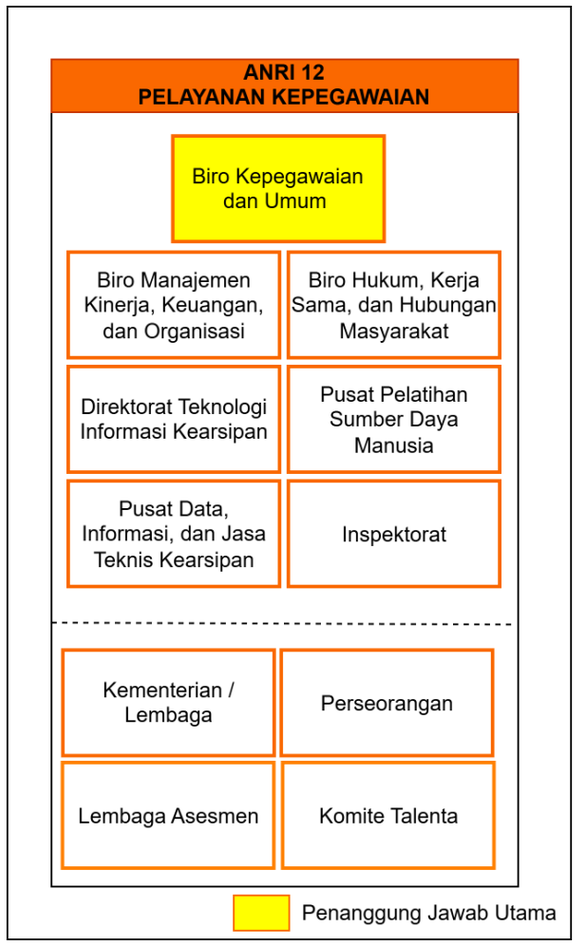

Gambar 174. Peta Relasi Proses Bisnis Level 1 (ANRI 12 Pelayanan Kepegawaian)

VIII.C.1. Peta Lintas Fungsi (ANRI 12.PLF.01 Perencanaan Kebutuhan);

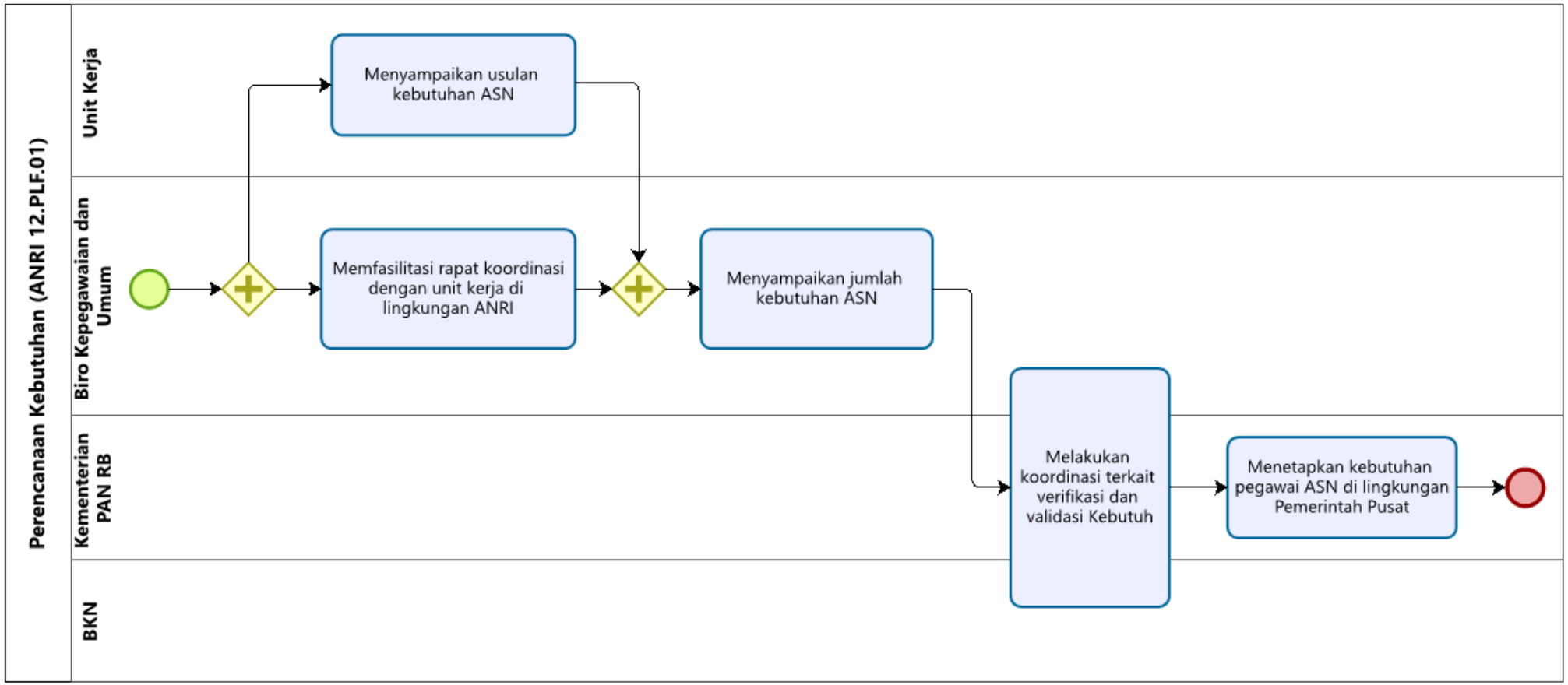

Gambar 175. Peta Lintas Fungsi (ANRI 12.PLF.01 Perencanaan Kebutuhan)

VIII.C.2. Peta Lintas Fungsi (ANRI 12.PLF.02 Pengadaan Pegawai ASN);

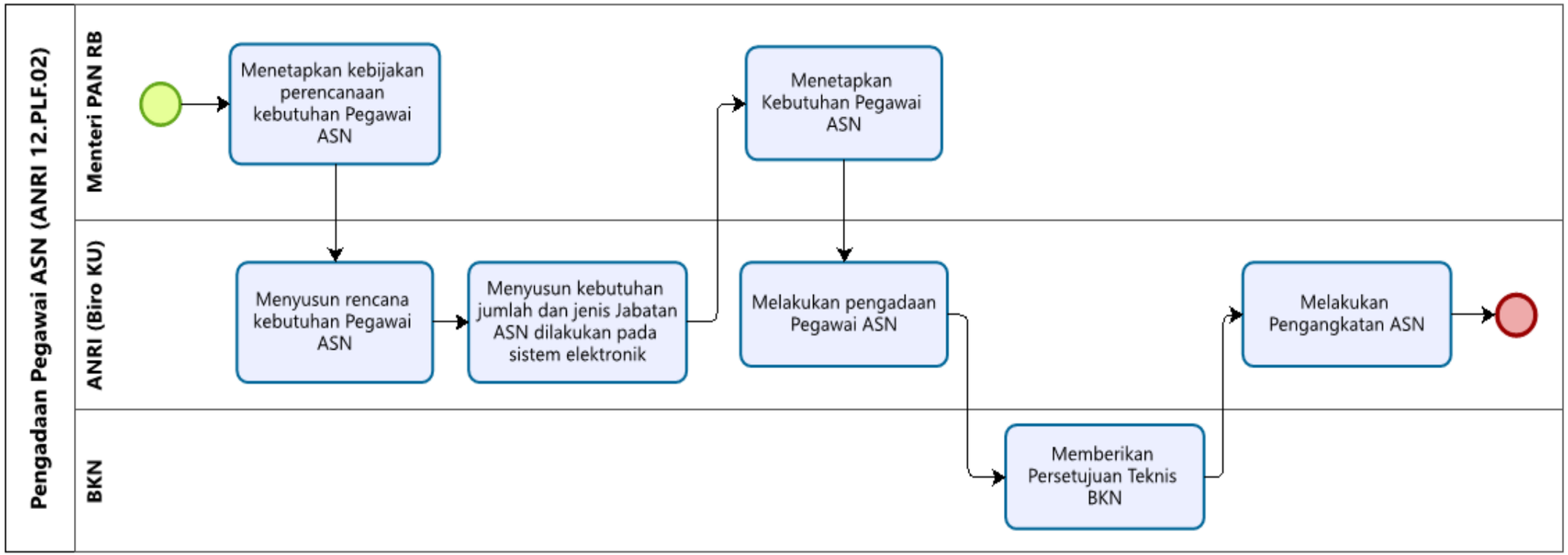

Gambar 176. Peta Lintas Fungsi (ANRI 12.PLF.02 Pengadaan Pegawai ASN)

VIII.C.3. Peta Lintas Fungsi (ANRI 12.PLF.03 Pengelolaan Manajemen Talenta);

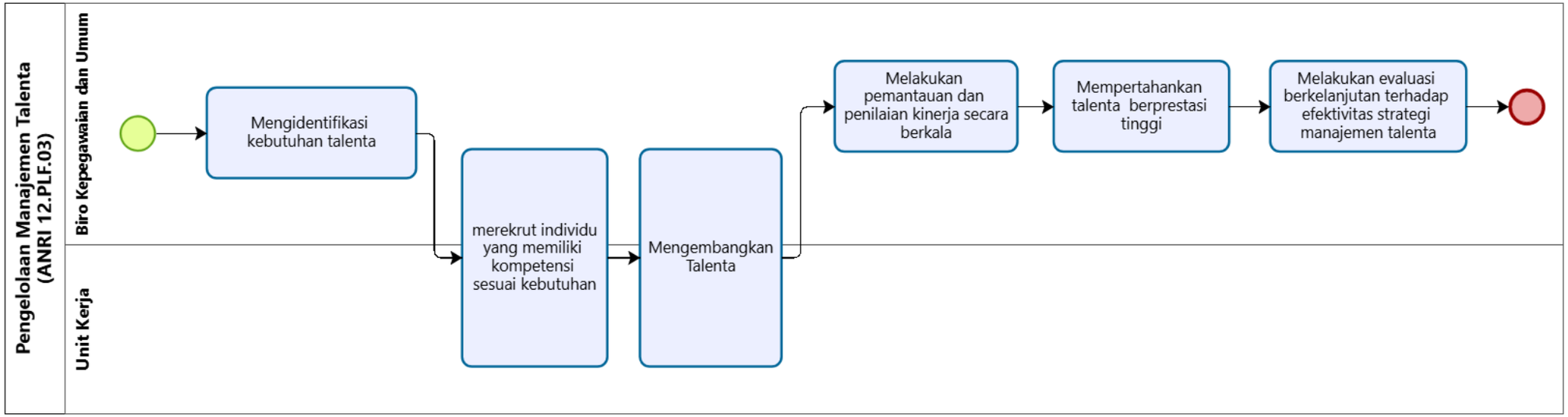

Gambar 177. Peta Lintas Fungsi (ANRI 12.PLF.03 Pengelolaan Manajemen Talenta)

VIII.C.4. Peta Lintas Fungsi (ANRI 12.PLF.04 Pengelolaan Kinerja);

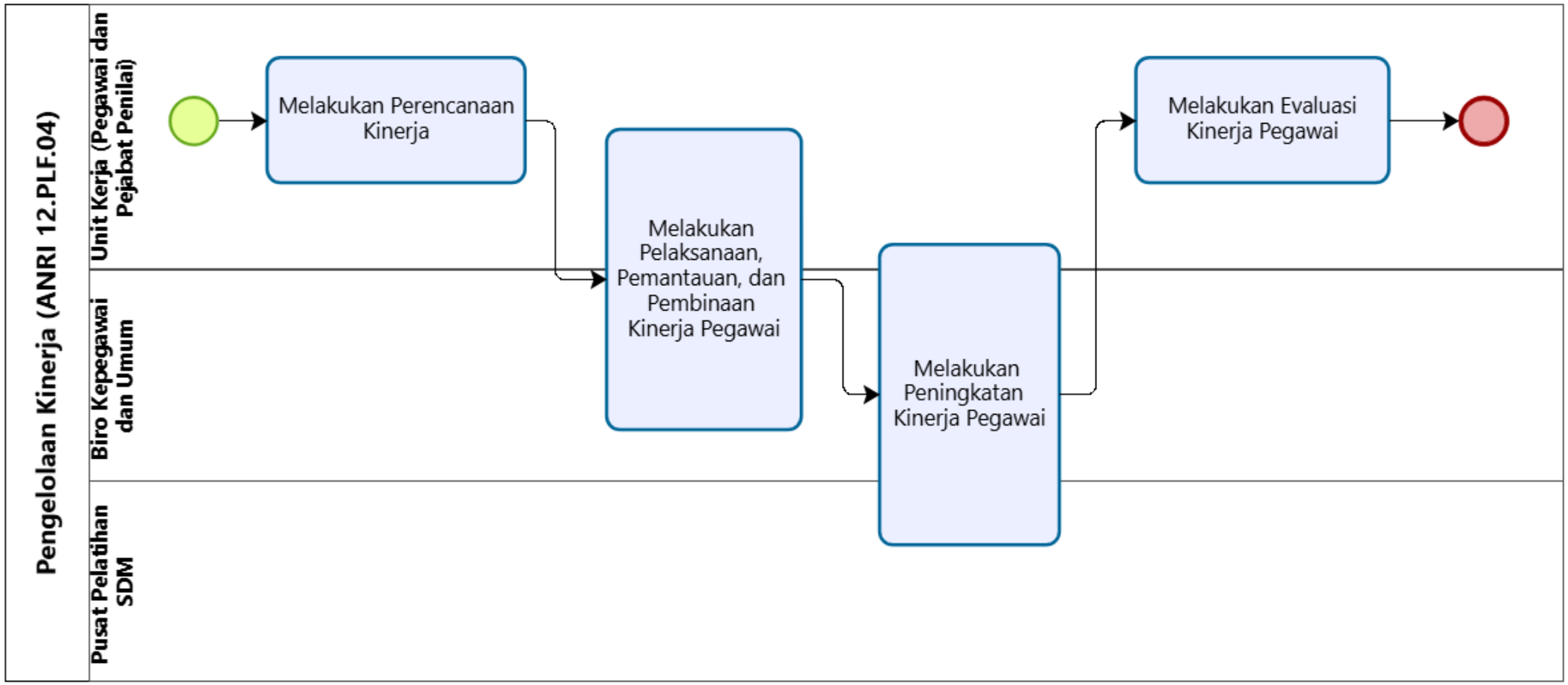

Gambar 178. Peta Lintas Fungsi (ANRI 12.PLF.04 Pengelolaan Kinerja)

VIII.C.5. Peta Lintas Fungsi (ANRI 12.PLF.05 Pengembangan Kompetensi);

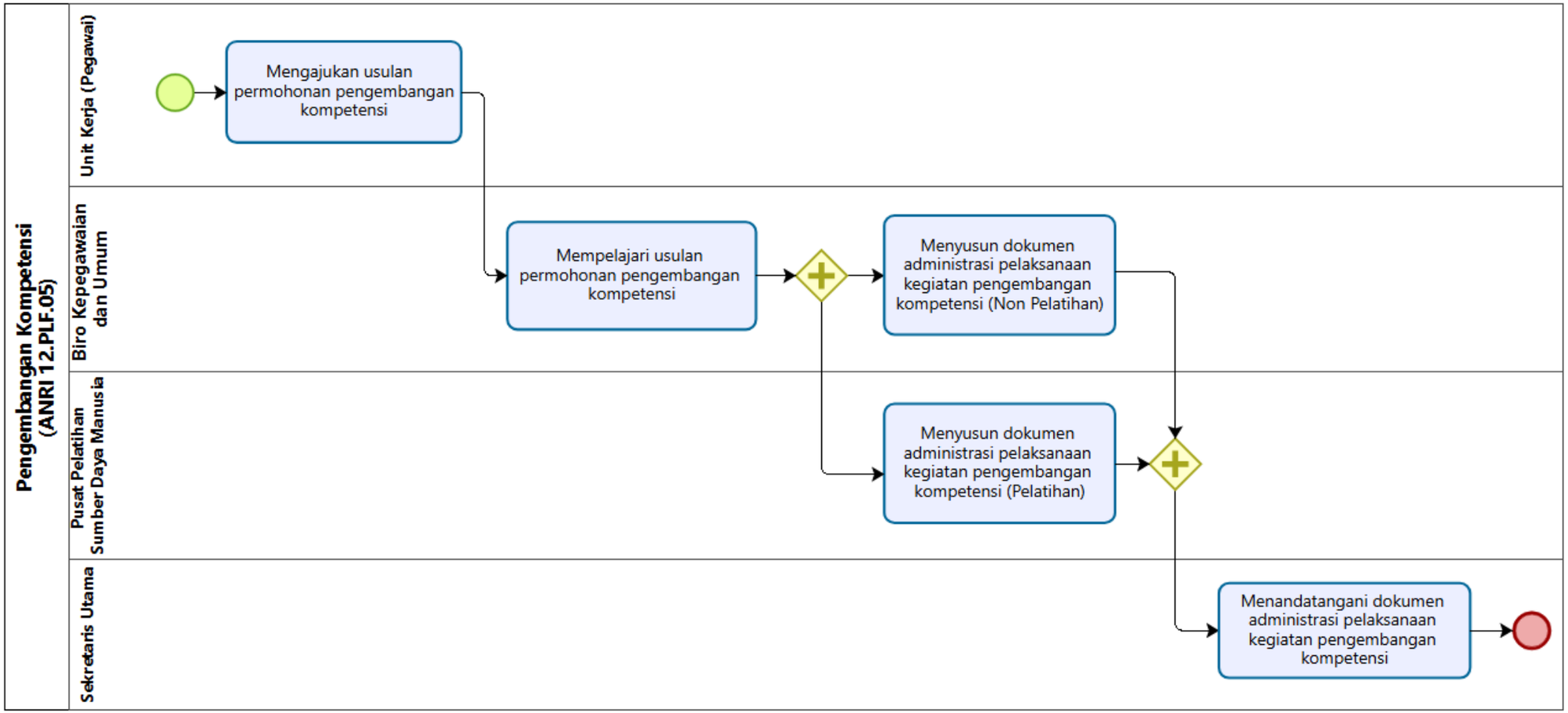

Gambar 179. Peta Lintas Fungsi (ANRI 12.PLF.05 Pengembangan Kompetensi)

VIII.C.6. Peta Lintas Fungsi (ANRI 12.PLF.06 Penguatan Budaya Kerja Dan Citra Institusi);

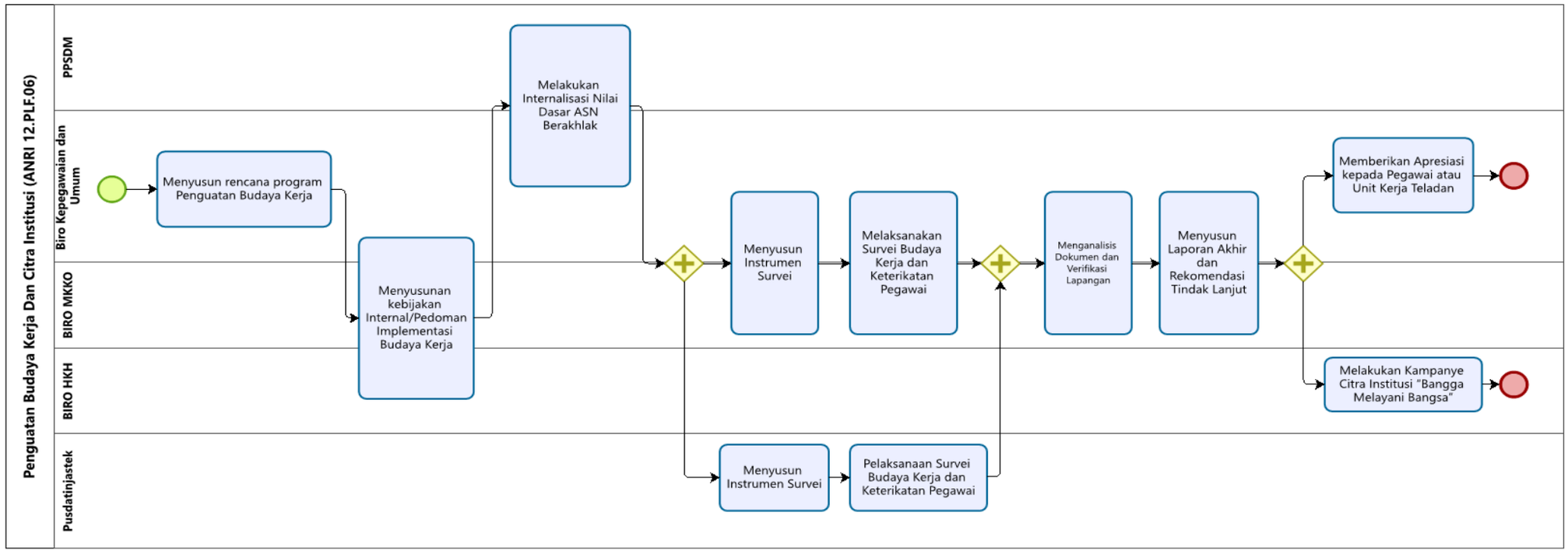

Gambar 180. Peta Lintas Fungsi (ANRI 12.PLF.06 Penguatan Budaya Kerja Dan Citra Institusi)

VIII.C.7. Peta Lintas Fungsi (ANRI 12.PLF.07 Penegakan Disiplin Pegawai);

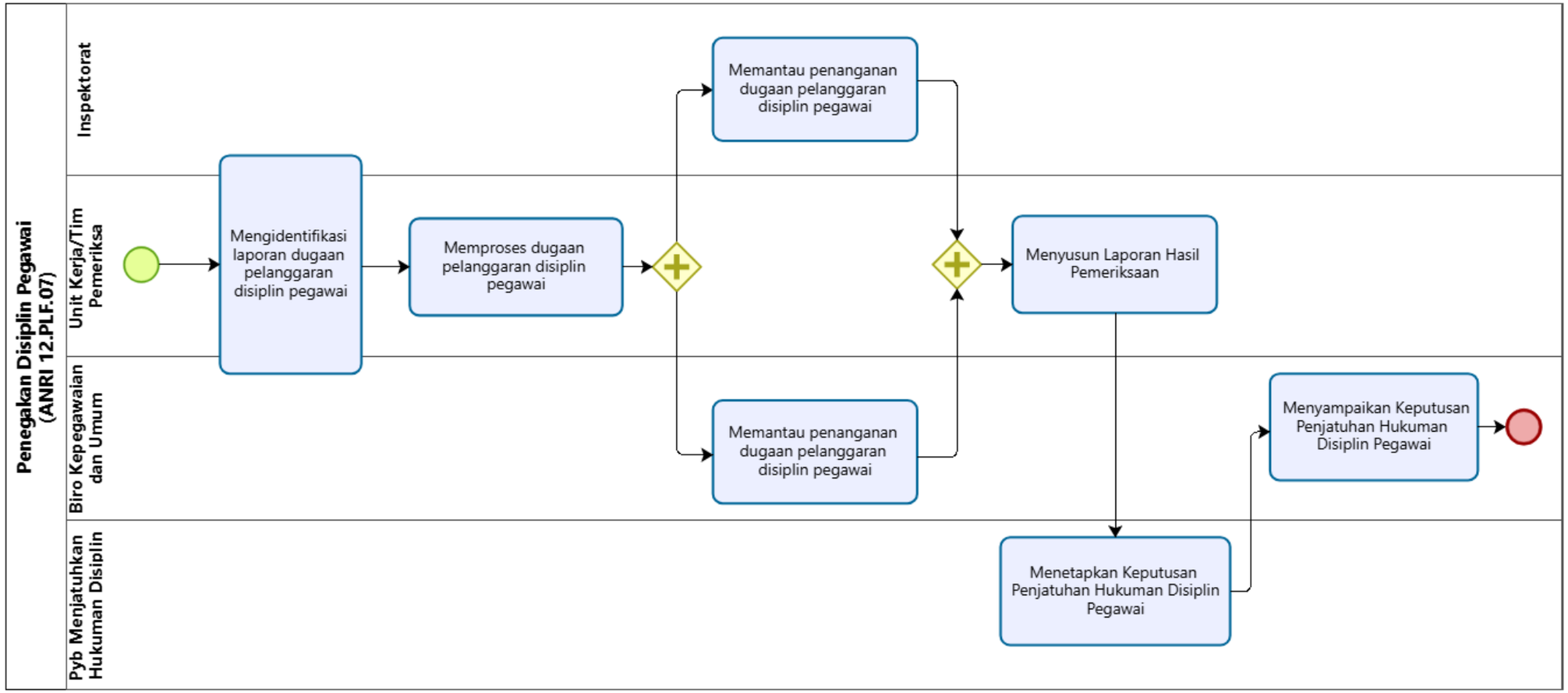

Gambar 181. Peta Lintas Fungsi (ANRI 12.PLF.07 Penegakan Disiplin Pegawai)

VIII.C.8. Peta Lintas Fungsi (ANRI 12.PLF.08 Pemberhentian Pegawai);

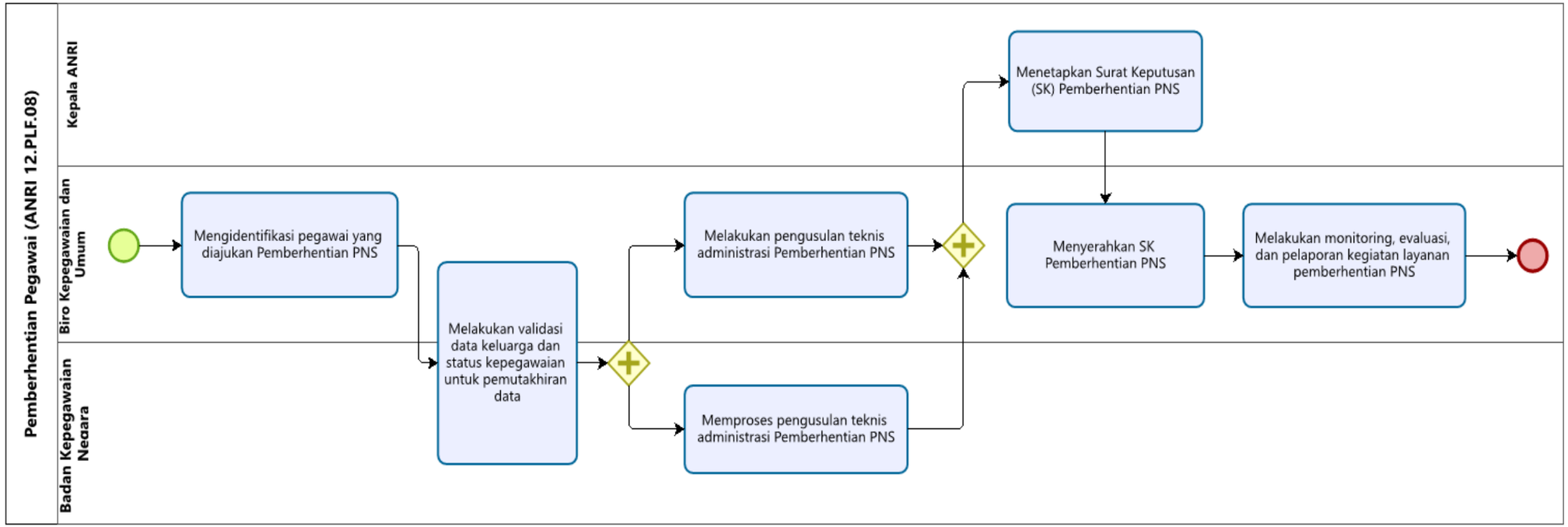

Gambar 182. Peta Lintas Fungsi (ANRI 12.PLF.08 Pemberhentian Pegawai)

VIII.C.9. Peta Lintas Fungsi (ANRI 12.PLF.09 Pemberian Penghargaan dan Pengakuan);

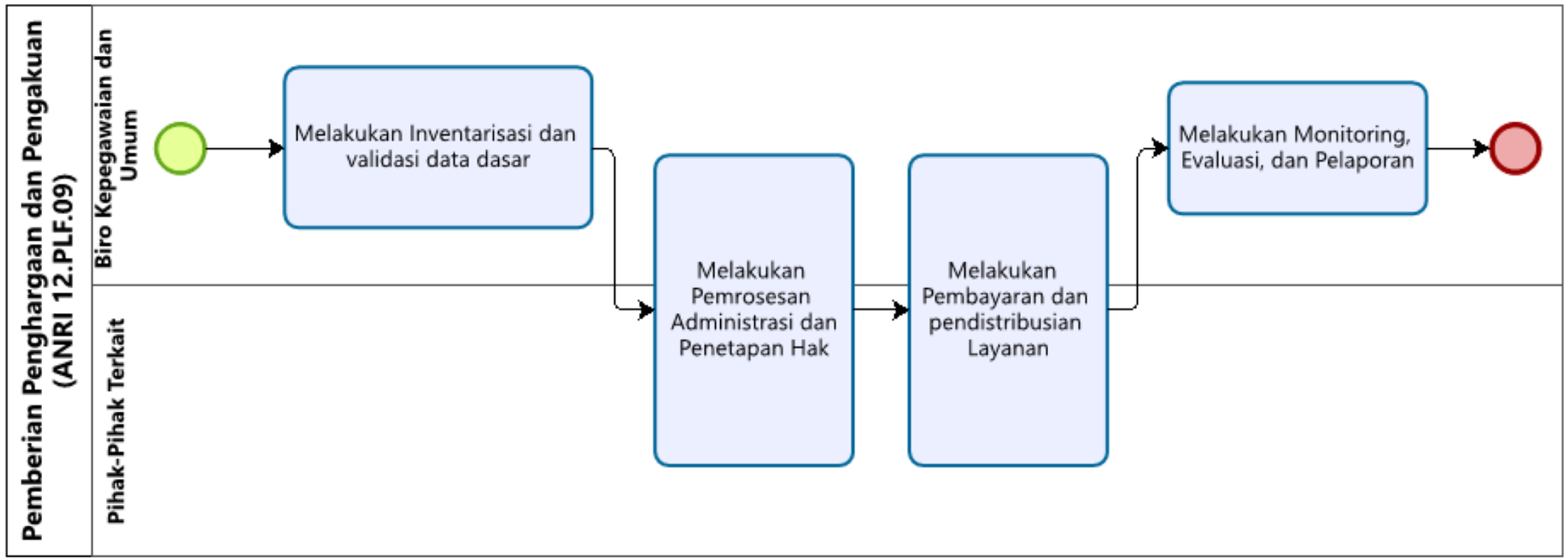

Gambar 183. Peta Lintas Fungsi (ANRI 12.PLF.09 Pemberian Penghargaan dan Pengakuan)

VIII.C.10. Peta Lintas Fungsi (ANRI 12.PLF.10 Pengelolaan Digitalisasi Manajemen ASN).

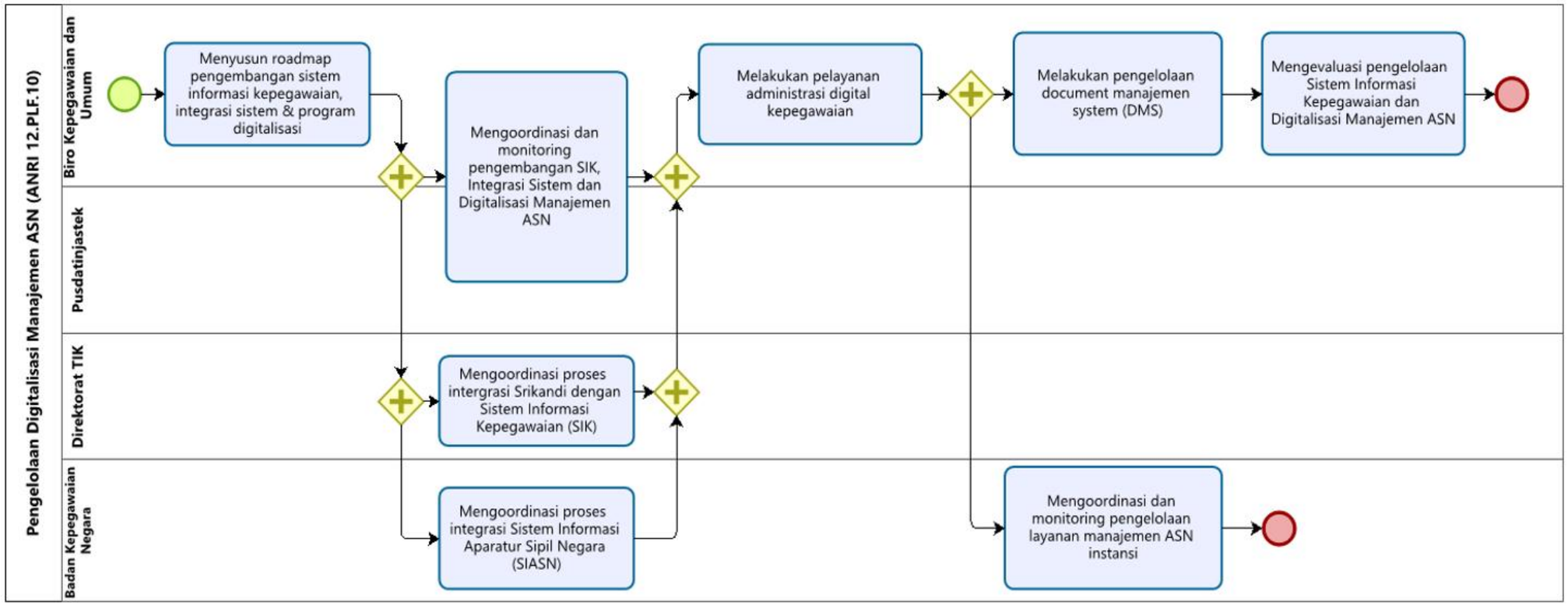

Gambar 184. Peta Lintas Fungsi (ANRI 12.PLF.10 Pengelolaan Digitalisasi Manajemen ASN)

IX.A. Proses Bisnis Level 1 (ANRI 13 Pelayanan Umum);

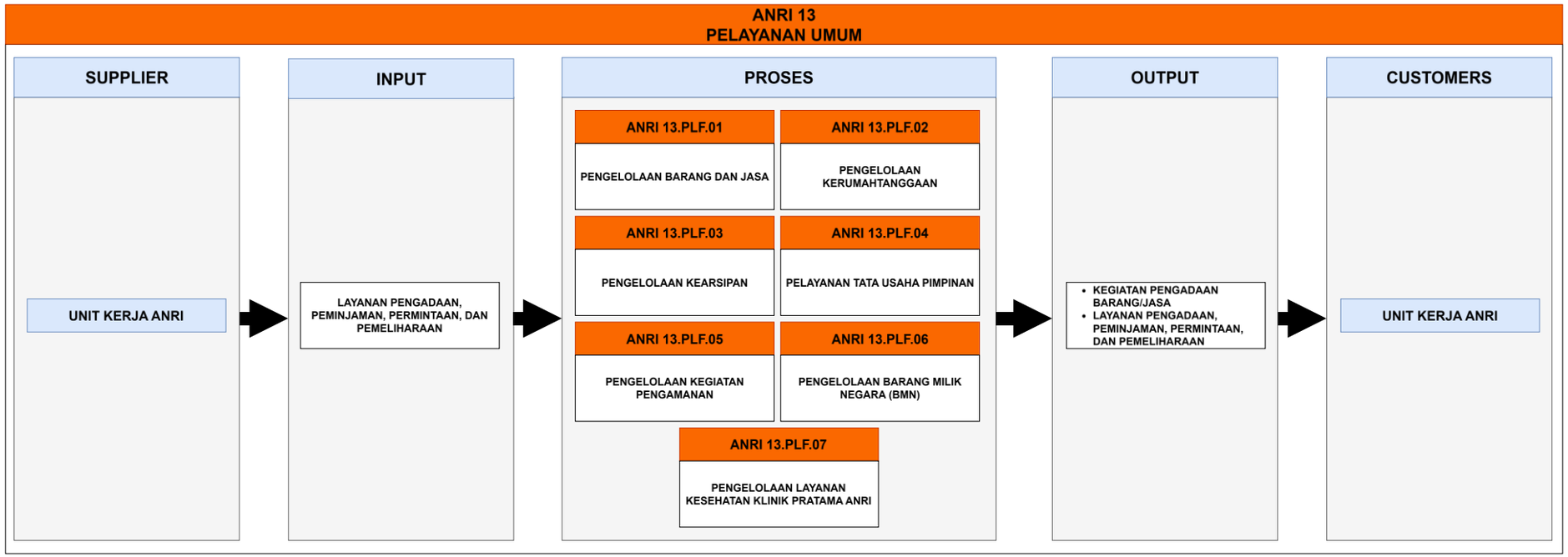

Gambar 185. Proses Bisnis Level 1 (ANRI 13 Pelayanan Umum)

IX.B. Peta Relasi Proses Bisnis Level 1 (ANRI 13 Pelayanan Umum);

Gambar 186. Peta Relasi Proses Bisnis Level 1 (ANRI 13 Pelayanan Umum)

IX.C.1. Peta Lintas Fungsi (ANRI 13.PLF.01 Pengelolaan Barang dan Jasa);

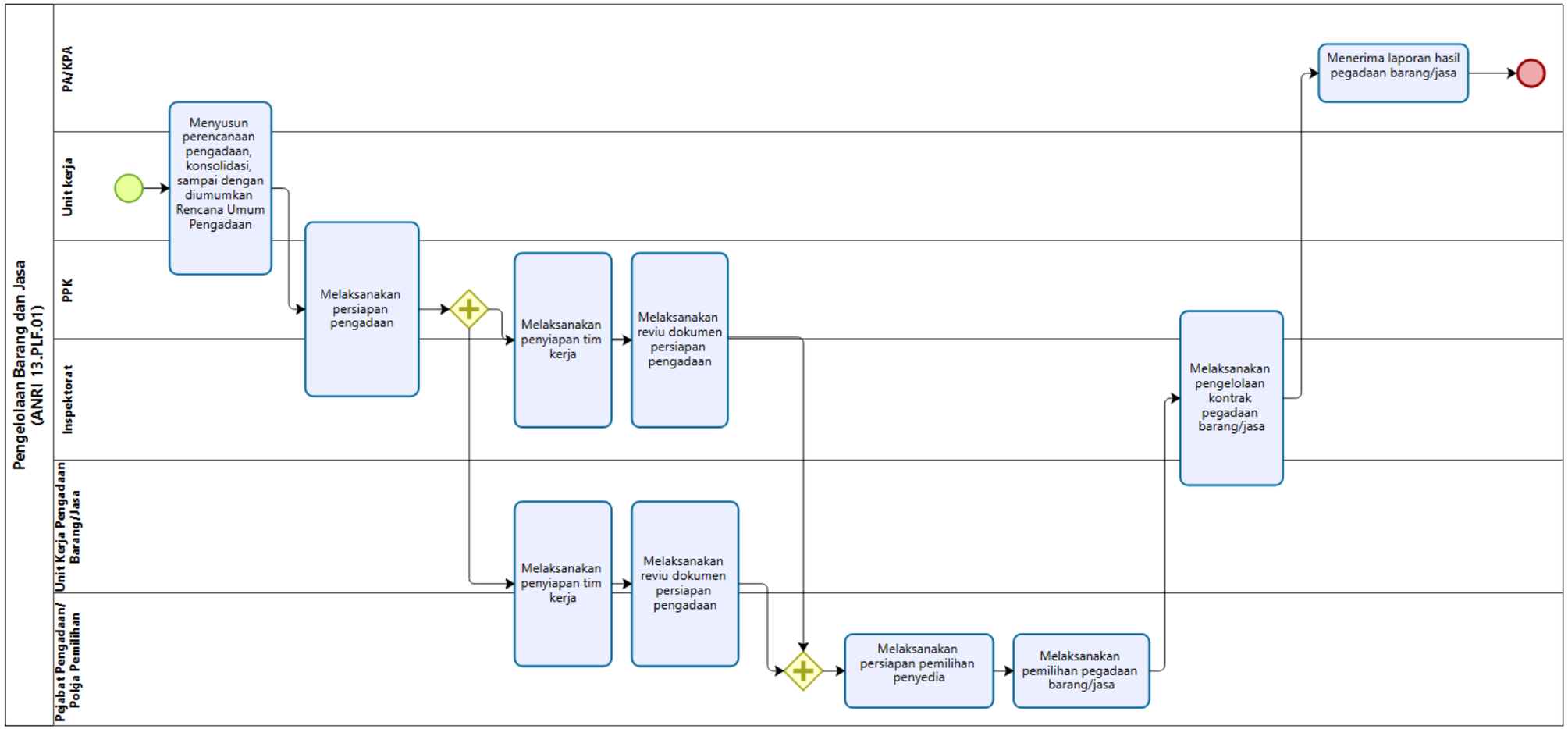

Gambar 187. Peta Lintas Fungsi (ANRI 13.PLF.01 Pengelolaan Barang dan Jasa)

IX.C.2. Peta Lintas Fungsi (ANRI 13.PLF.02 Pengelolaan Kerumahtanggaan);

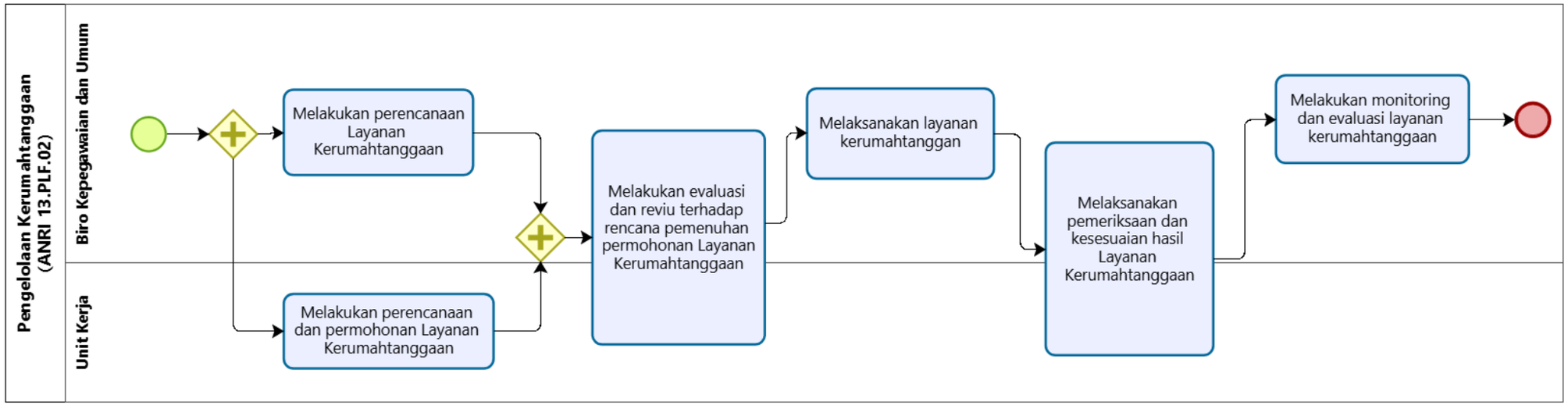

Gambar 188. Peta Lintas Fungsi (ANRI 13.PLF.02 Pengelolaan Kerumahtanggaan)

IX.C.3. Peta Lintas Fungsi (ANRI 13.PLF.03 Pengelolaan Kearsipan);

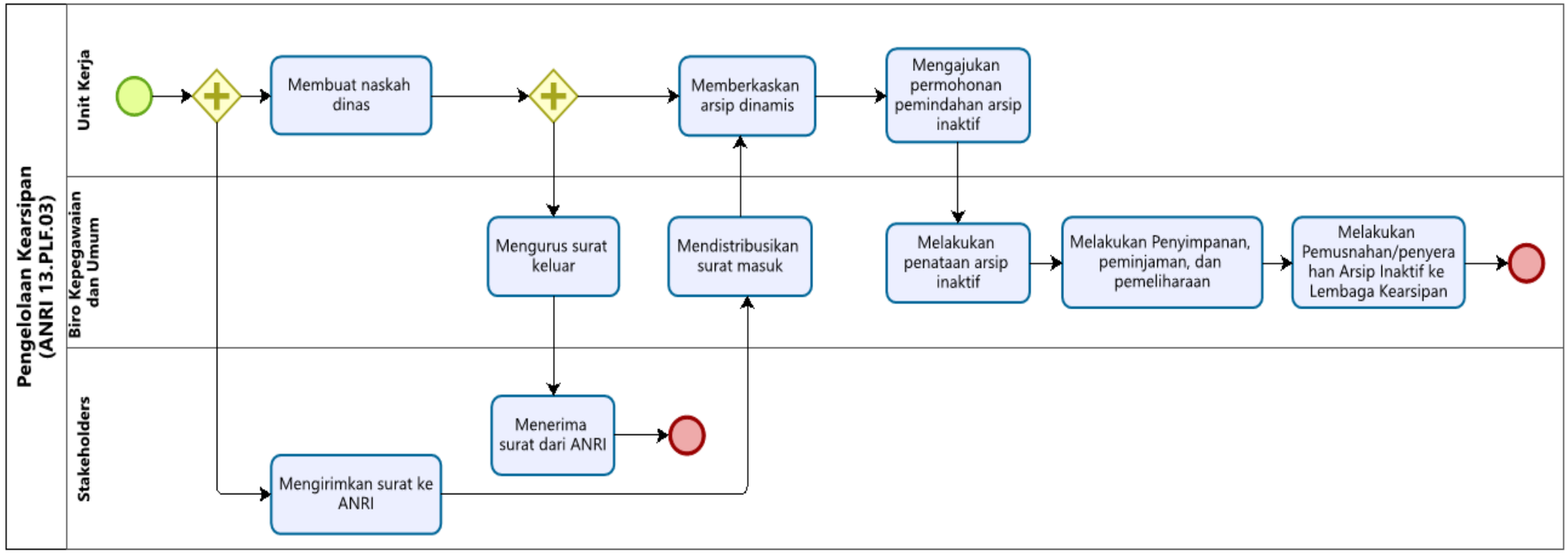

Gambar 189. Peta Lintas Fungsi (ANRI 13.PLF.03 Pengelolaan Kearsipan)

IX.C.4. Peta Lintas Fungsi (ANRI 13.PLF.04 Pelayanan Tata Usaha Pimpinan);

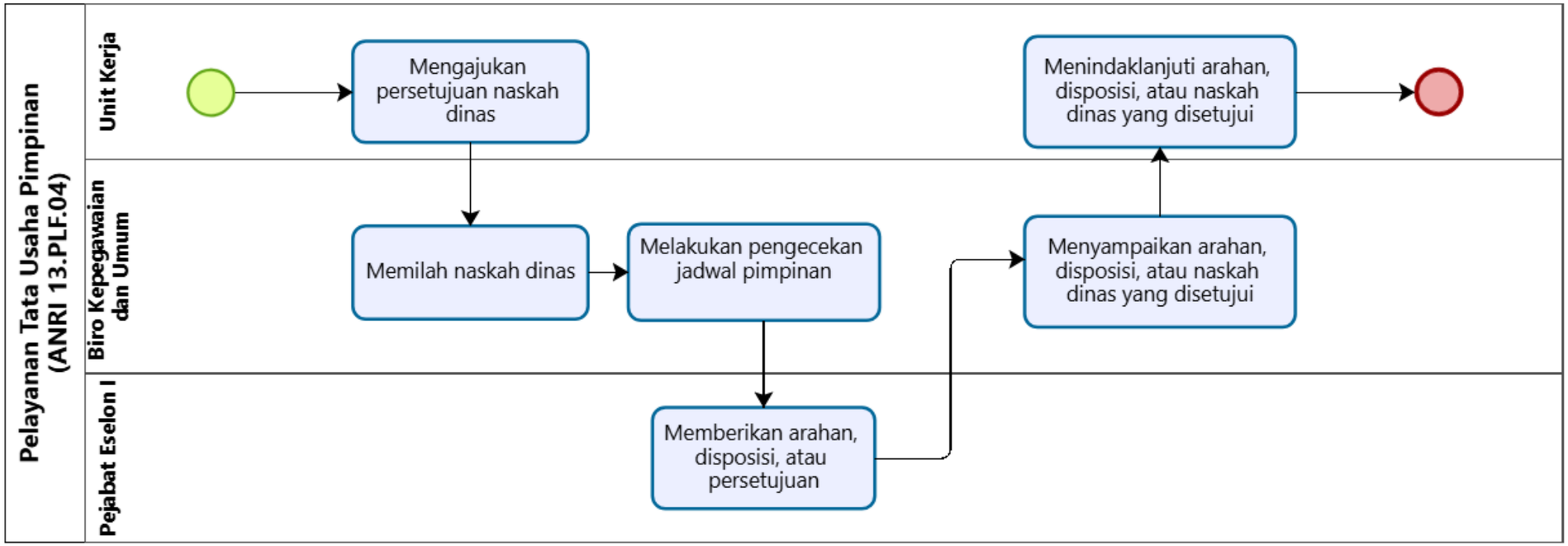

Gambar 190. Peta Lintas Fungsi (ANRI 13.PLF.04 Pelayanan Tata Usaha Pimpinan)

IX.C.5. Peta Lintas Fungsi (ANRI 13.PLF.05 Pengelolaan Kegiatan Pengamanan);

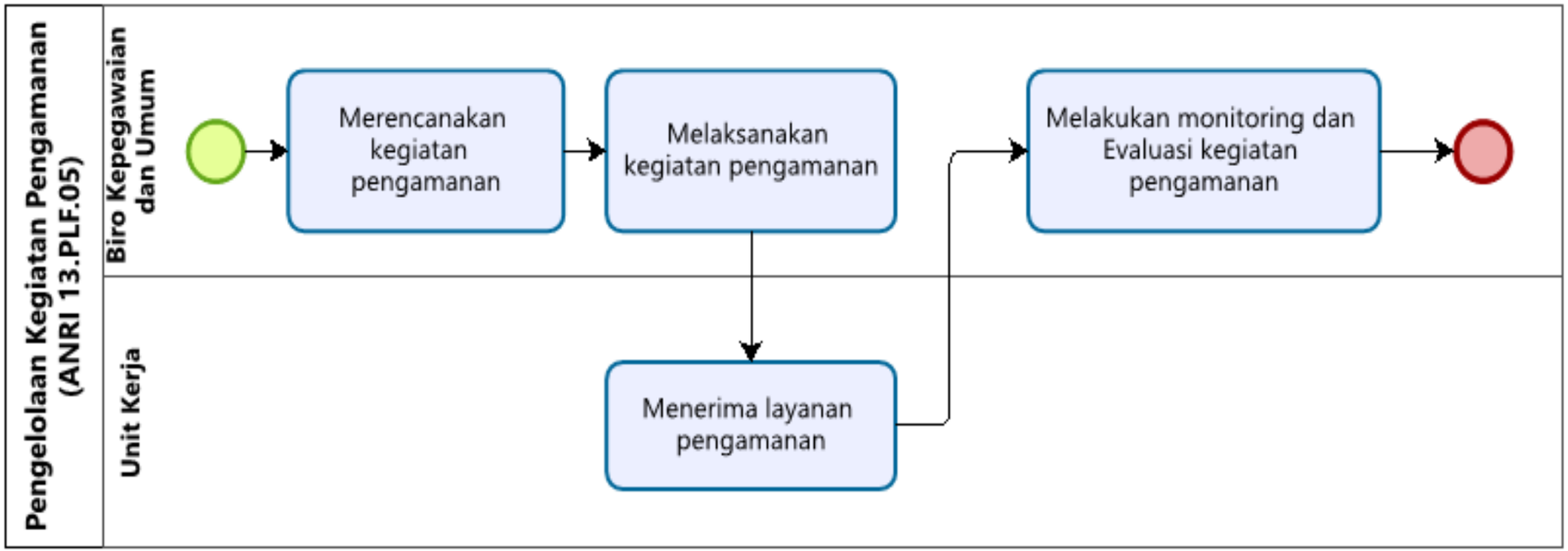

Gambar 191. Peta Lintas Fungsi (ANRI 13.PLF.05 Pengelolaan Kegiatan Pengamanan)

IX.C.6. Peta Lintas Fungsi (ANRI 13.PLF.06 Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)).

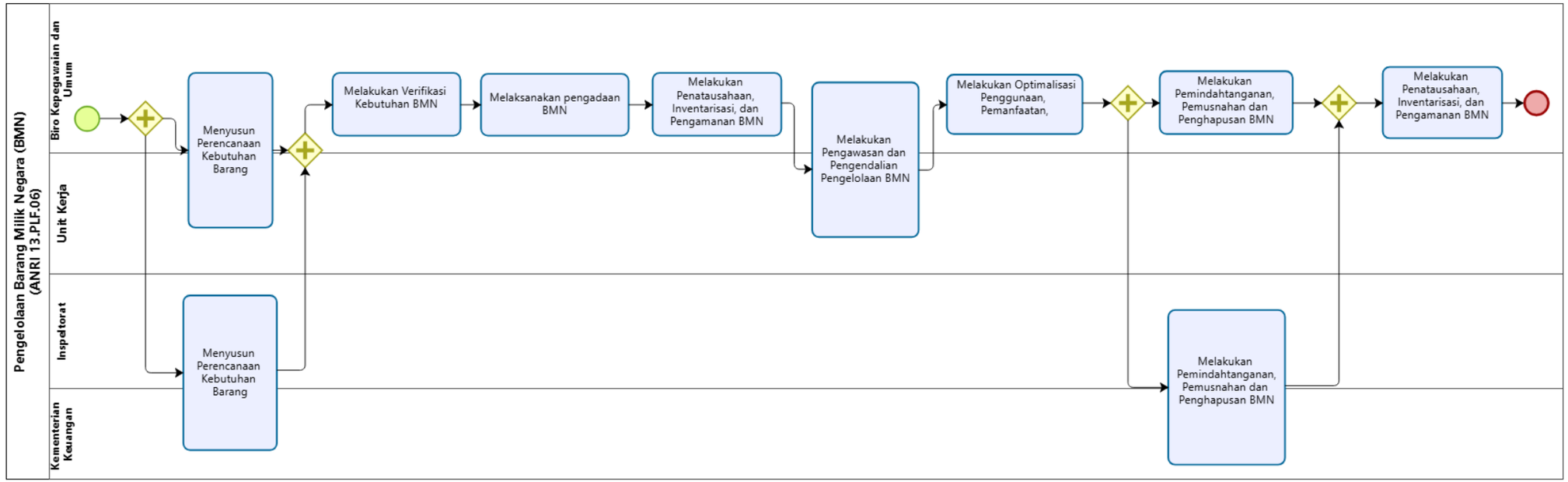

Gambar 192. Peta Lintas Fungsi (ANRI 13.PLF.06 Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN))

X.A. Proses Bisnis Level 1 (ANRI 14 Pelayanan Data dan Informasi Internal);

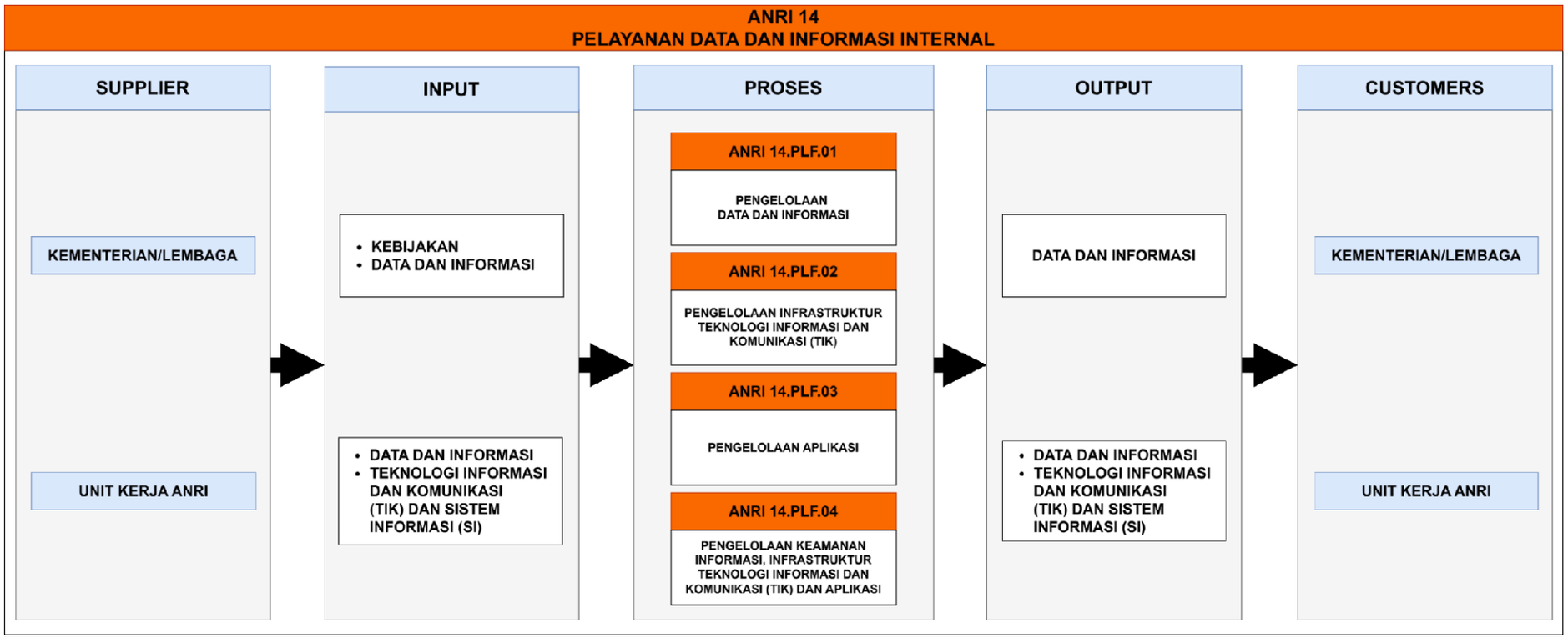

Gambar 193. Proses Bisnis Level 1 (ANRI 14 Pelayanan Data dan Informasi Internal)

X.B. Peta Relasi Proses Bisnis Level 1 (ANRI 14 Pelayanan Data dan Informasi Internal);

Gambar 194. Peta Relasi Proses Bisnis Level 1 (ANRI 14 Pelayanan Data dan Informasi Internal)

X.C.1. Peta Lintas Fungsi (ANRI 14.PLF.01 Pengelolaan Data dan Informasi);

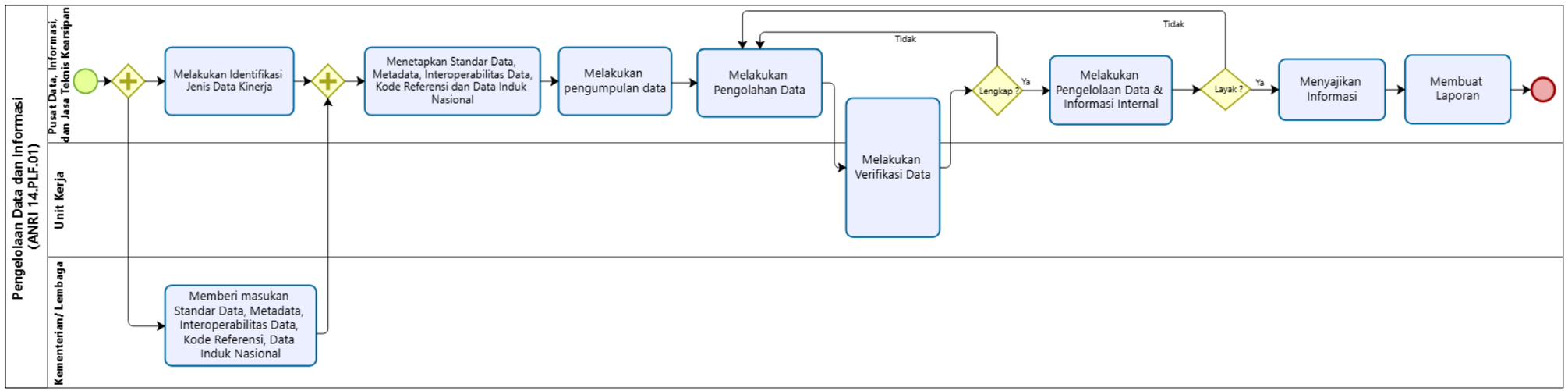

Gambar 195. Peta Lintas Fungsi (ANRI 14.PLF.01 Pengelolaan Data dan Informasi)

X.C.2. Peta Lintas Fungsi (ANRI 14.PLF.02 Pengelolaan Infrastruktur TIK);

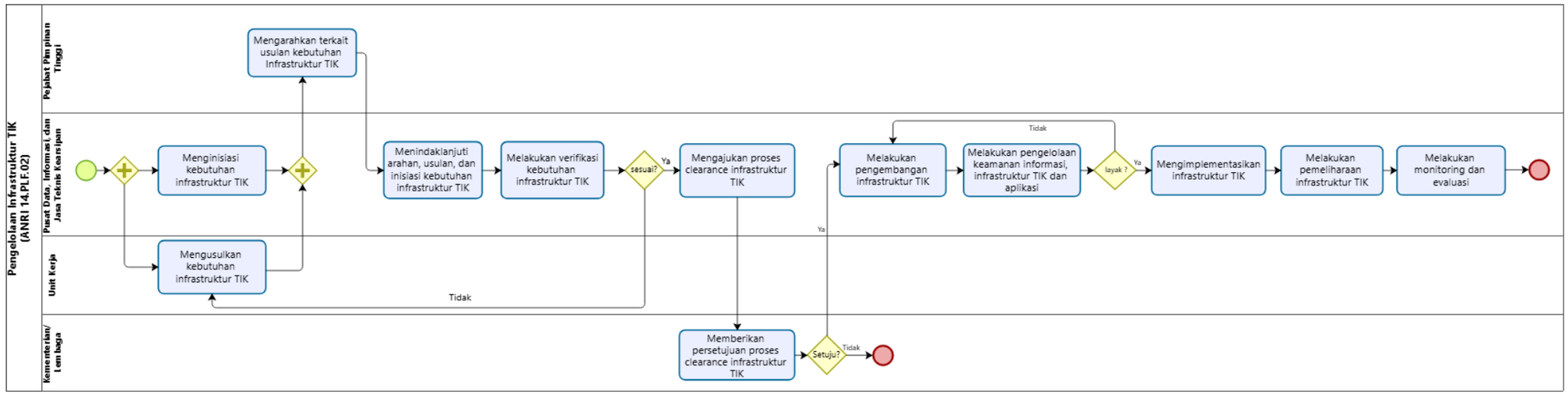

Gambar 196. Peta Lintas Fungsi (ANRI 14.PLF.02 Pengelolaan Infrastruktur TIK)

X.C.3. Peta Lintas Fungsi (ANRI 14.PLF.03 Pengelolaan Aplikasi);

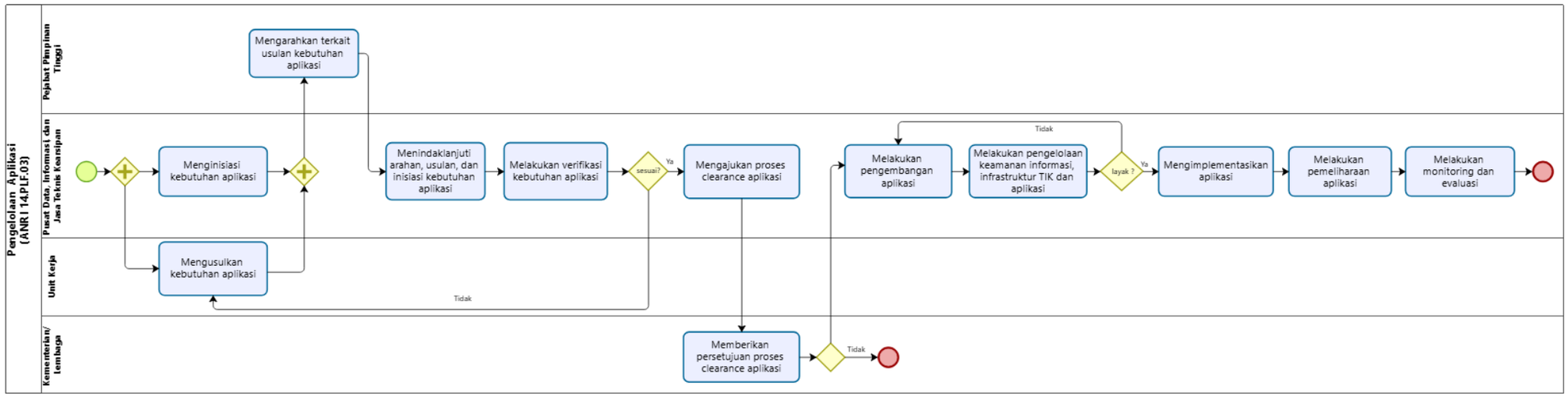

Gambar 197. Peta Lintas Fungsi (ANRI 14.PLF.03 Pengelolaan Aplikasi)

X.C.4. Peta Lintas Fungsi (ANRI 14.PLF.04 Pengelolaan Keamanan Informasi, Infrastruktur TIK dan Aplikasi).

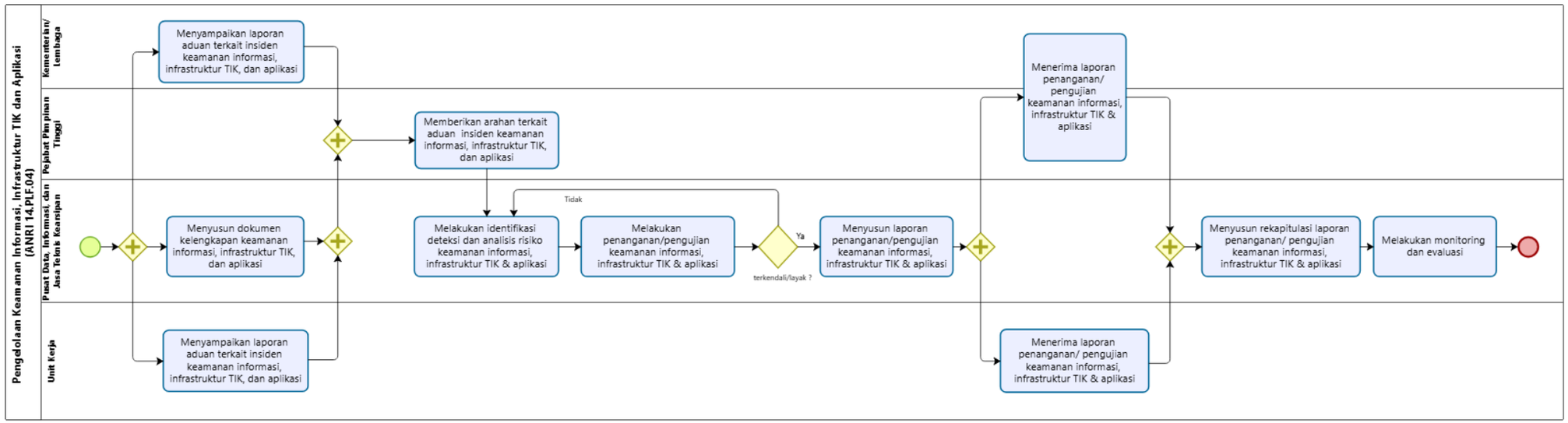

Gambar 198. Peta Lintas Fungsi (ANRI 14.PLF.04 Pengelolaan Keamanan Informasi, Infrastruktur TIK dan Aplikasi)

XI.A. Proses Bisnis Level 1 (ANRI 15 Pengawasan Internal);

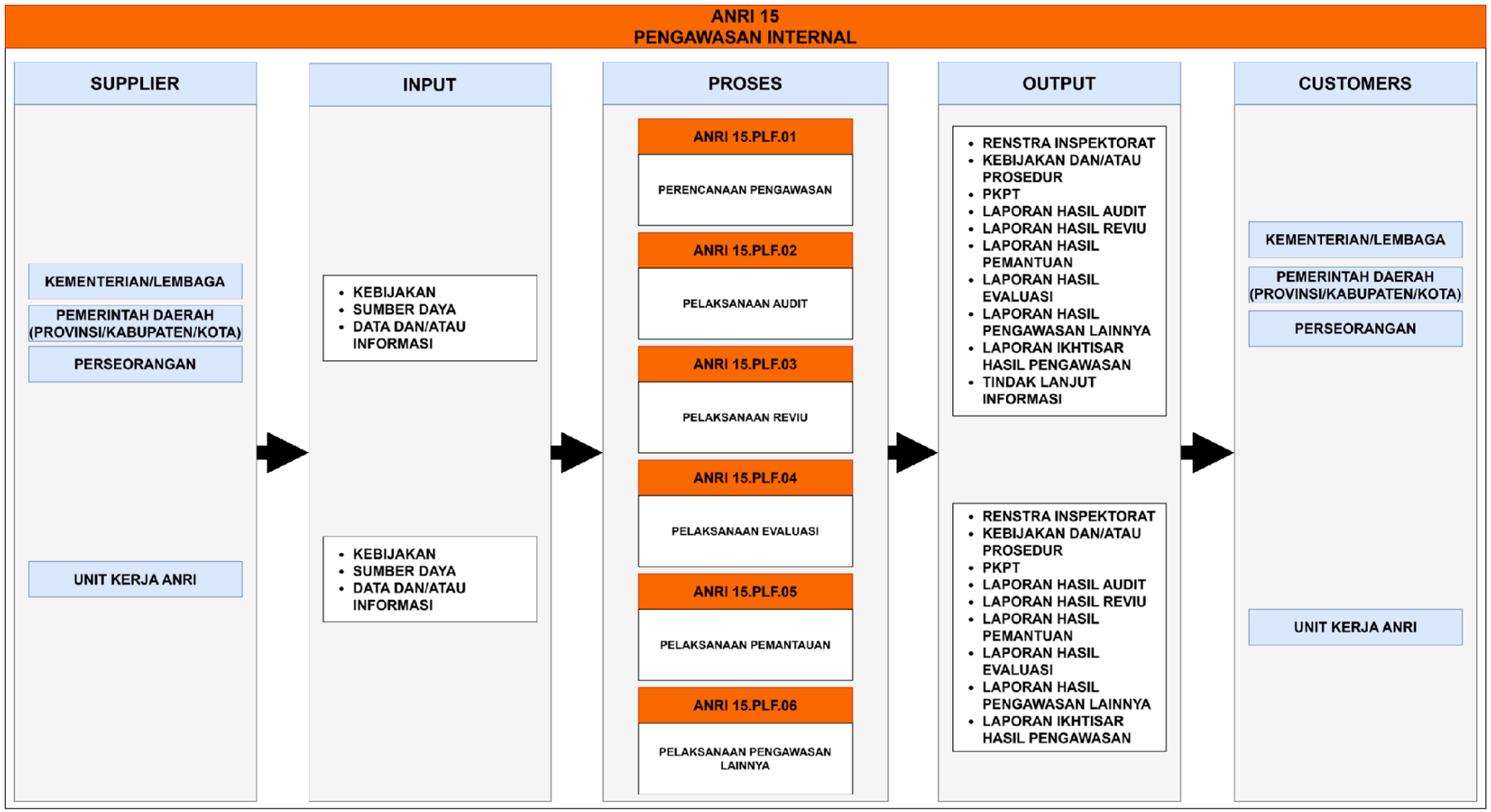

Gambar 199. Proses Bisnis Level 1 (ANRI 15 Pengawasan Internal)

XI.B. Peta Relasi Proses Bisnis Level 1 (ANRI 15 Pengawasan Internal);

Gambar 200. Peta Relasi Proses Bisnis Level 1 (ANRI 15 Pengawasan Internal)

XI.C.1. Peta Lintas Fungsi (ANRI 15.PLF.01 Perencanaan Pengawasan);

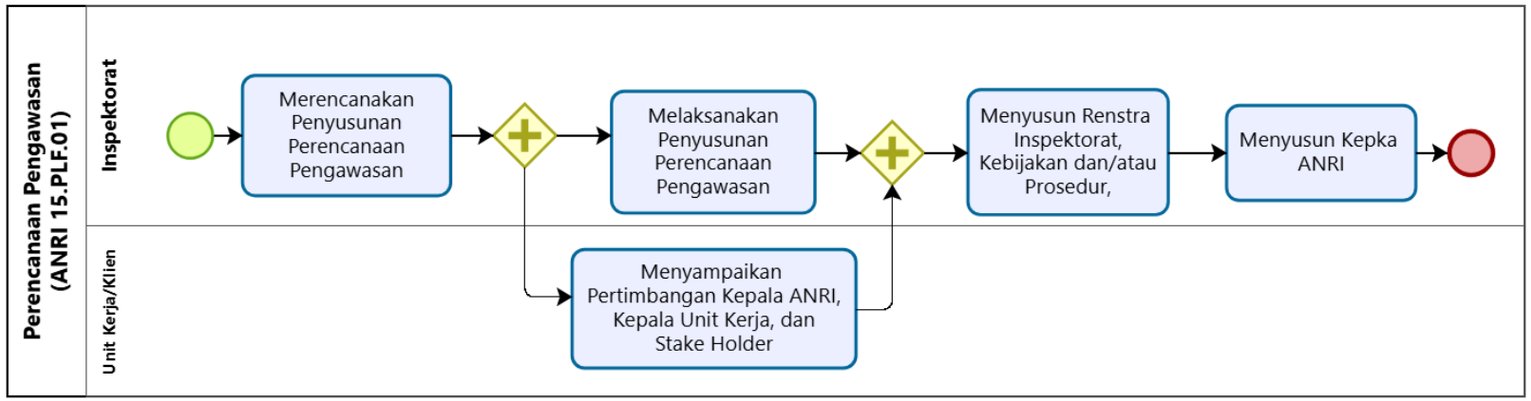

Gambar 201. Peta Lintas Fungsi (ANRI 15.PLF.01 Perencanaan Pengawasan)

XI.C.2. Peta Lintas Fungsi (ANRI 15.PLF.02 Pelaksanaan Audit);

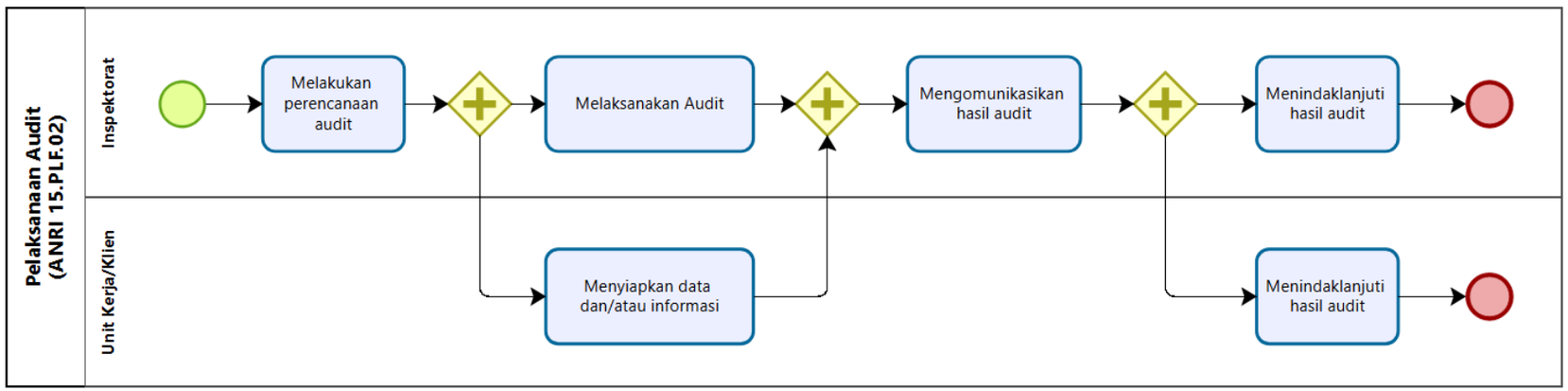

Gambar 202. Peta Lintas Fungsi (ANRI 15.PLF.02 Pelaksanaan Audit)

XI.C.3. Peta Lintas Fungsi (ANRI 15.PLF.03 Pelaksanaan Reviu);

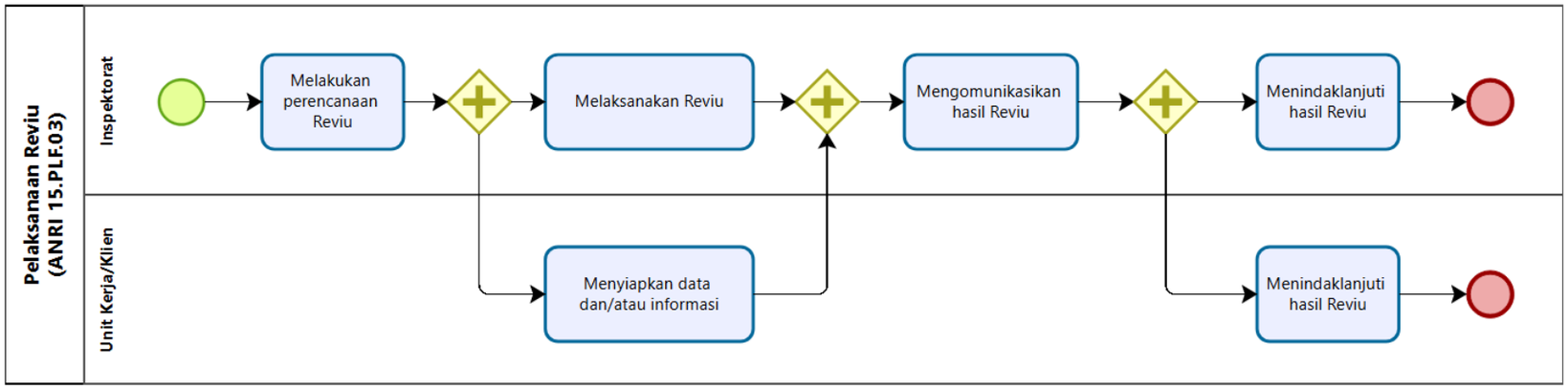

Gambar 203. Peta Lintas Fungsi (ANRI 15.PLF.03 Pelaksanaan Reviu)

XI.C.4. Peta Lintas Fungsi (ANRI 15.PLF.04 Pelaksanaan Evaluasi);

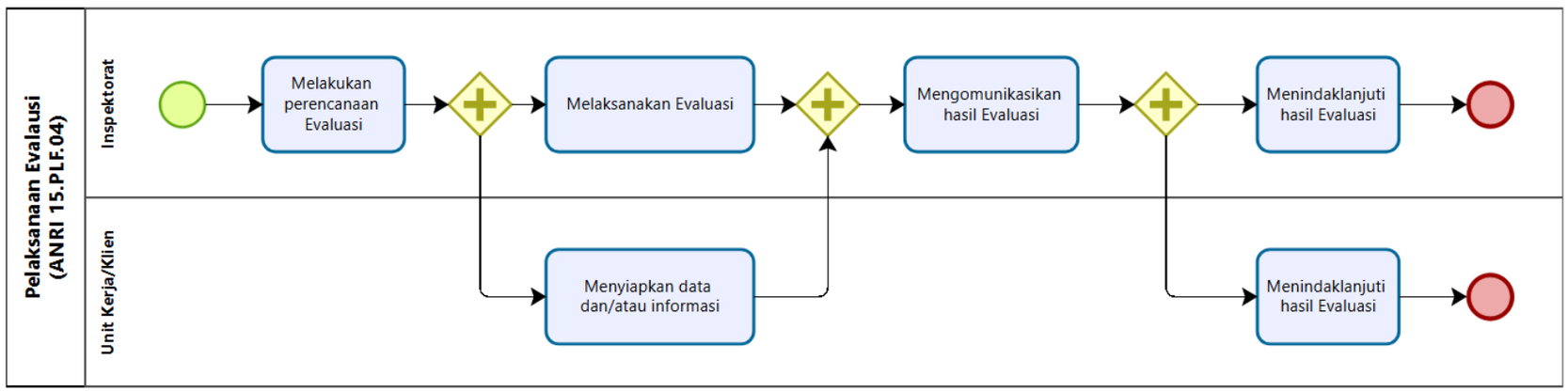

Gambar 204. Peta Lintas Fungsi (ANRI 15.PLF.04 Pelaksanaan Evaluasi)

XI.C.5. Peta Lintas Fungsi (ANRI 15.PLF.05 Pelaksanaan Pemantauan);

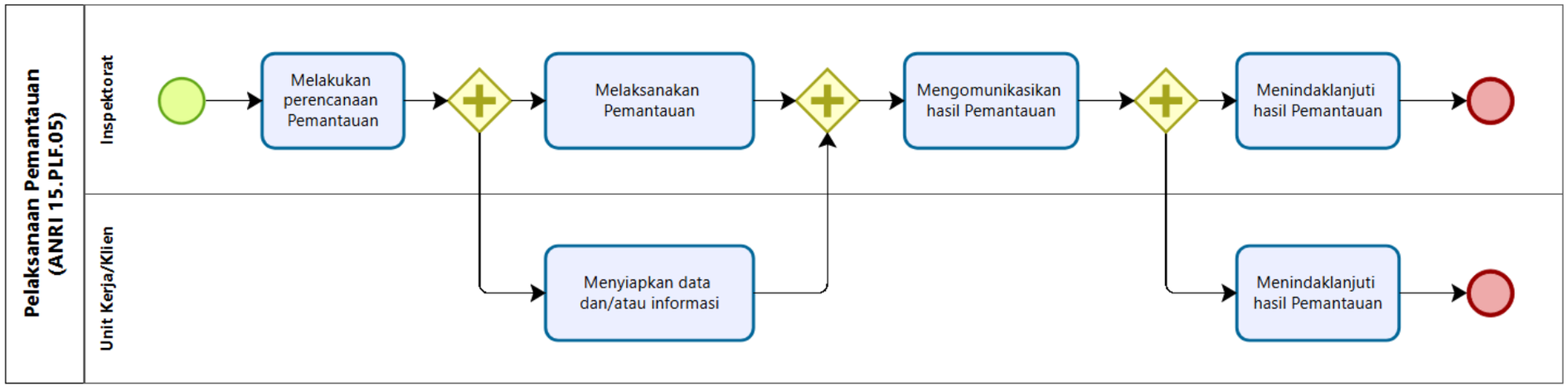

Gambar 205. Peta Lintas Fungsi (ANRI 15.PLF.05 Pelaksanaan Pemantauan)

XI.C.6. Peta Lintas Fungsi (ANRI 15.PLF.06 Pelaksanaan Pengawasan Lainnya).

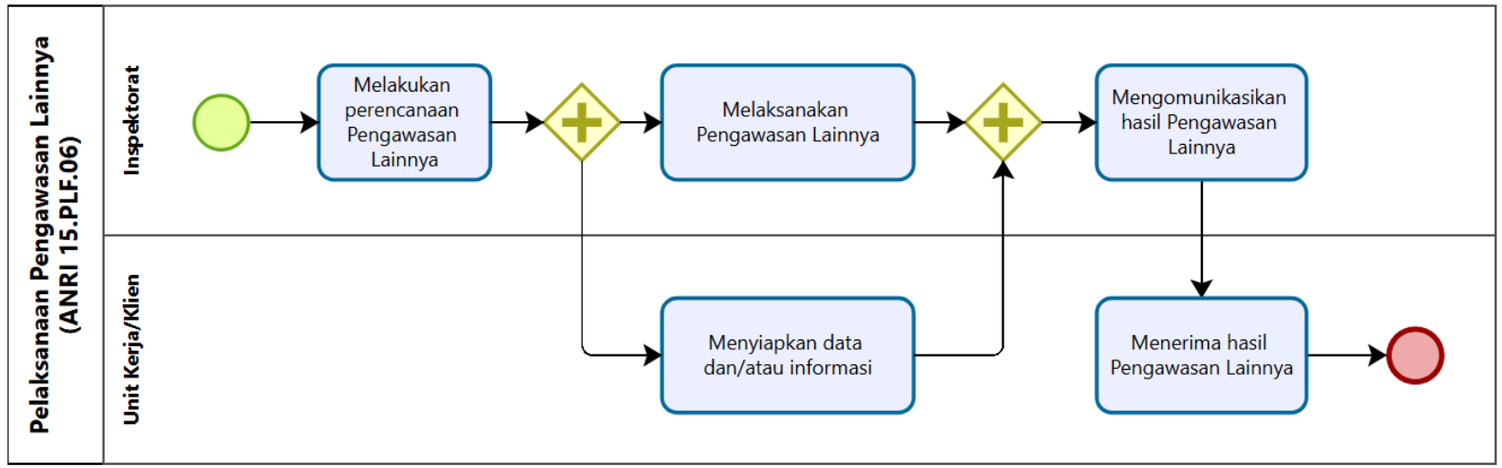

Gambar 206. Peta Lintas Fungsi (ANRI 15.PLF.06 Pelaksanaan Pengawasan Lainnya)

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGO PINANDITO